

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

sektorat
raan

2013

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern



Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2013

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

Pengarah :
Kacung Marijan (Direktur Jenderal Kebudayaan)

Penulis :
La Ode Rabani
G. Ambar Wulan
Restu Gunawan
Saleh As'ad Djamhari
Ibnu Wahyudi
Susanto Zuhdi

Editor :
Taufik Abdullah
Endjat Djaenuderadjat
Amurwani Dwi L

Tata Letak :
Agus Antoso

Penerbit :
Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270
Telp./Fax . : 021-5725044

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip seluruh atau sebagian isi buku
tanpa izin dari penerbit

KATA PENGANTAR

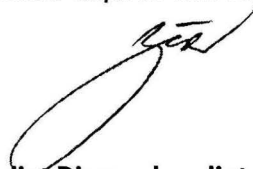
Kegiatan Penulisan Buku Sejarah Pemikiran Tokoh Bangsa, merupakan satu diantara upaya untuk mengungkapkan pergumulan, peranan dan pengaruh gagasan-gagasan dari para tokoh bangsa baik yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan dan agama dalam mendirikan, memperjuangkan dan membangun bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa Indonesia adalah sebuah keharusan untuk menggugah ingatan kolektif terhadap pemikiran-pemikiran para tokoh bangsa.

Demikian para tokoh melahirkan pemikiran-pemikiran mereka untuk memperbaiki dan memajukan Bangsa Indonesia dalam berbagai hal. Perdebatan dan dialog dilakukan dengan tujuan kemajuan bangsa-negara Indonesia. Perdebatan tidak menyurutkan para tokoh untuk tetap menjalin pertemanan diantara mereka.

Penulisan buku sejarah pemikiran Indonesia model ini merupakan bentuk paling sederhana untuk mengungkapkan pemikiran dan pendapat serta renungan dari para tokoh bangsa. Melalui penerbitan buku ini mudah-mudahan dapat digunakan sebagai teladan bagi generasi penerus bangsa untuk memperkuat karakter dan jatidiri bangsa di masa kini dan masa mendatang.

Kepada para penulis dan narasumber, atas kontribusinya, kami mengucapkan terimakasih. Akhirnya saya berharap mudah-mudahan buku ini dapat memberikan inspirasi dan semangat nasionalisme bagi masyarakat Indonesia dan generasi muda pada khususnya, serta dapat menjadi pegangan bahan ajar bagi guru-guru sejarah.

Direktur Sejarah dan Nilai Budaya



Endjat Djaenuderadjat

NIP. 19550512.198403.1.002

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Assalamu'alaikum wr wb.

Pada akhir abad 19 dan awal abad 20 dalam sejarah Indonesia adalah periode kolonisasi dari Pemerintah Hindia Belanda. Pada masa itu pula perlawanan di daerah-daerah di Tanah Hindia dilakukan oleh tokoh-tokoh lokal. Mereka menentang dominasi kekuatan militer kolonial yang melakukan perlawanan terhadap raja-raja dan tokoh-tokoh lokal seperti ulama dan guru. Perlawanan lokal itu terus dilakukan dan tumbuh sebagai jiwa nasionalisme saat itu.

Pada gilirannya nasionalisme terus tumbuh dengan masuknya pengaruh politik etis. Para pemuda yang mendapat pendidikan barat mulai menggagas ide-ide segar untuk menjadi suatu bangsa yang terlepas dari koloni Belanda. Gagasan nama " Indonesia " muncul saat para pemuda Hindia belajar di Belanda. Cita-cita kemajuan dan hasrat demokrasi yang semula keinginan akan kesetaraan sosial, kemudian tumbuh menjadi sebuah solidaritas yang mengatasi batas-batas primordial. Benih lahirnya bangsapun mulai tertanam.

Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) merupakan pembuka lembaran baru dalam proses *Nation Formula*. Ketika landasan kepulauan dan daerah dari Komunitas baru, yang disebut bangsa, secara simbolik dianggap berakhir. Sejak saat itu pula secara ideologis keabsahan organisasi kedaerahan ditentukan oleh keterkaitannya dengan komunitas baru yang disebut Bangsa Indonesia.

Begitulah, Indonesia adalah sebuah kesepakatan para pendiri bangsa untuk mengikat masyarakat menjadi satu kesatuan bangsa ditengah keberagaman etnis, suku, agama, atau golongan. Kesepakatan yang ada bukanlah dimaknai sekedar adanya Indonesia, tetapi ada sebuah kemauan bersama untuk memikirkan dan memajukan bangsa serta upaya mewujudkan cita-cita bersama. Pemikiran tokoh pendiri bangsa dimasa lampau yang menjadikan terbentuknya bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang muncul

tiba-tiba melainkan lahir dari sebuah proses yang panjang, dengan adanya kesadaran nasional yang melahirkan gerakan nasional dengan tetesan airmata, keringat, dan darah untuk mencapai tujuan yang sama yaitu kemerdekaan dan kemajuan.

Pemikiran tokoh ini menjadi sebuah teladan, namun saat ini belum diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Derasnya arus globalisasi, mengikis ingatan kolektif terhadap pemikiran-pemikiran para tokoh bangsa yang mengakibatkan hilangnya karakter dan jatidiri generasi bangsa. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kalangan muda khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia.

Direktur Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke that loops back to the left, crossing the horizontal stroke.

Kacung Marijan
NIP. 1964.0325.198901.1.002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN	iv
DAFTAR ISI	vi
P E N D A H U L U A N	3
Oleh : Taufik Abdullah	
BAB I PENDIDIKAN DAN ELITE MODERN INDONESIA	8
Oleh : La Ode Rabani	
A. Pengantar	8
B. Suasana Hindia Belanda pada Akhir Abad XIX sampai Awal Abad XX	9
C. Politik Etis	14
D. Mobilitas Sosial dan Munculnya Elite Modern	17
E. Perkembangan Transportasi dan Tumbuhnya Kota-kota Kolonial.....	19
F. Transportasi Darat	22
G. Perkembangan Komunikasi	26
H. Perkembangan Pers di Hindia Belanda	28
1) Pers Bumiputera	31
2) Seting Sosial Kehidupan Marco Kartodikromo	41
3) Pena Politik Marco Kartodikromo	42
I. Pendidikan dan Pergerakan Perempuan	44
BAB II DARI “BANGSA HINDIA” KE “INDONESIA” (Oleh: Dr. G. Ambar Wulan, M. Hum)	55
A. Pengantar: Blue Print Ke-Indonesia-an	55
B. Lahirnya Solidaritas Modern di STOVIA: Boedi Oetomo	57
1) Solidaritas Hindia: Indische Partij	62
2) Solidaritas Kesukuan: Pergerakan Pemuda Insuler	70
3) Solidaritas Keagamaan: Jong Islamiten Bond	79
4) Solidaritas Nasional: Perhimpunan Indonesia	86
5) Solidaritas Indonesia: Sumpah Pemuda	106

C. Kongres Pemuda Indonesia I	106
D. Kongres Pemuda Indonesia II	110
 BAB III KE ARAH INDONESIA BARU: PERCUTURAN IDEOLOGI	119
Oleh : Restu Gunawan	
A. Percuturan Ideologi (Islam dan Kebangsaan)	119
B. Nasionalisme Politik	121
C. Politik Ko dan Nonkoperasi	125
 BAB IV BPUPKI, PANCASILA DAN UNDANG – UNDANG DASAR 1945	140
Oleh : Saleh As'ad Djamhari	
A. Janji Kemerdekaan di kelak kemudian hari	140
B. Sidang-sidang BPUPKI	145
1) Pemaparan Pikiran tentang dasar Negara	145
2) Sidang kedua, BPUPKI tanggal 31 Mei 1945	148
3) Soekarno, Pancasila <i>Weltanschauung</i> bangsa	149
4) Wilayah Negara	194
5) Sidang Kedua, tanggal 15 Juli 1945	213
 BAB V NASIONALISME DAN KEBUDAYAAN	233
Oleh : Ibnu Wahyudi	
A. Kemodernan dan Kenasionalan	233
B. Kemunculan Bentuk Kesenian Baru	237
1) Puisi	237
2) Prosa	242
3) Drama	243
4) Film	248
C. Keindonesiaan yang Terefleksi dalam Karya	249
1) Polemik Kebudayaan	257
a. Polemik sebagai Representasi Dialektika Pemikiran	257
b. Polemik Mengenai Indonesia dan Keindonesiaan	259
c. Polemik Mengenai Orientasi Kebudayaan	268
d. Polemik Mengenai Sistem Pendidikan	271
 BAB VI PEMIKIRAN KENEGARAAN MASA DEMOKRASI TERPIMPIN DAN ORDE BARU	278
Oleh : Susanto Zuhdi	
A. Kekecewaan Terhadap Demokrasi Terpimpin : Kembali ke UUD 1945	279
B. Kepribadian Nasional Masa Demokrasi Terpimpin	280
C. NEFOS versus OLDEFOS	287

D. Dari Tragedi Nasional ke Pembangunan Nasional	290
E. Jati Diri & Demokrasi Pancasila	292
F. Wawasan Nusantara dan Globalisasi	293
LAMPIRAN I	297
LAMPIRAN II	302
DAFTAR PUSTAKA	305



Dari kiri ke kanan depan :
*Tiga Serangkai (Cipto Mangunkusumo, Ernest Douwes Dekker, dan
Suwardi Suryaningrat*
Sumber : Museum Kebangkitan Nasional



PENDAHULUAN

Barangkali siapa saja yang sempat membaca sejarah Indonesia Modern dengan segera ingat bahwa buku *Indonesia Menggugat* adalah pidato pembelaan Sukarno waktu ia diadili pengadilan kolonial di Bandung (Desember 1930) tetapi mungkin banyak yang tidak tahu atau mungkin juga lupa bahwa *Indonesie Vrij* adalah pidato pembelaan Hatta di Pengadilan Belanda di Den Haag (1926). Kemungkinan lupa ini tentu bisa dimaklumi juga sebab sejak Hatta berhenti sebagai Wakil Presiden (Desember 1956) namanya boleh dikatakan hilang timbul dalam ingatan masyarakat.

Tetapi teringat ataupun tidak, kedua pidato itu adalah “karya klasik” dalam sejarah perjuangan bangsa. Tidak perlu diperdebatkan bahwa dengan gaya masing-masing kedua pidato itu bukan saja ingin membuktikan bahwa mereka tidak melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana yang dibutuhkan—yaitu membuat persekongkolan untuk berontak—tetapi juga menyatakan keabsaahan dari landasan perjuangan mereka. Tetapi kalau sekiranya kedua naskah ini dibaca hanya sebagai teks saja—jadi terlepas dari untuk apa keduanya ditulis—maka kedua pidato mungkin bisa juga dianggap sebagai karya yang bernada kesejarahan. Hanya saja jika Sukarno memusatkan perhatian pada “rekonstruksi sejarah” dari sistem pemerasan sosial dan ekonomi yang dijalankan kapitalisme, yang didukung pemerintahan kolonial, maka Hatta lebih asyik menguraikan sejarah dan perkembangan pemikiran para mahasiswa yang tergabung *Perhimpoean Indonesia*. Apakah yang direnungkan dan dicita-citakan para pemuda “anak jajahan” yang sedang berada dan belajar “di negeri sang penguasa” (*In het land van de Overherser*, kata orang sana) itu? Kalau begitu halnya maka sepiantas lalu mungkin bisa saja dikatakan bahwa pidato Sukarno adalah contoh dari “sejarah ekonomi politik” yang dilontarkan oleh seorang sejarawan-nasionalis, sedangkan pidato Hatta adalah contoh dari “sejarah pemikiran” yang disampaikan seorang intelektual dari negeri jajahan yang berdialog secara langsung dengan dunia Barat yang demokratis.

Tetapi, memang kalau dikaji-kaji lagi harus diakui juga bahwa meskipun dengan pemilihan corak fakta sejarah yang berbeda-beda dan gaya retorika yang tidak pula sama, “rekonstruksi kesejarahan” yang disampaikan kedua pemuda terpelajar yang telah menampilkan diri sebagai pemimpin bangsa ini bertolak dari keinginan untuk mengatakan “sesuatu”, yang merefleksikan cita-cita yang telah tertanam dalam diri mereka. Kisah kesejarahan yang mereka sampaikan bukanlah “rekonstruksi sejarah” yang ingin berkisah tentang peristiwa yang pernah dan mungkin juga sedang terjadi, tetapi pantulan pemikiran dan hasrat politik. Dengan memakai bahan-bahan kesejarahan yang berbeda-beda mereka juga memperkenalkan sistem wacana, *discourse* dalam perjuangan. Mereka merekonstruksi unsur-unsur kesejarahan, untuk mengatakan sesuatu yang sedang mereka perjuangkan, di samping, tentu saja, untuk membuktikan kebenaran dan keabsyahan yang mereka lakukan.

Jadi kalau begitu keduanya boleh dikatakan sebagai memperlihatkan contoh dari *dimensi intelektual dari sejarah pergerakan kebangsaan*. Karena itulah ketika rekonstruksi dari sejarah pergumulan politik untuk mencapai kemerdekaan sedang dilakukan kedua corak *discourse* yang bernada kesejarahan ini tidak bisa dilupakan dan apalagi diabaikan.

Kisah kedua pidato dari dua pemimpin muda yang ternyata kemudian ditakdirkan menjadi Proklamator Kemerdekaan ini hanyalah contoh saja tentang hubungan yang perlu diperhatikan antara “tindakan” yang diaktualkan atau diwujudkan dan latar belakang intelektual atau landasan pemikiran dari tindakan itu. Kalau begitu maka hal ini bisa dianggap sebagai salah satu aspek dari sejarah pemikiran atau sejarah intelektual. **Mengapa sesuatu diinginkan** (*kemerdekaan bangsa*) dan **apa yang harus dilakukan** (*pergerakan kebangsaan*) demi tercapainya yang diinginkan.

Masa ketika pidato diucapkan dan juga ditulis (jadi memakai dua saluran) di pengadilan kolonial adalah aspek kedua, yaitu **periode sebuah sejarah dalam sejarah bangsa**. Peristiwa itu terjadi di zaman pergerakan kebangsaan ketika tuntutan kemerdekaan telah semakin menaik dan—tak kurang pentingnya—di waktu konsep “bangsa” dan “negara” telah semakin matang dirasakan.

Aspek ketiga ialah **corak atau sistem wacana** atau *discourse* yang dipakai. Kedua pidato ini dengan jelas memperlihatkan bahwa perhatian utama ialah perubahan, bahkan perombakan, sistem dan landasan kehidupan politik. Tetapi mengapa tahap ini telah dicapai begitu saja kalau mereka tidak tahu dan sadar juga bahwa ada jurang kultural yang dalam antara yang menjajah dengan yang dijajah. Dan memang menjelang kedua mereka

tampil dengan seruan “merdeka” kesadaran kultural tentang jarak itu telah lebih menjadi perhatian kalangan intelektual bangsa. Novel *Salah Asuhan*, umpamanya secara halus menyangsikan corak hidup ke-modern-modern-an gaya barat dan meninggalkan kebudayaan sendiri. Bahkan “kongres nasionalisme Jawa”, yang diadakan Budi Utomo (1920) dengan jelas sekali ingin memperlihatkan dan mengingatkan ketinggian “budaya Jawa” (yang aristokratis) di tengah-tengah perbenturan kebudayaan yang telah semakin kelihatan di kota-kota kolonial.

Begitulah contoh di atas menyatakan tiga hal: pertama, **dimensi waktu yang jelas**; kedua, **dimensi pemikiran sosial-politik**; dan ketiga, **dimensi wacana kultural**. Dengan kata lain sejarah pemikiran sebaiknya menghadapkan perhatian pada ketiga hal ini: waktu atau periodisasi yang jelas, pergumulan dalam pemikiran politik, dan wacana kebudayaan.

Buku yang ada di hadapan pembaca mempunyai tema utama, yaitu proses *nation formation* dan *nation building*—kisah sejak gagasan keharusan berdirinya sebuah “bangsa baru”, terbentuknya negara-bangsa dan dinamika sosial politik dan kebudayaan dari proses dan dinamika *nation building* sampai UUD 1945 dan pembukaannya dirumuskan.

Sejarah Indonesia dari akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 adalah sejarah ekspansi dan eksploitasi kolonial, yang disertai dengan perlawanan dan pemberontakan masyarakat di pedesaan. Sejak pemaksaan monopoli perdagangan dan dominasi militernya terhadap penduduk pribumi, kekuasaan colonial Belanda mendapat perlawanan dari para raja, aristokrat, dan ulama. Meskipun kekuasaan Belanda semakin menguat, tradisi perlawanan tidak pernah surut. Tradisi perlawanan ini memberi bentuk karakter nasionalisme Indonesia yang antikolonial dan merupakan kekuatan potensial dalam membantu pergerakan itu mencapai kematangannya. Tidak kurang pentingnya adalah tradisi perlawanan juga merupakan kekuatan ideologis yang menjadi pendorong di balik pencarian keaslian secara kultural.

Akan tetapi, nasionalisme tidak hanya persoalan menolak kekuasaan asing dan juga bukan persoalan mendapatkan kembali tatanan lama yang sempat hilang. Nasionalisme terutama menyangkut persoalan bagaimana orang harus merumuskan identitas kultural dan politiknya dan macam masyarakat apa yang ingin dibangun dan dikembangkannya. Nasionalisme berhubungan dengan konsep mengenai posisi seseorang dalam sejarah. Oleh karena itu, asal-usul nasionalisme modern tidak ditemukan dalam tradisi-tradisi perlawanan yang bermacam-macam itu, tetapi dalam lingkungan urban kolonial yang hierarkis, tempat orang dari seluruh kepulauan Indonesia

bertemu dan berbaur dalam bazar kultural yang mengembangkan suatu pengertian baru mengenai suatu masyarakat yang mempunyai kesamaan nasib.

Bazar kultural dapat digambarkan sebagai situasi di mana simbol-simbol budaya dari masyarakat pendatang, yang berasal dari latar belakang budaya dan etnis beragam, dipertukarkan dan secara perlahan-lahan dipunyai bersama-sama. Bazar kultural merupakan ruang sosial dan kultural tempat kelompok etnis dari seluruh Indonesia bertemu dan menemukan kesamaan kultural dan sejarahnya.

Dalam bazar ini, bahasa Melayu--*lingua franca* sejak masa kepulauan nusantara menjadi bagian jaringan perdagangan internasional—berperan penting. Bahasa melayu menjadi alat komunikasi pertama. Setelah kepulauan memasuki priode budaya-cetak, bahasa Melayu berperan utama sebagai kekuatan yang menyatukan. Buku-buku, surat kabar- surat kabar, dan yang lebih penting lagi, jurnal-jurnal, terbit dan dicetak dalam bahasa Melayu, baik dalam tulisan Jawi (Arab-Melayu) atau Latin. Menjelang dasawarsa abad ini, sudah ada beberapa kertas cetakan yang beredar di Hindia Belanda. Dalam proses ini, ide reformasi Islam yang baru lahir, yang bertujuan memurnikan agama dan juga kebangkitan intelektual dan politik Muslim mulai bermunculan. Bahasa Melayu dan reformasi Islam adalah fondasi kultural pertama dari konsep masyarakat baru ini. Keduanya ditegakkan oleh munculnya kultur-kultur urban, yang mampu melampaui batas-batas tradisi-tradisi lokal.

Suatu dunia yang terbuka, bazar kultural tidak hanya menawarkan model-model yang berbeda dan kesempatan-kesempatan baru tetapi juga menjadi standar perbandingan masyarakat lokal yang mapan dan sedang bermunculan dengan masyarakat asing. Melalui perbandingan inilah masyarakat-masyarakat menyadari betapa tertinggalnya mereka baik dari segi ekonomi maupun intelektual. Dari perspektif komparasi ini, seorang putri Bupati Jawa, Raden Ajeng Kartini (1879-1904), mengungkapkan cita-citanya yang mulia mengenai emansipasi dalam surat-surat yang ditulis dengan indah yang dikirimkan kepada sahabat Belanda-nya. Betapa besar keinginannya menjadi bagian dari dunia maju, dia menulis pada pergantian abad ini. Publikasi surat-surat setelah wafatnya Kartini mempunyai pengaruh luar biasa dan lestari dalam kesadaran masyarakatnya. Tulisan-tulisannya menginspirasi pergerakan-pergerakan awal untuk mengangkat derajat masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan ke arah kemajuan seperti yang dicontohkan oleh Barat.

Seperti surat-surat Kartini yang diterbitkan, pergerakan-pergerakan ini lahir pada waktu yang tepat. Pergerakan-pergerakan tersebut muncul ketika pemerintah dalam proses meninjau kembali kebijakan-kebijakan kolonialnya. Kini kampanye pasifikasi telah berakhir dan kebijakan liberal ternyata lebih menguntungkan dari segi ekonomi baik untuk penguasa kolonial maupun koloni, pemerintah Belanda didesak untuk membayar “hutang kehormatan” kepada masyarakat pribumi. Dalam suasana ini, masa depan hubungan koloni tampak optimistis: masyarakat pribumi akan bekerja sama dengan gembira di bawah kepemimpinan tuannya yang murah hati untuk memasuki dunia maju.

Jika sejarah pergerakan diperhatikan dengan seksama maka tampaknya bahwa sejak awal 1920-an sampai dengan awal 1930-an sebenarnya boleh dianggap sebagai “dasawarsa pergolakan pemikiran ideologi” di kalangan kaum pergerakan. Segera setelah itu perdebatan mengenai corak kebudayaan dari sebuah bangsa yang baru lahir, Indonesia, diperdebatkan.

Demikianlah, buku ini mendiskusikan muasal tumbuhnya kesadaran “modern”—terutama setelah berbagai pemberontakan petani, yang dipimpin para ulama berhasil dilumpuhkan pemerintah kolonial—lahirnya kesadaran akan makna kesatuan komunitas dan akhirnya tumbuh nasionalisme. Ketika kesadaran kebangsaan yang melampaui insularisme dan nasionalisme-etnis (biasa disebut nasionalisme kultural) terjadi “pengumpulan ideologis” dan mencapai puncaknya ketika UUD dan Pembukaan UUD dirumuskan. Dalam situasi naiknya kesadaran politik nasionalisme ini percaturan tentang kebudayaan dan masa depan bangsa juga terjadi.***

BAB I

PENDIDIKAN DAN ELITE MODERN

INDONESIA

A. Pengantar

Masuknya kolonialisme di Nusantara telah berpengaruh pada tatanan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Pengaruh itu makin terasa ketika terjadi perubahan orientasi dari perdagangan (ekonomi) ke arah politik (imperialisme) dan budaya administratif. Jika periodisasi sejarah dibuat bahwa ada masa Budha yang ditandai dengan dominasi kerajaan Sriwijaya, Hindu ditandai oleh dominasi dan kuasa kerajaan Majapahit, maka Islam ditandai dengan kuatnya pengaruh Islam yang terjadi sesudah periode Majapahit. Berbagai institusi kekuasaan lahir yang kemudian disebut dengan kesultanan membentang dari bagian barat Nusantara sampai di Ternate dan Tidore di Timur. Institusi politik Islam begitu dominan di Nusantara.

Kehadiran VOC dalam tatanan sosial ekonomi dan politik Nusantara dalam bentuk mengembangkan kekuasaan dan kekuatan lokal telah berdampak pada lahirnya bibit konflik baru dengan penguasa dan elite local. Budaya yang dominan (Islam) sebagai tradisi yang paling dekat dan dominan pada masa VOC telah menjadi kompetisi utama VOC dalam menjalankan tujuan-tujuannya di nusantara. Ideologi Islam yang mengakar telah menjadi tantangan utama kekuasaan asing di Indonesia. Berbagai perlawanan dan pemberontakan yang terjadi kemudian menjadikan Islam sebagai ideology yang melawan kolonialisme. Perlawanan itu makin diperkuat dengan kehadiran kuatnya aliansi VOC dan juga Belanda dengan para pedagang Cina, Arab, dan India. Komunitas-komunitas pedagang itu tidak memberi ancaman pada kekuasaan VOC.

Benturan tradisi Islam dan budaya lokal ini berlawanan dengan kultur dan politik ekonomi Eropa yang dimainkan oleh VOC (persekutuan

usaha) dan kemudian kekuasaan Belanda dengan modernitas ekonomi dan politik. Dalam periode yang panjang itu melahirkan banyak dinamika. Dinamika itu, salah satunya adalah hasrat kemajuan melalui transformasi sosial para bangsawan. Para bangsawan ini secara ekonomi, sosial dan politik menempati posisi sosial dan memperoleh berbagai kesempatan berkembang dari politik kolonial. Belanda sama sekali tidak menduga bahwa bibit perlawanan berasal dari kalangan bangsawan yang mereka didik. Pendidikan telah menembus batas-batas sosial untuk mendobrak semangat nasionalisme bangsa di Nusantara yang salah satunya melalui pemikiran yang disebarkan melalui media cetak dan diskusi di dalam organisasi.

B. Suasana Hindia Belanda pada Akhir Abad XIX sampai Awal Abad XX

Pada awal abad XIX ditandai dengan masuknya modal swasta ke Nusantara dalam jumlah yang besar. Hal itu ditandai dengan luasnya areal perkebunan dan beragamnya jenis komoditi yang ditanam. Dampak dari kondisi itu adalah masuknya nusantara dalam periode sejarah yang disebut industrialisasi. Selain itu, konsekuensi struktural juga terasa pada sistem kemasyarakatan di mana makin banyaknya orang-orang Eropa dengan segala tradisinya juga dihadirkan. Suasana hindia Belanda berubah ke modern seiring dengan terbukanya pasar komoditi dan diperkenalkannya gaji bagi karyawan perusahaan. Berbagai jenis transportasi juga hadir di kota-kota besar (perkebunan) dan kota pelabuhan yang tentu saja dihubungkan oleh sistem transportasi berupa jalan dan kereta api. Sistem transportasi itu menunjang pengangkutan komoditi ke pasar Eropa.

Realitas historis lain yang menguat pada akhir abad XIX adalah terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan penduduk bumiputera di tengah arus modal asing yang deras di Hindia Belanda. Sistem Sewa Tanah dan Undang-Undang Araria (1870) serta sistem upah yang diberikan kepada para petani tidak menolong mereka keluar dari kemiskinan. Hal ini terlihat dalam laporan *Mindere Welvaart Commissie* yang menyebutkan bahwa tingkat kemakmuran penduduk pribumi menurun. Sebuah realitas yang jauh berbeda dengan ekonomi kolonial yang terus membaik. Kaum liberal mendesak pemerintah Hindia Belanda untuk memperhatikan kondisi ekonomi pribumi di daerah sekitar perkebunan khususnya di Jawa yang terus mengalami penurunan. Kebijakan dikeluarkan meskipun masih dalam konteks ekonomi kolonial dalam bentuk program pengajaran (*educatie*), irigasi

(*irigatie*), dan migrasi (*migration*). Kebijakan itu dinamakan dengan *Politik Etis*.

Kemajuan ekonomi di Hindia Belanda juga telah menciptakan kelas menengah ekonomi. Kelas menengah ini umumnya berasal dari kelas bangsawan yang keluarganya memiliki tradisi ekonomi. Selain itu, kelas menengah ini berasal dari pemilik tanah dan mereka berasal dari kalangan istana, termasuk dari keluarga kerajaan. Catatan tentang kelas menengah ini pada awalnya memperoleh hak-hak istimewa dalam berbagai kebijakan kolonial Belanda. Salah satu yang menonjol adalah di bidang pendidikan.

“Kaum bangsawan dan keluarga para raja dengan bebasnya masuk sekolah-sekolah Eropa mulai dari tingkat dasar-sampai tingkatan tertinggi, hingga ke Eropa. Kondisi ini melahirkan realitas bahwa kelas sosial baru yang bernama *priyayi* berasal dari kalangan terdidik yang sebelumnya berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki akses ekonomi dan sosial di dalam kekuasaan kolonial Belanda”.

Para kelas menengah itu sangat mobile yang didukung oleh kondisi politik sosial, ekonomi, dan budaya yang ada pada waktu itu. Kelas menengah itu menempuh pendidikan di *Tweede Klass Inlandsche Scholen*: *Eerste Klass Inlandsche Scholen*, *Hollandische Inlandsche Scholen (HIS)*, *Europeesche Lagere Scholen (ELS)*, *Hollandche Burgerscholen (HBS)*, *School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA)*, dan *Opleiding School van Inlandsche Ambtenaren (OSVIA)*. Tujuan utama pendidikan yang berasal dari kelas menengah pribumi adalah untuk mengisi tenaga kerja yang tidak bisa diisi dari tenaga kerja kolonial. Pendidikan sejatinya membekali para siswanya dengan berbagai keahlian, namun pada perkembangannya, pendidikan telah melahirkan perkembangan yang bertentangan dengan tujuan awalnya. Para kaum terdidik itu tidak semuanya bekerja sesuai tujuan awalnya. Ada yang bekerja sebagai dokter yang sekaligus sebagai jurnalis. Ada yang jurnalis tetapi pada saat yang sama menjadi pedagang, dan lain sebagainya.

Kaum terdidik yang berasal dari para bangsawan itu salah satunya diperankan oleh Raden Mas Adhi Suryo (1880-1918). Adhi Suryo menolak tiga kali tawaran untuk menjadi pegawai pemerintah kolonial, yakni dari asisten Residen Wolf van Westermde dengan posisi sebagai pegawai pemberantasan lintah darat. Tawaran kedua datang dari asisten residen

Bandung untuk menjadi pegawai pajak, dan ketiga untuk menjadi anggota "Adat Commissie". Pekerjaan yang dipilih Adhi Suryo adalah sebagai redaktur dan penanggung jawab *Pembrita Betawi*, pada tahun 1907, Adhi Suryo menerbitkan mingguan *Medan Prijaji* dalam format yang sederhana di bawah NV *Javasche Boekhandelen Drukkerij en Handel Schiffboeften*.

Domor 22. Saptoe 4 Juni 1910. Tahun ke IV.

MEDAN-PRIJAJI

s. k. Minggoean dan Advertentie.



SOEARA bagai sekalian Radja-radja, Bangsawan asali dan fikiran, Prijaji dan saudagar Boemipoetra dan officier-officier serta saudagar-saudagar dari bangsa jang terprentah laenja jang dipersamakan dengan Anaknegeri, di seloeroeh Hindia Olanda.

Diterbitkan tiap-tiap hari Saptoe
oleh N. V. JAV. ROEKH. EN DRUKKERIJ „MEDAN PRIJAJI“, BATAVIA

REDACTIE Directeur: Hoofd Red. R. M. Tinto Achi Soerjo, Buitenzorg. Redacteurs: R. M. Pradjo di Soerjo dan A. W. Madhie. Redacteur en Vertaalenwoordiger boeat Europa. J. J. Meijer Oud Aant. Rek. Assendichtstr. 42 4-Gravenhage. Redacteur en Vertaalenw. boeat Molokken. A. L. Wawa Runtj Oud Major di Manado. Redacteur en Vertaalenw. boeat Poesangan. R. Ng. Tjito dan Winoto, aloes-aloes Bandoeng.	HARGA LANGGANAN. 1225 tiap-tiap 3 boeat. Boeat di Europa 15 tiap-tiap 3 boeat. HARGA ADVERTENTIE. 1 Kalja 1 10—, 1/2 kalja 1 5—, 1/4 kalja 1 4—, 1/8 kalja 1 250 Saloe regel 1 kolom 1 015 Boeat langganan dapat moerah hendak berembok dengan administrasi. Socelat-socelat des wäng langganan dan tes-lacur bagian adm hendak di kirim pada Administrasi N. V. Medan Prijaji Batavia. Socelat-socelat boeat Redactie hendak di alamatkan pada Hoofd Redacteur di Buitenzorg.
--	---

Surat Kabar Mingguan "Medan Priyai", Sumber : Ahmad Adam, *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan*; Jakarta: Hasta Mitra, 2003

Jika mencermati sejarah bangsa, maka penduduk nusantara-Indonesia, tidaklah homogen. Heterogennya penduduk nusantara terlihat pada unsur-unsur kebudayaan yang diwariskan. Kebudayaan itu diwujudkan, salah satunya melalui aktivitas keseharian yang hingga kini masih bisa diidentifikasi. Masyarakat nusantara ada yang berprofesi sebagai pedagang dan pelayar. Struktur sosialnya pun berbeda-beda sesuai

dengan tatanan sosial yang disepakati setelah melalui adaptasi dengan caranya masing-masing. Kelas sosial bangsawan, priyai, dan orang kebanyakan (Jawa: *wong cilik*) mengikuti pola umum yang berlaku pada strata sosial tahap paling awal yang mungkin hampir sama dengan yang berlaku pada strata sosial di Bali, yang kemudian berkembang seiring dengan perubahan jaman. Strata sosial itu memiliki sebutan berbeda di masing-masing wilayah kerajaan atau kesultanan. Pada tataran fungsional strata sosial itu hampir sama. Di Jawa kita mengenal kelompok sosial dengan gelar bangsawan Raden Mas. Di Sumatera barat kita mengenal *datuk* dan umum dikenal dalam tradisi Melayu. Di Sulawesi Selatan, kelompok bangsawan disebut dengan *daeng*.

Pada perkembangannya, tatanan sosial yang terbentuk itu dalam konteks Indonesia sebagai bangsa tidak bisa *mengeratkan*. Kaum bangsawan ingin keluar dari kebangsawanannya agar bisa hidup sebebas yang bukan bangsawan. Sebaliknya yang bukan bangsawan, ingin membentuk kelompok bangsawan baru, sehingga lahir istilah *bangsawan turunan* dan *bangsawan pemikir*. Bangsawan pemikir menjadi bangsawan karena kepandaianya (baca: sekolahnya) sehingga bisa diangkat menjadi bangsawan. Bangsa turunan diperoleh karena garis keturunan.¹

Pada saat itu, belum ada kesadaran untuk menjadi bangsa yang besar dengan dinamika sosial ekonomi dan budaya. Kesadaran menjadi sebuah bangsa lahir dari kaum terpelajar bangsa yang telah mengenyam sekolah dengan guru-guru Belanda. Kesadaran itu lahir karena persamaan sejarah, persamaan nasib karena terus menerus di bawah bayang-bayang kolonialisme, dan sebagainya. Masyarakat hidup dalam ruang-ruang yang disekat oleh garis batas yang tidak jelas dan hanya berdasarkan ras. Begitulah kolonial Belanda memberi garis rasial itu sebagai batas-batas ruang yang bisa diakses.

Menjelang akhir abad XIX kota-kota di Indonesia mengalami kemajuan tidak hanya dari komposisi demografinya, tetapi juga tingkat kesehatan. Penduduk kota tidak lagi homogen, tetapi makin heterogen. Komposisi etnis juga makin beragam, seperti Arab, China, Timur Asing. Pribumi, dan Eropa. Adaptasi juga terlihat di kota dengan beragam komunitas-komunitas yang terbentuk di kota-kota Indonesia, seperti Batavia, Semarang, Surabaya, dan Padang.² Komposisi etnik yang dipertegas kolonial Belanda dengan membagi ruang kota berdasarkan etnis dan mereka bertemu ketika terjadi transaksi dagang di antara mereka. Penduduk dibatasi oleh garis demarkasi hukum, berdasar rasial, dan status

sosial ekonomi. Di antara penduduk yang mengakses ruang pusat kota hanya ada pada kelompok sosial Eropa, China, Timur Asing, dan lapisan terluar dari itu adalah masyarakat mayoritas, pribumi. Ketika pertanyaan itu diajukan mengapa terjadi demikian? Maka jawabannya tidak sederhana dan tidak tunggal.

Kota-kota yang beragam, tentu juga memiliki kebutuhannya beragam. Jika kebutuhan manusia hanya terdiri dari papan, sandang, dan pangan ternyata tidak cukup, harus ada tambahannya. Kebutuhan warga kota adalah informasi dan berbagai bacaan tercetak. Budaya baru “membaca” pun muncul di kota-kota seperti Semarang, Batavia, Bandung, dan Padang. Menyadari kebutuhan membaca dan barang cetak ini bisa menjadi komoditas baru di Hindia, maka bisnis percetakan pun memasuki era baru. Pada tahap awal, berita atau konstruksi penulis (pemikiran) yang dimuat dan dijual masih pada tahap yang sederhana. Tidak ada kritik sosial yang ada dalam berita, tetapi dampak yang muncul dari adanya budaya baca yang baru ini, lambat laun makin dinikmati oleh pembacanya. Sebagian dari isi berita adalah kisah dari hubungan antar ras yang terjadi di perkotaan.

Hasrat kemajuan dan kesetaraan bangsa Indonesia muncul ketika banyak pemuda telah mengecap bangku sekolah, baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, munculnya surat kabar yang ikut memupuk kesadaran berbagai dari seluruh lapisan masyarakat bumiputra. Kesadaran ini makin tampak dengan banyaknya organisasi kaum muda yang mengarahkan tujuannya untuk membentuk suatu bangsa dan negara yang merdeka.³

Suasana sosial ketika terjadi perubahan di Padang, Sumatra Barat dapat dilihat dalam beberapa karya sastra. Karya sastra dimaksud antara lain pada novel *Sitti Nurbaya* (1922). Novel karya Marah Rusli ini menceritakan tentang kondisi social keluarga di kota Padang pada peralihan ke abad XX.

Sumatera barat adalah satu-satunya daerah yang tidak bayar pajak (*belaasting*) dan tidak dijajah di Indonesia. Dalam perjanjian sebagaimana termuat dalam **Palakat Panjang** menunjukan bahwa kedatangan Belanda di wilayah itu untuk menjaga keamanan dan berdagang. Pada perkembangannya, terjadi situasi yang tidak diharapkan oleh kolonial. Belanda memperoleh pendapatan dari hasil perdagangan komoditi kopi makin menipis. Sebaliknya, situasi pada rakyat Sumatra Barat menunjukan sebaliknya, yakni membaiknya kesejahteraan. Peningkatan

kesejahteraan masyarakat Sumatra Barat ini terjadi karena menanam tanaman lain selain kopi, seperti gambir dan tembakau.

Hasil perdagangan kopi pada masa kolonial yang makin mengecil ini disikapi dengan kebijakan yang dibuat Belanda. Kebijakan itu antara lain rakyat Sumatra Barat harus membayar pajak. Kebijakan itu ditolak oleh masyarakat Sumatra Barat, khususnya yang berasal dari kaum adat. Kelompok sosial lainnya sebaliknya mendukung karena dilandasi oleh pemikiran bahwa jika membayar pajak, maka orang-orang Eropa nantinya mendirikan sekolah. Dalam situasi itu, yang terjadi adalah terjadinya pemberontakan *anti-belasting* (anti pajak) di Sumatra Barat yang berakhir 1908. Setelah pemberontakan, Sumatra Barat mengalami kemajuan dalam berbagai lapangan kehidupan sosial.

C. Politik Etis

Pada akhir abad 19, Van Kol yang menjadi juru bicara golongan sosialis melancarkan kritik terhadap keadaan yang serba merosot di Hindia Belanda. Ia menyatakan bahwa selama satu abad lebih pemerintah mengambil keuntungan dari penghasilan rakyat, tetapi tidak ada satu per sen pun yang dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Selain itu Van Deventer, pada tahun 1899 menulis sebuah karangan dalam majalah *De Gids* berjudul "Hutang Kehormatan". Dalam tulisan itu Van Deventer menyatakan, bahwa dari hasil panen yang sangat berharga melalui Tanam Paksa, negeri Belanda telah memperoleh keuntungan berjuta-juta gulden. Antara tahun 1867 sampai dengan tahun 1878, keuntungan yang telah diperoleh tidak kurang dari 187 juta gulden. Hal itu merupakan hutang Belanda terhadap rakyat Hindia Belanda yang perlu dikembalikan, sekalipun dalam bentuk lain. Hal ini merupakan hutang kehormatan.⁴ Untuk itu perlu memajukan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan rakyat jajahan. Bahkan sebenarnya, andaikata Negeri Belanda tidak mendapat keuntungan pun dari daerah jajahan, sudah menjadi kewajiban merekalah untuk bertanggungjawab terhadap tanah jajahannya.⁵ Anjuran Van Deventer itu kemudian terkenal dengan sebutan "Trilogi Van Deventer" atau "Trias Etika", yang berisi pendidikan, irigasi, dan emigrasi.

Hasil dari upaya tersebut, pada awal abad ke-20, sekolah rendah pemerintah seluruhnya berjumlah 601, dengan jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 37 juta. Selain sekolah yang didirikan oleh pemerintah ada pula sekolah swasta, yang umumnya diperuntukkan bagi

penduduk non-pribumi, sebanyak 359 buah. Di beberapa daerah sekolah yang didirikan *missie* dan *zending* cukup banyak, yaitu berjumlah 451 buah. Secara keseluruhan jumlah sekolah 1.501. Peranan sekolah *missie* dan *zending* membuat ketidakseimbangan ini lebih mencolok lagi. Di seluruh daerah Minahasa yang berpenduduk kira-kira 450 ribu, sekolah pemerintah saja berjumlah 115 buah, sekolah partikular 14 dan sekolah dari gereja 237 buah, sedangkan di bagian selebihnya di Sulawesi seluruh sekolah belumlah melebihi 20 buah (pada tahun 1895 jumlah yang tercatat 14 buah). Di seluruh Sumatra, kecuali daerah Tapanuli Utara, jumlah sekolah pemerintah, swasta dan *missie* hanyalah 98 buah, sedangkan di Tapanuli Utara, daerah Batak-Kristen, jumlah ketiga jenis sekolah tersebut sebanyak 200 buah⁶.

Pada tahun 1900 tercatat sebanyak 169 ELS di seluruh Indonesia, dengan jumlah murid anak pribumi sebanyak 1.545, sedangkan jumlah murid Eropa berjumlah 13.592. Dari sekolah ini murid-murid dapat melanjutkan pelajaran ke STOVIA di Batavia yang telah mengalami beberapa kali pembaruan sejak didirikannya pada tahun 1851, atau secara teoretis bisa saja melanjutkan ke HBS. Namun, pada prakteknya, hal ini hampir tidak mungkin dilakukan karena hanya kurang dari satu persen tamatan ELS yang bisa menikmati pendidikan lima tahun HBS. Untuk bisa masuk HBS, persyaratannya sangat berat, mulai dari ujian masuk hingga pembiayaan.⁷ Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk masuk sekolah pegawai, atau OSVIA yang jumlahnya kira-kira enam buah. Setelah belajar tujuh tahun berharap bisa menduduki tempat yang tertinggi dalam kepegawaian yaitu menjadi bupati. Sekolah yang lebih umum ialah *Kweekschool* (Sekolah Raja) yang jumlahnya sebanyak lima buah terdapat di Surakarta, Bandung, dan tiga di luar Jawa, yaitu di Ambon, Manado, dan Bukittinggi.

STOVIA di Jakarta mempunyai tempat yang unik dalam sejarah kebangsaan. Di STOVIA mulai bersemi semangat nasionalisme, mula-mula bersifat ke-Jawa-an, kemudian bersemi dan berbau ke-Hindia-an. Sebagai satu-satunya sekolah dokter untuk pribumi, maka STOVIA adalah sekolah pertama yang mengumpulkan murid-murid dari seluruh penjuru tanah air. STOVIA juga berperan penting dalam pengembangan bahasa Melayu. Van Ophuysen yang terkenal sebagai perumus ejaan Melayu pernah mengajar di sekolah ini. Sementara itu, Sekolah Raja di Bukittinggi tidak hanya mendidik calon guru, tetapi juga mendidik calon pegawai pemerintah. Bangsawan Aceh yang telah dikalahkan Belanda, juga

dikirim ke Sekolah Raja. Begitu juga anak dari golongan atas lainnya dari seluruh Sumatra.

Sejalan dengan upaya meningkatkan pendidikan di kalangan bumiputera, maka pada awal abad 20 dimulai sistem sekolah desa atau *volksschool*, yang didirikan oleh masyarakat setempat dengan subsidi dan bimbingan dari pemerintah dengan lama sekolah tiga tahun. Sekolah yang diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Van Heutz pada tahun 1908 ini, cepat berkembang dan meluas. Pada tahun 1913 menurut Gubernur Ballot dari Sumatra Barat, terjadi peningkatan jumlah sekolah desa pada tahun 1915 yaitu dari 111 buah meningkat menjadi 350 buah. Kenaikan yang pesat dari sekolah desa ini boleh dikatakan umum di seluruh daerah yang telah mengalami penetrasi lebih lanjut dari pemerintah kolonial. Dalam sepuluh tahun saja, antara tahun 1910 sampai dengan tahun 1920 di seluruh "Hindia Belanda" jumlah murid yang memasuki sekolah desa naik dari 71.239 menjadi 423.314. Pada tahun 1930 jumlah murid telah naik sampai 1.229.666 dan tahun 1940 jumlahnya hanya naik menjadi 2.186.374 orang. Jika ditambah dengan murid-murid yang melanjutkan ke sekolah sambungan atau *Vervolgschool*, maka pada tahun 1930 jumlah murid keseluruhan ialah 1.482.736. Dengan demikian murid sekolah sambungan hanya 253.736. Pada tahun 1940 jumlah murid sekolah sambungan naik sedikit menjadi 282.358 orang.

Kecenderungan seperti ini juga tampak pada sekolah-sekolah Barat yang mempergunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, baik milik pemerintah maupun swasta bersubsidi. Pertumbuhan yang mencolok didapati pada dasawarsa ketiga, sedangkan pada dasawarsa keempat, terlihat pula proses perkembangan melambat. Antara tahun 1900 dan tahun 1910 murid-murid pribumi dari HIS dan ELS naik dua kali lipat menjadi 5.108. Pada tahun 1924 pemerintah memperkenalkan *sekolahschakel*, yang menghubungkan sekolah "bumiputra" dengan sekolah "Belanda". Hal ini membantu peningkatan jumlah sekolah "Belanda". Antara tahun 1910 dan tahun 1930 kenaikannya mencapai delapan kali lipat atau dengan angka absolut menjadi 43.411. Pada tahun 1940, jumlah murid ketiga jenis sekolah tersebut tercatat 88.223 orang. Murid yang tidak sanggup menyelesaikan sekolah jumlahnya cukup tinggi. Puncak kemajuan pendidikan gaya Barat sampai berakhirnya masa penjajahan Belanda, prosentase murid yang sanggup mendapatkan ijazah hanyalah kira-kira seperempatnya saja atau 25 persen.

Seperti sekolah rendah, perkembangan yang terpenting dari jaringan dan jumlah sekolah menengah juga terjadi antara tahun 1910 sampai tahun 1930. Setelah tahun 1930 terjadi pasang turun dan naik yang saling bergantian pada setiap tahunnya. Sekolah-sekolah kejuruan "Bumiputera" tetap memainkan peranan penting. Pada tahun 1930 murid dari sekolah kejuruan terdiri dari sekolah-sekolah guru (normal), mantri kesehatan, pertukangan, perkebunan, dan magang, berjumlah 15.716 orang. Pada kelompok "Belanda", jumlahnya hanyalah 5.233 orang. Dalam jumlah ini telah terhitung murid-murid MOSVIA, PHS (sekolah dagang), *Ambachtschool*, *Kweekschool*, HIK, dan sebagainya, sedangkan jumlah murid pribumi sekolah MULO pada waktu yang bersamaan telah mencapai angka 6.906 orang.⁸

Setelah tahun 1930, seperti telah dikatakan di atas, perkembangan sekolah pemerintah dan swasta bersubsidi, berjalan lambat. Hal ini disebabkan pada dasawarsa itu dimulai politik penghematan, sebagai akibat *malaise* yang menimpa perekonomian dunia. Apalagi Gubernur Jenderal Colijn, yang mulai memerintah tahun 1931 adalah seorang konservatif. Ia mengatakan, bahwa pemerintah Belanda sangat kuat, "sekuat Mont Blanc di pegunungan Alpen". Ia datang untuk menjalankan "politik apa yang mungkin", bukan kebijakan yang bersumber pada "apa yang diinginkan". Di samping itu, tenaga terdidik yang dihasilkan sekolah yang sudah tak sanggup lagi ditampung oleh lowongan kerja yang tersedia. Hal inilah yang antara lain mendorong Komisi Penyelidik HIS, yang dipimpin oleh Schrieke untuk menasehatkan kepada pemerintah pada tahun 1930 supaya tidak lagi menambah jumlah HIS, karena masalah sekolah tidak saja menyangkut soal tersedianya tenaga yang diperlukan, tetapi juga permintaan yang muncul.

D. Mobilitas Sosial dan Munculnya Elite Modern

Dampak positif pengajaran sistem Barat bagi kalangan elite tradisional adalah penguatan dasar legitimasi atau keabsyahan bagi kedudukan mereka. Dengan pengajaran Barat, elite tradisional ini merasa lebih percaya diri sebab pada mereka telah terkumpul dua sumber kesyahan, yaitu keturunan berdasarkan tradisi yang terkait erat dengan asas pewarisan jabatan (*erfelijkshaidbeginsel*),⁹ dan pengajaran Barat, yang memungkinkannya untuk menjadi perantara dengan penguasa asing. Karena itu,

tuntutan bagi pengajaran Barat sangat keras bergema di kalangan mereka. Banyak kalangan bangsawan menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Barat, bahkan akhirnya anak-anak ini menjadi terpengaruh budaya Barat, karena peran “Bapak asuh” yang sangat kuat. Misalnya yang dilakukan oleh Snouck Hurgronje terhadap putra-putra Bupati Serang, P.A.A. Djajadiningrat dan Hoesein Djajadiningrat, putra Bupati Bandung, R.A.A. Wiranatakusumah, dan lain-lain. Di samping Snouck Hurgronje, masih ada sejumlah nama lain yang mempunyai perhatian seperti itu terhadap kelompok orang pribumi seperti Abendanon, Engelenberg, Van Lith, dan Hardeman.

Tuntutan untuk memperoleh pendidikan Barat, semakin meluas karena dimulainya pelebaran kelas pegawai oleh pemerintah kolonial. Hal ini langsung mengancam kedudukan keluarga pegawai lama yang hanya bertopang pada kebanggaan keturunan. Untuk mempertahankan harkat dan status kepegawaianya, yang dulu didasarkan hubungan dengan raja, maka kini harus diperoleh melalui ketrampilan teknis menurut corak Barat. Tanpa hal ini kegoncangan dalam kepegawaian tidak bisa dielakkan. Begitulah umpamanya, pada tahun 1905 Bupati Tuban mengeluh, bahwa dari 260 orang priyayi yang baru diangkat di Keresidenan Rembang hanya sepuluh orang saja yang mendapat pendidikan di OSVIA. Pada tahun 1940 semua *regent*, yang jumlahnya 65 orang, dan sebagian besar patih di Jawa adalah tamatan OSVIA. Sebagian dari mereka telah menduduki perguruan tinggi. Dari jumlah 340 *wedana*, sepersepuluhnya adalah tamatan dari sekolah yang sama.

Di luar kepomongprajaan lembaga pengajaran Barat menghasilkan tenaga-tenaga yang terlatih yang dapat dipekerjakan pemerintah. Sebagai contoh dapat disebutkan bahwa pada tahun 1941 tercatat 90 sarjana hukum pribumi bekerja pada badan-badan pemerintahan, di antaranya 54 orang bekerja di bawah Departemen Kehakiman, 306 orang dokter bekerja pada Dinas Kesehatan. Pada tingkat lebih rendah dapat disebut bahwa pada tahun tersebut 58 dari jumlah 139 orang mantri hutan adalah orang pribumi asli, sebanyak 139 orang pula bekerja sebagai mantri pertanian, dan sebanyak 63 orang bekerja sebagai mantri hewan. Semuanya adalah tenaga terlatih dan termasuk kelas atas dan menengah dalam struktur kepegawaian.

Dapat diperkirakan bahwa banyak juga di antara pejabat yang mendapatkan kedudukan mereka karena keahlian yang dimilikinya tersebut, sesungguhnya berasal dari golongan bawah. Dalam hal ini sekolah menjadi saluran mobilitas sosial dan dengan pengaruh yang lebih

terbatas, menjadi titik tolak ke arah transformasi sosial. Kecenderungan yang lebih luas untuk terjadinya mobilitas sosial terdapat pula dalam dunia kepegawaian. Anak-anak dari pegawai rendah, karena pendidikan yang mereka peroleh, mempunyai kesempatan untuk melampaui tingkat yang pernah dicapai oleh orang tua mereka.¹⁰

Ketidakmampuan pemerintah kolonial menampung lulusan sekolah, menyebabkan timbulnya kaum intelektual yang merasa diperlakukan tidak adil oleh sistem kolonial, sekaligus juga mendorong adanya keharusan mentransformasikan bekal yang diberikan oleh sekolah. Pada saat makin memuncaknya gerakan kebangsaan pada tahun 1930-an, hal tersebut tampak mencuat dengan berkembangnya sekolah-sekolah swasta, usaha-usaha penerbitan, koperasi dan sebagainya. Peleburan dari sifat sekolah "Belanda" sekaligus memupuk semangat kebangsaan dan merintis ke arah terbentuknya corak masyarakat lain yang bukan kolonial. Sekolah Barat telah berfungsi sebagai katalisator untuk terwujudnya dua jenis elite, yaitu birokrat moderen dan kaum intelektual. Keduanya berasal dari tradisi pendidikan yang sama, tetapi berada dalam lingkungan politik dan sosial yang berbeda. Keduanya mempunyai tempat atas susunan hierarki sosial, tetapi yang pertama lebih didukung oleh legitimasi politik, sedangkan yang lain oleh keunggulan ilmu. Birokrat modern ini disebut juga priyayi birokrat untuk di Jawa, dan di Tatar Sunda dikenal sebagai *menak lama*; sedangkan kaum intelektual yang muncul akibat pendidikan Barat dikenal juga sebagai *priyayi professional* atau *priyayi intelektual*.¹¹

Sementara itu, tamatan sekolah swasta yang disebut "sekolah liar", baik yang bercorak sekuler dan agama, makin menemukan diri mereka berhampiran dengan kaum terpelajar bebas ini. Walaupun tradisi pendidikan mereka berbeda-beda - terutama jika dibanding dengan lulusan sekolah agama - mereka menghadapi situasi dan kemungkinan sosial yang hampir sama. Keduanya mendapatkan tempat terlepas dari tuntutan politik atau kekuasaan.

E. Perkembangan Transportasi dan Tumbuhnya Kota-kota Kolonial

Pada 1845 satu kapal uap Belanda dialokasikan untuk melayani pelayanan pos di Singapura dan mengangkut surat dan penumpang ke Batavia terus ke Surabaya⁵. Munculnya permukiman orang Belanda di berbagai tempat di wilayah pantai di luar Jawa mendorong para pengusaha untuk secara aktif membuka usaha di dalam pelayanan pos dan angkutan penumpang. Di

bawah kontrak pengiriman pos dan penumpang yang dibuat pada 1850 dengan sindikat baru Willem Cores de Vries, hubungan pelayaran kapal uap diperluas dari Jawa ke permukiman Belanda yang ada di Padang, Makasar, Menado, Ternate, dan Ambon.

Perusahaan yang didirikan oleh berbagai bangsa terus berkembang dan memberikan pelayanan pengiriman pos dan angkutan penumpang dari satu tempat ke tempat lain di Asia Tenggara. Di Kepulauan Philippina, penguasa Spanyol pada 1854 menyediakan pelayanan angkutan menggunakan kapal uap bagi perjalanan laut setiap bulan menghubungkan Hongkong (yang pada akhir dasawarsa 1850an selama beberapa tahun diambil alih oleh perusahaan pelayaran angkutan pos). Pada akhir 1860-an satu kapal uap Prancis ditetapkan untuk melayani rute antara Singapura dan Batavia dan sudah barang tentu melanjutkan perjalanannya ke Hongkong terus ke Manila.

Sebelum dibukanya terusan Suez, pusat-pusat pantai utama berada di India, Asia Tenggara, Cina, dan Jepang. Pembukaan terusan Suez pada Desember 1869 mengkonsolidasikan integrasi yang lebih dekat antara Asia dan Eropa meskipun terjadi pula diversifikasi dalam jaringan pelayaran. Sebelum 1870 hanya Inggris dan Prancis yang mampu memberikan pelayanan angkutan pos dengan subsidi pemerintah, kekuatan kolonial yang lain membangun sendiri jaringan langsung antara negeri induk dengan wilayahnya di Asia; bendera *Stoomvaart Maatschappij Nederland* (SMN) mulai berlayar pada 1871 dan bendera Spanyol dikibarkan oleh Olano dan Larinaga & Co. pada 1873.

Gagasan untuk memunculkan angkutan kapal oleh swasta di Hindia Belanda muncul sekitar 1850⁶. Selama ini angkutan kapal di Hindia Belanda dilaksanakan secara proteksionis sehingga mengundang kritik dari kaum liberal. Pada 1825, pemerintah Belanda menyewa kapal asing seperti kapal milik perusahaan Inggris Firma Maclain Watson & Co. ss *Baron van der Capellen* yang berbobot mati 114 last dengan harga 6.000 sampai 8.000 gulden sebulan. Pada 1827 satu kapal lain juga disewa di Singapura. Dengan semakin ramainya kapal yang dioperasikan maka pemerintah memikirkan untuk mengembangkan berbagai kota pelabuhan yang ada di utara pulau Jawa.

Hiruk pikuknya perkembangan perusahaan pelayaran di antara negara-negara Eropa dan Asia mendorong pemerintah Belanda untuk mengembangkan armada lautnya yang dioperasikan di Hindia Belanda.

Kapal-kapal tersebut semula bukan milik perusahaan swasta tetapi milik pemerintah di Negeri Belanda. Pada pertengahan abad ke-19 perkembangan armada angkutan laut pemerintah Belanda di Asia Tenggara berkembang secara pesat. Pada 1845 jumlah kapal yang dioperasikan adalah 4 buah, pada 1847 bertambah menjadi 6, dan tiga tahun kemudian jumlah kapal yang dioperasikan meningkat menjadi 10 buah. Kapal tersebut melayani angkutan barang dan penumpang serta dinas pos dari Batavia ke Singapura yang kemudian dalam pengangkutan ke Eropa bekerjasama dengan armada Inggris.

Pada 1852 pemerintah Hindia Belanda meneken kontrak baru dengan C. de Vries yang diberi ijin untuk membuka jalur pelayaran antara Batavia – Bengkulu – Padang pergi pulang dan dari Batavia ke Makasar lewat Semarang dan Surabaya pergi pulang setiap musim timur sebulan sekali. Pada musim barat setiap dua bulan pelayaran diarahkan ke Ambon, Ternate, Manado dan Makasar. Dalam kontrak tertanggal 1 Juni 1854, de Vries diberikan konsesi untuk membuka jalur pelayaran baru yaitu ke Muntok, Kepulauan Riau. Jalur ini berangkat dari Batavia lewat Muntok terus ke Singapura pergi pulang. Subsidi yang diberikan pemerintah dalam mengangkut surat dinas sungguh sangat memuaskan. Pada tahun pertama subsidi yang diberikan kepada perusahaan pelayaran sebesar f.140.000,- kemudian menjadi f.130.000,- atau rata-rata f.9,69 dan f.8,73 setiap mil. Dengan semakin meluasnya jangkauan jaringan pos yang harus dilayani maka pemerintah menaikkan besarnya subsidi menjadi f. 10,56 untuk setiap mil. Naiknya subsidi tersebut bukan saja berarti bahwa pemerintah ingin agar penyampaian pesan dari satu daerah ke daerah lain terjamin tetapi juga dapat diartikan bahwa pemerintah ingin mendorong agar perusahaan pelayaran milik swasta berkembang sehingga jaringan pelayaran dapat menembus setiap titik penting bagi kepentingan pemerintah kolonial di Hindia Belanda.

Pada 4 Februari 1888 parlemen Belanda mensyahkan dibentuknya perusahaan pelayaran yang lebih menjamin angkutan barang dari tanah jajahan ke Negeri Belanda. Perusahaan tersebut dinamakan *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM)⁸. Perusahaan KPM diberi hak untuk mengangkut barang dan penumpang dari Hindia Belanda ke Eropa. Untuk angkutan pos subsidi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan ini adalah lebih tinggi daripada subsidi yang diberikan kepada perusahaan Inggris. Fasilitas bagi angkutan penumpang juga dilakukan pembenahan seperti tempat duduk penumpang dibagi menjadi kelas utama, kelas satu

sampai kelas lima. Tarif untuk perjalanan dinas pegawai pemerintah dan tarif angkutan barang juga lebih rendah.

Depresi ekonomi 1930-an yang membawa dampak buruk pada perusahaan perkebunan di Sumatra Timur mengakibatkan terjadinya arus balik para pekerja perkebunan yang berasal dari Jawa. Mobilitas tenaga kerja pada dasawarsa ini tentu melibatkan kapal laut terutama yang mempunyai pangkalan keberangkatan di Sabang atau Belawan Deli. Dari pelabuhan keberangkatan itu para pekerja akan diangkut menuju ke berbagai pelabuhan di pantai utara Pulau Jawa seperti Batavia, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Sementara produksi industri perkebunan seperti karet dan tembakau terhenti karena terikat pada perjanjian internasional maka angkutan barang dari berbagai pelabuhan di Hindia Belanda ke Eropa terhenti. Pada tahun 1937 keadaan tampak membaik dan kehidupan industri mulai hidup. Namun belum lagi kegiatan ekonomi di Hindia Belanda pulih benar Bala Tentara Jepang mendarat di beberapa daerah di Jawa dan Kalimantan tanpa memperoleh perlawanan yang berarti dari militer Belanda. Maka beralihlah penguasaan atas Hindia Belanda dari tangan Belanda ke tangan Bala Tentara Jepang pada Maret 1942.

F. Transportasi Darat

Upaya untuk membangun sarana-prasarana transportasi di Hindia Belanda merupakan proses yang panjang. Munculnya gagasan perlunya membangun jaringan angkutan di Jawa oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda sebenarnya telah terjadi pada bagian pertama abad ke-19 saat pelaksanaan Sistem Tanam Paksa mengalami perkembangannya. Pada tahun 1840 suatu penyelidikan tentang kemungkinan membangun jaringan kereta api yang menghubungkan antara Surabaya lewat Solo ke Yogyakarta terus ke Priangan dengan berbagai jaringan sempalan di berbagai kota.

Dengan diundangkannya Undang-undang tertanggal 6 April 1875 hak untuk membangun jalan kereta api yang pertama oleh perusahaan negara di Hindia Belanda (S.S.) yaitu untuk rute Surabaya – Pasuruan – Malang; kemudian diikuti oleh pembangunan jaringan di tempat lain baik di Pulau Jawa maupun Sumatra. Pemberian konsesi kepada pengusaha swasta antara lain tertuang dalam surat keputusan tertanggal 18 Januari 1882 yang diberikan kepada N.I.S. untuk membangun jaringan antara Tegal – Balapulang. Pada September 1895 jaringan Semarang – Cirebon

digunakan untuk angkutan trem uap. Dengan Surat keputusan tanggal 23 Januari 1883 jaringan Belawan – Medan - Deli-Tuwa dan Medan – timbang Langkat diberikan kepada Deli Spoorweg Maatschappij. Jaringan yang menghubungkan kota Batavia – Bekasi yang dibangun oleh Bataviasche Oosterspoorwegmaatschappij ijin pembangunannya tertuang dalam surat keputusan tertanggal 19 Februari 1884. Jaringan tersebut untuk masa kemudian diperpanjang terus ke kota Karawang.

Setelah pertengahan 1880an, pembangunan jalan kereta api pemerintah berjalan dengan cepat sehingga pada pergantian abad, jaringan rel yang ada di Jawa bukan hanya menghubungkan kota pedalaman dengan kota pantai tetapi juga menghubungkan kota-kota yang ada di pedalaman. Di luar Jawa pembangunan jaringan pada akhir abad-ke-19 dipusatkan di daerah Aceh, yang menghubungkan kota Medan dengan kebun tanaman ekspor di sekitarnya di Sumatra Utara dan kota di pantai barat Sumatra. Pada 1911 persetujuan diberikan pemerintah untuk membangun jaringan dari Palembang ke Selat Sunda meskipun sampai 1927 kegiatan ini belum selesai. Pada waktu itu bagian di utara, selatan, dan barat Pulau Sumatra belum dihubungkan oleh jaringan yang terpadu. Sementara itu pada 1922 jaringan rel kereta api juga dibangun di Sulawesi Selatan yang menghubungkan kota Makasar dengan kota Takalar.

Angkutan kereta api mempunyai arti yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi di Pulau Jawa dan Sumatra bersama-sama dengan angkutan darat yang menggunakan sarana jalan darat. Angkutan kereta api maupun angkutan kendaraan bermotor diperlukan untuk memindahkan barang maupun penumpang dari satu tempat ke tempat lain.

Jaringan rel kereta api yang ada di Jawa antara lain berada di Yogyakarta yang masuk wilayah kerja jaringan Barat dan wilayah Surakarta yang masuk wilayah kerja jaringan timur. Jaringan rel kereta api di Jawa pada 1936 mempunyai lebar rel 1,067 meter yaitu lebar normal rel kereta api. Mempunyai panjang rel untuk jaringan utama sepanjang 2.270 kilometer dan jaringan cabang sepanjang 580 kilometer. Di samping itu terdapat kereta dengan rel ukuran kecil yaitu 0,60 meter sepanjang 79 kilometer yang digunakan untuk mengangkut tebu dari areal tanam ke pabrik gula pada musim giling. Dengan demikian panjang jaringan rel kereta api S.S. di Jawa adalah 2929 kilometer. Kecuali 79 kilometer jaringan rel dengan lebar 0,60 meter seluruh jaringan rel milik S.S. di Jawa adalah 1.067 meter.

Wilayah luar Jawa telah memperoleh perhatian S.S. karena kepentingan pemerintah kolonial dan pengusaha swasta juga terdapat di wilayah tersebut. Perusahaan Zuid Sumatra Staatstramwegen membangun jaringan di Lampung sepanjang 62 kilometer dan di Palembang sepanjang 152 kilometer yang telah beroperasi pada 1917. Jaringan yang pertama adalah menghubungkan kota Panjang - Haji Pemanggilan yang dihubungkan dengan kota Kertapati dan Muara Enim. Untuk jaringan dari Kertapati akan mempertemukan ruas dari Musi dan Ogan dengan kota Palembang. Pada 1917 ruas Muara Enim dan lokasi tambang Bukit Asam di Tanjung diselesaikan sepanjang 13 kilometer. Bekerjasama dengan Dinas Angkutan Mobil dan Darat jaringan ke Palembang akan disempurnakan. Jaringan Palembang – pelabuhan Lampung memang diharapkan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Di Aceh jaringan kereta dengan rel ukuran 1.067 meter yang menghubungkan Ule-ule dengan Kutaraja telah dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum pada November 1876. Pada 1897 jaringan Kuta Raja – Lam Baru telah dikerjakan. Jaringan rel kereta terus dikembangkan di wilayah pantai Utara dan Timur dimana jaringan Pangkalan susu – Besitang telah selesai dikerjakan pada 1917. Dari Pangkalansusu jaringan rel diteruskan ke Arubaai dan dari Besitang pada pertengahan 1919 dibuka jaringan yang menghubungkannya dengan jaringan milik Delispoorwegmaastchappij.

Perkembangan kereta api di Pulau Sumatra S.S. menghadapi kendala dalam mengembangkan jaringan rel keretaapi di Sumatra Barat. Bukit Barisan yang mempunyai ketinggian di Subang 1.050 meter dan di Padang Panjang sekitar 773 meter adalah berada di atas rata-rata ketinggian yang dapat ditolerir. Pada 1833 dibangun jaringan jalan kereta gerobag di lembah Anai untuk memperbaiki jalan angkutan antara Padang Panjang dan Padang. Pada 1870 seorang insinyur tambang W.H. de Greeve menyatakan dalam satu laporan kepada pemerintah tentang kemungkinan eksploitasi ladang batubara Ombilin. Laporan itu ditindaklanjuti pemerintah dengan menugasi Dr.R.D.M. Verbeek untuk melakukan penelitian tentang potensi tambang batubara tersebut. Pada 1873 J.L. Cluysenaar ditugasi pemerintah untuk meneliti tentang kemungkinan membangun jaringan rel kereta api yang mendukung kepentingan pemerintahan kolonial di Sumatra Barat secara keseluruhan maupun bagi pengangkutan batu bara dari dataran tinggi Padang ke pelabuhan di pantai barat Sumatra pada

khususnya. Hasil laporan tersebut diterbitkan berturut-turut pada 1876, 1878, dan 1884.

Mengingat potensi ekonomi Sumatra Barat cukup besar untuk dikembangkan di masa kemudian maka pemerintah kolonial memandang perlu untuk memperluas jaringan kereta api di daerah ini. Dengan surat keputusan tertanggal 13 Juli 1895 ditetapkan untuk memperpanjang jaringan rel kereta api Fort de Kock – Payakumbuh sepanjang 32 kilometer yang selesai pada 15 September 1896. Pada akhir 1917 jalur utama Pelabuhan Emma – Padang – Padang Panjang – Sawah Lunto sepanjang 105 kilometer dihubungkan dengan jalur lain yaitu Padang – Puluayer, Lubukalir - Sungai Limau dan Padang Panjang – Payakumbuh sepanjang 95 kilometer, secara bersama-sama jalur tersebut sepanjang 245 kilometer.

Setelah pertengahan abad ke-19, perluasan jaringan kereta api telah memberikan bentuk pelayanan angkutan darat yang murah sepanjang rute yang telah lama terbentuk meskipun jaringan baru juga diperlukan untuk mengangkut penumpang dan barang dari pabrik menuju stasiun terdekat. Di Pulau Jawa kebutuhan akan jaringan transportasi ke stasiun utama dipenuhi dengan cara membangun jaringan rel bagi angkutan trem atau kereta api.

Mobil pertama yang diketahui diimpor ke Asia Tenggara adalah di Singapura pada 1896. Di Sumatra Utara mobil digunakan pertama kali pada 1902. di Rangoon pada 1905. Pada awal abad ke-20 mobil masih merupakan barang yang langka kecuali di beberapa daerah seperti Philippina dimana pengaruh Amerika berkembang.

Pembangunan jaringan jalan raya di luar Jawa tidak berjalan secara cepat. Sungai dan pantai di bagian utara, barat, dan selatan Pulau Sumatra dihubungkan dengan jaringan kereta api mempunyai peran penting sebagai angkutan utama sampai masa kini. Sungai menjadi kendala bagi pembangunan jaringan jalan raya lintas Sumatra yang membentang sepanjang pantai barat dan pantai timur Sumatra. Jalan darat yang mempunyai peranan dasawarsa 1920an adalah pengerasan dari jalan setapak yang pernah ada yang menghubungkan dataran tinggi di Sumatra Barat dengan ujung pelayaran sungai yang mengalir sampai pantai timur Sumatra dan Selat Malaka. Meskipun rel kereta api telah dibangun di wilayah yang berbukit-bukit, jalan darat terbukti merupakan sarana transportasi yang lebih murah dalam pengadaannya.

Persaingan antara perusahaan angkutan darat dengan perusahaan angkutan kereta api di dalam menyediakan angkutan umum di kota semakin tampak di permukaan. Di Asia Tenggara kota pelabuhan seperti Jakarta (1882), Rangoon (1884) Singapura (1885) dan Surabaya (1890) mengikuti pola pelayanan yang dikembangkan di kota-kota di Eropa dan Amerika dengan membangun jaringan trem uap sebagai angkutan umum. Fasilitas ini mendorong gaya hidup di sub-urban bagi orang kaya di Eropa dan yang lebih penting jumlah penumpang, angkutan ini dapat melayani mobilitas harian para pekerja menuju atau dari kota pelabuhan. Sedikit ketinggalan dibandingkan dengan Eropa, pada 1890an angkutan kota mulai menggunakan tenaga listrik sementara kota lain termasuk beberapa kota di propinsi mulai membangun jaringan seperti Bangkok pada 1893, Batavia (1899), Calcutta (1902), Hongkong dan Mandalay (1904), Penang dan Singapura (1905), Rangoon dan Manila (1906). Pelayanan angkutan kota ini ditunjang atau bahkan harus bersaing dengan sejumlah besar angkutan lokal tradisional seperti di Jawa dan Philipina yaitu kereta kuda. Pada mulanya mobil menggantikan angkutan kereta kuda yang sebelumnya lazim digunakan orang Eropa dan Orang Cina kaya namun pada periode antara PD I dengan Perang Dunia II mulai terjadi persaingan antara taksi dan jipney dengan angkutan kereta api pada jaringan utama. Persaingan itu menjadi semakin tajam pada 1930-an ketika ada tuntutan yang serius bagi adanya fasilitas angkutan umum yang murah.

G. Perkembangan Komunikasi

Pada abad ke-18 pelayanan pos di Hindia Belanda telah dilayani oleh lembaga swasta. Untuk mengantar surat dari Batavia ke berbagai tempat di Hindia Belanda ada petugas yang disebut pecalang. Untuk pengiriman surat dari Batavia ke Cirebon, Tegal dan Semarang pada 1754 memerlukan waktu 14 hari.⁴⁵ Untuk mengirim surat dari Negeri Belanda ke Hindia Belanda dilakukan oleh kapal Kumpeni maupun kapal asing yang melayari rute Eropa ke Asia Tenggara memakan waktu 7,5 bulan.

Pada 1746 kantor pos pertama kali didirikan di Batavia. Waktu itu ada dua pegawai pos, seorang bertugas sebagai penerima surat, paket, dan titipan lain yang akan dikirim, seorang yang lain bertugas mengantarkan surat, paket dan titipan lainnya ke alamat yang dituju. Keadaan semacam ini tidak berlangsung lama karena pada 1747 penerimaan surat dilakukan dengan kotak surat atau semacam bis surat.

Karena banyak keluhan maka pada 1789 dibuat aturan tentang pengiriman surat oleh swasta.

Untuk keperluan pengiriman surat maka Daendels pada masa kekuasaannya membangun jalan pos yang pada 29 Mei 1808 Daendels bercita-cita bahwa pada saat ia masih berkuasa pengiriman surat harus sampai ke alamat dalam waktu 3 kali 24 jam. Untuk itu setiap residensi diangkat pegawai pos. Pada 18 Juni 1808 reorganisasi pelayanan pos dilakukan yaitu Jawa dibagi menjadi 4 distrik: distrik Banten, melayani hantaran pos dari Banten ke Batavia; distrik Batavia, dari Batavia sampai Karang Sambung; Distrik Semarang, dari Karang Sambung sampai Semarang; Distrik Surabaya, melayani hantaran dari Semarang ke Surabaya. Di setiap distrik diangkat seorang komisaris jalan dan pos. Di samping itu sebuah kantor pos umum dan stasiun bagi pengiriman bermacam titipan juga didirikan.

Pengiriman surat lewat pos dari Batavia ke Bogor dilakukan setiap hari. Pengiriman surat ke berbagai tempat lain dilakukan dua kali seminggu. Petugas penghantar surat dari Batavia ke Bogor harus berangkat sepagi mungkin dan pada setiap 6 pal (1 pal = 1,5 kilometer) tersedia seorang petugas pengganti. Antara Bogor dan Surabaya didirikan 12 tempat penginapan, setiap penginapan terdapat 6 atau 8 kamar tidur yang bagus dan di antara penginapan tersebut terdapat pasanggrahan. Perubahan terjadi dalam frekuensi pengiriman surat yaitu sejak 1828 pengiriman surat semula tiga kali perminggu diubah menjadi dua kali per minggu.

Pada 1871 angkutan kereta api antara Batavia – Jatinegara dibuka untuk pertama kali yang sangat bermanfaat bagi petugas pos. Tujuh tahun kemudian dikeluarkan peraturan bahwa pengiriman pos dilakukan dengan angkutan kereta api. Jalur kereta api antara Anyer – Batavia dan antara Batavia – Bandung – Yogya – Surabaya terdapat fasilitas pengiriman pos. Di beberapa tempat yang kereta api cepat tidak berhenti serta tempat yang tidak ada setasiun kereta api didirikan kantor pos pembantu.

Pelayanan pos diluar Jawa memperoleh perhatian pemerintah kolonial tak lama setelah layanan itu dibangun di Jawa. Di Sumatra pelayanan pos dilakukan dengan mobil yaitu di Palembang Boven Landen serta di Pantai Timur Sumatra, yang prakteknya kecuali melayani pengiriman surat juga melayani angkutan penumpang dan barang. Masalah lain yang dihadapi pengantar pos di luar Jawa seperti di Distrik Lampung adalah

adanya gangguan binatang buas seperti gajah. Pegawai pos di Aceh dalam menjalankan tugasnya sering menghadapi gangguan sehingga mereka dipersenjatai dengan rencong atau *klewang*.

Pelayanan telegraf dimulai sejak 1855 dengan Peraturan Ratu yang memungkinkan pengadaan elektro magnet telegraf. Jaringan telegraf bagi kepentingan umum dibangun sejalan dengan dibangunnya jaringan rel kereta api karena berita pemberangkatan kereta api diatur dengan sistem komunikasi antar stasiun dengan telegraf. Dengan demikian di setiap stasiun dan halte selalu tersedia sarana komunikasi telegraf. Setelah dikeluarkannya ijin pembukaan jaringan komunikasi oleh Ratu Belanda pada 1855, jaringan yang dibangun pertama kali adalah antara Batavia – Bogor, dengan jaringan ini pula pengiriman berita pertama kepada Gubernur Jendral lewat telegram dilakukan pada 23 Oktober 1856. Dua tahun berikutnya dibuka saluran telegraf Batavia – Surabaya dengan saluran cabang Semarang – Ambarawa. Pada 1859 jumlah kantor telegram di seluruh Jawa telah mencapai 28 tempat dengan panjang jaringan 2.700 kilometer.

Untuk mendukung kepentingan militer dan bisnis maka perluasan jaringan telegraf di Jawa maupun di luar Jawa semakin penting. Pada 1866 pemasangan jaringan di Sumatra telah disetujui. Pemasangan pertama dilakukan di Telukbetung. Pada 1871 jaringan telah masuk kota Padang dengan panjang jaringan 1200 kilometer, dan ke Singkel sepanjang 600 kilometer.

Teknologi transportasi dan komunikasi mempunyai sumbangan penting bagi perubahan yang terjadi di Hindia Belanda. Perkembangan pengaruh penguasa Barat di Jawa yang sudah mapan pada abad ke-19 dapat diperluas ke luar Jawa karena dukungan transportasi dan komunikasi.

H. Perkembangan Pers di Hindia Belanda

Pada paruh ke-2 abad ke-19, penerbitan pers berkembang juga di kota-kota selain Batavia, Semarang, dan Surabaya. Pada tahun 1880, di Cirebon lahir surat kabar *Tjiremai*, yang berlangsung sampai pada awal abad ke-20. Di Bandung muncul *De Preanger Bode* pada tahun 1895 di bawah redaksi R.J. De Vries yang bekerjasama dengan firma Kolff & Co.

Di Sumatera pada tahun 1884 muncul *Deli Courant*, yang dimodali oleh pengusaha tembakau, Deen. Lima tahun kemudian, di Deli terbit pula *Sumatra Post*. Di Padang, pada tahun 1893 terbit *Sumatra Bode*, dan pada

tahun 1899 muncul *De Padanger*. Di Palembang, pada tahun 1898 lahir *Nieuws en Advertentieblad voor Residentie Palembang, Djambi en Banka*, yang terbit dua kali seminggu untuk kepentingan perusahaan minyak di sekitar tempat itu. Pada tahun 1901 di Kota Raja terbit *Nieuws en Advertentieblad voor Atjeh en Onderhoorigheden*. Di Sulawesi, pada tahun 1902 terbit *Makassarsche Courant* di Makasar, dan di Kalimantan tahun 1894 terbit *Bandjermasingsch Nieuwsblad* di Banjarmasin.

Secara umum sejak akhir abad ke-19, tulisan-tulisan dalam surat kabar mulai bersifat kritis terhadap politik kolonial Belanda di Hindia Belanda. Sebagai contoh, *Bondsblad* (terbit 1897), surat kabar milik *Indische Bond* (perkumpulan orang-orang Indo-Belanda), sering mengekspresikan perjuangan kaum Indo untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan golongan Eropa totok dalam bidang politik.

Selain surat kabar yang berbahasa Belanda, orang-orang swasta Eropa juga menerbitkan surat kabar berbahasa Melayu dan Jawa. Dalam disertasinya tentang *The Vernacular Press and The Emergence of Modern Indonesian consciousness (1855-1913)*, Ahmat B. Adam menulis ada tiga kategori surat kabar berbahasa Melayu yang diterbitkan oleh orang-orang swasta Eropa yaitu budaya atau pendidikan, gereja, dan komersial.¹²

Dalam cakupan kategori budaya atau pendidikan, terdapat surat kabar mingguan *Bromartani* yang terbit pada 1855 di Surakarta. Pengelola mingguan ini adalah C.F. Winter Sr. dan anaknya, G. Winter. *Bromartani* berisi berbagai artikel tentang ilmu pengetahuan, berita-berita dari luar negeri, berita kelahiran, kematian, penawaran dan pelelangan, keputusan pemerintah, pengangkatan pegawai pemerintah, artikel-artikel tentang pertanian dan industri, hikayat atau dongeng, dan berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana-mana. Pada tahun yang sama, terbit juga di Surakarta *Poespitamantjawarna* di bawah pimpinan redaksi De Jonge Winter. Kedua surat kabar tersebut ditulis dalam bahasa Jawa *kromo inggil* dan memuat terutama artikel-artikel tentang pengetahuan, kebudayaan, dan informasi-informasi lainnya seperti berita kelahiran, pengumuman pemerintah, pengangkatan pegawai, dan lain-lain. *Bintang Hindia* adalah majalah yang didirikan atas kerja sama antara orang Belanda, Brousson, dan orang Indonesia, Abdoel Rivai. Tujuan penerbitan ini adalah untuk mengembangkan kebudayaan rakyat bumiputera dan memperkuat hubungan antara Belanda dan daerah koloninya. Atas usaha Brousson dan Abdoel Rivai, penerbitan *Bintang Hindia* mendapat bantuan keuangan dari pemerintah. Pemerintah kolonial bersedia memberi bantuan untuk

penerbitannya, karena majalah itu didistribusikan di kalangan pegawai-pegawai pemerintah, guru-guru, siswa-siswa, dan militer, sehingga mudah dikontrol. Bagian dari sistem pengawasan itu dapat diketahui dari persyaratan bahwa artikel-artikelnya jangan sampai menimbulkan pengaruh buruk bagi pembaca bumiputera. Penerbitnya adalah N.J. Boom di Amsterdam, dan terbitan pertamanya beredar pada Januari 1903. Selain beredar di Hindia Belanda, *Bintang Hindia* juga sampai ke Singapura.¹³

Dalam kategori komersial, terbit antara lain mingguan *Soerat Kabar Malaijoe* di Surabaya pada tahun 1856. Mingguan ini berbahasa Melayu, di bawah redaksi Führi, dan memuat berita-berita perdagangan di Jawa Timur. Lange & Co. di Batavia menerbitkan mingguan berbahasa Melayu *Soerat Chabar Betawi* pada tahun 1858. Surat kabar ini ditulis dengan huruf latin dan Arab, dan memuat berita tentang perdagangan dan peristiwa-peristiwa di Batavia serta daerah-daerah lain di Jawa. Van Dorp di Semarang menerbitkan *Selompret Melajoe* pada tahun 1860, dan berlangsung sampai dengan tahun 1911. *Selompret Melajoe* memuat terutama advertensi, berbahasa Melayu pasar, dan ditujukan untuk kepentingan bisnis.

Untuk kepentingan gereja, pada tahun 1868 di Minahasa terbit majalah bulanan *Tjahaja Siang*, dengan editornya Graafland yang dibantu oleh para pembantu pendeta dan murid-murid sekolah misi. *Tjahaja Siang* memuat terutama hal-hal keagamaan dan pendidikan. Untuk



Surat Kabar "Bintang Hindia", Sumber : Ahmad A...
Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesac
Keindonesiaan; Jakarta: Hasta Mitra, 2003

penyebaran agama Kristen, di Batavia terbit mingguan *Biang Lala*. Mingguan ini berisi artikel-artikel tentang agama Kristen dan kisah-kisah dari Bibel, dan editornya adalah J.M. Arnold.

Pada awal abad ke-20, seiring dengan kebangkitan nasionalisme Cina di Jawa, orang-orang Cina peranakan juga ikut meramaikan usaha penerbitan surat kabar. Pada tahun 1901, terbit *Li Po* di Sukabumi, kemudian disusul oleh penerbitan *Pewarta Soerabaja* (1902), *Warna Warta* (Semarang, 1902), *Chabar Perniagaan* (Batavia, 1903), *Ik Po* (Surakarta, 1904), *Djawa Tengah* (Semarang, 1909), dan *Sin Po* (Batavia, 1910). Pers milik orang Cina peranakan itu menawarkan lahan pekerjaan baru bagi



Surat Kabar "Slomporet Melayu", Sumber : Ahmad Adam, *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan*; Jakarta: Hasta Mitra, 2003

golongan intelektual bumiputera di kota-kota yang tidak suka bekerja sebagai pangreh praja. Bagi golongan intelektual bumiputera, pers Cina peranakan yang menggunakan bahasa Melayu itu memiliki arti penting sebagai media untuk menyebarluaskan ide-ide mereka. Menurut Heather Sutherland, pers Cina peranakan menjadi model bagi pers bumiputera, dan memberikan pengalaman profesional bagi orang-orang bumiputera sebagai editor dan reporter.¹⁴

1) Pers Bumiputera

Setelah orang-orang Belanda dan Cina memelopori usaha dalam bidang penerbitan pers, orang bumiputera juga tergugah untuk terjun dalam

bidang jurnalistik, terutama setelah berdiri organisasi-organisasi yang bersifat kebangsaan dan keagamaan. R.M. Koesoemo Oetoyo dapat disebut sebagai orang Jawa pertama yang menerbitkan surat kabar. *Pewarta Prijaji*. Surat kabar ini terbit untuk pertama kalinya pada pertengahan tahun 1900.

Surat kabar *Pewarta Priyayi* memuat artikel yang berhubungan dengan dunia priyayi. Isi *Pewarta Prijaji* mendorong masyarakat priyayi agar mengetahui berbagai aturan yang harus dijalankan baik oleh kalangan priyayi sendiri maupun untuk masyarakat umum, menambah pengetahuan para priyayi sebagai bekal menjalankan tugas sebagai pegawai pangreh praja, dan hal-hal yang terkait dengan masyarakat dan kebudayaan Jawa. Surat kabar dengan bahasa Melayu rendah ini diterbitkan di Semarang sebagai bulanan. R.M. Koesoemo Oetoyo memegang pimpinan redaksi dan editor utama. Di halaman muka tertulis nama surat kabar itu dalam huruf kapital: PEWARTA PRIJAJI. Di bawahnya ditulis keterangan: "*Soerat kabar Boelanan, aken bergoena Prijaji Djawa di Poelo Djawa dan Madoera. Redacteur: Raden Mas Oetoyo, Djoeroebasa Djawa di Soerakarta, Dikaloewarkan dan ditjatak di Semarang-Drukkerij en Boekhandel Directeur P.A. van Asperen van der Velde.*" Surat kabar ini berhenti terbit pada pertengahan tahun 1903, karena pemimpin redaksinya terlampau sibuk dengan jabatan barunya sebagai Bupati Ngawi.

Medan Prijaji merupakan media bagi orang bumiputera untuk mengekspresikan pandangan-pandangannya tentang kesejahteraan dan pendidikan rakyat bumiputera, saluran untuk menyampaikan kritik terhadap golongan priyayi yang korup dan pegawai negeri yang mengeksploitasi *wong cilik* atau rakyat jelata.¹⁵ *Medan Prijaji* merekrut jurnalis-jurnalis yang telah berpengalaman untuk staf redaksinya, yaitu Martodarsono, G. Gandawinoto, dan Marco Kartodikromo. Karena kritik-kritiknya yang keras terhadap pemerintah kolonial, pada Maret 1910 Tirtoadisoejo diasingkan selama 2 bulan ke Teluk Betung, Lampung.¹⁶ Setelah kembali dari pengasingannya, Tirtoadisoejo kembali bekerja sebagai kepala editor *Medan Priyayi*. Karena Tirtoadisoejo masih terus melancarkan kritik-kritik tajam terhadap pemerintah kolonial, *Medan Prijaji* harus dihentikan penerbitannya pada tahun 1912.

Sejak Budi Utomo berdiri pada tahun 1908, pers menjadi alat untuk mengungkapkan perasaan bangsa yang dijajah itu. Pembentukan Budi Utomo segera disusul oleh pendirian organisasi-organisasi lainnya, terutama Sarekat Islam, Indische Partij dan Partai Komunis Hindia (PKI) yang masing-masing menerbitkan surat kabar sebagai "corong" organisasi.

Sarekat Islam Surabaya menerbitkan *Oetoesan Hindia* (1913-1923) setelah Kongres Sarekat Islam pada tanggal 26 Januari 1913. Redaktornya adalah H.O.S. Tjokroaminoto, Sosroboto, dan Tirtodanoedjo. Sebagai "corong" Sarekat Islam, *Oetoesan Hindia* menyuarakan Islamisme dan bersifat radikal nasionalistis. Pada tahun 1923, *Oetoesan Hindia* terpaksa menghentikan penerbitannya, karena terjadi perselisihan internal dalam Sarekat Islam, dan banyak pelanggan yang tidak membayar uang langganan.

Oetoesan Hindia bukan satu-satunya media Sarekat Islam. Sarekat Islam Surakarta menerbitkan *Sarotomo*, dan Sarekat Islam Betawi memiliki *Pantjaran Warta*. Sarekat Islam Semarang memiliki harian *Sinar Djawa* (1914-1918), yang kemudian bernama *Sinar Hindia* (1918-1924). Harian ini diwarnai oleh kritik-kritik tajam para jurnalis dan redaktornya seperti Semaoen, Darsono, dan Marco Kartodikromo. Pemerintah kolonial mewaspadaikan *Sinar Hindia* sebagai surat kabar ekstrimis. Sarekat Islam Cilacap mempunyai organ *Pantja Indra* (1916-1917), dan Sarekat Islam Sokaraja, Banyumas, mempunyai *Perasaan* (1919).

Indische Partij, yang berdiri pada tahun 1912 dan dibubarkan pada tahun itu juga, memiliki *Het Tijdschrift* dan *De Expres*. Redaktornya yang terkenal adalah E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangoekoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat. Kedua surat kabar itu berbahasa Belanda, dan mengekspresikan cita-cita untuk mencapai kesatuan dan kemerdekaan Indonesia. Karena sikap politik ini, Douwes Dekker, Tjipto Mangoekoesoemo, dan Suwardi Soerjaningrat diasingkan ke negeri Belanda pada tahun 1913. Dari Belanda, mereka tetap melakukan perjuangan politik dan jurnalistik.

Setelah Partai Komunis Hindia (PKI) berdiri pada tahun 1920, khasanah pers Indonesia semakin beragam karena munculnya surat kabar milik PKI dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya. Pada tahun 1925 terdapat lebih dari 20 penerbitan PKI di berbagai kota.

Pada pertengahan dekade ke-2 abad ke-20, pers bumiputera semakin menunjukkan warna ke-Indonesiaannya. Pada tahun 1924, para mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda menerbitkan surat kabar dengan nama yang mengekspresikan nasionalisme Indonesia secara jelas yaitu *Indonesia Merdeka*.

Pada 1900-an hasrat akan kemajuan yang telah dimulai kurang lebih pada dasawarsa terakhir abad sebelumnya, telah mewujudkan dalam bentuk tumbuhnya masyarakat koperasi yang mendirikan toko-toko priayi di

beberapa tempat. Jika pada dasawarsa terakhir abad ke 19 beberapa kelompok dan asosiasi kecil lokal dibentuk oleh kalangan priayi dan guru, pada 1900 kebutuhan akan organisasi masyarakat Jawa yang lebih besar dan beranggotakan kelompok yang lebih luas lebih dirasakan lagi oleh kalangan elit kaum pribumi. Dalam sebuah artikel di *Pewartu Priayi*, R.M. Tjokroadikoesoemo mendorong agar para pemuka priayi mendirikan sebuah organisasi Jawa yang dapat menggali soal persatuan Jawa, kerja sama saling menguntungkan, pengembangan pendidikan, mendorong priayi Jawa agar menghargai profesi di bidang pertanian dan perdagangan, mendorong semangat belajar, memupuk minat membaca surat kabar dan buku, serta memungkinkan orang Jawa mengerti kewajiban mereka terhadap masyarakat dan pemerintah. R.M. Tjokroadisurjo juga mengusulkan kendati orang Belanda dan Jawa bisa menjadi anggota, pemimpin organisasi ini seyogyanya bupati, patih atau wedana.

Kepedulian akan kemajuan yang sangat mempengaruhi masyarakat Hindia Belanda memberi Brousson ide mendirikan majalah yang bisa menjadi juru bicara intelektual baru itu. Pada pertengahan 1902, Brousson membuat kesepakatan dengan Abdul Rivai untuk menerbitkan sebuah majalah bergambar di Belanda untuk diedarkan di Hindia Belanda¹⁷.

Pada Juli 1902, *Bintang Hindia* terbit untuk pertama kali didirikan oleh Brousson dan Abdul Rivai di Negeri Belanda. Atas usaha Brousson dalam mempertahankan bantuan dari pemerintah justru menjadikan *Bintang Hindia* lembaga separuh resmi milik pemerintah pada tahun ketiga kehadirannya. Ketika *Bintang Hindia* diluncurkan pada akhir 1902, Abdul Rivai sedang bersiap untuk ujian masuk sekolah kedokteran di Amsterdam, pada saat yang sama ia juga sedang menunggu keputusan dari Kementerian Jajahan yang pada 5 November 1899 ia surati untuk meminta penjelasan mengenai kemungkinan dirinya dan lulusan Sekolah Dokter Jawa lainnya dibebaskan dari ujian itu. Selama di Amsterdam, sebagaimana Brousson, Rivai juga dihubungkan dengan kepemimpinan *Algemeen Nederlandsch Verbond* dan *Vereeniging Oost en West*. Dua organisasi yang beranggotakan mantan pejabat Belanda yang pernah bertugas di Hindia Belanda ini dikenal sebagai penyokong utama politik etis. Dari merekalah biasanya Brousson memperoleh bantuan. Pada akhir 1902, dewan pimpinan kedua asosiasi ini menyurati Kementerian Jajahan mendesak pemerintah agar menyokong *Bintang Hindia* yang bertujuan: mempromosikan pertumbuhan kebudayaan pribumi dan memperkuat ikatan antara Belanda dan wilayah jajahannya.¹⁸

Abdul Rivai menulis bahwa majalah dua mingguan ini yang ia sebut *soerat tjerita* mempunyai tujuan ambisius dan mulia untuk memajukan pengetahuan rakyat Hindia Belanda hingga mereka bisa mencapai status bangsawan pikiran. Seruan Rivai ini diulang oleh orang Indonesia lain di jajaran redaksi *Bintang Hindia*, Raden Koesomo Joedha yang mendorong orang Jawa khususnya supaya menjadi pembaca dan menjadi pelanggan *Bintang Hindia*. Namun dalam edisi contoh ini Rivai menyebutkan majalah ini ditujukan bagi pembaca dari seluruh lapisan masyarakat di Hindia Belanda. *Bintang Hindia* ditujukan bagi para aristokrat, kaum pribumi, Arab, pegawai Tionghoa, juga kalangan militer di Yogyakarta, Solo, Madura, Ambon, Ternate dan Banda serta kalangan pedagang, siswa sekolah pimpinan, sekolah guru, sekolah Dokter Jawa dan seluruh pegawai lainnya. Untuk memikat para pembaca Arab dan Tionghoa, Rivai berjanji akan menerbitkan artikel dan berita mengenai Timur Tengah dan Tiongkok, sementara untuk memenuhi kebutuhan pembaca yang ingin belajar bahasa Belanda ia juga memuat beberapa artikel dalam bahasa Belanda. Bagi Rivai, penerbitan *Bintang Hindia* bukan terutama didorong oleh kepentingan komersial. Dicitak dengan kertas sangat berkualitas harga langganan *Bintang Hindia* hanya 3 gulden pertahun tentu paling murah selama kurun waktu itu. Malah sebaliknya sungguh-sungguh tulus hendak menjadikan berkala ini medium untuk menyuarakan ide-idenya mengenai kemajuan kehidupan moral dan sosial bangsa Indonesia. Clockener Brousson juga mempunyai motivasi mulia ketika meluncurkan terbitan ini. Sebagai seorang idealis yang romantis, ia adalah propagandis etis tulen yang bersemangat, yang berkeinginan menumbuhkan jembatan persahabatan dan kesetiaan rakyat Indonesia pada Belanda dan ratunya.

Dilihat dari isinya, *Bintang Hindia* jelas merupakan majalah berilustrasi pertama yang lewat artikel dan ilustrasinya memberi kesadaran dan dedahan mengenai dunia di luar Hindia Belanda kepada para pembacanya. Sejak terbitan pertamanya 1902, Abdul Rivai telah memberi kesan pada para pembaca mengenai perlunya berubah ke cara hidup yang lebih modern. Dalam artikelnya tentang 'bangsawan pikiran' yang belakangan menjadi slogan di antara generasi yang lebih muda dalam gerakan modernisasi dan kemajuan di Hindia Belanda Abdul Rivai menulis:

Bila kita bandingkan bangsa Hindia dengan bangsa kulit putih maka pelbagai perbedaan, bahkan seperti bumi dan langit. Di Eropa ada dua jenis bangsawan:

Bangsawan usul dan bangsawan pikiran. Bangsawan usul terjadi karena sudah takdir, jika nenek moyang adalah bangsawan maka keturunannya menjadi bangsawan pula. Itulah bangsawan usul. Meskipun pengetahuan dan kepandaianya seperti kodok dalam tempurung. Sedangkan bangsawan pikiran didapat dengan cara belajar dan mempelajari sendiri sekalian pikiran dan pendapat orang-orang yang berilmu dari pasal yang telah dipelajarinya dan dari perkara-perkara lain yang patut diketahui oleh segala orang yang berpelajaran.¹⁹

Penggolongan Rivai atas intelektual sebagai bangsawan pikiran menunjukkan bahwa ia menempatkan kaum terpelajar Indonesia dalam posisi yang sangat penting dalam memimpin bangsanya menuju kemajuan. Rivai membandingkan kelompok ini yang dikatakan akan segera bertambah di Hindia Belanda dengan pasukan tempur bersenjata. Dengan menyebut bahwa bangsa Eropa telah bersenjata, Rivai mengimbau kaum muda pribumi agar mempersenjatai diri mereka:

Musuh yang bersenjata itu hanyalah boleh dilawan oleh musuh, yang bersenjata pula. Demikian juga ilmu dan kepandaian itu hanyalah cakap dilawan dengan ilmu kepandaian...

Walaupun imbauan kepada kaum pribumi untuk mengejar kemajuan menyiratkan bahwa mereka harus bersiap-siap menantang bangsa-bangsa Eropa, Rivai mengemukakannya dalam pengucapan yang ambigu yakni dibarengi pujian atas usaha pemerintah meningkatkan jumlah sekolah-sekolah bagi kaum pribumi. Meskipun demikian pesan Rivai sangat jelas:

Karena bangsa asing di Hindia bangsa, Bangsawan pikiran belaka maka wajiblah bumi putera tanah itupun bangsawan pikiran jika ia hendak: diukur sama panjang, ditimbang sama berat'

Lewat *Bintang Hindia*, Rivai juga mempopulerkan istilah kaum muda yang didefinisikan sebagai:

Semua orang Hindia (tua dan muda) yang tidak suka lagi mengambil aturan kuno, adat kuno kebiasaan kuno tetapi yang mau memuliakan diri dengan pengetahuan dan ilmu. Disisi lain istilah 'kaum tua' atau 'kaum kuno' ia

tujukan pada mereka yang terobsesi pada kemuliaan (gila hormat) dan adat Jawa sembah dan jongkok. Alam analisisnya tentang masyarakat Indonesia, Rivai merasa ada tiga kelompok yang sangat berbeda orang awam, bangsawan usul dan bangsawan pikiran. Dari ketiganya ia yakin hanya kelompok terakhirlah yang bisa memimpin proses modernisasi masyarakat. Pada 1905, Rivai mengusulkan pembentukan sebuah organisasi besar kaum pribumi yang bisa menyatukan seluruh kaum muda atau elemen progresif. Organisasi itu diusulkan bernama Perhimpunan Kaoem Moeda, harus berusaha mendirikan cabang di berbagai kota dan daerah untuk membaca kebutuhan kaum pribumi²⁰. Dalam usulannya ini, Rivai memberi contoh kaum Tionghoa yang menurut dia telah berhasil mendirikan perhimpunan kaum muda sendiri, yaitu Tiong Hoa Hwee Koan. Ide untuk membentuk organisasi semacam itu memberi pertanda pembentukan Boedi Oetomo tiga tahun kemudian.

Seperti BO organisasi yang dibayangkan Rivai meletakkan pendidikan dan pengajaran sebagai program utama dalam mengejar kemajuan. Tetapi sebenarnya masyarakat Tionghoa dan Tiong Hoa Hwee Koan-lah yang sangat mempengaruhi Abdul Rivai hingga ia mengusulkan agar gerakan serupa diluncurkan oleh para cerdik pandai bangsa Indonesia. Pada 1903 orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda telah diijinkan memotong kuncir mereka dan berpakaian seperti bangsa Eropa. Kekaguman Rivai terhadap kemajuan bangsa Tionghoa mendorong dia mendukung tuntutan mereka agar pemerintah membuka fasilitas pendidikan bagi anak-anak mereka. Pada 1906 pemerintah di negeri Belanda menyambut kedatangan misi Tionghok. Mengomentari hal itu, Rivai menyebut bahwa orang Tionghoa telah beradab, ia kemudian bertanya, 'akankah kaum pribumi mencapai status serupa?' dalam sebuah tulisan bersambung mengenai kebangkitan bangsa Tionghoa, Rivai menekankan bahwa kaum mudalah yang memimpin Tionghoa peranakan. Kekagumannya pada gerakan modernis bangsa Tionghoa menyebabkan Rivai berulang kali mendesak kawan-kawannya dan bangsa Indonesia untuk menyamai orang-orang Tionghoa yang terbaratkan.

Bagi bangsa Indonesia, Bintang Hindia adalah pembuka mata yang mendorong mereka mengubah sikap dan nilai tradisional menjadi lebih modern dan kebaratan. Rivai memang dipandang sebagai penggagas utama ide-ide baru itu dan merupakan penemu istilah 'kaum muda' dan majalahnya juga memuat tulisan para intelektual Indonesia dan Tionghoa yang berbagi cita-cita yang sama dengan apa yang didengungkan Rivai. Artikel dan ilustrasi dalam majalah ini meliputi subyek yang sangat beragam.

Tulisan Rivai yang memberi semangat untuk bangkit dari tidur panjang mendorong kalangan intelektual yang baru muncul untuk membaca *Bintang Hindia*. Kendati punya citra sebagai berkala yang disponsori pemerintah, *Bintang Hindia* berhasil menarik perhatian kaum terpelajar, para guru, pejabat priyayi dan siswa dalam polemik mengenai tradisi dan perubahan dalam masyarakat pribumi. Bagi banyak orang Indonesia *Bintang Hindia* satu-satunya penerbit intelektual sejati pada masa itu, mengekspresikan sentiment yang telah mereka rasakan sejak lama. Dalam pidato yang disampaikan ketua BO cabang Bondowoso pada 1909, *Bintang Hindia* dan Abdul Rivai disebut-sebut sebagai pelopor dalam hal menyuarakan perlunya bangsa Indonesia membentuk sebuah organisasi seperti Tiong Hoa Hwee Koan.

Meskipun begitu, menjelang akhir 1906 kelangsungan hidup *Bintang Hindia* terlihat tak jelas. Pada Agustus 1906, surat edaran 6 November 1905, yang meminta para pejabat pemerintah menyokong majalah ini telah ditarik, begitu pula fasilitas bebas biaya pos. Abdul Rivai, pemimpin redaksi yang melakukan sebagian besar tugasnya di Belanda, sudah makin sibuk dengan studinya. Apalagi timbul perselisihan antara Rivai dan Brousson mengenai orientasi yang harus dipilih *Bintang Hindia*. Rivai ingin isi majalah ini berwatak politis dan menggunakan bahasa yang dekat Melayu Rendah. Keluarnya Rivai dari jajaran dewan redaksi pada Juni 1907, untuk berkonsentrasi pada studi kedokterannya, merupakan akhir dari *Bintang Hindia* yang edisi terakhirnya terbit pada 15 Juni 1907. Karena Brousson belum bisa melunasi pinjaman dari pemerintah, ia pun menerbitkan *Bandera Wolanda* pada 1908 sebagai pelanjut *Bintang Hindia*. JE Tehupeiort menjadi pemimpin redaksinya dan sebagaimana *Bintang Hindia*, *Bandera Wolanda* juga merupakan majalah dengan ilustrasi yang diterbitkan NJ Boon Press di Amsterdam²¹.

PADA awal abad 20 jumlah kaum pribumi yang bekerja sebagai koresponden dan *typesetter* juga makin banyak bukanlah hal tak biasa jika para *typesetter* menyumbangkan artikel ke surat kabar tempat mereka bekerja. Ada empat belas surat kabar dan enam berkala yang beredar di Hindia Belanda pada 1900. Lima surat kabar berkala berbahasa anak negeri terbit harian. Tetapi hampir semua surat kabar itu hanya melayani pembaca Tionghoa serta menerbitkan berita dan artikel yang disesuaikan dengan selera warga Tionghoa. Bangkitnya kesadaran ke-tionghoa-an yang ditandai dengan pembentukan Tiong Hoa Hwee Koan rupanya mendorong kaum Tionghoa peranakan berlangganan surat kabar. Persaingan di antara

para penerbit dan editor untuk merebut pembaca Tionghoa yang jumlahnya terus meningkat ini menjadi intens. Para penerbit pribumi pun karenanya harus berupaya merebut pembaca dari kalangan non pribumi. Karena itu tak mengherankan ketika berkala pertama milik pribumi, *Soenda Berita* terbit perdana pada 17 Agustus 1903, penerbit dan editornya Raden Mas Tirta Adhi Soerjo mengumumkan bahwa 20 persen keuntungan iklan yang diperoleh akan disumbangkan ke badan-badan sosial. Tujuan Tirta ini jelas untuk meraih pelanggan dan pemasang iklan di kalangan Tionghoa, Indo dan juga Eropa di luar pembaca pribumi. Namun isi berkala ini tetap mengutamakan kepentingan kaum pribumi. Ketergantungan pers pada pelanggan Tionghoa dan Indo diakui oleh Tirta Adhi Soerjo sendiri.

Marco Kartodikromo

"Brani karena benar takut karena salah".

Semboyan Mas Marco Kartodikromo di atas memberi pesan atas keberanian melakukan perlawanan dan menerima konsekuensi dari apa yang diperjuangkannya benar. Nama Marco Kartodikromo dalam sejarah tokoh bangsa Indonesia kurang populer dan mungkin dilupakan. Sejarah merekam jejak Marco Kartodikromo atas kiprahnya dalam pers yang dimuat dalam *Hidoep* tahun 1924-1925. Rekonstruksi pemikiran Marco Kartodikromo ini dibuat berdasarkan karya intelektualnya dalam bentuk novel, syair, dan sajak yang dimuat dalam *Hidoep* dan *Suara India* di mana Marco Kartodikromo menorehkan senjatanya sebagai pejuang kemerdekaan. Dalam sumber tersebut diketahui karya Marco Kartodikromo, diantaranya *Mata Gelap*, *Student Hidjo*, *Sair Sama Rasa dan Sama Rata*, *Babat Tanah Djawa*, *Sajak Badjak Laoet*, dan *Matahariah atau Kromo Bergerak*. Marco berhasil dengan tujuannya dengan melalui pendidikan untuk melakukan penyadaran massa khususnya masyarakat Jawa. Marco Kartodikromo kalau boleh dikatakan dapat disejajarkan dengan tokoh sekelas Tjipto Mangunkusumo dan Dr. Soetomo.²² Marco adalah salah satu tokoh perintis gagasan kebangsaan. Marco Kartodikromo lahir di Cepu pada 25 Maret 1879. Marco Kartodikromo lahir dari keluarga priyayi rendahan di Cepu. Marco Kartodikromo lulus dari sekolah Bumi Putra Angka Dua di Bojonegoro dan sekolah swasta Bumiputra Belanda di Purworejo. Ia kemudian memasuki dinas kehutanan sebagai juru tulis rendah sekitar 1905. Tidak lama kemudian, ia pindah ke Semarang dan menjadi juru tulis di NIS,

sambil belajar bahasa Belanda dari seorang Belanda yang menjadi guru privatnya.²³

Pada masa muda, Marco Kartodikromo bergabung dengan angkatan Muda Solo dan bekerja sebagai jurnalis. Marco Kartodikromo meninggal pada tahun 1932 di kamp konsentrasi Digul (Irian). Marco Kartodikromo meninggal dalam masa pembuangannya oleh pemerintah kolonial Belanda. Marco meninggal karena menderita penyakit paru-paru. Untuk menelusuri jejak Marco Kartodikromo bahan yang digunakan adalah surat kabar dan tulisan lain yang relevan.

Ketika pemerintah kolonial Belanda membuka investasi modal asing di Indonesia, dampak ikutan dari investasi itu salah satunya adalah dalam bentuk produk gagasan. Produk gagasan itu antara lain, novel, surat kabar, jurnal, buku, teater, lagu, dan sejenisnya mengalir ke Indonesia dan mempengaruhi alam pikiran masyarakat pribumi, termasuk ke kalangan kaum bangsawan yang pada periode itu menjadi salah satu konsumen arus informasi itu.

Kehadiran kereta api yang menghubungkan berbagai kota-kota besar di Jawa juga ikut mempercepat arus produk gagasan itu mengalir ke berbagai lapisan sosial. Bagi mereka yang berpendidikan, produk gagasan itu menjadi referensi utama untuk mengisi berbagai informasi terhadap dunia luar. Belajar dari produk gagasan itu, beberapa tokoh seperti Marco Kartodikromo mengambil posisi dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Marco Kartodikromo sadar betul bahwa tulisan-tulisan Belanda telah memainkan peranan dalam merubah imajinasi rakyat Indonesia dengan struktur sosial yang dibuat sendiri dan menempatkan orang-orang pribumi secara berbeda. Belanda adalah struktur sosial tersendiri dan berbeda dengan orang-orang pribumi sebagaimana tertulis dalam Babad Tanah Djawa yang diterjemahkan oleh Lembaga Javanologi Belanda. Marco Kartodikromo kemudian merekonstruksi Babad Tanah Djawa tersebut dengan mengatakan bahwa pemaknaan terhadap apa yang dilakukan Belanda pada karya tersebut adalah potret kekalahan budaya Jawa yang kompromis. Oleh karena itu, tinjauan kritis yang koheren terhadap dunia dan sejarah orang-orang Jawa perlu dilawan.²⁴ Termasuk di dalam pemikiran mereka tentang kenyataan betapa beratnya tantangan yang dihadapi dan bagaimana cara menghadapinya.

2) Seting Sosial Kehidupan Marco Kartodikromo

Perubahan hubungan kerja ke sistem industrial ternyata membawa implikasi pada lahirnya mobilitas sosial. Perubahan ini terjadi ketika sistem tanam paksa dihapus pada awal abad XX. Kerja rodi juga dihapus sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran sosial dalam tatanan struktur sosial masyarakat Jawa. Salah satu perubahan pada tatanan sosial masyarakat Jawa adalah adanya kaum ningrat tinggi dari bangsawan keraton yang sebelumnya sangat dihormati pelan-pelan mulai ditinggalkan. Kaum muda yang berasal dari kelas sosial bangsawan rendah ingin menjadi pegawai dan menduduki jabatan negeri. Kaum muda memasuki sekolah-sekolah yang ada di kota-kota terutama ketika desa-desa mulai terbebas dari kerja rodi. Kelompok sosial ini mencari pekerjaan apa saja yang ada di kota sehingga memperoleh pengalaman yang beragam, termasuk Marco muda. Pengalaman inilah yang tidak dimiliki oleh kaum ningrat tinggi yang lahir sebelumnya. Kelompok anak-anak muda itu berkenalan dengan dunia dan cara modern di kota. Listrik, tenaga uap, bensin, dan menjadi montir yang ahli adalah bahagian dari kehidupan mereka di kota. Kehidupan anak muda ini jauh lebih bebas ketimbang anak ningrat yang sebelumnya harus disembah-sembah.

Dalam kehidupan kota, membangun jembatan, menjadi pekerja rendah, bekerja sebagai penggerak mesin mobil, membuat bendungan dari beton, ikut menjadi pekerja pabrik, membuka bengkel adalah keseharian yang mewarnai pengalaman anak muda pada tahun 1900an khususnya di kota-kota kerjaan seperti di Solo. Pekerjaan ini menjadi pelengkap *setting sosial* yang melahirkan perubahan tatanan sosial masyarakat Jawa yang ada di istana dengan yang ada di desa dan kota.

Marco Kartodikromo dalam perjalanan sosialnya dimulai dari seting seperti itu, yakni bergabung dengan anak-anak muda Solo, Jawa Tengah. Mereka disebut dengan Angkatan Muda yang mau bekerja dengan kelompok angkatan muda. Angkatan muda ini juga bekerja dalam dunia jurnalistik dengan cara magang. Mereka magang jurnalistik Indo dan Cina. Pada perkembangannya, anak-anak muda itu menjadi editor dan menulis artikel sendiri dan memberikan komentar-komentar pada surat pembaca dan kemudian menyuntingnya. Dengan pekerjaan seperti itu, pembaca media mereka adalah kaum pergerakan dan sebagian besar adalah anak-anak muda pribumi. Media koran tentu menjadi alat efektif dalam menyampaikan pesan tentang jaman yang sudah berubah dan adanya penindasan

kolonialisme. Melalui Koran, pembaca bisa diajak mulai dari rakyat sampai kaum kromo untuk melawan penjajah.

Dalam kaitan itu, Marco Kartodikromo pernah mengatakan bahwa kapitalis Eropa, dia sudah sama bersepakat dengan bangsanya kapitalis alias membikin *Maatschappij* yang besar-besar, dan akalnya manggaroek oeang, yaitoe menghisap darahnya kromo, sudah amat pintar sekali. Pernyataan Marco Kartodikromo jelas menunjuk pada upaya penyadaran kaum kromo sesegera mungkin untuk menyadari tentang kolonialisme yang selalu merugikan bangsa Indonesia.

Dalam pandangan Marco Kartodikromo, kaum pergerakan dalam menentang penjajah tantangannya sangat besar, karena selain berasal dari anak muda yang memiliki kekayaan dan memihak pada penjajah yang juga ikut menindas bangsanya sendiri. Sebenarnya mereka itu seharusnya memiliki surat kabar sendiri yang dibaca oleh kaum muda. Kaum pergerakan tidak kritis membaca surat kabar kaum pemodal, karena tidak melacak kepentingan-kepentingan pemilik modal yang terkandung dalam surat kabar tersebut. Untuk itu, Marco Kartodikromo mengajak melakukan perang pena di surat kabar untuk membuka mata kaum bumi putra terhadap tatanan kekuasaan kolonial sekaligus untuk menjelaskan mana yang benar-benar bersih dan kotor. Dalam kerangka itu diperlukan bacaan-bacaan politik agar kaum kromo mengetahui, memahami dan menyadari politik penguasa kolonial.

3) Pena Politik Marco Kartodikromo

Di jaman yang belum populernya komputer dan mesin ketik untuk menulis adalah pena. Pena inilah yang mengintegrasikan pikiran yang diwujudkan dalam bentuk rangkaian kata dan kalimat untuk menyampaikan maksud penulisnya, dalam hal ini adalah Marco Kartodikromo. Bagaimana Marco Kartodikromo menggunakan penanya sebagai senjata untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya? Tulisan ini akan memaparkan tulisan-tulisan pena Marco Kartodikromo dalam menentang kolonialisme.

Oleh karena basis perjuangan Marco Kartodikromo adalah pers atau pemikiran, maka senjata ampuhnya adalah tulisan/karya. Untuk memahami itu perlu ditelusuri teks yang sudah dihasilkan dan menelaah alur cerita, karkter, dan pilihan diksi yang digunakan. Hal ini penting karena

posisi Marco Kartodikromo berada di tengah kekuasaan kolonial yang sewaktu-waktu menenggelamkan perjuangannya.

Salah satu tulisan Marco Kartodikromo yang terkenal adalah novel berjudul *Mata Gelap*. Seting tulisan adalah kota Semarang dan Bandung. Dalam tulisan ini Marco Kartodikromo melukiskan kondisi masyarakat kolonial yang memiliki tradisi baru, yakni senang membaca Koran, hidup bebas, dan senang berlibur. Jika pilihan diksi itu ditelaah lebih jauh, maka dengan mudah kita bisa mengatakan bahwa kolonial telah mampu mengenalkan kebudayaan baru pada warga bumi putera. Akan tetapi, persoalan sesungguhnya adalah terjadinya demoralisasi dan dekadensi yang terjadi pada masyarakat kota Semarang dan Bandung yakni persoalan hidup bebas yang mengancam persoalan moral bangsa Indonesia. Selain itu, dipilihnya Bandung dan Semarang menjadi menarik karena Bandung tidak saja menjadi salah satu pusat kereta api yang menjadi simbol transportasi modern pada waktu itu, tetapi juga karena Bandung adalah tempat liburan/plesiran dan pusat perkembangan modernitas dalam hal gaya hidup yang merasuk pada pegawai rendahan pribumi. Kegemaran baru warga pribumi tidak lepas dari pengaruh kolonial yang membawa modernitas termasuk dalam hal membaca novel, koran, buku, dan lain sebagainya. Semarang dipilih karena fungsi kota pelabuhan Semarang yang berkembang pada periode itu bersama-sama dengan Surabaya dan Makassar. Kekhawatiran Marco pada perkembangan politik pintu terbuka kolonial Belanda menjadi alasan lain yang terselip di benak Marco Kartodikromo ketika memilih Semarang sebagai realitas dalam novelnya.

Dalam karyanya yang berjudul *Student Hidjo*, Marco Kartodikromo menceritakan dilema pelajar HBS yang melanjutkan pendidikannya di negeri Belanda. Sebagaimana umumnya, pelajar jaman dulu masih muda sudah memiliki kekasih. Umumnya pelajar pada waktu itu sudah memiliki kekasih. Dalam perjalanannya, pelajar HBS ini kemudian tertarik dengan gadis Belanda. Karya ini juga menjadi ruang perjuangan Marco Kartodikromo untuk menggugah kesadaran pelajar tentang pentingnya memantapkan tujuan melawan kolonialisme. Hal ini juga dilakukan Marco Kartodikromo dalam karyanya *Sair Sama Rasa dan Sama Rata*. Adapun sebagian dari teks dari syair itu adalah;

"Soepaja djalannja SAMA RATA,
Jang berdjalan poen SAMA me RASA,
Enak dan senang bersama-sama,
Ja'toe: "Sama rasa, sama rata."

(Sinar Djawa 10 April 1918)

Kedua karya itu benar-benar digunakan untuk menunjukan betapa Marco Kartodikromo berjuang dengan pengalaman penanya mengungkap ketidak-adilan praktek kolonial terhadap rakyat Jawa pada awal abad XX. Pikiran Marco Kartodikromo dalam karya ini mulai memperlihatkan diksi yang lebih radikal ketika dalam tulisannya menyampaikan dengan jelas pada sub judul dengan "Kejadian yang benar-benar terjadi di tanah Jawa". Ini artinya, Marco Kartodikromo mulai membuka front perlawanan terbuka. Konsekuensinya jelas bagi Marco Kartodikromo penangkapan dan penjara yang ada di dalam pikirannya.

I. Pendidikan dan Pergerakan Perempuan



Perkumpulan Putri Bandung, Sumber : Ahmad Adam, Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan; Jakarta: Hasta Mitra, 2003

Gagasan Kemajuan dari kaum perempuan keluar dari peran tradisional muncul dari sejumlah tokoh lahir pada akhir abad IX sampai awal abad XX. Kaum perempuan yang keluar dari peran tradisional itu adalah R.A. Kartini (Jepara- Jawa Tengah), Dewi Sartika (Jawa Barat) dan El-Yunusiyah (Sumatera Barat). Ketiga tokoh ini pemikirannya akan dikaitkan dengan wacana pemikiran gerakan perempuan yang bermuara pada perdebatan pelaksanaan kongres perempuan I di Yogyakarta pada tahun 1928.

Pelaksana politik etis di Hindia Belanda bidang pendidikan adalah J.H. Abendanon pada tahun 1900 menjadi Direktur Pendidikan di Hindia Timur. Atas bantuan istrinya, sinar pendidikan dipancarkan ke pemuda Indonesia. Abdul Muis yang belakangan diketahui sebagai pemimpin Sarikat Islam adalah salah seorang yang sering berkumpul di Batavia. Suasana ini memberi rangsangan untuk melakukan surat menyurat antara R.A. Kartini, puteri bupati Jepara dengan Abendanon.²⁵ Bermula dari korespondensi inilah cahaya emansipasi wanita Indonesia dimulai dan kemudian berwujud menjadi ide mendirikan sekolah-sekolah keputrian. Sekolah itu kemudian menghasilkan perempuan muda Indonesia yang berpendidikan barat dan bersama-sama dengan para pemuda Indonesia berada dalam suasana kehidupan masyarakat yang berubah. Abendanon dikenal sangat cinta Indonesia, walaupun pada tahun 1904 dikembalikan ke Belanda. Untuk melanjutkan rasa cintanya itu, Abendanon melakukan persahabatan dengan orang-orang Indonesia yang mengikuti pendidikan di negeri Belanda. Abendanon menuntun dan membantu para pelajar Indonesia itu dengan berbagai cara.²⁶

Kartini mempertanyakan, mempersoalkan dan menyaksikan segala sesuatu yang berasal dari tradisi yang dirasakan sendiri dalam kehidupannya di lingkungan keluarga bupati Jepara.²⁷ Kesempatannya bergaul dengan orang-orang Belanda benar-benar membantu kesadaran terhadap masyarakatnya. Kartini mengalami keterkejutan budaya modern. Oleh karena itu Kartini berusaha memperoleh pendidikan dan semangat kemajuan melalui pendidikan.²⁸

Kartini adalah perempuan di dalam dua realitas. Realitas pertama, Kartini hidup dalam alam tradisi masyarakat Jawa Tradisional yang senantiasa membatasi sikap dan tindakan perempuan. Pada saat yang sama, Kartini berinteraksi dengan dunia di luar kehidupannya dunia modernitas yang bertolak belakang dengan realitasnya di dalam kesehariannya di rumah Bupati Jepara.²⁹

Dewi Sartika. Perempuan Lainnya yang juga sebagai salah satu penerobos benteng dominasi kuasa kaum laki-laki adalah Dewi Sartika. Perjuangan Dewi Sartika dalam memajukan kaumnya adalah dengan mendirikan sekolah. "Sekolah Kautamaan Istri" adalah nama sekolah yang dirintis dan didirikan oleh Raden Dewi Sartika. Sekolah itu pula yang dimaknai oleh banyak kalangan sebagai media perjuangan Dewi Sartika dalam kerangka memajukan kaum perempuan di Hindia Belanda.

Dewi Sartika lahir di Bandung pada 4 Desember 1884 dari pasangan Raden Somanagara dan Nyi Raden Rajapermas, yang merupakan keturunan keluarga priyayi Sunda. Dewi Sartika sejak kecil mendapat pendidikan dasar dari orang tuanya dan disekolahkan di sekolah Belanda. Ketika ayahandanya wafat, maka Dewi Sartika kecilpun ikut pamannya seorang Patih di Cicalengka dan Dewi pun melanjutkan pendidikannya di sekolah Belanda, *Lagere School*. Dewi Sartika kecil yang tumbuh perlahan mulai mengambil peran dalam masyarakat. Bila ada waktu senggang, Dewi Sartika menyempatkan diri mengajari baca-tulis pada anak-anak pembantu yang berada lingkungan kepatihan. Dalam proses perjalanan hidupnya, Dewi Sartika mempelajari tentang wawasan kesundaan dari pamannya. Wawasan kebudayaan barat diperoleh dari hasil interaksinya dengan seorang asisten Residen Belanda.

Pada tahun 1904, Dewi mendirikan Sekolah Istri. Sekolah ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat terutama kaum perempuan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, telah menjadikan semangat dan cita-cita untuk terus berupaya agar anak-anak dan kaum perempuan pribumi bisa mendapat kesempatan memperoleh ilmu pengetahuan. Para murid perempuan ini, diajari mulai dari baca-tulis, berhitung, menjahit, merenda, menyulam, dan juga pelajaran agama. Penyelenggaraan sekolah ini tidak berjalan mulus saja karena adanya budaya yang masih bersemayam di kalangan masyarakat, yakni 'pengekangan' kaum perempuan masih kuat dijalankan pada saat itu. Namun upaya yang tak kenal lelah, cita-cita serta kegigihan Dewi Sartika dan mendapat dukungan penuh keluarga, maka sekolah tersebut diwujudkan. Perkembangan sekolah yang diperjuangkan Dewi Sartika kemudian menuai hasil positif. Di antara hasil positif itu adalah didirikannya sekolah Keutamaan Istri di beberapa daerah. Tercatat sembilan sekolah berdiri di Kota Kabupaten di Pasundan. Satu sekolah istri didirikan di Bukit Tinggi Sumatera Barat oleh Encik Rama Saleh. Jika mencermati perubahan nama Sekolah yang dipelopori oleh Dewi Sartika, kita akan menemukan urutannya. Pada 16 Juli 1904 Dewi Sartika mendirikan Sekola Istri atau Perempuan. Sekolah ini berubah lagi pada tahun 1914 menjadi Sekolah Keutamaan Isteri. Pada tahun 1929, nama sekolah diubah lagi menjadi sekolah Raden Dewi. Perubahan itu tentu saja sejalan dengan adaptasi yang terpaksa dilakukan agar tidak dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda.

El-Yunusiyah. El-Yunusiyah adalah penggagas berdirinya lembaga-lembaga pendidikan dan pers di Sumatera Barat. Peran ini merupakan langkah awal kaum perempuan keluar dari kodrat tradisionalnya dan mengambil peran dalam pekerjaan kaum laki-laki. Wacana gerakan perempuan ini menjadi populer dan menarik rakyat banyak untuk mengambil bagian dari gerakan itu. Diselenggarakannya Kongres Perempuan pertama



Kongres Perempuan Indonesia Pertama, Sumber : Ahmad Adam, Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan; Jakarta: Hasta Mitra, 2003

di Yogyakarta pada tahun 1928 menjadi bukti wacana gerakan perempuan telah mengakar sejak ide-ide kemajuan itu dihadirkan.

Salah satu organisasi perempuan yang dikenal luas adalah Isteri Sedar yang berdiri pada tahun 1932. Salah satu tokohnya adalah Suwarni yang menyerukan agar kaum perempuan mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perdebatan tentang isu itu terus terjadi dan salah satunya berasal dari kelompok perempuan merdeka dan kelompok Islam. Mereka berpendapat bahwa “*perempuan pergerakan Indonesia tujuan apa yang mau diambil?*”. Dalam pandangan kelompok itu dikatakan bahwa kongres perempuan hanya membahas keluarga dan sedikit pekerjaan sosial, Pertemuan itu tidak lebih dari pertemuan istri kaum bangsawan yang tidak punya pekerjaan sehingga mengadakan kumpul-kumpul, makan-makan dan pergi tamasya sambil membicarakan cita-cita mereka “menjadi rumah tangga yang sempurna” yakni:

Tjita-tjitanya hanya ingin menjadi pengisi rumah tangga yang sempurna, dengan perkataan kasar: menjadi toekang masak, menyulam, dan menjahit yang lebih sempurna. Pendidikan anak-anak Ta'dibitjarakan, sedang oentoek pendidikan iboe-iboe ada terpenting sekali....Untoek rakjat Indonesia, perhimpunan-perhimpunan ini tak berguna sekalipun karena tidak mempengaruhi nasibnya kaum istri kita, tidak menuju kearah kemerdekaan dan kesatuan kaum perempuan hanya untuk memenuhi harinya atau untuk menyenangkan hatinya saja"³⁰

Kesadaran Berorganisasi sebagai simbol Kemajuan.

Pax Neerlandica adalah paket kebijakan dengan tujuan menciptakan keamanan yang dijalankan dalam kerangka implementasi politik etis di Hindia Belanda. Paket kebijakan dijalankan oleh Gubernur Jenderal J.B. van Heutz pada tahun 1904-1909. Pax Neerlandica lahir dari situasi pergolakan yang terjadi di beberapa daerah yang tak kunjung selesai. Kebijakan ini tujuan utamanya adalah menciptakan Hindia Belanda sebagai daerah yang aman, tertib, dan damai. Di tengah situasi dan upaya menciptakan kemandirian dan ketertiban itulah, organisasi Boedi Oetomo secara resmi berdiri pada 20 Mei 1908. Boedi Oetomo lahir karena meningkatnya kesadaran menjadi sebuah bangsa hindia yang merdeka. Kelahiran Boedi Oetomo yang digagas oleh Dokter Wahidin Soediro Sudiro Husodo diketahui sebagai redaktur Majalah *Retnodoemilah* yang bekerja sejak tahun 1901. Majalah ini telah menjadi jembatan ide Dokter Wahidin tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat pribumi. Pendidikan menurut dokter Wahidin memperkuat lahirnya kesadaran kebangsaan. Akira Nagazumi menyebutkan bahwa pendidikan kolonial Belanda menjadi kunci kemajuan dalam membangun kesadaran tentang lahirnya nasionalisme Indonesia.³¹

Boedi Oetomo didirikan dengan tujuan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik dan perusahaan. Tujuan lainnya sebagaimana tertera pada hasil Kongres I pada bulan Oktober 1908 di Yogyakarta adalah memajukan kesenian dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pribumi untuk mencapai kesejahteraan bagi kehidupan rakyat serta mempejuangkan cita-cita kemanusiaan secara universal.³²

Pada tahun 1906, Dokter Wahidin mengeluarkan gagasan tentang pemberian beasiswa bagi anak-anak pribumi yang pandai. Sasaran dari ide Wahidin ini adalah mereka yang bekerja sebagai pegawai kolonial

yang berasal dari penduduk pribumi. Gagasan Wahidin tidak mendapat respon baik dari pegawai kolonial. Akan tetapi, respon yang baik berasal dari para mahasiswa STOVIA. Di antara mahasiswa yang tertarik dengan gagasan beasiswa Dokter Wahidin adalah Soetomo dan Soeraji.

Organisasi BO adalah organisasi yang memiliki perangkat, struktur, dan cabang-cabang yang lengkap. Pada tahun 1909, Boedi Oetomo telah memiliki 40 cabang dengan anggota lebih dari 10.000 orang. Reaksi pemerintah kolonial Belanda terhadap lahirnya organisasi Boedi Oetomo justru disambut baik. Hanya saja, dalam perkembangannya organisasi Boedi Oetomo terseret dalam pusaran politik kolonial, terlepas dari perjuangan organisasi Boedi Oetomo pada pencapaian menuju Indonesia merdeka. Pada tahun 1919 misalnya, Boedi Oetomo masuk pada Dewan Pertahanan Indie yang dibentuk pemerintah Hindia Belanda sebagai respons atas meletusnya perang Dunia I untuk kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah. Organisasi yang bertahan lama adalah organisasi BO, meskipun kemudian organisasi itu dikenal sebagai:

“organisasi orang-orang terpelajar (sebagai seorang dokter, rechter, insinjoer, patih, kandjeng, da serupa itoe, yang kloear dari sekolah pertengahan ataoe tinggi seperti HBS, STOVIA, Asviba, Universiteit, dan sebagainya)” dan “oemoemnya mempoenyai pentjarian penghidoepan jang boleh dibilang tjoekeop, meskipoen boleh dibilang kaja” suatu “pentjarian penghidoepan” yang “hanja bisa didapat dari tangan goepermen atau dari tangannya peroesahaan dan perdagangan besar yang boekan kepoenyannya bangsa sendiri”.³³

Bagi orang-orang pribumi, kelahiran Boedi Oetomo merupakan sebuah langkah maju dalam memperjuangkan kemajuan bangsa dan masyarakat khususnya masyarakat Jawa. Soetomo dalam perkembangannya telah menjadi salah satu pemuda yang memimpin gerakan nasionalis.

Sarikat Islam. Organisasi pergerakan yang ikut menguatkan semangat nasionalisme Indonesia adalah Sarikat Islam (SI). Sarikat Islam lahir dari induk Sarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samahuddin pada tahun 1911. H. Samanhudi adalah seorang pedagang yang berasal dari Laweyan Solo Jawa Tengah. Sarikat Islam lahir pada tahun 1912 di Solo sebagai reaksi atas monopoli perdagangan batik Cina di Lawean Solo.

Orang-orang Cina dalam perdagangannya di Hindia Belanda selalu di bawah perlindungan kolonial Belanda. Jika SI lahir atas respon melawan dominasi Cina dalam perdagangan batik, maka sama saja dengan SI ikut melawan pemerintah kolonial Belanda. SI juga didirikan untuk tujuan melindungi pedagang pribumi dari penguasaan para pedagang Cina. Realitas itu pada kenyataannya melahirkan persaingan antara pedagang pribumi di bawah perlindungan Sarikat Islam dengan para pedagang Cina yang dilindungi oleh pemerintah Hindia Belanda. Dampak dari melawan pemerintah pada akhirnya harus diterima Sarikat Islam berupa pelarangan aktivitasnya.

Sarikat Islam kemudian melanjutkan perjuangannya di Surabaya. Di Surabaya SI berkembang baik di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto. Syarikat Islam Surabaya menggunakan rumah HOS Tjokroaminoto sebagai tempat memikirkan dan merumuskan pergerakan. Sukarno menjuluki rumah HOS Tjokroaminoto dengan sebutan "Dapur Nasionalisme Indonesia".³⁴ tokoh-tokoh yang lahir dari SI yang digembleng di Surabaya ini di antaranya adalah Semaoen, tokoh SI cabang Semarang yang kemudian menjadi tokoh PKI yang sangat terkenal. Selain itu, Sukarmadji Maridjan Kartosuwirjo, tokoh Islam fundamentalis yang menginginkan Negara DI/TII dan lahirnya Negara Islam Indonesia.

Di bawah HOS Tjokroaminoto, SI di Surabaya menggunakan landasan ideologis Islam untuk membangun kesadaran kebangsaan. Islam dimunculkan sebagai *counter* atas perkembangan arus kristenisasi dan melawan ideologi kolonial sebagai penjajah. Tampilnya SI dalam perjuangan dan pemikiran kebangsaan menjadi justifikasi atas adanya pendapat bahwa Islam pada awal abad XX menjadi salah satu kekuatan pembebas dari belenggu penjajah. Pada level ini beberapa pergerakan kebangsaan melawan kolonial Belanda di beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa Tengah, Banten, Aceh, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat menjadi bukti pembenar atas ideologi tersebut.

SI dalam perjuangannya di bawah HOS Tjokroaminoto tidak menggunakan senjata, tetapi melalui bangunan gagasan melawan kolonialisme dengan organisasi sosial politik. Organisasi SI telah mengisi ruang ingatan anak bangsa tentang pentingnya harga diri sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari penindasan serta berbagai kewajiban pajak. Sarikat Islam dalam perkembangannya juga dipengaruhi oleh pemikiran Pan-Islamisme yang berkembang di Mesir. Tokoh pemikir Pan-Islamisme adalah Sayid Jamaluddin Al Afghani. Pemikiran tokoh Mesir itu menawarkan

sosialisme Islam sebagai sosialisme sejati. Sosialisme Islam lebih baik daripada sosialisme Marxis yang cenderung mengingkari keberadaan Tuhan. Bukti adanya pengaruh tradisi pemikiran Mesir dalam tubuh SI diketahui dari HOS Tjokroaminoto. Menurutnya, *“Sosialisme Islam menjadi lebih baik seiring dengan meningkatnya keimanan kaum muslimin dan kian menguatkan rasa persaudaraan sesama muslim”*.

SI pada periode awal terkesan berbagi peran dengan Muhamadiyah karena sama-sama mengusung roh pembaharuan Islam. Perbedaannya terletak pada orientasi ruang peranannya. Muhamadiyah lebih menggarap sosial keagamaan masyarakat, sedangkan SI menggarap segmen politik. Keanggotaan SI juga sangat terbuka dan tidak seperti Budi Utomo yang hanya dimasuki kaum bangsawan dan terdidik.

Raden Mas Adhisurjo, adalah seorang bangsawan yang telah mengalami pergeseran orientasi dari kelas sosialnya. Sejarah mencatat bahwa tiga kali melakukan penolakan atas pekerjaan sebagai pegawai kolonial. Pertama Adhi Surjo menolak tawaran dari Asisten Residen Wolff van Westermde untuk menjadi pegawai dinas pemberantasan lintah darat. Kedua, Adhi Surjo menolak tawaran dari Asisten Residen Bandung untuk menjadi pegawai pajak. Ketiga tidak mau menjadi *Adat Commissie*.

Pekerjaan yang dipilih oleh Raden Mas Adhisurjo adalah menjadi redaktur kepala dan menjadi penanggungjawab surat kabar pemberita Betawi. Pada Januari 1907, Adisurjo menerbitkan sendiri surat kabar itu meskipun dengan format yang sederhana. Ia menerbitkan mingguan *Prijaji*. Mingguan ini dikelola dalam sebuah perusahaan bernama *NV Javasche Boekhandle en Droekkerij en Handel Schiffboefden*, kemudian sebagai organ *Sarekat Prijaji*, sebuah organisasi ekonomi yang didirikan pada tahun 1906. *Sarekat prijaji* didirikan karena terinspirasi dari *Tiong Hoa Hwee Koan* yang didirikan pada tahun 1900 oleh penduduk *Tionghoa*. *Djamiat ul-Khair* adalah organisasi ekonomi yang sama dan didirikan oleh orang-orang Arab pada tanggal 17 Juli 1905. *Sarekat Prijaji* tidak bertahan lama.

Rivai adalah pendahulu Sukarno dan Bung Hatta. Rivai tidak hanya menulis di penerbitan di Indonesia seperti *Bintang Hindia*. Rivai juga menulis di Koran Belanda *Algemeen Handelsblad*, *Indische Gids*, dan *Koloniaal Weekblad*. Rivai tercatat menerbitkan sendirian *pewarta Walanda*. *Pewarta Walanda* tidak bertahan lama karena kurang pembaca dan pembeli. Koran ini oleh Rivai dinilai berhasil karena tulisan-tulisan dimuat di koran-koran Melayu di Hindia. Rivai tiba di Belanda pada tahun 1899.

Rivai sering mengkritik sikap orang-orang Belanda. Kritik Rivai di antaranya adalah tentang perbedaan warna kulit antara orang-orang Hindia yang tinggal di Belanda. Teman-teman Rivai yang terkena dampak dari diskriminasi ini adalah Mas Asmaoen dan Boenjamin. Keduanya menyelesaikan kedokteran di Amsterdam pada tahun 1908. Rintangan rasial ini sulit dihilangkan dan kemudian melahirkan kekecewaan mendalam. Belum lagi tantangan internalnya yang kuat karena mereka juga mengenal ideologi nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Dalam pandangan Rivai, diskriminasi itu tidak terjadi di Belanda.

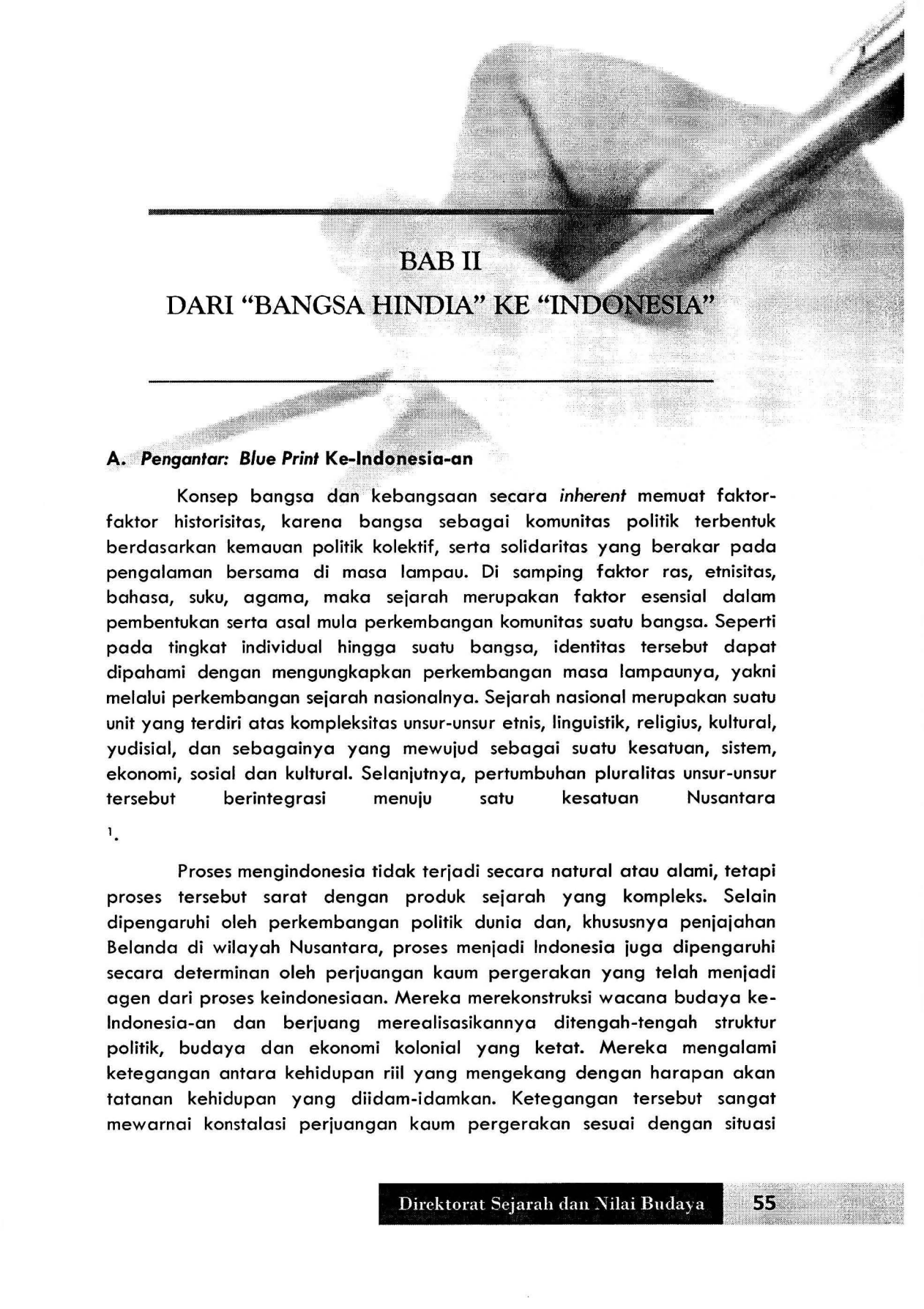
Data demografi menunjukkan bahwa pada rentang tahun 1924 jumlah orang Indonesia sebesar 60 juta jiwa dan 291.500 jiwa berada di Eropa. Beberapa sarjana yang kapabel tidak pernah diberi ruang oleh pemerintah untuk menggantikan pegawai pribumi. Raden Mas Ismangoen Danoewinoto adalah orang pribumi pertama yang lulus pada tahun 1875 di sekolah *grootambtenaar*. Dengan prestasi itu seharusnya menjadi *hofdambtbaar* dengan gaji pada periode itu minimum 1000 gulden.

Motivasi Belanda untuk mendirikan sekolah bukanlah untuk mengangkat derajat Bangsa Hindia. Belanda mendirikan sekolah untuk kebutuhan tenaga kerja. Dengan tenaga kerja yang telah siap itu, Belanda terbantu oleh kelulusan mereka. Belanda juga berkepentingan memperoleh pembantu yang cerdas.

Catatan Akhir :

- 1) Pemikiran ini lahir dari kuatnya ikatan tradisi bangsawan khususnya Jawa yang selalu membatasi ruang gerak pergerakan nasional. Sebagai salah satu contoh dari kasus ini adalah Mas Marco Kartodikromo. Nama Marco adalah tambahan nama sebagai bentuk adaptasi dari nama Eropa dan Jawa (bangsawan).
- 2) W.F.Wetheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 133-138.
- 3) Taufik Abdullah, "Dari Hasrat Kemajuan ke Pembentukan Bangsa", dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 5, Masa Pergerakan Kebangsaan*, Jakarta: Kerjasama Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata-Ikhtiar Baruan Hoeve, 2012), hlm. 63.
- 4) Taufik Abdullah (ed); *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid V*; Jakarta, IBVH; 2012, hal. 243
- 5) Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara Sejarah Indonesia*; Jakarta: KPG, 2008, hal. 331.
- 6) Taufik Abdullah (ed), *op.cit*; hal. 244
- 7) J.S. Furnivall, *Colonial Policy and Practice*. (Cambridge:1948), hlm.377
- 8) Taufik Abdullah; *Indonesia Toward Democracy*; Singapore: ISEAS; 2009; hal. 5-7.
- 9) *ibid*; hal 7-9
- 10) Taufik Abdullah (ed) *op, cit*, hal. 263.
- 11) Taufik Abdullah, *op. cit*, hal. 154 - 157
- 12) Taufik Abdullah, *op. cit*, hal. 194 – 198.
- 13) Taufik Abdullah (ed); *op cit*, hal. 182.
- 14) Taufik Abdullah (ed), *op. cit*, hal. 185
- 15) Taufik Abdullah; *op. cit*, hal. 296
- 16) Ahmad Adam, *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan*; Jakarta: Hasta Mitra, 2003, hlm. 188-190.
- 17) Taufik Abdullah (ed), *op. cit*, hal. 298
- 18) A.B. Adam, *op. cit*, hlm. 212.
- 19) *Ibid.*, hlm. 224.
- 20) Ahmad Adam; hal 167
- 21) Ahmad Adam, hal 169
- 22) Ahmad Adam hal 179

- 23) Ahmad Adam 181
- 24) Rajif, "Marco Kartodikromo dan Pemikiran Anti Kolonial", dalam *Driyarkara, Tahun XXII* no.3 hlm.10
- 25) Takhasi Siraishi, 1997, *Jaman Bergerak*, Jakarta, Cet I, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 109-110.
- 26) Robert van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka jaya, 1984), hlm. 60.
- 27) "Een dankbare herinnering aan wijlen Mr. J.H. Abendanon", dalam *Oedaya*, Februari 1926.
- 28) Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, jilid II* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992), hlm. 84-85
- 29) Taufik Abdullah, "Nation Formation and Structural Concern: a Problem in Indonesian Historiography" dalam *Prisma The Indonesian Indicator*, No 29 (September 1983), hlm. 34-35.
- 30) Jajat Burhanuddin, Oman Fathurahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, Jakarta: Gramedia
- 31) Akira Nagazumi, *Bangkitna Nasionalisme Indonesia Boedi Oetomo 1908-1918* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 43-45.
- 32) A.K. Pringgodigdo, 1986, hlm. 1.
- 33) "Sarekat Orang-Orang Intelectual di Indonesia", *Pandoe Merah*, No. 1. 1924.
- 34) "*Dapur Nasionalisme Indonesia*" adalah istilah yang Sukarno karena ide, gagasan, tujuan dan berbagai pemikiran tentang nasionalisme Indonesia digagas dan diolah di rumah HOS Tjokroaminoto di Surabaya.



BAB II

DARI “BANGSA HINDIA” KE “INDONESIA”

A. Pengantar: *Blue Print* Ke-Indonesia-an

Konsep bangsa dan kebangsaan secara *inherent* memuat faktor-faktor historisitas, karena bangsa sebagai komunitas politik terbentuk berdasarkan kemauan politik kolektif, serta solidaritas yang berakar pada pengalaman bersama di masa lampau. Di samping faktor ras, etnisitas, bahasa, suku, agama, maka sejarah merupakan faktor esensial dalam pembentukan serta asal mula perkembangan komunitas suatu bangsa. Seperti pada tingkat individual hingga suatu bangsa, identitas tersebut dapat dipahami dengan mengungkapkan perkembangan masa lampaunya, yakni melalui perkembangan sejarah nasionalnya. Sejarah nasional merupakan suatu unit yang terdiri atas kompleksitas unsur-unsur etnis, linguistik, religius, kultural, yudisial, dan sebagainya yang mewujud sebagai suatu kesatuan, sistem, ekonomi, sosial dan kultural. Selanjutnya, pertumbuhan pluralitas unsur-unsur tersebut berintegrasi menuju satu kesatuan Nusantara

1.

Proses mengindonesia tidak terjadi secara natural atau alami, tetapi proses tersebut sarat dengan produk sejarah yang kompleks. Selain dipengaruhi oleh perkembangan politik dunia dan, khususnya penjajahan Belanda di wilayah Nusantara, proses menjadi Indonesia juga dipengaruhi secara determinan oleh perjuangan kaum pergerakan yang telah menjadi agen dari proses keindonesiaan. Mereka merekonstruksi wacana budaya ke-Indonesia-an dan berjuang merealisasikannya ditengah-tengah struktur politik, budaya dan ekonomi kolonial yang ketat. Mereka mengalami ketegangan antara kehidupan riil yang mengekang dengan harapan akan tatanan kehidupan yang diidam-idamkan. Ketegangan tersebut sangat mewarnai konstalasi perjuangan kaum pergerakan sesuai dengan situasi

jamannya. Mereka tidak hanya berjuang di bidang politik saja, melainkan juga berusaha keluar dari budaya yang telah mengukung diri dan bangsanya. Dalam hal ini, mereka tidak hanya mengarahkan untuk mencapai kemerdekaan bangsa saja, melainkan berkeinginan untuk menciptakan kebudayaan yang memungkinkan manusia-manusia Indonesia dapat hidup merdeka sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Pengetahuan modern yang diperoleh melalui pendidikan Belanda telah membawa pengaruh pencerahan terhadap sebagian besar kaum pergerakan tentang pentingnya menghargai harkat martabat manusia.

Kenyataan ini menjadikan mereka yang mengalami pendidikan kolonial pada umumnya mempunyai kemampuan dan semangat intelektual tinggi yang sangat mempengaruhi atmosfer gerakan politik menjadi visioner. Pelopor gerakan nasional pada umumnya merupakan sosok-sosok yang *well educated* sebagai elite modern yang ikut mengubah sejarah jamannya. Mereka berperan dalam menciptakan budaya alternatif yang memungkinkan bangsa Indonesia merdeka secara politik, ekonomi, dan budaya. Pelbagai organisasi politik banyak menyelenggarakan diskusi yang tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga melakukan proses internalisasi nilai-nilai yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan negara modern.

Perkembangan politik saat itu semakin kondusif bagi anak-anak pergerakan yang bangga berlabuh dalam suasana ke-Indonesia-an dibanding hanya sekedar dalam lingkup kebudayaan orang tua mereka (*primordialisme*). Pelbagai gerakan pemuda, yang semula sangat kental dengan identitas *primordialisme* pun semakin larut dengan arus kesadaran menuju ke-Indonesia-an. Salah satu faktor yang berperan besar membangun kebudayaan Indonesia adalah wacana dan tema perjuangan yang dikembangkan oleh beberapa organisasi politik. Bahkan, beberapa organisasi pemuda semakin intensif dalam kesadaran dan identitas kebudayaan yang baru, yaitu Indonesia. Dengan demikian, mereka tidak terkungkung hanya sekedar menganggap dirinya sebagai pemuda Jawa, pemuda Sumatera tetapi juga pemuda Indonesia.

Oleh karena itu, organisasi pergerakan nasional merupakan wadah bagi kaum intelektual yang di satu pihak telah mengalami alienasi sosio-kultural dan di pihak lain memerlukan ceruk sosial baru untuk mewartakan arena bergerak dan forum komunikasi politik. Seperti, *Boedi Oetomo*, *Indische Partij*, Pergerakan Pemuda Induler, *Jong Islamieten Bond*, dan Perhimpunan Indonesia dan sebagainya berfungsi sebagai lambang identitas

baru berdasarkan solidaritas modern (non-primordialis). Ide nasionalisme mentransenden etnosentrisme, primordialisme dan komunalisme diganti solidaritas nasional. Dalam hal ini, Perhimpunan Indonesia dengan manifestasi politiknya pada 1925 menegaskan konsep bangsa, kesatuan dalam masyarakat pluralitas, kemandirian dan kesemuanya merupakan prinsip nasionalisme yang kemudian diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

B. Lahirnya Solidaritas Modern di STOVIA: Boedi Oetomo

Secara historis lahirnya Pra STOVIA memiliki latar belakang yang tidak terlepas dari berjangkitnya berbagai wabah penyakit menular dan berbahaya di daerah Karesidenan Banyumas pada pertengahan abad 19 atau tepatnya pada 1851. Pemerintah Kolonial yang menerima laporan tersebut memiliki gagasan untuk menerbitkan buku tuntutan kesehatan yang dibagikan ke para kepala desa (lurah) dalam bahasa Jawa dan Melayu. Adapun tujuannya, yakni agar setiap desa dapat menjaga kesehatan desa beserta penduduknya, namun cara ini tidak memberikan hasil memuaskan. Selanjutnya, muncul gagasan baru untuk membentuk kelompok kesehatan dari kalangan penduduk yang dilatih dalam hal perawatan. Dari gagasan itu pemerintah memutuskan beberapa pemuda sehat dan cakap dari seluruh penjuru Pulau Jawa yang pandai menulis dan membaca huruf, baik Jawa maupun Melayu dan minimal berumur 16 (enam belas) tahun untuk dididik di Rumah Sakit Militer di Weltevreden, Batavia (sekarang: Jakarta). Sejumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang pemuda berhasil terseleksi untuk menjalani pendidikan yang berlangsung selama 3 (tiga) tahun sebagai juru kesehatan dan setelah lulus bergelar “Dokter Jawa”.

Dalam perkembangannya, Direktur Sekolah Dokter Jawa, yaitu Dr. C. Eijkman pada 1889 mengajukan usul, agar pendidikan diselenggarakan selama 5 (lima) tahun. Usul ini disambut dengan saran lain, yaitu pelajar Sekolah Dokter Jawa hendaknya berasal dari lulusan *Europeesche Lager School* (ELS) dan pendidikan dilaksanakan selama 6 (enam) hingga 8 (delapan) tahun. Sejak 1901, upaya pengembangan mutu Sekolah Dokter Jawa ditingkatkan menjadi *Shcool tot Opleiding van Indische Artsen* (STOVIA). Dr. H.F. Roll yang disebut sebagai “Bapak STOVIA” memimpin sekolah itu sejak berdiri, yakni pada 1901 hingga 1908.

Usaha Dr. H.F. Roll tidak hanya berhenti pada perubahan Sekolah Jawa menjadi STOVIA, tetapi ia meneruskan dengan mendirikan gedung

sekolah sesuai dengan gagasannya. Meskipun dana menjadi halangan utama dalam pembangunan gedung ini, namun berkat keuletannya ia dapat mengumpulkan sumbangan sebesar 178.000 gulden untuk membangun gedung STOVIA yang diresmikan pada 1902. Dengan dibukanya gedung baru STOVIA, bentuk pendidikannya pun menyesuaikan keadaan, seperti Tingkat Persiapan (*Voorbreiding*) dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun. Sementara itu, Tingkat Kedokteran (*Geneeskundig*) ditambah waktu belajarnya menjadi 6 (enam) tahun. Lulusan STOVIA tidak lagi memperoleh gelar Dokter Jawa, tetapi bergelar *Inlandsch Arts*. Sejak 1903, penerimaan STOVIA diperketat dengan mengadakan ujian saringan.

Setelah berjalan selama 11 (sebelas) tahun dengan beberapa perubahan, pada 1913 STOVIA mengalami reorganisasi yang meliputi perbaikan kurikulum; penyelenggaraan praktikum yang dilakukan secara terpisah sesuai tingkat dan jurusan; lama pendidikan untuk Tingkat Persiapan berlangsung selama 3 tahun dan untuk Tingkat Kedokteran menjadi 7 tahun; penambahan tenaga pengajar dan para asisten; serta perubahan gelar bagi para lulusan yang semula *Inlandsch Arts* (1902) menjadi *Indisch Arts*. Selain itu, STOVIA mulai menerima calon pelajar dari segala bangsa dengan biaya sendiri. Sejak 1919, pembaharuan gedung STOVIA terus dilakukan, diantaranya pemindahan klinik beserta pendidikan klinis ke *Centrale Burgelijke Ziekeninrichting* (CBS) di Salemba (sekarang: Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo /RSCM).

Sekolah yang mendidik para calon dokter tersebut memiliki kedudukan “canggung”, begitu pula dalam menyebut para pelajarnya. Mereka tidak menamakan diri “siswa” atau “murid” yang mereka anggap agak ‘rendah’ dari sisi tingkat. Selain itu, mereka juga tidak menyebut “*leerling*”, karena sebutan itu tidak memperlihatkan perbedaannya dengan sekolah-sekolah lain yang setingkat. Oleh sebab itu, mereka memilih kata “*eleve*” dari bahasa Perancis, yang berarti ‘murid’. Penamaan ini dianggap lebih diterima dikalangan mereka, selain belum ada yang menggunakannya, sebutan itu terasa khusus bagi pelajar STOVIA. Namun, istilah “*eleve*” kemudian mengalami perubahan pengucapan menjadi “klepek” untuk menyebut pelajar STOVIA, hal ini disebabkan adanya pengaruh logat Betawi. Pada perkembangannya, penyebutan “klepek” justru diterima sebagai suatu kehormatan, di samping sebutan itu dapat menciptakan keakraban tersendiri di kalangan para pelajar STOVIA².

Gedung STOVIA yang merupakan sebuah kompleks itu terdiri dari beberapa bangunan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan

dikelilingi dengan pagar rapih dan kokoh yang menyebabkan orang luar tidak mudah untuk memasuki area sekolah tersebut. Untuk menjaga disiplin para “klepek” dan mencegah keleluasaan orang dari luar masuk ke wilayah itu, di bagian depan kompleks terdapat pintu gerbang besar yang terbuat dari besi berjeruji. Pada malam hari terdapat peraturan, bahwa bagi para pelajar Tingkat Persiapan hanya diperbolehkan ke luar asrama hingga pukul 20. 00 (malam) dan bagi para pelajar Tingkat *Geneeskundig* hingga pukul 22.00 (malam).

Gedung STOVIA yang terletak di *Hospitaalweg* memiliki dua tempat sebagai satelit terbesar, yakni gedung “Langen Sawo” dan *Sumatraans Commensalenhuis* (SCS). Keduanya terletak di Kwitang dan tidak jauh dari gedung STOVIA. Di kedua tempat tersebut merupakan titik temu para “klepek” untuk membicarakan berbagai masalah tanpa agenda mulai dari yang paling ringan hingga topik-topik politik saat itu.

Sekolah dokter ini memiliki tempat unik dalam sejarah kebangsaan sebagai tempat berseminya semangat nasionalisme yang semula bersifat ke-Jawa-an, kemudian berkembang menjadi ke-Hindia-an. Dalam hal ini, STOVIA adalah sekolah pertama yang mengumpulkan murid-murid dari berbagai daerah dan tinggal dalam sebuah asrama. Selain itu, di lembaga pendidikan ini, para pelajar menerima ilmu pengetahuan dan pendidikan secara Barat yang membawa pengaruh terhadap terbukanya wawasan para pelajar menjadi semakin luas, terutama terkait kondisi masyarakat jajahan, baik yang dijajah maupun penjajahnya. Kaum pelajar ini menjadi semakin memahami tentang anggapan-anggapan lama mengenai kesukuan, perbedaan-perbedaan yang diperbesar oleh penjajah dalam rangka politik “memecah belah”.

Kondisi ini meningkatkan kesadaran munculnya bibit solidaritas nasional, seperti mulai lenyapnya secara lambat laun batas-batas kesukuan, terutama ketika mulai berinteraksi satu sama lain, karena mereka tinggal dalam satu asrama yang membawa pada rasa senasib sepenanggungan. Proses kebangsaan semakin tidak tertahankan dengan menyaksikan adanya praktik-praktik tidak wajar dan melanggar perikemanusiaan serta keadilan yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap rakyat terjajahnya. Hal ini menumbuhkan rasa ketidakpuasan para pemuda pelajar terhadap keadaan masyarakat koloni dimana mereka hidup. Kesadaran terhadap lingkungan disekelilingnya tersebut mendorong para pemuda pelajar bertindak untuk mengangkat derajat bangsanya dan melepaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda. Sebagai alat perjuangan, mereka mendirikan

organisasi modern yang sekaligus dapat menjadi tempat mereka melatih diri sebagai pemimpin³.

Seperti, pelajar Soetomo yang tercatat sebagai mahasiswa STOVIA pada 1903 bersama-sama 13 orang dari beberapa daerah, mendirikan Perkumpulan Boedi Oetomo bersama kawan-kawannya, diantaranya, R.M. Goembrek, M. Soeraji, M. Goenawan Mangoenkoesoemo, M. Mohammad Saleh dan M. Soeleiman. Lahirnya Boedi Oetomo didorong oleh keadaan sangat kompleks dari rakyat yang tertindas oleh penjajah. Kondisi keterlantaran rakyat terjajah mendorong hasrat para kaum pelajar STOVIA mendirikan perhimpunan pelajar yang bertujuan mempercepat usaha ke arah kemajuan rakyat. Kebetulan pada akhir 1907, dokter Wahidin Soedirohoesodo dari Badan Bantuan Pendidikan atau *Studiefonds* yang bertujuan menolong para pemuda Indonesia agar dapat menuntut pendidikan di Perguruan Tinggi, mengadakan ceramah yang mendapat sambutan antusias dari para pelajar STOVIA. Ceramah tersebut telah menginspirasi mereka untuk segera membentuk suatu perhimpunan⁴.

Soetomo yang waktu itu berusia 19 tahun, segera menghubungi para pelajar lainnya di luar Batavia. Ia menulis surat tentang cita-citanya untuk mendirikan perhimpunan pelajar kepada kawan-kawan pelajar di Yogyakarta, Semarang, dan Magelang. Perwujudan hasrat ini dipercepat dengan adanya berita bahwa pada Mei 1908 pemerintah Hindia Belanda akan membuka Sekolah Opsir Bumiputra. Pendirian sekolah itu mendapat sambutan, terutama dari kalangan pejabat pemerintah serta sebagian rakyat yang tidak mengetahui hakikat sebenarnya tentang maksud terselubung dari pemerintah kolonial. Dalam hal ini, para pelajar STOVIA tetap mencurigai maksud pemerintah tersebut. Mereka prihatin melihat rakyat yang terpecah belah sikap mereka terhadap pendirian Sekolah Opsir Bumiputra yang dibiayai dengan pajak rakyat. Dalam praktiknya, sekolah ini hanya dinikmati oleh anak-anak bangsawan dan setelah lulus mereka diarahkan untuk patuh pada pemerintah. Cara ini semakin menjauhkan mereka dari pemikiran kebangsaan.

Di samping itu, kesadaran terhadap kondisi kemiskinan rakyat dan kehidupan feodalisme yang membelenggu mereka merupakan hal yang antagonis. Pada 20 Mei 1908 dalam sebuah ruang kelas STOVIA dengan dihadiri beberapa pemuda dicetuskan perkumpulan Boedi Oetomo yang diketuai Soetomo. Oleh karena tindakan tersebut, Soetomo dan kawan-kawannya harus menghadapi sikap para dosen STOVIA yang menuduh para pemuda ini melawan pemerintah Hindia Belanda. Tuduhan itu

disertai ancaman, apabila kegiatan tersebut tidak dihentikan maka Soetomo akan dikeluarkan dari sekolah. Suatu keberuntungan bagi Soetomo dan kawan-kawan, karena direktur STOVIA, Dr. H.F. Roll mendiskusikan persoalan Soetomo dan berhasil menenggang perasaan para dosen yang anti Boedi Oetomo dengan mengemukakan pertanyaan:

“Apakah di antara tuan-tuan yang hadir di sini tidak ada yang lebih ‘marah’ dari Soetomo waktu tuan-tuan-tuan berumur 18 tahun?”

Dr. H.F. Roll yang berpikiran maju memberikan sumbangan pemikiran guna membantu perjuangan para pelajar Sekolah Dokter Jawa.

Sejak berdiri Boedi Oetomo di gedung STOVIA, pihak pemerintah kolonial Belanda mengikutinya dengan cermat. Himpunan dokumen-dokumen resmi sekitar 1907-1910 terdapat dalam buku Dr. Van der Wall, berjudul *“De opkomst van de Nationalistische Indisch”* (Munculnya gerakan nasional di Hindia Belanda) berisi uraian betapa tajamnya pemerintah mengamati periode awal abad 20. Namun, menurut laporan resmi pemerintah, bahwa Boedi Oetomo sebagai satu usaha yang berkeinginan untuk terus maju dianggap tidak berbahaya. Walaupun demikian, pemerintah memberikan peringatan pula apabila suatu saat Boedi Oetomo muncul dengan tujuan-tujuan politik tersembunyi, maka organisasi itu diancam dibubarkan.⁵

Selain itu, pemerintah mensinyalir pula, pengaruh Douwes Dekker terhadap para pelajar STOVIA sangat besar sekali. Pengaruh pribadi Douwes Dekker terhadap para pemuda pelajar STOVIA lebih kuat bila dibandingkan dengan tulisan-tulisannya yang dimuat di *Bataviaasch Nieuwsblad*. Dalam hal ini, Douwes Dekker secara intensif mengadakan hubungan yang erat dengan para pelajar STOVIA. Oleh karena keakraban dan kekayaan literatur yang dimilikinya, rumah Douwes Dekker di Kramat, Jakarta yang lokasinya tidak jauh dengan gedung STOVIA, seolah-olah dijadikan “ruang bacaan” bagi para pelajar STOVIA. Di tempat ini, Douwes Dekker secara terus menerus mengisi jiwa para pelajar dengan semangat juang dan patriotisme. Oleh karena itu, tidak mengherankan pula apabila rumah Douwes Dekker disebut sebagai tempat kelahiran “jiwa Boedi Oetomo” yang memancar dari pikiran dan tindakan Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, dan kawan-kawan. Kemudian, Douwes Dekker mendapat julukan “temannya orang Jawa di kalangan pelajar itu”. Bahkan, oleh Soetomo dan kawan-kawannya di STOVIA, Douwes Dekker disebut sebagai “calon” yang mestinya ikut duduk dalam pengurus Boedi Oetomo.⁶

Pergerakan Boedi Oetomo pada taraf pertama memang bukan pergerakan politik, dan keanggotaannya juga masih terbatas pada suku Jawa dan Madura. Dalam 5 (lima) tahun pertama Boedi Oetomo benar-benar merupakan kancah atau muara keinginan-keinginan bergerak maju dengan medan tanpa ada yang membatasi. Adapun, hal yang hendak dicapai adalah kehidupan terhormat bagi bangsa yang dapat ditafsirkan menjadi watak khas perjuangan guna mencapai kemerdekaan dari semua pergerakan kebangsaan di Indonesia. Di sinilah letak martabat pergerakan Boedi Oetomo sebagai perintis kebangkitan nasional dalam membangun solidaritas modern dan pada akhirnya pergerakan itu mengalami kemunduran pada 1913 akibat munculnya aliran-aliran baru yang lebih radikal. Diantaranya, *Indische Partij* yang mendasarkan kebangsaan sebagai *Indier* (Indierschap) yang anggotanya lebih meluas, termasuk kaum Indo Belanda, Cina peranakan dan sebagainya.

1) Solidaritas Hindia: *Indische Partij*

Munculnya media -media tulisan merupakan sarana edukasi secara informal yang memiliki *value* bagi tumbuhnya kesadaran kebangsaan yang dimotori oleh kaum pelajar. Bahkan, tulisan-tulisan yang dimuat, seperti di *Bataviaasch Nieuwsblad* dianggap membahayakan pemerintah. *Bataviaasch Nieuwsblad* yang dipimpin J.H. Ritman memiliki nama baik di kalangan kaum pelajar, karena dinilai obyektif. Surat kabar tersebut bersifat bebas dan tidak menurut haluan pemerintah kolonial secara membabi buta. Oleh karena itu, surat kabar ini memberikan pengaruh positif terhadap tumbuh kembang kesadaran para pelajar, seperti dari STOVIA terhadap persolan solidaritas Hindia. Selanjutnya, pada Mei 1912, *Het Tijdschrift* yang kemudian terkenal dan juga menjadi bacaan kaum cendekiawan bumiputera pun diterbitkan sebagai majalah berkala untuk menggantikan *Bataviaasch Nieuwsblad*.

Pada September 1912 terbit pula harian *De Express* yang berhaluan revolusioner nasionalis. E.F.E. Douwes Dekker⁷ sebagai redaktur mengajak para pemuda yang berjiwa nasionalis untuk menjadi pembantu tetap di majalah tersebut, seperti R.M. Soewardi Soerjaningrat⁸, sedangkan dr Tjipto Mangoenkoesoemo menjadi anggota dewan redaksi. Bergabungnya ke dua tokoh tersebut menguntungkan Douwes Dekker dalam menambah kekuatan guna mewujudkan misi majalah dalam mengkritisi pemerintah kolonial. Ketiganya, yakni Douwes Dekker, Soewardi

Soerjaningrat dan Tjipto Mangoenkoesoemo bekerja bahu membahu yang kemudian dikenal dengan sebutan "*Janget Kinatelon*" atau "Tiga Serangkai".

Sesudah aliran nasionalisme dan revolusioner disiarkan melalui *Het Tijdschrift* dan *De Express* sebagai alat propaganda mampu memasuki alam pikiran dan perasaan para pemuda pergerakan, kedua media ini menjadi pelopor kelahiran *Indische Partij* yang didirikan oleh "Tiga Serangkai" pada 6 September 1912. Partai ini, sejak lahir secara langsung memperkenalkan diri sebagai partai politik yang berhalauan kebangsaan, kerakyatan dan kemerdekaan. Secara historis, *Indische Partij*, perkumpulan ketiga yang berdiri pada masa suasana Kebangkitan Nasional saat itu, setelah Budi Utomo dan, kemudian Sarekat Islam, merupakan organisasi yang secara awal mengembangkan faham persatuan dan kemerdekaan bagi bangsa Hindia. Para pemimpin *Indische Partij* berusaha menyadarkan rasa kebangsaan bangsa Hindia dan mempersiapkan menjadi bangsa yang bebas merdeka. Dalam hal ini, Boedi Oetomo dan Sarekat Islam hanya membatasi keanggotaannya pada pribumi, tetapi *Indische Partij* tidak hanya kalangan pribumi saja, tetapi siapa pun atau dari bangsa apapun yang lahir di Hindia dan mencintai tanah airnya, dapat diterima menjadi anggota organisasi ini. Jadi, peranakan Eropa, peranakan Arab, peranakan Cina dapat diterima sebagai anggota *Indische Partij*, asalkan mereka mengakui Hindia sebagai tanah tumpah darahnya. *Indische Partij* yang bertujuan mempersiapkan kehidupan sebagai bangsa yang merdeka dianggap sangat membahayakan pemerintah kolonial Belanda.

Ketika awal didirikan *Indische Partij*, banyak orang Indo Belanda masuk ke dalam partai itu. Namun, jumlah tersebut menjadi berkurang, setelah Douwes Dekker tidak menerima orang-orang Indo yang menuntut sebagai golongan minoritas. Douwes Dekker menghendaki agar orang-orang Indo justru meleburkan diri sebagai bangsa Hindia. Dalam persoalan identitas dirinya pun, Douwes Dekker sebagai orang Indo Belanda tidak pernah menggunakan kebangsaan Belanda. Ia selalu menggunakan kebangsaan *Indier*, hal ini dilatarbelakangi belum adanya istilah *Indosier* atau "orang Indonesia" waktu itu. Ketika dipromosikan sebagai doktor di bidang ekonomi di Universitas Zurich, Swiss, ia harus memberitahukan kebangsaannya. Ia menyebut *Indier* dan ditolak, oleh karena secara internasional istilah *Indier* merupakan nama kebangsaan bagi India. Akhirnya, Douwes Dekker menggunakan kebangsaan *Javaan* yang berarti orang Jawa².

Kaum Indo Belanda merasa sangat kecewa terhadap ucapan Douwes Dekker yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh memiliki tanah, karena bumi Hindia hanyalah diperuntukkan bagi putera-puteri Hindia saja. Mereka yang ingin memiliki tanah harus menjadi orang Hindia terlebih dahulu dan bersedia melakukan kewajiban-kewajiban yang dipikul oleh rakyat, seperti ronda malam dan lain-lain. Sementara itu, Douwes Dekker pun beranggapan untuk memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka dan berdaulat haruslah bersemboyankan "*rawe-rawe rantas malang malang putung*", seperti yang tertulis dalam lencana *Indische Partij* berbentuk perisai. Kewarganegaraan tidak memperdulikan asal kebangsaan, dalam hal ini yang terpenting adalah mau mengakui Hindia sebagai tanah airnya untuk menjadi anggota *Indische Partij* yang dapat menjadi pemersatu dalam penderitaan bersama di koloni.

Walaupun *Indische Partij* masih sangat muda usianya, namun langkah-langkahnya sangat tegas dan revolusioner. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tersebut dikirimkan kepada pemerintah untuk meminta disahkan dan diakui sebagai badan hukum. Dengan Surat Keputusan Pemerintah Nomer 1 tanggal 4 Maret 1913 permintaan tersebut ditolak dengan alasan bahwa perkumpulan itu didasarkan pada tujuan politik yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Menurut pasal 111 Peraturan Pemerintah Hindia Belanda, organisasi semacam itu harus dilarang dan tidak dapat disahkan AD/ART nya. Pada 5 Maret 1913, pimpinan partai mengajukan lagi permohonan kepada pemerintah untuk pengesahan dan pengakuan sebagai badan hukum. Dalam permohonan kedua ini diadakan perubahan Anggaran Dasarnya. Dalam pasal 2 Anggaran Dasar disebutkan bahwa perkumpulan dicabut dan diganti kata-kata seperti yang tercantum pada Anggaran Dasar *Insulinde*. Perkumpulan *Insulinde* merupakan perhimpunan orang-orang Belanda peranakan yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan politik, meskipun lebih banyak ditekankan pada bidang sosial. Walaupun demikian, pemerintah tetap menolak dengan Surat Keputusan tertanggal 11 Maret 1913¹⁰.

Pada 31 Maret 1913 pucuk pimpinan partai mengambil keputusan dengan maksud hendak menyelamatkan anggota-anggotanya, karena *Indische Partij* akan dibubarkan, yakni dengan memindahkan para anggotanya memasuki *Insulinde* yang dipimpin oleh Douwes Dekker. Dengan cara ini, *Indische Partij* dianggap tetap "ada". Menurut Douwes Dekker, hal yang sangat penting dan dibutuhkan adalah suatu organisasi nasional yang

harus berjuang untuk persiapan-persiapan nyata dalam mencapai persamaan derajat dan kemerdekaan bagi seluruh bangsa Hindia.

Di tengah situasi tersebut, pada Juli 1913, pemerintah kolonial Hindia Belanda akan merayakan satu abad (100 tahun) kemerdekaan negeri Belanda dari penjajahan Perancis di jaman Napoleon. Menurut rencana, perayaan tersebut hendak diselenggarakan pada 15 Nopember 1913 dalam bentuk pesta besar-besaran orang-orang Belanda dengan dananya berasal dari pungutan uang rakyat secara paksa guna penyelenggaraan perayaan tersebut. Rencana ini mendapat reaksi keras dari kalangan masyarakat pribumi yang berpendapat bahwa tidak sepatasnya jika suatu perayaan kemerdekaan akan diselenggarakan dalam negara yang sedang mengalami penjajahan. Perayaan ini sangat menghina dan melukai perasaan kebangsaan, diantaranya para pemimpin *Indische Partij*.

Douwes Dekker melakukan protes agar pesta '100 tahun Kemerdekaan Belanda' dilakukan di tempat tertutup, seperti *Societeit* (Kamar Bola), tempat orang-orang Belanda bersantai dengan bermain *biljart* (bola sodok), tanpa mengikutsertakan kaum pribumi. Protes ini ditulis dalam bahasa 'Melayu pasar' atau 'bahasa pelabuhan' dengan banyak anak kalimat dan bernada marah yang dilontarkan pada panitia perayaan tersebut. Tulisan tersebut berjudul, "*Wij Zullen Niet Mee*" (Kami Tidak Akan Turut), antara lain berbunyi:

".....Mengapa kamoe tidak merayakan pesta itoe di dalam kamar bolah dengan pantes-pantes, di tempat sendirian, dimana kamoe dapat minoem-minoem soepaja moedah akan berminoem atas kehormatan tanah ajermoe? Tentoe kamoe ta' akan mendengar setjara bentjih daripada kami dalam perajaan itoe, kerna kami tidak haroes toeroet pesta, tentoe kamoe tida akan mendengar setjara salah seorang dari medan kami, jang soeka berpidato, seperti kehendak saja akan nantang pada kamoe orang, jang membuat pesta sematjam itoe. Kalau ada begitoe tiadalah kamoe akan dapat melarang pada saja akan berpidato begitoe. Sjoekoerlah sekarang soedah banjak orang, jang djadi besar di dalam sekolah saja, ja'ni sekolah kemerdekaan.

*Ja, Toewan-toewan commisie, mengapakah kamoe tidak bersoeke-soeka di medan kamoe empoenja kaoem sendiri?....*¹¹.

R.M. Soewardi Surjaningrat segera menulis, "*Als Ik eens Nederlander was...*" yang dicetak oleh *De Eerste Bandoengsche Publicatie Maatschappij* (kongsi yang mengelola berita pertama di Bandung di bawah pimpinan J.F. Wesselius, penerbit Surat kabar *De Express*) dalam bentuk brosur. Tulisan

tersebut membuat Soewardi menjadi terkenal, karena diterbitkan oleh Komite Boemi Poetra¹² yang dipimpin dokter Tjipto Mangoenkoesoemo dalam oplag besar (5000 eksemplar). Brosur itu yang dicetak dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Dalam terjemahan Abdoel Moeis dengan bahasa Melayu, tulisan itu diberi judul, "Andaikata Aku Seorang Belanda..". Dalam terjemahan inilah muncul kalimat yang terkenal dari Soewardi Soerjaningrat:

"Tidak selayaknya bangsa Hindia turut serta merayakan kemerdekaan bangsa lain yang menindas kita".

Adapun cuplikan tulisan tersebut, diantaranya:

"Djika sekarang ini akoe seorang Belanda, akoe memprotes akan diadakannya perajaan kemerdekaan itu. Akan koetoelis dalam soerat-soerat kabar, bahwa itoe salah. Akan koeperingatkan teman-temankoe pendjadjah, bahwa pada waktoe sekarang ini sangat berbahaja mengadakan perajaan peringatan kemerdekaan. Bangsa Belanda hendak koeperingatkan, djangan menjinggung perasaan rakjat Indonesia jang kini baroe bangoen dan menjadi pemberani. Dan djangan mengurangadjarinja. Soenggoeh akoe akan memprotes sekeras-kerasnja.

Tetapi.....akoe boekan orang Belanda, akoe hanja anak bangsa berkoelit tjoklat, pendoedoek tanah djadjahan Belanda. Sebab itu akoe tidak akan memprotes. Djika akoe protes djuga tentoe akoe akan disesali. Dan karena protes itu rakjat Belanda jang memerintah disini pasti menjdauhkan dirinja dari dirikoe, karena koehina. Jang demikian itu tak koesoekai dan memang tidak boleh. Sebab djika akoe seorang Belanda akoe tidak akan melukai perasaan rakjat Indonesia.

Lagipoela aku akan dianggap kurangadjar terhadap Sri Ratu jang kota hormati. Perbuatankoe itoe pasti tidak dapat diampoeni, sebab akoe hanja seorang pendoedoek bawahannya jang seharoesnja selaloe setia kepadanya. Itoelah sebabnja maka akoe tidak protes. Sebaliknya akoe akan ikoet dalam perajaan itu. Djika nanti dilakoekan poengoetan derma, akoe tentoe akan ikoet memberinja, walaoepoen oleh karenanja akoe haroes mengoerangi belandja roemahanggakoe hingga separranja. Adalah kewadjabankoe sebagai pendoedoek tanah djadjahan Belanda oentoek memperingati sepenuhnya hari kemerdekaan negeri Belanda, negeri jang kita pertoean. Akan koeminta kepada semoea teman-temankoe sebangsa dan sesame pendoedoek tanah djadjahan keradjaan Belanda oentoek ikut merajakannya, karena walaupun perajaan itoe semata-mata kepentingan Belanda, ada djuga disitoe kesempatan bagi kita

*oentoek menjatakan isi hati dan setia kita kepada negeri Belanda. Dengan demikian kita akan mengadakan demonstrasi kesetiaan. Alangkah besarnya kegembiraankoe. Sjukurlah, bahwa akoe boekan seorang Belanda....."*¹³.

Tulisan dengan menggunakan gaya bahasa halus, tepat, tandas, dan mengena sasaran sebagai tamparan halus dan sekaligus kritik pedas bagi pemerintah kolonial atau penjajah. Brosur telah tersebar, ketika secara tiba-tiba pihak Kejaksaan memerintahkan untuk menyitanya. Hal itu tidak akan mungkin dilaksanakan secara tuntas, karena brosur yang dicetak besar-besaran dengan menggunakan bahasa Melayu yang dikuasai sebagian besar rakyat pribumi, telah tersiar di seluruh tanah Jawa. Hakim Pengadilan (*officier van Justitie*) Monsanto didatangkan dari Batavia ke Bandung untuk memeriksa 'perkara Soewardi' tersebut. Dalam hal ini Soewardi dianggap membakar semangat dan mempengaruhi golongan pribumi untuk melawan kebijakan pemerintah. Ia dituduh pula menyebarluaskan rasa permusuhan antar golongan dan berusaha memecah belah lapisan masyarakat yang ada di Hindia Belanda.

Setelah pemeriksaan Soewardi berakhir, pada 20 Juli 1913 dr. Tjipto Mangoenkoesoemo menyerang pemerintah dengan tulisan yang dimuat di surat kabar "*De Express*", berjudul "*Kracht of Vrees?*" ("Kekuatan atau Ketakutan?"), sebuah karangan dengan menggunakan bahasa Belanda. Dalam tulisan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah kolonial sesungguhnya telah menyadari, apa yang akan terjadi setelah brosur pertama beredar, yang semestinya mereka siap untuk menanggung akibatnya. Beberapa petugas datang ke kantor Comitè Boemi Poetra untuk menyita semua brosur karangan Soewardi Apakah tindakan yang berwewenang dan sikap polisi tersebut merupakan pameran kekuatan? Selama itu, orang-orang Belanda memandang masyarakat pribumi tidak lebih daripada suatu bangsa budak saja. Selanjutnya, Tjipto menyadarkan bahwa kaumnya adalah pemilik negeri ini. Meskipun tanpa senjata, golongan pribumi akan tetap berjuang. Kita mempunyai kekuatan!, serunya. Tjipto meminta bangsanya menyokong Comitè yang telah didirikan dan berharap agar mereka memikirkan nasib Soewardi yang harus mempertanggungjawabkan tulisannya.

Selanjutnya, Tjipto Mangoenkoesoemo mengatakan, andaikata uang teman-teman berlebih, dia minta agar uang tersebut dikirimkan ke Comitè Boemi Poetra dan nanti dengan caranya sendiri, Comitè akan memperingati "100 tahun Kemerdekaan Belanda" itu. Jika nanti yang menamakan diri *Nederlander* atau orang Nederland di dalam pesta tersebut minum minuman

keras dengan iringan *toast* dan dalam pidato menyatakan manisnya kemerdekaan, maka Tjipto mengingatkan bahwa manisnya kemerdekaan yang sama yang sedang dinikmati Soewardi, telah dirampas oleh pemerintah. Diantaranya, ia tulis:

"Apakah tindakannya itoe meroepakan soeatoe pameran kekoeatan ataukan ketakoetan?"

Dua hari kemudian, pada 28 Juli 1913 Soewardi menulis lagi sebuah artikel di dalam surat kabar *"De Express"*. Artikel itu ditulis di dalam bahasa Belanda, berjudul *"Ook Allen Voor Een"* ("Satu Untuk Semua, Tetapi Juga Semua Untuk Satu"). Dalam karangannya ini, Soewardi menyatakan bahwa tulisannya berjudul *"Als Ik Eens Nederlander Was.."* itu merupakan gambaran dari perasaan hatinya. Soewardi yakin bahwa bukan ia saja yang mempunyai perasaan demikian. Sebagian besar memang berdiam diri, tetapi di dalam dada masing-masing, pasti juga merasakan seperti apa yang telah dirasakan Soewardi bersama kawan-kawannya. Douwes Dekker pada waktu itu baru saja datang dari negeri Belanda. Dalam akhir tulisan, ia mengajak bangsanya untuk tetap tenang dan selalu siap dalam menghadapi segala kemungkinan. Soewardi percaya bahwa Komite Boemi Putra akan terus memperjuangkan cita-citanya. Tulisan itu diakhiri dengan pernyataan:

*"Kita haroes mempoenjai kekoeatan dan kepribadian dalam menghadapi perdjoeangan nasional ini. Djika tidak, maka selamanja saudara-saudara akan tetap mendjadi boedak! Lepaskan diri dari perboedakan ini!"*¹⁴.

Setelah membaca tulisan kedua kawannya itu, Douwes Dekker menulis pula di dalam surat kabar *"De Express"*. Dalam tulisannya, yang berjudul *"Pahlawan Kita Soewardi Soerjaningrat dan Tjipto Mangoenkoesoemo*, ia memuji kedua sahabatnya itu. Pemerintah Hindia Belanda melarang Komite Boemi Poetra mengadakan kegiatan apapun. Semua isi berita dalam surat kabar di seluruh wilayah Hindia Belanda mendapat pengawasan dan dilarang menyiarkan peristiwa-peristiwa yang dianggap merugikan pemerintah dan hanya berita resmi pemerintah sajalah yang boleh disiarkan. Akibatnya, semua berita menjadi 'kabur' dan menyangsikan karena pemerintah menempatkan diri di pihak yang benar. Walaupun demikian, Komite Boemi Poetra yang dilarang tidak berarti patuh pada larangan pemerintah itu. Dengan caranya, Komite tetap

melakukan gerakan, meskipun tidak secara terang-terangan untuk membakar semangat bangsanya.

Tulisan “Tiga Serangkai” ternyata benar-benar menggelisahkan pemerintah kolonial Belanda. Bayangan akan meletusnya suatu revolusi menghantui pemerintah kolonial Belanda yang takut akan timbul perlawanan rakyat. Waktu Soewardi menulis karangan itu, ia masih seorang pemuda berusia 22 tahun, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat kemudian ditangkap Belanda, demikian pula Douwes Dekker. Mereka benar-benar dianggap orang-orang yang membahayakan kedudukan pemerintah. Semula Soewardi akan dibuang ke Pulau Bangka, dr. Tjipto ke Banda Neira dan Douwes Dekker ke Timor Kupang. Tetapi keputusan itu diubah menjadi pengusiran dari tanah air ke negeri Belanda. “Tiga Serangkai” ini merupakan korban pertama sejak tanah Hindia diliputi suasana kebangkitan nasionalnya. Hukuman Pemerintah Kolonial terhadap Tiga Serangkai itu mendapat simpati besar dari teman-teman seperjuangan yang lain. Hal ini terbukti dari jumlah uang yang berhasil dikumpulkan, antara lain oleh Boedi Oetomo dan Sarekat Islam yang memungkinkan “Tiga Serangkai” itu berangkat ke tempat pembuangan bersama keluarga mereka. Hal ini adalah bukti munculnya rasa setia kawan dan solidaritas di kalangan pergerakan rakyat saat itu.

Pada 6 September 1913, tepat pada hari ulang tahun *Indische Partij*, R.M. Soewardi Soerjaningrat, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Douwes Dekker berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, Batavia menuju ke negeri Belanda, tempat pengasingan. Sungguhpun mendapat hukuman buangan, namun semangat kemerdekaan ketiganya tidak pernah patah. Salah satunya, Soewardi, ia menuliskan pesan kepada kawan-kawan yang ditinggalkannya di atas kapal “Bulow”, saat kapal berlayar di Teluk Benggala, dengan judul “*Vrijheidshedenking en Vrijheidsberooving*”. Tulisan berisi gugatan tertanggal 14 September 1913, yakni agar bangsanya tidak turut dalam merayakan peringatan kemerdekaan Belanda dan lebih dari itu ia menginginkan agar pesta perayaan yang telah direncanakan dibatalkan dan dianggap menyakitkan hati. Selain itu, pada kaum Indo, Soewardi mengingatkan bahwa sebenarnya mereka telah dijauhkan dari yang berdarah murni dan tidak termasuk bangsa berkulit putih. Hal ini ditunjukkan dengan adanya lagu “*Wie Neerlands Bloed*” (Siapa yang Berdarah Belanda), Soewardi mengharap agar mereka mau masuk atau menyatu dengan golongan pribumi, seperti yang dilakukan E.F.E. Douwes Dekker, yakni berjuang bersama untuk mencapai kemerdekaan bangsa.

2) Solidaritas Kesukuan: Pergerakan Pemuda Insuler

Pada permulaan abad 20 merupakan penanda adanya isyarat-isyarat yang menunjukkan kemajuan oleh perkembangan pendidikan modern yang membawa kesadaran Kaum Pelajar terhadap kehidupan disekelilingnya. Seperti, lahirnya Boedi Oetomo dalam lingkungan pendidikan STOVIA pada 1908. Di tanah Minangkabau juga muncul semangat kebangsaan, pada 1910 berdiri perkumpulan *Adabiah* yang dipelopori oleh kaum muda Islam, diantaranya Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Karim Amrullah. Perkumpulan ini kemudian mendirikan sekolah *Adabiah* yang mengajarkan pengetahuan umum dan pelajaran Agama Islam. Bagi daerah Minangkabau yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, maka perkembangan perkumpulan *Adabiah* merupakan suatu yang wajar. Pada 1914, Haji Abdullah Ahmad dan Mohammad Taher Marah Sutan mendirikan H.I.S Adabiah yang diakui diberi subsidi pemerintah Hindia Belanda.

Tokoh Mohammad Taher Marah Sutan yang mendirikan “Syarikat Usaha”, menduduki posisi penting dalam perkembangan faham kebangsaan dan kemajuan di tanah Minangkabau yang perannya dapat disejajarkan dengan dr. Wahidin Soedirohoesodo dalam mengembangkan kemajuan dan kebangsaan di Pulau Jawa. Dalam hal ini, Taher Marah Sutan merupakan penabur benih, pendorong semangat, dan pencipta iklim perkembangan faham kebangsaan, terutama di kalangan Kaum Muda, seperti Mohammad Hatta, Bahder Johan, Nazir Datuk Pamuncak, dan Mohammad Yamin¹⁵.

Sementara itu, di kalangan STOVIA pun mulai bangkit untuk mendirikan perkumpulan pelajar, meskipun dalam suasana kesukuan. Pada 7 maret 1915, di Batavia Satiman Wirsandjojo, Kadarman, Soenardi, dan para pemuda lainnya mendirikan Tri Koro Dharmo yang berarti Tiga Tujuan Mulia (Sakti, Budi, Bhakti). Perkumpulan ini bertujuan, *pertama* membentuk ikatan antara para pelajar bumiputera pada sekolah menengah dan kursus pengetahuan kejuruan; *kedua* yakni untuk menyebarkan pengetahuan bagi anggota-anggotanya; *ketiga* yakni membangkitkan serta mempertajam perasaan untuk segala bahasa dan kebudayaan Jawa serta menciptakan rasa persaudaraan di antara berbagai suku yang terdapat di Pulau Jawa, Madura, dan Bali.

Namun, orang Sunda sebagai suku terbesar di Jawa Barat tidak mau menerima pimpinan dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Para pelajar Sunda, Bali, dan Madura merasa, bahwa Tri Koro Dharmo¹⁶ menjadi monopoli suku Jawa. Menguatnya gagasan untuk mewujudkan kebudayaan Jawa Raya yang meliputi juga kebudayaan suku-suku, selain suku Jawa, telah mendorong diselenggarakan Kongres pada 12 Juni 1918 di Solo. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir daerah asal semua pelajar yang mendukung perubahan nama dari Tri Koro Dharmo menjadi Jong Java.

Kongres ini berharap menemukan pemecahan masalah, sehingga para pelajar Sunda, Bali, dan Madura dapat segera menjadi anggota dari organisasi baru tersebut, karena mereka memiliki latar belakang budaya yang sama. Tujuan dari Jong Java, yakni: *Pertama*, mengadakan latihan bagi calon-calon pemuka nasional. *Kedua*, Memupuk cinta tanah air harus menjadi dorongan, karena tanah air kekurangan pimpinan yang cakap. *Ketiga*, berusaha untuk menarik perhatian umum pada perkembangan kebudayaan Jawa. *Keempat*, mempertebal persaudaraan di antara semuasuku bangsa Indonesia yang hidup di sini¹⁷.

Dalam prakteknya, hanya sebagian kecil para pelajar dari daerah-daerah lain menggabungkan diri ke dalam Jong Java. Pada hakikatnya, para pelajar Jawa merupakan mayoritas dari seluruh anggota perkumpulan tersebut. Di Solo, pada 1919 diadakan kongres ke II yang dihadiri sejumlah besar para pelajar Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan agenda persoalan semi politik. Pembahasan masalah ini hendak menunjukkan dalam tubuh Jong Java masih terkandung perasaan kuat dalam menumbuhkan rasa persatuan antar suku-suku bangsa di Hindia. Namun, salah satu pembahasan yang disampaikan dokter Satiman Wirjo Sandjojo sebagai pembicara dalam konperensi menekankan bahwa seolah-olah suku Jawa lebih tinggi dari suku lainnya. Begitu pula, saat menerangkan dan menggambarkan sifat-sifat khas kebudayaan Jawa, ia terbawa pada penilaian subyektivitas yang berlebihan. Hal ini menyebabkan munculnya kritik-kritik tajam yang berkembang menjadi perdebatan politik, sehingga ketua sidang merasa perlu untuk menanggukuhkan rapat itu. Walaupun dalam kenyataannya, dokter Satiman merasa bahwa ia telah melampaui batas, dan saat beristirahat ia menemui lawan-lawan diskusinya serta meminta maaf atas pernyataan-pernyataan yang membawa pada suasana ketersinggungan suku-suku lainnya. Perdebatan itu merupakan kejadian unik dari konperensi saat itu.

Kongres Kebudayaan Jawa yang berlangsung selama 5 hari dapat berjalan dengan lancar, terlepas dari “insiden Satiman” yang sempat menyebabkan suasana suram. Namun, kondisi itu segera pulih kembali dengan adanya sikap-sikap yang meyakinkan dari para pembicara lainnya. Pelaksanaan kongres di dalam suasana kebudayaan yang damai di Solo, menjadikan para peserta menyadari pentingnya manfaat mempertahankan serta mengembangkan kebudayaan Jawa sesuai sifat-sifatnya sendiri di tengah perkembangan sistem pendidikan gaya Barat saat itu¹⁸. Pada kongres-kongres Jong Java selanjutnya, seperti Kongres ke-III nya di Solo pada 1920 dan Kongres ke-IV pada 1921 di Bandung pembicaraan sekitar semi politik masih terus berlangsung. Namun demikian, mengenai sikap Jong Java terhadap aksi dan propaganda politik belumlah jelas. Ketidakjelasan sikapnya terhadap persolalan politik itu menjadikan langkah Jong Java dalam mengakomodasi usulan-usulan yang berkaitan dengan pembangunan kolektif suku bangsa Indonesia, terutama pada kalangan pelajar-pelajar dan pemuda mengalami hambatan.

Berbagai pernyataan berkaitan hubungan Jong Java dengan aktivitas politik bangsa Indonesia dan, khususnya kaum pergerakan baru terjawab ketika pada Kongres ke-V di Solo pada Mei 1922, Jong Java dengan tegas memutuskan bahwa secara organisasi dan individual anggota Jong Java tidak diperbolehkan mencampuri urusan politik, termasuk menghadiri aksi dan propaganda politik. Hal itu semakin diperkuat dengan keputusan Kongres Luar Biasa Jong Java pada Desember 1922 yang menetapkan bahwa tujuan Jong Java hanyalah mengadakan hubungan antar murid sekolah menengah, mempertinggi perasaan untuk kebudayaan sendiri, menambah pengetahuan umum dari para anggota, dan melakukan olah raga¹⁹.

Berkaitan dengan keputusan ini, bagi anggota Jong Java yang menginginkan dirinya untuk terjun dalam bidang politik hanya diperbolehkan setelah tamat sekolah. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kesadaran para pelajar terhadap aktivitas politik kalangan pergerakan mengalami hambatan. Para pelajar Jong Java seakan-akan telah terpasung oleh aturannya sendiri, sehingga mereka tidak bisa mengekspresikan dirinya dalam upaya merespon tuntutan masyarakat luas yang tengah membutuhkan obor penerang dalam usaha mencapai pembebasan nasional. Walaupun demikian, kebakuan terhadap gagasan-gagasan pembaharuan dalam tubuh Jong Java tidak berlangsung lama. Pada Kongres ke-VII di Yogyakarta

pada Desember 1924, pengurus besar Jong Java atas nama ketuanya, Samsuridjal mengusulkan tiga persoalan yang seharusnya diberlakukan agar Jong Java menjadi lebih dinamis dan aspiratif terhadap persoalan-persoalan rakyat. Dengan usulan tersebut, diharapkan agar Jong Java mampu memunculkan kaum muda yang patriotik dan berwawasan kerakyatan. Samsuridjal memandang penting bagi Jong Java untuk melakukan kegiatan yang lebih mendatangkan semangat dan karakter jiwanya serta perasaan nasionalistik dalam dirinya. Baginya anggota yang sudah dewasa (di atas 18 tahun) hendaknya dibebaskan untuk mengikuti kegiatan politik praktis. Menurut pandangan Samsuridjal, bahwa untuk membantu pemberian kegiatan kursus-kursus itu dibutuhkan anggota-anggota luar biasa yang bisa mengarahkan jalannya kegiatan itu.

Usulan ini dimaksudkan agar Jong Java bisa meningkatkan komitmen kebangsaannya. Sebagai jalan menuju arah tersebut, yakni dengan mengadakan kursus-kursus agama Islam bagi anggota Jong Java yang beragama Islam, karena agama Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Hindia. Selain itu, menurutnya, banyak para pelajar yang kurang paham lagi mengenai ajaran Islam. Dengan memahami ajaran-ajaran agama Islam, Jong java dapat mengikatkan diri dengan perasaan rakyat. Dan, untuk meningkatkan rasa patriotism anggota Jong Java, sejak awal anggotanya harus mulai dilibatkan dalam aktivitas politik.

Namun, usulan Samsuridjal tentang pembaharuan di dalam tubuh Jong Java ditolak kongres dengan alasan bahwa ia dituduh tengah bermain politik. Di samping itu, tengah beredar Sarekat Islam (SI) telah menyusupi Jong Java. Dalam kritiknya, Haji Agus Salim memandang bahwa Jong Java telah menjauhkan pemuda pelajar dari agama Islam. Keadaan ini menjadikan Jong Java semakin terperangkap ke dalam kebekuan terhadap isu-isu di luar organisasi, terutama berkaitan dengan semakin menguatnya gagasan pembebasan nasional Indonesia. Pada 1926 atas inisiatif ketuanya, yakni Soenardi Djaksodipoero, Jong Java kembali membuka diri terhadap gagasan persatuan nasional dan cita-cita kemerdekaan.

Proses penyadaran tersebut semakin menguat dan akhirnya pada 30 Desember 1929 berdasarkan putusan kongresnya yang terakhir, Jong Java dinyatakan meleburkan diri dalam Indonesia Muda. Namun, akibat kesadaran yang terlambat itu, sebagian besar anggotanya membentuk dan membangun organisasi baru yang aspiratif terhadap gagasan

persatuan bersama rakyat. Salah satunya, pada 1925 Samsuridjal yang kemudian mendirikan Jong Islamieten Bond yang ingin mewujudkan persatuan nasional dengan dasar perjuangan bercirikan Islam.²⁰

Sementara itu, para pemuda Sumatra yang belajar di STOVIA juga mendirikan perkumpulan dengan nama Jong Sumatranen Bond (JSB) pada 9 Desember 1917. Tujuan dari perkumpulan ini untuk mempererat hubungan antara para pemuda pelajar Sumatera, menanamkan kesadaran terhadap tugas ke depan sebagai pemimpin dan pendidik bangsa, menghidupkan dan menjunjung tinggi kepribadian Sumatera. Meskipun, JSB berdiri dan bermarkas di gedung STOVIA, tetapi anggota-anggotanya tidak hanya terdiri dari para pelajar STOVIA saja, melainkan juga berasal dari luar. Diperkirakan, waktu itu anggotanya berjumlah 150 orang, sedangkan yang belajar di STOVIA sekitar 33 orang. Di antara anggota JSB yang bukan pelajar STOVIA adalah Mohammad Hatta dari PHS dan Mohammad Yamin dari Rechtschool. Dalam perkembangannya, cabang-cabang JSB terdapat di 6 (enam) tempat di Jawa, 2 (dua) tempat di Padang dan Bukittinggi.

Banyaknya tokoh JSB yang berasal dari tanah Minang, seperti Mohamad Amir, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Bahder Djohan, dan lain-lain tidak terlepas peran pemuda Nazir Datuk Pamuncak, yang juga anggota JSB, pulang ke Padang setelah menamatkan pendidikannya di HBS. Semula, ia hendak melanjutkan studinya ke Universitas Leiden di Belanda, namun harus tertunda oleh karena pelayaran ke Eropa saat itu terhalang akibat berkecamuknya Perang Dunia I (1914-1918). Pada waktu itu, ia diminta oleh pengurus pusat JSB untuk memberikan penerangan tentang tujuan JSB dan sekaligus diminta untuk mendirikan cabang di Padang dan di Bukittinggi. Atas bantuan Mohammad Tahir Marah Sutan, dapat diselenggarakan rapat pada malam hari di antara para pemuda pelajar di gedung Syarikat Usaha di Padang. Rapat dihadiri para pemuda pelajar Sekolah Raja Bukittinggi yang sedang bertanding sepak bola di Padang. Dalam rapat tersebut, pemuda Nazir Datuk Pamuncak berpidato dalam bahasa Belanda yang biasa dilakukan oleh para pelajar dalam pertemuan-pertemuan (*vergaderingen*). Saat itu, bahasa Indonesia belum dipergunakan secara umum.

Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa para pemuda Jawa telah mendirikan perkumpulan dua tahun sebelumnya. Oleh karena itu,

pemuda Sumatera harus segera bergerak dengan mendirikan perkumpulan. Nazirpun secara keras sambil menunjuk ke arah timur:

"Lihatlah ke sana ke pinggir langit, matahari kemegahan bangsa telah terbit!".

Nazir kemudian menjelaskan tentang tujuan JSB, yakni: *Pertama*, memperkuat tali persaudaraan antara para pemuda Sumatera yang masih belajar serta menanam kesadaran dalam jiwanya, bahwa mereka mempunyai seruan hidup untuk menjadi pemimpin dan pendidik bangsanya. *Kedua*, menimbulkan perhatian pada anggotanya dan orang lain terhadap tanah dan bangsa Sumatera serta untuk mempelajari adat istiadat, kesenian, bahasa-bahasa, pertanian dan sejarah Sumatera.

Pidato Nazir berlangsung kurang lebih satu jam ini telah menggugah hati para pelajar yang hadir pada acara tersebut, terutama bagian kalimat "menanam keinsyafan dalam jiwanya, bahwa pemuda mempunyai seruan hidup untuk menjadi pemimpin dan pendidik bangsanya". Kata-kata itu tampaknya menyentuh para pemuda, seperti Mohammad Yamin, Mohammad Hatta, Bahder Djohan, dan lain-lain. Kedatangan Nazir ke tanah kelahirannya itu ternyata membuahkan hasil, yakni berdirinya cabang JSB di Padang dan di Bukittinggi. Setahun kemudian, pada 1919 JSB telah mengadakan Kongres Pertama di Padang. Sementara itu, Mohamad Amir, Mohammad Hatta, Bahder Djohan, dan Mohammad Yamin terpilih sebagai pengurus JSB yang bergerak dalam dunia perjuangan kepemudaan dan kebangsaan. Dalam Kongres Pertama JSB, juga mendirikan tugu peringatan di kota Padang, yang salah satu sisinya tertulis: *"Ter herinnering aan het eerst Congres van JSB, 1919"* yang berarti "Peringatan Kongres JSB Pertama, 1919".²¹

Banyak pula pengaruh berdirinya JSB pada berbagai segi kehidupan di Minangkabau. Di Bukittinggi seorang siswa STOVIA anggota JSB berpidato di muka umum dengan ucapan *"Saudara-saudara yang tercinta"*. Ucapan tersebut menimbulkan kehebohan yang dianggap sebagai tindakan yang menyimpang adat istiadat dan tidak lagi menghormati orang tua. Ungkapan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menjalin hubungan kekerabatan. JSB juga mendorong hilangnya hambatan terhadap perkawinan antara suku. Pernah pula terjadi seorang gadis akan melangsungkan perkawinannya dengan seorang pemuda Jawa, tetapi pihak keluarga gadis tidak menyetujuinya, karena berlainan suku. JSB membela

dan memihak perkawinan antar suku, akhirnya kedua anak muda itu mencapai cita-citanya untuk membina rumah tangga.

Mohammad Yamin merupakan pimpinan JSB yang secara intens membangun hubungan dengan pembinaan faham rasa kebangsaan Indonesia. Walaupun demikian, pada 1920 cita-cita kebangsaan Indonesia masih samar-samar. Bahkan, Mohamaad Yamin sendiri pada 1920 itu belum berpegang pada faham kebangsaan Indonesia. Ia masih bergerak dalam lingkungan daerah, seperti pada bunyi sajaknya, "*Andalas, Tanah Airku*" yang menganggap Andalas atau Sumatera sebagai Nusa Harapan. Saat itu, Mohammad Yamin yang baru berusia 17 tahun telah membawa perubahan pemaknaan dari Minangkabau menjadi Andalas.

Terlebih, para guru Belanda, utamanya pengajar Ilmu Sejarah dan Ilmu Bumi selalu mengajarkan bahwa "*Molukken is het verleden, Java is het heden en Sumatra is de toekomst*" (Maluku masa lalu, Jawa masa sekarang dan Sumatera masa yang akan datang). Semboyan ini harus dilihat dari konstruksi pemikiran Belanda yang mengandung tafsir kolonialis ekonomi, bahwa Maluku sudah diperas dan tidak menghasilkan keuntungan besar lagi bagi Belanda, seperti pada masa VOC di abad 17 dengan rempah-rempahnya. Adapun, pulau Jawa sejak abad 19 hingga abad 20 memang sedang mendatangkan keuntungan besar bagi Belanda dengan hasil perkebunannya, seperti kopi, kina, karet, nila, dan lain-lain dengan tenaga kerja murah dan melimpah. Dengan demikian, Jawa ditafsirkan sebagai "masa kini". Sedangkan, Sumatera mengandung banyak tambang, seperti minyak tanah, batu bara, gas bumi, timah, dan logam.

Walaupun demikian, anggota-anggota JSB telah memiliki kepercayaan terhadap kekuatan Indonesia Raya. Pada saat itu, JSB, selain mengenang segala sesuatu yang telah dilakukannya atau dicapainya, lebih utama lagi mencetuskan gagasan-gagasan baru yang akan dihadapinya. Salah satu hal yang sangat dirasakan oleh para anggota JSB ialah tentang bahasa. Sampai saat itu, dalam lingkungan JSB menggunakan bahasa Belanda secara luas. Pada lustrum pertama JSB di Jakarta 1923, Mohammad Yamin mencetuskan gagasan yang disampaikan dalam pidatonya, berjudul "*De Maleische Taal in het Verleden, heden en in de toekomst*" ("Bahasa Melayu Pada Masa Lampau, Masa Sekarang, Dan Masa Yang Akan Datang"). Pidato Mohamad Yamin ini menuai berbagai macam tanggapan. Sebagian besar menyambut dengan gembira gagasan untuk

menjadikan suatu bahasa yang dapat digunakan oleh antar suku bangsa yang sangat beragam bahasa dan kebudayaannya. Namun, sebagian golongan tua mengkhawatirkan bahwa gagasan Yamin tersebut akan dianggap Pemerintah Kolonial Belanda sebagai usaha politik yang akan menyulitkan kedudukan Belanda²². Selain itu, Mohammad Yamin melontarkan gagasan lagi tentang perlunya sebuah Majalah Kebudayaan yang diberi nama “Malaya”. Keberadaan majalah ini ditujukan untuk merangkul dan mengambil hati penduduk Malaya yang masih berada di bawah penjajahan Inggris.

Pada Lustrum pertama JSB juga telah dibuat medali peringatan dengan gambar nyiur melambai, disampingnya terdapat kembang melati sebagai lambang keindahan Hindia. Pada waktu itu, diresmikan pula panji perhimpunan JSB yang bergambar pelita menyala dengan semboyan “Pelita Bangsa, Senantiasa” yang memaknai pemuda sebagai pelita yang akan selalu menerangi bangsanya. Dalam perkembangannya, JSB semakin menunjukkan perjuangan menuju menguatnya keindonesiaan. Hal ini tercermin ketika JSB dipimpin Mohamad Yamin yang saat itu hampir menamatkan AMS dan hendak memasuki RHS telah mengorientasikan pemikiran dan perjuangan untuk persatuan “Indonesia”. Ia menggunakan faktor-faktor Sejarah, Kebudayaan, dan juga Geo politik untuk menyusun faham kebangsaan. Dalam hal ini, Mohammad yamin menyatakan bahwa istilah “Indonesia” yang mula-mula digunakan dikalangan Ilmu Bahasa, kemudian dipakai oleh sarjana Jerman Adolf Bastian pada 1889 dalam bukunya, berjudul “*Indonesia orde die inseln des Malayischen Archipel*” untuk menunjukkan persatuan kebudayaan bangsa Indonesia²³.

Di samping Jong Java dan Jong Sumatranen Bond, pada 1918 lahir pula Jong Ambon yang didirikan oleh pelajar STOVIA, yakni L. Tamaela dan J. Kajadu yang bercita-cita menyatukan para pemuda dan pelajar asal Maluku di Jawa dalam suatu perkumpulan. Inisiatif pendirian Jong Ambon, yang lebih merupakan perkumpulan olah raga terutama sepak bola ini, mendapat sambutan baik di kalangan pelajar dan pemuda dari daerah tersebut. Diantaranya, Johannes Latuharhary ikut serta dalam memperkuat kesebelasan Jong Ambon.

Tampaknya, Jong Ambon mengalami kemunduran, namun pada 1 Juni 1923 dihidupkan kembali dengan nama *Sport en Muziek Vereeniging Jong Ambon* (SVJA). Walaupun demikian, perkumpulan itu tetap dikenal

dengan nama Jong Ambon yang diketuai F. Loppies dengan wakilnya L.J. Wattimena. Adapun, inti penggerak organisasi ini ialah para pelajar dan alumni STOVIA, seperti dr. L. Tamaela, dr. J. Lisapaly, dr. J. Tupamahu, dr. J. Kajadu, G. Rehatta, C.J. Kapitan, J. Malaihollo, D. Tahitu, W. Putiray, J. Leimena.

Setahun kemudian muncul dua aliran dalam perkumpulan ini. *Pertama*, adalah sebagian pelajar yang tidak puas dengan peran Jong Ambon yang hanya bergerak di bidang olah raga. Ditengah-tengah gelombang pergerakan nasional, mereka berpendapat bahwa pendidikan harus diutamakan. Oleh karena itu kelompok ini mendirikan *Vereeniging Ambonsche Studenten* (VAS) yang dipimpin Toule Salahuwey, seorang pelajar *Recht Hoge School* (RHS) dan J. Leimena, seorang pelajar STOVIA. VAS/Jong Ambon ini menyatukan diri dengan pergerakan pemuda Indonesia dan dalam Kongres Pemuda Indonesia Ke I pada 1926, Jong Ambon diwakili Toule Salahuwey, dr. Kajadu bersama isterinya. Pada Kongres Pemuda ke II 1928 yang berhasil mencetuskan Sumpah Pemuda, J. Leimena ikut berperan dalam peristiwa tersebut. *Kedua*, Jong Ambon yang aktivitasnya lebih pada sepak bola dipimpin G. Rehatta dan berhasil mengembangkan sayapnya di kota-kota besar di Jawa. Kesadaran nasionalismenya yang terus dikembangkan menjadikan warna kostum klub Jong Ambon ini adalah merah putih. Nasionalismenya ini menjadi "duri" bagi pemerintah Hindia Belanda untuk mengakui sebagai badan hukum, meskipun pada akhirnya permohonan Jong Ambon dipenuhi pemerintah untuk memperoleh *rechtspersoon* pada 1 November 1930²⁴.

Selanjutnya berdiri pula perkumpulan-perkumpulan para pemuda kedaerahan lainnya yang kebanyakan didirikan oleh para pelajar atau alumni STOVIA, yakni Jong Minahasa yang didirikan pada 1918 dengan tokoh-tokohnya J. pantaouw dan Dena Pantaouw (menjadi istri Mr. Sunario); Jong Celebes dengan tokoh-tokohnya, diantaranya Arnold Mononutu, Waworuntu, Magdalena Mokoginta yang menjabat sekretaris dan anggota delegasi Kongres Indonesia Muda di Solo. Perkumpulan ini menerbitkan majalah bernama "Suara Celebes"; *Jong Timoresche Verbond* dengan tokohnya, antara lain J.W. Amalo; dan Jong Batak.

Munculnya Jong-Jong tersebut yang kemudian melakukan pendekatan satu sama lain, telah mencuatkan pemikiran dari Hatta dan Bahder Djohan, "apakah pergerakan pemuda yang telah ada, yakni JSB,

Jong Java, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Timoresche, Jong Batak dapat dipersatukan menjadi Jong Indie. Tampaknya pikiran ini terlintas pula dari Jong Java. Jong Java dalam kongres ke IV di Bandung pada 1921 memutuskan diadakan federasi dengan JSB. Namun, cita-cita ini tidak mudah diwujudkan, karena rasa kesukuan atau kedaerahan tidak begitu mudah dihilangkan²⁵.

3) Solidaritas Keagamaan: Jong Islamiten Bond

Berkembangnya organisasi-organisasi Kaum Pelajar atau pemuda yang terbagi dalam wadah dan perasaan kedaerahan tidak terlepas munculnya masalah, terutama renggangnya organisasi satu dan yang lainnya. Muncul pemikiran sebagian para pemuda pelajar yang menyadari perlu hilangnya sifat kedaerahan, diantaranya Kasman Singodimedjo yang berkeyakinan bahwa kemelut perpecahan antar organisasi pelajar itu dapat diperbaiki melalui agama Islam yang merupakan sebagian besar agama kaum bumiputra. Menurutnya, bahwa organisasi-organisasi, seperti Jong Java harus berani memelopori menggunakan Agama Islam sebagai dasar untuk selanjutnya disuguhkan kepada semua organisasi "Jong" yang lain-lain. Dengan demikian, menurut pemikiran sebagian para pemuda saat itu bahwa persatuan organisasi-organisasi tersebut akan terwujud dengan cara tersebut. Meskipun, sejak lama sudah berdiri organisasi-organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persatuan Islam. Organisasi-organisasi ini tidak saja mengajarkan agama Islam, melainkan juga menjalankan dakwah. Namun, usaha mereka belum meliputi Kaum Pelajar. Salah satu kendala adalah soal bahasa, karena Kaum Pelajar hanya mungkin dijangkau dengan Bahasa Belanda. Siaran-siaran atau penerbitan organisasi itu dalam bahasa Melayu atau daerah, tidak menjangkau golongan pemuda pelajar yang sebagian besar beragama Islam²⁶.

Dalam suatu Kongres Jong Java ke-VII di Yogyakarta pada 1924, Samsuridjal, seorang pemuda asal Karanganyar, Jawa Tengah dan juga pelajar *Recht Hoge School* yang menjabat ketua umum Jong Java menyampaikan pemikiran mendalam tentang tugas yang hendak ia kerjakan dalam masyarakat bagi kepentingan bangsa. Samsuridjal memiliki gagasan yang waktu itu belum banyak dimengerti, bahwa sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam. Terlepas dari agama yang dianut oleh seorang pemimpin, ia patut mengetahui dan memahami agama rakyat yang dipimpin. Agama rakyat sebagaimana adanya, tidak dengan macam-macam salah pengertian sebagai akibat pendidikan Barat²⁷.

Samsuridjal mengajukan usul sederhana dalam kongres tersebut, agar di kalangan Jong Java dibuka kesempatan mempelajari agama Islam. Terhadap gagasan Samsuridjal ini, Mohammad Roem menyampaikan pandangannya:

"Andaikata usul itu ditambah, seharusnya agama-agama lain, saya rasa Samsuridjal tidak keberatan. Ia mengusulkan agama Islam karena agama tersebut agama mayoritas rakyat".

Usul itu diterima dengan sederhana, tetapi ditolak dengan berbagai macam tuduhan, bahwa Samsuridjal dianggap bermain politik. Sesungguhnya dalam pemungutan suara yang dilakukan dalam Kongres Jong Java itu terdapat dua pandangan yang setuju Islam dan yang menolaknya memiliki kekuatan sama, sehingga terjadi dua kali pemungutan suara. Sesuai tata tertib organisasi, persoalan itu diserahkan pada keputusan yang diambil ketuanya. Dalam wewenangannya, akhirnya Samsuridjal menyatakan usulnya itu tidak diterima kongres. Adapun, kongres yang berlangsung dari 27 hingga 31 Desember 1924 tersebut juga dihadiri para pemuka agama, seorang pastur Katolik, seorang pendeta Protestan, seorang Theosofi; sedang ulama Islam yang hadir adalah Haji Agus Salim. Dimasukkannya usulan supaya Islam dijadikan pelajaran wajib dalam Jong Java, disebabkan agama Katolik dan Protestan serta Theosofi telah dimasukkan sebagai pelajaran bagi anggota-anggota Jong Java²⁸.

Selanjutnya, Samsuridjal meminta pertimbangan dan dukungan tentang perlunya mendirikan organisasi pelajar yang beragama Islam dengan maksud untuk mempelajari Islam pada tiga orang, yakni Kiai Ahmad Dahlan, Tjokroaminoto, dan Haji Agus Salim yang kemudian merestui usulan tersebut. Selain itu, sejumlah kawan-kawannya yang pada Kongres ke VII Jong Java mendukung usulannya, menyatakan siap mendukung gagasannya itu dan siap bekerja sama. Akhirnya, Samsuridjal memutuskan bahwa tempat rapat dilaksanakan di sebuah sekolah Muhammadiyah di daerah Kauman, Yogyakarta. Rapat pembahasan yang berlangsung penuh semangat dan banyak masukan, saran, serta dialog yang lama sudah direkam dan diakomodasikan tersebut, terlaksana pada malam hari dengan penerangan lampu tempel.

Dalam rapat itu pula disepakati nama organisasi baru yakni Jong Islamieten Bond (JIB) yang secara resmi dinyatakan berdiri di Weltevreden, Batavia pada 1 Januari 1925. Organisasi baru ini dipimpin oleh Samsuridjal

dan H. Agus salim diangkat sebagai penasehat JIB. Adapun, asas dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar tertulis dalam bahasa Belanda, yaitu *pertama*, mempelajari agama Islam dan menganjurkan agar ajarannya diamalkan; *kedua*, menumbuhkan simpati terhadap Islam dan pengikutnya, di samping toleransi yang positif terhadap orang-orang yang berlainan agamanya). Di samping itu, kegiatan organisasi meliputi: *pertama*, menerbitkan majalah berkala, brosur-brosur, dan lain-lain penerbitan; *kedua*, mengadakan kursus, pertemuan debat, dan lain sebagainya; *ketiga*, mengadakan darmawisata dan lain kunjungan ke tempat-tempat yang berarti²⁹.

Sehubungan dengan keanggotaannya, semula JIB didirikan untuk para pelajar yang masih duduk di bangku sekolah, terlepas dari umurnya. Di samping itu, ada pula orang-orang yang masih muda dan tidak lagi bersekolah atau sudah tamat belajarnya dapat menjadi anggota JIB. Oleh karena itu, keanggotaan JIB terbuka bagi para pemuda beragama Islam dari umur 14 tahun hingga 29 tahun, yang dikemudian hari diperluas menjadi 35 tahun. Selain itu, keanggotaan JIB juga tidak membatasi pada kesukuan atau kedaerahan. Di luar dugaan Samsuridjal dan kawan-kawan, sejumlah blanko formulir anggota yang diedarkan pada rapat propaganda itu berhasil menjaring 250 orang pemuda yang siap menjadi anggotanya. Mereka rata-rata berasal dari para pelajar dari *Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs* (MULO) dan *Algemene Middlebare School* (AMS) serta sebagian lainnya adalah tamatan dari sekolah-sekolah itu.

Keberhasilan propaganda pertama semakin menambah keyakinan Saamsuridjal dan kawan-kawan. Dari jumlah anggota yang terjaring tersebut sudah dirasa cukup untuk mengembangkan organisasi yang kemudian membentuk JIB cabang Batavia dan siap menjadi embrio bagi perluasan JIB ke daerah-daerah lainnya. Pada 15 Februari 1925, rapat propaganda dilakukan di Yogyakarta yang dilanjutkan di Solo, dan kemudian di Madiun. Propaganda JIB ini mendapat sambutan para pelajar menengah MULO, AMS serta sebagian lainnya adalah tamatan sekolah-sekolah itu dari ketiga daerah tersebut. Dengan terbentuknya Pengurus Besar JIB yang bertanggung jawab dalam usaha propaganda bagi pengembangan wilayah Jawa, perluasan propaganda JIB semakin lancar. Seperti, Sjahbudin Latief untuk daerah Yogyakarta, Solo dan Madiun, Mohammad Koesban dan Kasman ke Purworejo dan Kutoarjo, serta Samsuridjal dan Agus Salim ke Bandung.

Materi yang biasa dibawakan dalam rapat propaganda berkisar tentang bagaimana menumbuhkan kesadaran dan pengembangan pergerakan nasional Indonesia, dan perlunya usaha untuk mempertahankan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Dalam rapat itu dibicarakan kedudukan atau derajat bangsa pribumi yang tertindas oleh bangsa penjajah. Mereka melihat bahwa pihak penjajah dengan usaha-usahanya yang sangat halus melalui jalur pendidikan telah menjauhkan para pemuda Indonesia dari akar budayanya. Mereka berkesimpulan bahwa sangat penting dan sudah merupakan suatu keharusan untuk kembali memahami dan mempelajari ajaran agama Islam³⁰.

Dalam sebuah rapat terbuka di Batavia, Samsuridjal menyampaikan sikap, keyakinan dan cita-cita JIB. Utamanya, sikap JIB terhadap kaum perempuan yang menempatkan mereka pada posisi terhormat. Untuk merealisasikan gagasan itu, dalam tubuh JIB akan dibentuk wadah tersendiri, namun tidak terlepas dari organisasi induknya. Kemudian dikemukakan juga mengenai sikap JIB terhadap perkumpulan pemuda lainnya dan kaum pergerakan nasional pada umumnya. Menurutnya, JIB akan menempatkan posisi mereka sama derajat dan JIB siap bekerja sama. Sementara sikap JIB terhadap politik adalah membolehkan anggota-anggotanya untuk terjun dalam bidang politik, namun dalam aksinya tersebut tidak boleh membawa nama organisasi.

Walaupun demikian, kehadiran JIB inipun ada yang menyambutnya dengan perasaan tidak suka, karena JIB membawakan bentuk nasionalisme baru. Seorang pemimpin pemuda yang menentang mengatakan:

"Alles wat ruikt naar Indonesische nationalism, moet worden bestreden met hand en tand" (Apa saja yang berbau nasionalisme Indonesia harus diberantas dengan segala daya upaya).

Pada saat itu memang masih belum menjadi kesadaran umum, baru kesadaran mayoritas. Namun, dalam waktu beberapa bulan saja di kota-kota besar, seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Bogor, Medan, dan Makasar telah didirikan cabang-cabang JIB. Oleh karena keaggotaannya sebagian besar Kaum Pelajar, maka cabang-cabang JIB hanya dijumpai di kota-kota besar, seperti kota propinsi dan karesidenan. Pada akhir tahun 1925, JIB mengadakan kongres pertama di

Yogyakarta yang dipimpin Samsuridjal. Pada kongres ini, Samsuridjal yang telah memimpin JIB selama setahun (1925-1926) meletakkan jabatannya dan diganti oleh Wiwoho Poerbohadidjojo (1926-1930).

Walaupun demikian, keberadaan JIB pun menimbulkan suara-suara yang mempertanyakan masalah kebangsaan di dalam perjuangan JIB. Seperti:

“Bagaimana sikap JIB terhadap rasa kebangsaan yang sedang bangkit di kalangan pemuda pelajar?” , “Apakah JIB cukup memberi bimbingan agar para pemuda Islam tetap menjadi nasionalis yang akan memimpin rakyat menuju kemerdekaan tanah air?” Sehubungan dengan Islam bukanlah agama yang tidak nasional, melainkan internasional, maka muncul lagi pertanyaan, “Dapatkah dalam JIB diberikan pendidikan nasional yang sempurna?”

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikaitkan dengan kekhawatiran pendidikan nasionalisme dalam JIB menjadi berkurang, sehingga akan mengendorkan cita-cita bangsa ke arah kemerdekaan. Menurut Mohammad Roem, anggota-anggota JIB sendiri merasa tidak sedikitpun cintanya kepada tanah air, dalam hal ini agama Islam mengajarkan orang Islam berjuang memberantas kebatilan dan menegakkan keadilan dengan segala pengorbanan. Ia mengacu pada hadits yang berbunyi, *“Hubul wathon minal iman”* yang berarti cinta tanah air dan bangsa itu sebagian dari iman. Berdasarkan keyakinan itu, rasanya orang Islam tidak akan kurang nasionalismenya. Suara-suara yang menyiratkan keraguan anggota JIB dan jiwa kebangsaan pun menjadi hilang saat JIB ikut dalam Kongres Pemuda ke II yang berhasil mencetuskan Sumpah Pemuda pada 1928³¹.

Pada bulan Maret 1925, JIB berhasil pula menerbitkan majalah, bernama *An-Nur* (*Het Licht* atau Cahaya). Pada halaman depan tercantum Al Qur'an, surat At-Taubat ayat 32:

“Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi tidak mengijinkan kemauan mereka, melainkan lebih mencemerlangkan cahayanya, walaupun orang kafir tidak menyukainya”.

Di samping menerbitkan majalah yang memuat tentang Agama Islam, cabang-cabang JIB juga mengadakan kursus agama. Baik majalahnya maupun kursusnya menggunakan bahasa Belanda yang masih menjadi ciri komunikasi para pemuda pergerakan pada umumnya saat itu.

Sejak berdiri, JIB memiliki penasihat, yakni Haji Agus Salim yang dikenal sebagai salah satu pemimpin Sarekat Islam (SI), di samping Tjokroaminoto dan dikenal seorang ahli dalam agama Islam dan sangat mahir berbahasa Belanda. Haji Agus Salim mampu menjelaskan persoalan-persoalan terkait Agama Islam, baik melalui kursus-kursus JIB maupun melalui tulisan-tulisannya di "*An-Nur*" terkait serangan-serangan dari luar sehubungan dengan kedudukan Islam di tengah situasi yang diwarnai modernitas yang menurut kesaksian Mohammad Roem, anggota JIB menjadi bangga bahwa ajaran Islam memberikan pedoman yang baik dalam dunia modern yang mengikatkan rasa percaya diri anggotanya.

Pada 1927 JIB membentuk "Lembaga Inti" (Kern Lichaam) yang anggotanya telah memiliki banyak pengetahuan tentang Islam. Mereka inilah yang merencanakan dan mengusahakan kegiatan-kegiatan yang lebih memberikan bantuan dari pengetahuannya bagi para anggota yang lain. "Lembaga Inti" ini didirikan bersifat setempat-setempat, bergantung kepada tenaga yang ada di tempat tersebut. Misalnya, di Bandung lembaga itu dipimpin oleh Mohammad Natsir, dan mempunyai hubungan erat dengan Persatuan Islam (Persis) yang dipimpin oleh ulama A. Hassan. JIB berdasarkan agama Islam, maka di dalam pergerakan dan pergaulan sehari-hari terdapat batas-batas tertentu antara anggota-anggota pria dan wanita. Kemudian didirikanlah bagian wanita dengan nama Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling (JIBDA).

Sebagai organisasi yang mendasarkan pada agama Islam, maka dalam kegiatan dan pergaulan sehari-hari terdapat batas-batas antara pria dan wanita. Kemudian didirikan JIB bagian wanita yang disebut Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling (JIBDA). Salah satu anggotanya yakni Siti Soekaptinah (istri Soenarjo Mangoenpoespito) yang sebelumnya adalah anggota Jong Java dan masuk menjadi anggota JIBDA setelah organisasi ini didirikan di Yogyakarta. Siti Soekaptinah memasuki JIBDA, karena ia ingin meyakinkan para pelajar atas ke-Islamannya dengan studi yang kritis dan bertoleransi terhadap orang yang berpendirian lain.

Selain itu, organisasi JIBDA menempatkan kedudukan yang tinggi dan terhormat bagi wanita, sama dalam kedudukan dan dalam hukum dengan laki-laki, sebagai rekan atau partner. Penekanan hal tersebut diperlukan, karena nuansa pemikiran Indonesia saat itu diliputi oleh persoalan-persoalan terkait wanita, terutama dalam hubungannya dengan

Islam. Tujuan lain pendirian JIBDA, yakni untuk melatih para anggotanya agar menjadi wanita Islam sejati dan untuk membela serta melindungi hak-hak wanita sesuai dengan ajaran Islam. Dalam JIBDA mulai didiskusikan pula tentang kedudukan wanita dalam Islam, kedudukan wanita dalam masyarakat, pergaulan bebas (*vrije omgang*), dan poligami³². Dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada 1928, JIBDA ikut serta dengan melibatkan ketua JIBDA Cabang Yogyakarta Siti Soekaptinah menjadi penulis I. Adapun kongres tersebut menghasilkan pendirian Badan Permufakatan yang meliputi semua organisasi-organisasi wanita Indonesia yang disebut “Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia” (PPPI), dalam hal ini JIBDA pun turut aktif di dalamnya.

Di samping itu, JIB dengan pengikut sejumlah 4000 orang dan telah membentuk suatu “Lembaga Inti” (*Kern Lichaam*) dengan anggota-anggotanya yang telah dianggap banyak mengetahui tentang Islam. Adapun tugas lembaga ini yakni merencanakan dan mengusahakan kegiatan-kegiatan untuk memberikan bantuan dari pengetahuannya bagi para anggota-anggota lainnya. Lembaga yang telah dibentuk sejak 1927 ini dikukuhkan pada Kongres JIB di Madiun pada 1931. Fungsi dari lembaga tersebut menjadi penghubung antara JIB dengan organisasi-organisasi Islam yang ada waktu itu. Oleh karena keterbatasan tenaga, maka “Lembaga Inti” inipun didirikan secara lokal. Misalnya, di Bandung, lembaga ini dipimpin oleh Mohamad Natsir yang memiliki hubungan erat dengan Persatuan Islam (Persis) di bawah pimpinan ulama A. Hassan.

JIB juga menerbitkan majalah organisasi dengan nama “*Het Licht*”, walaupun dicantumkan pula di majalah itu nama lain, yaitu “*An Nur*”, namun nama dalam bahasa Belanda itulah yang terkenal waktu itu. Majalah tersebut dipimpin oleh Yusuf Wibisono dan terbit secara teratur hingga 1932. Diantara penulis, Kasman Singodimedjo paling produktif dalam menulis dengan menengahkan topik-topik bernuansa keagamaan. Kemahirannya di bidang agama Islam ini juga tidak terlepas dari hubungannya dengan tokoh-tokoh ulama terkenal seperti Syech Ahmad Syurkati di Weltevreden, Batavia sejak 1926. Ia adalah pendiri “*Al Irsyad*” dengan anggotanya adalah masyarakat Arab dan pendirian organisasi ini didukung oleh H.O.S. Tjokroaminoto, Haji Agus Salim, dan K.H. Achmad Dahlan. Adapun Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh yang memperhatikan dan mengkhawatirkan keadaan keagamaan para pelajar bumiputra yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Belanda. Para

ulama tersebutlah yang menuangkan pemikiran-pemikiran yang mengantarkan hingga lahir JIB dari kalangan para pelajar tersebut³³.

Dalam Kongres JIB yang diselenggarakan pada 23-27 Desember 1927 di Yogyakarta, Ketua JIB, Wiwoho mengemukakan perkembangan gagasan persatuan yang tengah menjadi topik yang populer di kalangan intelektual. Ia menyebutkan bahwa organisasi Jong Java dan Jong Sumatera, dan beberapa organisasi kedaerahan lainnya telah sepakat untuk merealisasikan gagasan 'fusi' pada waktu yang akan datang. Ia mengungkapkan pula tentang gerakan pemuda saat itu digolongkan menjadi dua kelompok, yakni yang berprinsip Islam dan nasionalisme. Pandangan ini bukan berarti adanya pertentangan kedua prinsip yang terwujud kemudian dengan munculnya Indonesia Muda (IM) dan JIB. Hal ini merupakan jawaban JIB terhadap usulan beberapa perkumpulan pemuda untuk membentuk fusi di antara mereka.

Sikap ini tercermin saat pencetusan Sumpah pemuda pada Oktober 1928, meskipun JIB merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) pergerakan pemuda yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dalam hal ini, Mohammad Roem sebagai anggota JIB Cabang Jakarta, menyaksikan Djohan Mohammad Tjai, pelajar senior dari *Recht Hoge School* mewakili pengurus Kongres Pemuda 1928. Namun, JIB tidak ikut fusi oleh karena asas JIB adalah Islam. Hal ini sudah dibicarakan sebelumnya dalam pengurus, artinya sudah ada saling pengertian yang menjadikan JIB masih dipandang perlu ikut dalam Kongres Pemuda ke II 1928 tersebut³⁴. Walaupun demikian, pada dasarnya pandangan perjuangan kedua kelompok ini terhadap bangsa adalah sama, sehingga antara JIB dan IM merupakan kekuatan gerakan pemuda yang kokoh dan siap bekerja sama.

4) Solidaritas Nasional: Perhimpunan Indonesia

Indische Vereeniging yang didirikan, salah satunya oleh R.M. Moto Soeroto- mahasiswa Ilmu Hukum, di Den Haag pada 1908, ditujukan bagi kepengurusan para pelajar Hindia Belanda yang menempuh pendidikan di negeri Belanda. Adapun keanggotaannya, tidak hanya terbatas dari suku bangsa di Hindia saja, melainkan juga berasal dari keturunan Cina dan Belanda. Perkumpulan yang bersifat sosial budaya ini, berhubungan erat dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat Belanda, diantaranya Mr. Abendanon, mantan Kepala Pendidikan di Hindia Belanda, Van Deventer, Prof. Steinmetz, Prof. Dr. Snouck Hurgronje, mantan penasehat Pemerintah

Hindia Belanda. Mereka membimbing para anggota *Indische Vereeniging* dalam rangka politik Etis yang berlandaskan *cooperation and association*³⁵. Selain itu, tokoh-tokoh Belanda ini sering diundang pula untuk mengadakan ceramah di kalangan anggota *Indische Vereeniging*, seperti yang dilakukan Sam Ratulangi saat menjabat sebagai ketua organisasi itu pada 1914-1915. Walaupun demikian, *Indische Vereeniging* memiliki arti penting bagi penyediaan bibit-bibit yang dapat mempersatukan para pelajar dari Jawa, Sumatera, Sunda, Madura, Ambon, Minahasa, dan lain-lain yang sedang menuntut pendidikan di Belanda tersebut. Perasaan kesukuan mereka pun semakin hilang secara pelan-pelan yang dalam perkembangannya berganti dengan perasaan kebangsaan.

Pasca Perang Dunia I pada 1918, jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar ke negeri Belanda semakin bertambah besar. Kedatangan angkatan muda untuk belajar di negeri Belanda ini membawa angin segar, karena anggapan-anggapan tentang perbedaan-perbedaan, seperti kesukuan yang diperbesar oleh pemerintah Kolonial dalam rangka politik “*divide et impera*” (politik ‘memecah belah’). Meskipun muda, mereka telah berpengalaman dalam gerakan pemuda, seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan sebagainya. Mereka, diantaranya Mohammad Hatta yang tiba di Belanda pada 1921 untuk melanjutkan kuliah di *Handels Hogeschool* di Rotterdam, Iwa Kusuma Sumantri kuliah di Ilmu Hukum di Leiden, Darmawan Mangoenkoesoemo kuliah di *Chemis* di Delft, dan lain-lain. Pada periode 1919 hingga 1921, *Indische Vereeniging* dipimpin oleh Ahmad Soebardjo Djojoadisurjo yang kemudian dilanjutkan oleh Soetomo yang memimpin organisasi tersebut dari 1921 hingga 1922.

Dalam dinamika antar mahasiswa tersebut terdapat dua aliran, yakni aliran moderat dan aliran progresif. Aliran moderat yang dipimpin Noto Soeroto menghendaki, di samping sebagai anggota *Indische Vereeniging*, golongan moderat ini ingin tetap memelihara hubungan dengan negeri Belanda, meskipun dalam bentuk *rijk eenheid*. Selanjutnya, golongan progresif berhasil merubah *Indische Vereeniging* pada 1922 menjadi *Indonesische Vereeniging* yang dilakukan oleh pengurus organisasi di bawah kepemimpinan Herman Kartowisastro (ketua), Soewarno (sekretaris), Mohammad Hatta (bendahara), dan Darmawan Mangoenkoesumo (archivaris). Di samping perubahan nama perkumpulan, mereka juga banyak memberi perhatian pada perkembangan pergerakan

yang terjadi di tanah air, Hindia Belanda. Mereka mendiskusikan, diantaranya “*November Belofte*” (Janji November) yang disampaikan Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) pada 18 November 1918. Ketika itu, ia memberikan sambutan pada pembukaan *Volksraad* (Dewan Rakyat) di Batavia yang menjanjikan bahwa *Volksraad* kelak merupakan wakil seluruh rakyat Hindia Belanda dan akan memberikan perbaikan-perbaikan kepada penduduk bumiputra. Janji ini tidak pernah direalisasi karena dinilai bersikap lunak terhadap penduduk Hindia Belanda. Ia ditarik dan diganti dengan Gubernur Jenderal baru yang bersikap keras, yakni D. Fock (1921-1926) yang dalam pemerintahannya diwarnai oleh arus pemogokan dari Sarekat Islam dan PKI dengan Sarekat Sarekat Buruh di bawah naungan kedua partai politik tersebut. Di masa inilah terjadi pembuangan para pemuda bumiputra ke Digul, ke luar negeri atau terbelenggu dalam penjara kolonial.

Hermawan Kartowisastro dan kawan-kawannya mencela keras sikap kolonial Pemerintah Hindia Belanda dengan gubernur jendralnya. Keadaan buruk yang melanda tanah air mempengaruhi jalan pikiran Herman Kartowisastro dan kawan-kawannya. Mereka juga diilhami oleh seruan para pemimpin dunia yang dikumandangkan pada akhir Perang Dunia pertama, yakni “*right of self determination*” bagi bangsa-bangsa di dunia. Sebagai media komunikasi, mereka menerbitkan majalah “*Hindia Poetra*” yang sebelumnya dikelola oleh *Indonesische Verbond van Studenten*, sebuah organisasi mahasiswa bentuk konfederasi yang di dalamnya bergabung *Indische Vereeniging*, Tjung Hoa Hui (organisasi mahasiswa Cina), dan beberapa organisasi mahasiswa Belanda yang mempunyai perhatian pada Hindia Belanda³⁶.

Pada masa kepemimpinan Herman Kartowisastro diciptakan lambang organisasi dalam warna merah putih dan ditengahnya terdapat gambar “kepala kerbau” yang diharapkan sebagai simbol kesabaran, ketabahan, dan keberanian para pelajar Hindia di negeri Belanda. Lambang yang diusulkan Ahmad Soebardjo Djojoadisoeerjo, seorang mahasiswa Ilmu Hukum di Leiden, digambar di atas kain oleh seorang mahasiswa Seni dan kemudian menjadi kebanggaan yang dipasang di tembok, tepatnya di atas kepala para pengurus PI ketika mereka sedang rapat. Sedangkan Ahmad Subardjo sendiri membuat lambang tersebut dalam bentuk yang lebih kecil dan dipasang di kamarnya di sebuah *flat* di

Noordeinde 32, Leiden. Dalam sendau gurau, ia sampaikan kepada para anggota perhimpunan:

*"siapapun yang hendak menempuh ujian doktoral, sebelum pergi ke tempat ujian, singgah dulu beberapa menit di kamarku untuk bersujud di depan lambang merah putih sambil mengucapkan kata-kata demi kehormatan tanah air"*³⁷.

Kepemimpinan Herman Kartowisastro kemudian diganti oleh pengurus baru periode 1923-1924, yakni Iwa Koesoemasoemantri (ketua), J.B. Sitanala (sekretaris), Mohammad Hatta (bendahara), Darmawan Mangoenkoesumo (archivaris), dan Sastro Moeljono (komisaris). Pada masa kepengurusan baru ini lebih maju selangkah lagi dengan keterangan dasarnya bercorak nasional radikal yang menghendaki persatuan rakyat Hindia dan pemerintahan dituntut untuk bertanggung jawab terhadap rakyat Hindia. *Indonesische Vereeniging* di bawah Iwa Koesoemasoemantri berusaha keras untuk menunjukkan warna perjuangan mereka kepada seluruh anggota dan sedapat mungkin diketahui oleh pimpinan pergerakan nasional di Indonesia. Untuk itu, mereka tetap menerbitkan majalah "Hindia Poetra" yang diselundupkan ke Hindia Belanda. Redaksi majalah tersebut adalah Ahmad Soebardjo, Mohammad Hatta, dan Darmawan Mangoenkoesumo. Redaksi beralamatkan di tempat tinggal Mohammad Hatta di Schoone Bergerweg 51 B, Rotterdam, berdekatan dengan *Handels Hoge school*. Dalam rangka peringatan ulang tahun *Indonesische Vereeniging* ke-15 pada 1923, Mohammad Hatta dan kawan-kawan diberi tugas menyusun *Gedenkboek Indonesische Vereeniging 1908-1923* yang diterbitkan pada April 1924. Buku tersebut berisi 13 (tigabelas) artikel yang menggunakan nama samaran³⁸ untuk kepentingan pengamanan pribadi para pengarangnya.

Salah satunya, tulisan Mohammad Hatta yang saat itu berusia 21 tahun, sangat tajam dan meyakinkan tentang posisi ekonomi berjudul "*Indonesia in de Wereldgemeenschap*" (Indonesia Dalam Masyarakat Dunia). Dalam tulisan tersebut, Hatta mengutip uraian J.E. Stokvis (Sosialis) yang menyatakan bahwa:

"Bermilyar-milyar keuntungan mengalir dari Hindia", dan bahwa "harta kekayaan yang ditanam di bumi Hindia mempergunakan tenaga-tenaga kerja kaum pribumi yang dibayar terlalu minim".

Sebagai bukti dikemukakan pula angka-angka yang menunjukkan keuntungan yang diperoleh dalam tahun-tahun peperangan. Pada akhir Perang Dunia I *Handels Vereeniging Amsterdam* (HVA) mengeluarkan keuntungan sebesar 60% di tahun 1920".

Gedenkboek mendapat kecaman keras dari kaum kolonialis Belanda yang memberi cap bahwa *Indonesische Vereeniging* sudah melangkah ke arah yang membahayakan. Selain artikel-artikelnya, juga gambar sampul bukunya, yakni warna merah putih dan ditengah-tengah terdapat gambar kepala kerbau. Selain itu, di halaman cover dalam terdapat lukisan Pangeran Diponegoro yang menggemparkan kalangan pemerintah Belanda dan pensiunan Belanda yang pernah bertugas di Hindia Belanda, seperti gubernur jenderal, residen, dan sebagainya. Pers Belanda juga memberi berbagai komentar tajam tentang isi *Gedenkboek* tersebut. Mereka tidak menduga bahwa para pelajar Hindia memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah penjajahan Belanda, soal-soal aktual mengenai keadaan di Hindia Belanda, dan masalah politik internasional.

Meskipun demikian, sikap radikal organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda ini tidak berkurang, malah bertambah tinggi suhunya di masa kepemimpinan Nazir Pamuncak yang susunan lengkap pengurusnya, yakni Nazir Pamuncak (ketua), A.A. Maramis (sekretaris), R. Soewarno (bendahara), Soekiman (komisaris). Dan Mohammad Nazif (archivaris). Pada rapat anggota 1 Mei 1924, Nazir Pamuncak menjelaskan tentang keterangan dasar:

"Indonesia yang bersatu, dengan menyingkirkan perbedaan golongan, dapat mematahkan kekuasaan penjajahan".

Tujuannya ialah memerdekakan Indonesia melalui suatu aksi massa nasional yang insaf dan berdasar pada tenaga sendiri. Ia menegaskan dengan adanya dua jenis penjajahan, yakni penjajahan politik dan ekonomi, maka aksi itu harus ditujukan kepada kemerdekaan politik dan sikap menentang kapital asing yang menyedot kekayaan Indonesia. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa politik non kooperasi adalah sendi perjuangan rakyat Hindia.

Di samping itu, dikatakannya, bahwa kerjasama dengan penjajah untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah menipu diri sendiri.

Kerjasama hanya bisa terjadi di antara dua golongan yang sama hak dan kewajiban serta kepentingannya. Apabila syarat itu tidak dipenuhi, maka kerjasama tersebut berarti mempermainkan “yang lemah” oleh “yang kuat” untuk kepentingan sendiri. Oleh sebab itu, *Indonesische Vereeniging* menolak kerjasama dan tetap bertujuan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Arah perjuangan *Indonesische Vereeniging* telah berubah menjadi organisasi politik tersebut, tidak terlepas dari pengaruh kehadiran Tiga serangkai (Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan R.M. Soewardi Soerjaningrat) yang diasingkan ke Belanda. Begitu pula, nama majalahnya mengalami perubahan dari “Hindia Poetra” yang terbit pada 1915 menjadi “Indonesia Merdeka” pada 1924.

Selanjutnya, tindakan radikal yang diambil pada masa kepemimpinan Nazir Pamuncak ialah pemecatan terhadap Noto Soeroto dan J.B. Sitanala. Noto Soeroto, penganut politik asosiasi adalah bekas mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Leiden. Ia putera Pangeran Notodiningrat dari Pakualaman Yogyakarta. Ia termasuk seorang pendiri *Indische Vereeniging*. Namun, ia kemudian membuka toko buku di Den Haag setelah berhenti kuliah. Ia juga dikenal sebagai seorang sastrawan dari Hindia di Nederland dan karangannya telah dibaca secara luas. Pada 1924, Arnold Mononutu membaca tajuk rencana majalah “Udaya”. Dalam tajuk tersebut, Noto Soeroto memuji jasa dan budi baik van Heutsz sebagai *pacificator Indonesia*. Van Heutsz dinilai oleh Noto Soeroto sebagai seorang “pahlawan” yang telah berjasa mendatangkan keamanan di Hindia Belanda.

Menurut Arnold Mononutu, pendapat Noto Soeroto dianggap salah dan tidak dapat diampuni. Ia meminta kepada Nazir Pamuncak sebagai ketua *Indonesische Vereeniging* untuk mengadakan rapat anggota. Dalam rapat itu, Arnold Mononutu tampil sebagai jaksa penuntut dan menegaskan dalam rapat tersebut tentang apa yang didengar langsung dari Noto Soeroto sebagai anggota organisasi tidak dapat dibenarkan. Arnold menyatakan bahwa tidaklah tepat Noto Soeroto memuji Van Heutsz yang tidak berperikemanusiaan dalam menindas perlawanan rakyat Indonesia, yang hendak mencari kebebasan dan kemerdekaan. Sikap yang demikian berlawanan dengan cita-cita perjuangan *Indonesische Vereeniging*. Oleh sebab itu, Arnold menuntut agar Noto Soeroto dikeluarkan dari *Indonesische Vereeniging*. Rapat anggota menyetujui tuntutan Arnold Mononutu sehingga

Noto Soeroto diberhentikan dari *Indonesische Vereeniging*, setelah diberi kesempatan kepadanya untuk membela diri.

Tindakan yang sama dilakukan pula terhadap J.B. Sitanala, bekas sekretaris *Indische Vereeniging*. Ketika diadakan rapat untuk memberhentikan Noto Soeroto, ia tidak hadir. Sitanala mengirim surat kepada surat kabar *Het Algemeene Handelsblad* yang dimuat dalam kolom surat pembaca pada terbitan 3 Januari 1925 dengan judul "*Een Booze Geest*" (Suatu Semangat Jahat). Dalam suratnya itu, ia menyerang anggota dan pengurus *Indonesische Vereeniging*, yang telah mengeluarkan Noto Soeroto dari organisasi. Ia mengirim surat dua kali kepada Surat kabar tersebut dengan nada yang sama. Nazir Pamuncak sangat marah terhadap sikap Sitanala itu. Mereka mengadakan rapat anggota dan mengundang Sitanala untuk mempertanggungjawabkan isi suratnya tersebut. Dalam rapat itu, pihak pengurus menjelaskan kepada Sitanala bahwa sebenarnya ia boleh berpendapat lain, namun ia tidak boleh membeberkan kepada pers. Sitanala tidak dapat membela dirinya dan mau menerima resiko yang ditimpakan kepadanya akibat perbuatannya tersebut. Dalam pemungutan suara, ternyata para anggota setuju agar Sitanala diberhentikan dari keanggotaan *Indonesische Vereeniging*. Tindakan *Indonesische Vereeniging* dengan mengeluarkan dua orang anggota berturut-turut hanya dalam jangka waktu sebulan, mendapat sorotan tajam dari pers kolonial Belanda. Mereka memperingatkan pemerintah Belanda agar berhati-hati terhadap *Indonesische Vereeniging* yang semakin radikal dan dapat mengancam kepentingan Belanda di Hindia Belanda.

Pasca rapat pemecatan Sitanala, dilakukan pemilihan pengurus baru yang berhasil memilih Soekiman Wirjosandjojo (ketua), Arnold Mononutu (wakil ketua), Soerono (sekretaris I), Mohammad Hatta (sekretaris II), Amir (komisaris), dan Muhammad Yusuf (komisaris). Pengurus *Indonesische Vereeniging* ini jumlahnya lebih banyak daripada jumlah anggota pengurus sebelumnya yang berkisar 5 (lima) orang saja. Pengurus baru ini berjumlah 8 (delapan) orang dengan tugas yang lebih berat. Sebulan kemudian, pengurus mengadakan rapat lagi untuk membicarakan program dasar organisasi. Rapat yang diselenggarakan pada 8 Februari 1925 yang dipimpin ketuanya, yaitu Soekiman Wirjosandjojo, memutuskan program dasar organisasi, sebagai berikut:

Pertama, Hanya satu Indonesia yang merasa bersatu, dengan menyampingkan perbedaan-perbedaan golongan yang dapat mematahkan kekuasaan penjajahan. Tujuan bersama yakni memerdekakan Indonesia dan menghendaki supaya dibangun suatu aksi massa yang nasionalis yang sadar dan bersandar pada kekuatan diri sendiri.

Kedua, ikut sertanya segenap lapisan rakyat Indonesia dalam perjuangan bersama untuk kemerdekaan itu adalah pula suatu syarat yang dibutuhkan secara mutlak untuk mencapai tujuan.

Ketiga, unsur yang paling berpengaruh dan bersifat inti dalam setiap masalah politik kolonial ialah pertentangan kepentingan antara penjajah dan yang terjajah. Kecenderungan politik penjajah untuk mengaburkan dan menyelubungi unsur ini harus dibahas oleh pihak yang dijajah dengan mempertajam dan menegaskan semua pertentangan itu.

Keempat, dengan memperhatikan pengaruh yang merusak dan demoralisasi dari penjajahan terhadap keadaan psikis dan fisik dalam kehidupan Indonesia, maka perlu diusahakan secara sungguh-sungguh normalisasi keadaan jasmani dan rohani.

Pada rapat 8 Februari 1925 tersebut diputuskan pula perubahan nama organisasi dari *Indonesische Vereeniging* menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Penggunaan nama "Indonesia" adalah suatu identifikasi terhadap watak nasional organisasi yang semakin ditingkatkan dalam perjuangan. Istilah "Indonesia" untuk mengganti "Hindia Belanda" semakin didengungkan oleh Perhimpunan Indonesia dalam setiap kesempatan, seperti pada pertemuan-pertemuan internasional. Mereka menggunakan topi "*fil*" yang sudah digunting ujungnya sebagai pici yang menunjukkan ciri nasional Indonesia. Dalam perjumpaan dengan para mahasiswa dari Asia ataupun Afrika, para mahasiswa Indonesia berusaha menjelaskan tentang adanya suatu kepulauan yang terletak di antara Benua Asia dengan Australia, antara Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik yang masih dijajah Belanda. Inilah Indonesia yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya dari kolonialisme Belanda.³⁹

Sejak Perhimpunan Indonesia di bawah kepemimpinan Soekiman dan kawan-kawannya, pemerintah Belanda mulai mengambil tindakan terhadap pengurus Perhimpunan Indonesia. Reaksi tersebut semakin hebat terlebih dengan *statement* PI di bawah pimpinan Soekiman, sebagai berikut (sesuaikan ejaan baru):

Pertama, hanya suatu Indonesia yang merasa bersatu padu, dengan menyampingkan perbedaan-perbedaan antara golongan-golongan masing-masing, dapat mematahkan kekuasaan kaum penjajah. Tujuan bersama yaitu kemerdekaan Indonesia mengehendaki terwujudnya suatu massa-aksi nasionalistis yang sadar dan bersandar pada kekuatan sendiri.

Kedua, ikut sertanya semua lapisan rakyat Indonesia dalam perjuangan bersama untuk kemerdekaan itu adalah juga suatu syarat yang mutlak benar-benar untuk mencapai tujuan tersebut.

Ketiga, unsur yang terpenting dan bersifat inti dalam setiap masalah politik kolonial yakni pertentangan kepentingan antara penjajah dan yang terjajah. Kecenderungan politik kaum penjajah untuk membikin kabur dan menyelimuti unsur tersebut harus dijawab oleh pihak yang terjajah dengan mempertajam dan menegaskan segala pertentangan.

Keempat, Melihat pengaruh dari penjajahan yang bersifat merusak dan menurunkan kesucilaan terhadap keadaan psysis dan psychis dari kehidupan Indonesia itu perlu diusahakan sekeras-kerasnya supaya dibikin normal lagi keadaan rohaniah dan jasmaniah itu.⁴⁰

Selanjutnya, pada 1926 Mohammad Hatta yang menjabat sebagai bendahara di organisasi ini dan dikenal sebagai sosok yang teliti, giat, tekun, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar, terpilih sebagai ketua baru PI dengan suara bulat untuk menggantikan Soekiman Wirjosandjojo yang telah lulus dan akan kembali ke tanah air⁴¹. Di bawah kepemimpinan Mohammad Hatta, PI berkembang menjadi suatu organisasi politik yang mempengaruhi jalannya politik rakyat di Hindia Belanda dan mendapat pengakuan dari PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) bahwa PI adalah *voorstap* (pos depan) dari gerakan nasional di Eropa⁴². Perhatian PI terhadap perkembangan pergerakan nasional di Hindia Belanda ditunjukkan dengan memberikan ulasan, saran, dan kritik yang disampaikan melalui tulisan-tulisan di berbagai koran dan majalah yang terbit di tanah air.

Pada saat pidato terpilihnya sebagai ketua PI, Mohammad Hatta menjelaskan bahwa:

“penjajahan merupakan cermin dari sifat serakah pihak Barat untuk menguasai negeri lain dan memanfaatkan hasil negeri jajahan untuk mendatangkan hasil sangat besar bagi Belanda. Oleh karena itu, Hatta mendorong bangsa Hindia, terutama kalangan PI untuk meningkatkan kemampuan berekonomi, di

samping menyadari soal kedudukan penjajahan. Ia pun melihat PI sebagai organisasi yang non kooperatif, di samping percaya pada diri sendiri dan membina persatuan. Ia menganjurkan untuk bersikap tegas dan kuat sebagai modal untuk menghidupkan organisasi PI. Selain itu, ia melihat kemerdekaan bukan sebagai kemegahan, tetapi untuk kemanusiaan dan peradaban. Hatta pun mengemukakan pula kemungkinan pecahnya perang Pasifik dapat menginspirasi bangsa Hindia untuk merdeka. Gagasan-gagasan Hatta inipun disebarkan bebas di Belanda, namun diberangus di tanah air”.

Majalah PI, yakni “Indonesia Merdeka” banyak dilaporkan yang tidak sampai ke alamat di Hindia Belanda karena disita oleh pihak kepolisian dalam penggeledahan terhadap orang-orang pergerakan yang dicurigai. Oleh Karena itu, majalah dan dokumen lain dari PI semakin lama semakin bertambah banyak untuk masuk ke tanah air melalui penyelundupan⁴³.

Sementara itu, PI meneruskan propaganda ke luar negeri dalam bidang politik. Anggota-anggotanya tersebar ke luar Nederland, seperti Arnold Mononutu dijadikan wakil PI di Paris untuk mempropagandakan cita-cita kemerdekaan di masyarakat negara tersebut. Penyebaran cita-cita kemerdekaan juga dilakukan setiap anggota PI di saat Saat libur musim panas, musim dingin di luar Nederland. Seperti yang dilakukan Muhammad Nazif, Iwa Koesoema Soemantri, Gatot Taroenamihardja, Aboetari, Soepomo, Sastromoeljono, Soediono, Boentaran, Boedharto martootatmodjo, darmawan Mangoenkoesoemo, Mohammad Ichsan, Djoenaedi, Dahlan Abdullah, Bahder Djohan, Mohammad Hatta, Samsi Sastrowidagdo, dan lain-lain.⁴⁴

Waktu itu, gerakan demokrasi internasional di bawah pimpinan bekas anggota parlemen Perancis Marc Sangnier sedang menyiapkan kongres untuk perdamaian yang diadakan di Bierville, Perancis pada Agustus 1926. Dalam kongres tersebut, Hatta hadir sebagai ketua mewakili PI ingin menunjukkan kepada kaum demokrat Barat bahwa antara dasar kemanusiaan dengan perjuangan revolusioner bagi kemerdekaan bangsa tidak dapat diputuskan. Langkah pertama dalam pidato Hatta pada pembukaan kongres, yakni memperkenalkan kata “Indonesia” dan bukan “Hindia Belanda” dalam merujuk tanah airnya. Sejak itu, peserta kongres menyebut “Indonesia”, termasuk orang-orang Belanda yang di awal pidato mereka masih menyebut “Hindia Belanda” dan mereka tidak mengulang

Istilah itu lagi, baik dalam perdebatan maupun dalam pembicaraan lainnya. Dalam tulisan-tulisan mereka ke luar, kepada kawan-kawan dan keterangan umum, mereka sebut “Indonesia”.⁴⁵

Kongres tersebut juga membuat kesepakatan bahwa perdamaian dunia tidak akan tercapai bila penjajahan masih terus menindas bangsa-bangsa, antara lain di Asia. Selain mempropagandakan tujuannya, PI berusaha untuk mendapat kontak dengan organisasi-organisasi di luar negeri Belanda untuk membangun hubungan internasional. Pada Februari 1927, PI mengirimkan utusannya untuk hadir dalam Kongres Liga Anti Kolonial di Brussel. Delegasi PI yang dipimpin Mohammad Hatta berhasil meyakinkan Kongres untuk membuat resolusi yang menyatakan bahwa kongres tersebut bersimpati terhadap gerakan Kemerdekaan Indonesia dan bersedia mendukungnya. Resolusi kedua menuntut penghapusan hukuman pengasingan yang terjadi di Indonesia dengan tujuan agar para pemimpin Indonesia yang saat itu diasingkan dimerdekakan. Dalam kongres-kongres itu Hatta menguraikan tujuan PI dan pemerintah Belanda tidak senang melihat apa yang dilakukan Hatta tersebut. Ia dianggap berbahaya, terlebih tulisan-tulisannya yang sangat tajam mengecam pemerintah kolonial serta dapat membangkitkan semangat rakyat untuk memberontak.

Selain itu, pada 1927 pengurus PI di bawah Mohammad Hatta juga menghadiri Kongres Wanita di Gland, Swiss dan Konferensi Liga Wanita Internasional untuk perdamaian dan kemerdekaan yang diadakan di negara tersebut. Di depan Kongres ini Hatta bicara tentang *“L’Indonesie et son problem d’indépendance”*. Eksploitasi ekonomi terhadap Indonesia dari kapital asing merupakan tema pokok dalam uraiannya. Pada 1929 Hatta hadir kembali sebagai utusan PI dalam Gerakan Liga Melawan Imperialisme dan Penjajahan, di Berlin yang membawanya bertemu dengan tokoh-tokoh dunia untuk memperkenalkan Indonesia di Eropa. Selanjutnya, arena propaganda dari PI semakin keras yang mengakibatkan pemerintah Belanda mengadakan penggledahan di beberapa rumah kediaman pengurus PI pada 1927. Pasca penggledahan tersebut, pada 26 September 1927 Pemerintah Belanda menangkap empat anggota pengurus PI, yakni Mohammad Hatta, Abdoel Kadir Djoeningrat, Ali Sastroamidjojo, dan Natsir Datuk Pamuntjak yang kemudian dimasukkan ke penjara di Rotterdam. Penangkapan ini menimbulkan protes, terutama di Indonesia sendiri, diantaranya PNI (Partai nasional Indonesia) khusus mengadakan rapat protes di Bandung⁴⁶.

Mohammad Hatta dan kawan-kawannya diadili pada tanggal 8 Maret 1928 dan mendapat hak pembelaan dari tiga orang ahli hukum Belanda. Jaksa menuntut agar mereka dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Dalam sidang pertama hakim belum memberikan putusnya, namun Hatta dan kawan-kawan sudah boleh meninggalkan penjara. Dalam sidang kedua yang diadakan pada 22 Maret 1928, Hatta membacakan pembelaannya, berjudul *"Indonesia Vrij"* (Indonesia Merdeka) yang diterbitkan dalam bentuk buku kecil. Ia mempelajari tentang Hukum Konstitusional sewaktu di penjara untuk membuat pembelaannya itu. Pembelaan yang saat dibacanya membutuhkan waktu selama tiga jam tersebut, menguraikan nasib bangsa Indonesia yang diakibatkan oleh penjajahan Belanda. Adapun, sebagian kutipan dari permulaan dan akhir pembelaan Hatta yang disalin dalam bahasa Indonesia, sebagai berikut:

"Yang Mulia Tuan-Tuan Ketua dan Hakim!

Tatkala dalam tahun 1924 redaksi Indonesia Merdeka menulis kata pendahuluan untuk tahun baru, kata-kata berikut yang keluar dari penanya: "Indonesia Merdeka" menjadi suara mahasiswa muda Indonesia, suara yang barangkali belum diperhatikan oleh yang berkuasa, tetapi suatu kali akan didengarnya. Tidak dengan tidak ada kesalahan suara itu diabaikan saja, sebab di belakang suara itu ada kemauan yang tegas untuk terus mencapai hak-hak yang cepat atau lambat akan menegakkan dalam dunia ini suatu Indonesia Merdeka.

Sedikit mereka menduga, bahwa masa itu begitu cepat ada balasannya, terutama dalam lingkungan yang memerintah. Lebih kurang diduga, bahwa suara itu begitu cepat di bawa ke muka pengadilan. Aku sekarang berdiri di muka tuan-tuan yang mulia, Presiden dan Hakim, untuk mempertanggungjawabkan tujuan dan perjuangan itu dari pandanganku.

Kutipan dari pada akhir pembelaan Hatta selanjutnya:

"Yang Mulia Tuan-Tuan Presiden dan para hakim!

.....Dengan menganalisa perhubungan kolonial, Perhimpunan Indonesia memperoleh suatu kenyataan, bahwa perhubungan itu dikuasai oleh dua tenaga yang bertentangan tujuannya, yaitu pendirian Nederland yang mau mempertahankan penjajahannya apa juga yang akan terjadi, dan t

Ujian Indonesia ke jurusan merdeka sama sekali. Dan ini menimbulkan keyakinan padanya, bahwa kemerdekaan Indonesia hanya dapat diperoleh dengan kekerasan. Tetapi hal ini bukanlah suatu pendapat yang luar biasa. Karena juga pendeta-pendeta dan anggota-anggota Perwakilan Rakyat Negeri Belanda mempunyai pendapat seperti itu, sebagaimana Mr. Duys kemarin menunjukkan dengan berbagai kutipan. Itu adalah hukum sejarah, bahwa lahirnya sesuatu bangsa selalu sejalan dengan penumpahan darah dan air mata.

Indonesia Merdeka menulis tentang itu dalam tahun 1924, halaman 1, sebagai berikut:

Cepat atau lambat pada suatu ketika bangsa yang tejajah mengambil kembali kemerdekaannya, itu adalah suatu hukum besi sejarah dunia. Cuma suasana dan keadaan betapa gerakan kemerdekaan itu terjadi, ikut ditentukan oleh mereka yang berkuasa. Sebagian besar tergantung pada mereka, apakah lahirnya kemerdekaan itu sejalan dengan penumpahan darah dan air mata atau nerjalan dengan proses perdamaian.

Negeri Belanda yang menguasai sepenuhnya, bagaimana Indonesia akan merdeka, dengan jalan kekerasan atau dengan jalan damai. Tetapi dengan memperhatikan sikap sebagian besar rakyat Belanda, seperti yang ternyata pada debat dalam Tweede Kamer pada tahun 1925 tentang undang-undang yang akan mengatur susunan Pemerintah Hindia Belanda, aku kuatir bahwa jalan yang pertama akan ditempuh.

Bahwa penjajahan Belanda akan berakhir, bagiku itu pasti. Itu hanya soal waktu dan tidak soal ya atau tidak. Janganlah Nederland mensugesti dirinya sendiri, bahwa penjajahannya akan tetap sampai akhir jaman.....dst.

Yang terhormat Tuan-Tuan Presiden dan Hakim!

Apabila aku sampai sekarang pada akhir pembelaanku, inginlah aku mempergunakan kedudukanku sebagai orang yang tertuduh menjadi penuduh terhadap kezaliman yang diderita terus menerus oleh bangsaku. Kepada Tuan-tuan, pendukung hukum dan keadilan, akuajukan pertanyaan, apakah sesuai dengan jabatan Tuan-tuan untuk menyetujui perbuatan Pemerintah Belanda yang bertentangan dengan hukum terhadap pemuda Indonesia yang tidak berdaya. Bertahun-tahun hidup kami di negeri ini dipersukar dengan berbagai macam cara. Kami kira, bahwa kami di sini dalam negeri Grotius, dimana hak azasi manusia dijunjung tinggi, merasai juga hak-hak elementer itu. Tetapi tidak! Karena orang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kami selain daripada perantaraan mahkamah, diambil cara imoril untuk menikam kami. Orang tua kami di Indonesia, dengan ancaman keluar dari jabatan pemerintah atau dengan cara lain, dilarang mengirim uang untuk anaknya di negeri Belanda, selama ia masih menjadi anggota Perhimpunan Indonesia. Tindakan itu

serupa dengan sehelai pedang yang bermata dua yang menyayat timbal balik. Pada satu pihak anaknya ditelantarkan di negeri orang dan menderita kesukaran, dan pada pihak lain ditimbulkan pertentangan antara bapa dan anak, antara generasi tua dan generasi muda. Juga dengan tiada ancaman itu ada hubungan yang tegang antara angkatan tua dan muda. Juga dengan tiada ancaman tindakan pemerintah ayah dan anak hidup dalam suasana terpisah. Orang tua yang hidupnya terikat kepada tradisi lama dan merasa hidupnya sudah dekat pada lobang kubur, ingin mempertahankan apa yang ada, berhadapan dengan angkatan muda yang menyongsong sinar merah pagi dan jiwanya penuh dengan cahaya baru yang datang. Keyakinannya begitu kuat dan kepercayaannya hidup dalam hatinya yang muda, sehingga tidak dapat dibunuh. Cinta dan semangat begitu dalam duduk dalam jiwanya, sehingga anak muda, sekalipun dengan jiwa yang luka, bersedia memutuskan hubungan keluarga untuk membela kepercayaannya.

Sungguhpun begitu, Tuan Presiden, cara mengadakan provokasi, cara menekan beberapa pelajar Indonesia di sini supaya hidup sengsara dan menderita, bertentangan dengan hukum dan berdosa!

Kepada Tuan-Tuan Hakim, pengasuh hukum, aku bertanya dengan penuh kepercayaan, apakah cara ini bukan suatu jalan yang tidak langsung untuk mengalangi kami di negeri ini bergerak bebas, yang bertentangan dengan hukum Undang-Undang Dasar? Kepada Tuan-Tuan aku berani bertanya dengan kepercayaan: apakah tindakan itu tidak melanggar kebebasan yang diakui oleh Undang-Undang Dasar?

Apakah tidak akan menimbulkan kejengkelan yang lebih besar pada kami, apabila orang dengan jalan yang sewenang-wenang saja menyuruh rasakan pada kami, juga dengan jalan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, betapa sedihnya nasib menjadi bagian daripada bangsa yang tidak merdeka? Sangat jelas, bahwa jaminan hukum bagi kami, putera-putera suatu bangsa yang terjalin, tidak ada dimana-mana.

Tetapi pemuda Perhimpunan Indonesia tahu menderita, sebagaimana tiap-tiap pemuda bangsa yang terjajah harus menderita. Masa mudanya bukan bulang terang seperti masa mudanya putera bangsa yang merdeka. Pada masa mudanya mereka menderita dan memberikan berbagai pengorbanan. Tetapi semuanya ini membina pikirannya dan karakternya dalam perjuangan untuk cita-cita yang mengubik dan memanggil. Panggilan suara rakyat Indonesia yang banyak serasa terdengar dan menggembirakan mereka dan bersama dengan rakyat banyak itu mereka mau berjuang.

Kami percaya masa datang bangsa kami dan kami percaya atas kekuatan yang ada dalam jiwanya. Kami tahu bahwa neraca kekuatan di

Indonesia senantiasa berkisar ke arah keuntungan kami. Orang katakana-kata Indonesia Merdeka-bahwa bangsa kami, yang besar di masa yang lampau, tidak lagi mampu untuk mendukung kebesaran di masa datang, bahwa tidak mungkin lagi mengatasi garis yang menurun. Kami tidak akan mengadili bangsa kami, sejarah akan menentukannya.

Sinar merah masa datang sudah mulai menyingsing sekarang. Kami menghormati itu sebagai datangnya hari baru. Pemuda Indonesia harus menolong kami mengemudi ke jurusan yang benar. Tugasnya ialah mempercepat datangnya hari baru itu. Ia harus menjadi bagiannya. Mudah-mudahan rakyat Indonesia merasa merdeka di bawah langitnya dan mudah-mudahan mereka merasa menjadi tuan sendiri dalam negara yang dikurniakan Tuhan kepadanya.

Sekarang aku sedang siap menunggu keputusan tuan-tuan tentang pergerakan kami. Kata-kata Vlaming Rene de Clerq, yang dipilih pemuda Indonesia sebagai petunjuk, hingga dibibirku:

*Hanya satu negeri yang dapat disebut negeriku
Ia besar karena perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku.⁴⁷*

Salah seorang pembela, berasal dari *Social Demochratische Arbeiders Partij* (SDAP), berhasil membuktikan ketidakbenaran tuduhan terhadap keempat pengurus PI itu. Akhirnya, pada 22 Maret 1928 Pengadilan memutuskan pembebasan bagi keempat pengurus PI tersebut. Proses pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa mereka menganjurkan kekerasan untuk mencapai tujuan. Pasca peristiwa ini, perjuangan PI semakin keras untuk kemerdekaan bangsanya dengan menganjurkan gerakan non-kooperatif secara total.⁴⁸ Sementara itu, salah satu unsur yang menyebabkan para mahasiswa Indonesia belajar di Nederland menjadi militan, yakni adanya perbedaan antara mereka dengan para mahasiswa Belanda. Para mahasiswa Indonesia di Nederland di samping belajar, mereka harus memperhatikan perjuangan nasionalnya⁴⁹.

PI menjadi tombak terdepan di luar negeri bagi perjuangan kaum pergerakan di tanah air. Di samping itu, momentum pembebasan ini juga merupakan babak baru "pertemuan" Hatta dan Soekarno, walaupun hanya sebatas hubungan melalui tulisan-tulisan di media massa. Seperti, artikel Sukarno di *Soeloeh Indonesia Moeda* pada 1928 dengan judul "Pemandangan dan Pengajaran" yang berisi pembelaannya terhadap Hatta dan kawan-kawan yang sekaligus dimaksudkan untuk mengurangi simpati

berlebihan yang diterima para hakim-hakim Belanda itu. Terhadap pembebasan para tokoh-tokoh PI tersebut, Soekarno berpendapat:

"Kita tidak perlu berterima kasih kepada hakim-hakimnya, karena pertentangan kepentingan yang lebih besar tetap ada, yakni antara pemerintah yang menjajah dan yang dijajah. Karena, perkara semacam itu bakal terjadi lagi".⁵⁰

"Pertemuan" Hatta dan Soekarno terjadi lagi, ketika Hatta berpolemik dengan J.E. Stokvis, seorang sosial demokrat dan pemimpin *Indische Sociaal Demochratische Vereeniging* (ISDV). Polemik ini terkait dengan keputusan Kongres II kaum sosialis internasional di Brussel, Swiss pada Agustus 1928, yakni mengusulkan untuk membagi-bagi daerah jajahan yang boleh merdeka ke dalam empat kelompok, sebagai berikut: *pertama*, negara yang harus segera diberi kemerdekaan; *kedua*, negara yang harus mendapat hak menentukan nasib sendiri; *ketiga*, negara yang berhak atas pemerintahan sendiri; *keempat*, negara yang masih harus tetap berada di bawah kekuasaan orang-orang kulit putih. Dalam hal ini, Indonesia dimasukkan ke dalam kelompok keempat.

Mohammad Hatta sebagai ketua PI sangat geram dengan penggolongan Indonesia ke dalam klasifikasi tersebut. Melalui artikel berjudul "Socialist Internasional dan Kemerdekaan" yang dimuat di "Soeloeh Indonesia Merdeka" pada Oktober 1928 yang mengkritik secara pedas keputusan itu menyebutkan, antara lain:

".....Munafik! Sebab orang sosialis yang menamakan dirinya pembela kaum tertindas nyatanya masih melihat pertimbangan-pertimbangan ekonomi, karena kaum terjajah seperti Indonesia telah menghasilkan jutaan gulden tiap tahun bagi Belanda. Jika Indonesia merdeka, tentu saja kaum buruh Belanda akan merugi.....".⁵¹

Dalam polemic "Hatta dan Stokvis" ini, Soekarno ikut terusik dan membela Hatta melalui tulisannya berjudul "Mohammad Hatta-Stokvis" dalam *Soeloeh Merdeka*, 1928. Tulisan Soekarno ini lebih dari sekadar membela Hatta, karena jiwa nasionalisnya pun ikut terusik. Hatta menyerang Stokvis dan kaum sosialisnya dengan pendekatan ekonomi, sedangkan Sukarno menyerangnya dengan menyebut kaum sosialis melakukan penyimpangan yang ditetapkannya sendiri, yakni "*hak self determination*" yang sepenuh-penuhnya bagi semua bangsa dan mencela penjajahan

kapitalis-imperialis yang menyebabkan penduduk asli negeri-negeri jajahan itu menjadi terjerumus ke dalam perbudakan, kerja paksa atau pembinasan sama sekali.

Namun, hubungan Sukarno dan Hatta menjadi terganggu dan akhirnya keduanya sering berpolemik secara tajam. Hal ini tidak terlepas dari perjuangan Hatta tersebut dilancarkan di Belanda yang menjajah Indonesia yang menjadikan tindakan-tindakan dan pemikiran-pemikiran Hatta memberikan warna dalam dinamika perjuangan. Hatta yang beranggapan bahwa sikap non kooperatif bisa berubah sesuai perkembangan merupakan suatu hal yang memungkinkan bagi perjuangan orang Indonesia untuk duduk dalam parlemen Belanda. Pemikiran ini ditentang Soekarno yang tidak menyetujui orang Indonesia duduk dalam parlemen Belanda. Perbedaan pandangan tersebut menjadi perdebatan hangat setelah Hatta ditawari kalangan "*Onafhankelijke Socialistische Partij*" (OSP) atau Sosialis Merdeka untuk menjadi anggota parlemen Belanda. Meskipun, sebenarnya ia telah menolak dengan alasan ingin berjuang di Indonesia pasca penyelesaian studinya. Namun, pemberitaan telah menyebar di Indonesia tentang penawaran OSP dan Hatta disebutkan menerima kedudukan tersebut. Kalangan PNI, termasuk Soekarno menuduh Hatta tidak konsisten dalam menjalankan sikap perjuangannya yang bersifat non -kooperatif.

Hal lain yang mengganjal, terkait hubungan Hatta dan Soekarno, yakni sebelum ditangkap Belanda, saat Soekarno aktif menggalang PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) yang didirikan pada 1927; Hatta tidak menyetujuinya, karena PPPKI, seperti sebelumnya tidak banyak berarti dalam perjuangan. Hatta menilai bahwa PNI sendiri belum berhasil mencetak kader, karena lebih mengutamakan penggalangan massa. Di sini, salah satu perbedaan keduanya, Soekarno lebih menyukai massa dan Hatta lebih suka mendidik kader. Menurutnya, pendidikan politik harus dilakukan melalui surat-surat kabar dan pertemuan-pertemuan yang bersifat kursus untuk menciptakan kaderisasi. Pemikiran ini didasarkan dengan adanya kaderisasi tidak akan terjadi kekosongan pemimpin, bila Belanda melakukan penangkapan para pemimpin lapisan pertama.

Selain PPKI, PNI pun tidak lepas dari kritik Hatta melalui artikelnya berjudul "Buah Pikiran Politik" yang ditulis pada 1 Februari 1929. Ia menyebut PNI lemah organisasinya dan belum memiliki anggota secara

masal, meskipun dalam rapat-rapat umum selalu dibanjiri massa. Oleh karena itu, PNI perlu melakukan pendidikan politik yang terencana. Bung Hatta menulis, diantaranya (ejaan menyesuaikan):

*“Tidak cukup, kalau rakyat bertepuk tangan riuh kalau misalnya Ir Soekarno berbicara; tidak cukup manakala rakyat menjadi Soekarno saja. Yang perlu yaitu supaya dalam hati tiap-tiap lid PNI hidup seorang Soekarno, pendeknya tidak cukup kalau hanya satu saja Soekarno, melainkan beribu-ribu, kemudian berjuta-juta. Pendeknya di seluruh PNI ada Soekarno. Dan kalau rakyat PNI terus berusaha begini, barulah besar patai kita; bolehlah kita memaksa pemerintah melakukan permintaan kita”.*⁵²

Dalam hal ini, Sukarno menyampaikan pemikirannya terhadap pentingnya massa aksi:

*“Partai Nasional Indonesia dengan tegas mengatakan satu-satunya daya yang dapat menggugurkan imperialisme Belanda di Indonesia ini adalah satu massa aksi yang revolusioner. Satu massa aksi dari pada seluruh Marhaen Indonesia yang berpuluh-puluh juta”.*⁵³

Di samping itu, dalam menanggapi pandangan tentang pentingnya pendidikan rakyat, Sukarno berpendapat:

“Mereka mencoba menerangkan pandangan mereka yang mengerikan. ‘Pertama kita harus mendidik rakyat kita yang jutaan jumlahnya. Mereka harus dipersiapkan untuk memerintah mereka sendiri. Kedua, kita harus memperbaiki kesehatan mereka agar tahan berdiri tegak. Bukankah lebih baik kalau segalanya sudah lengkap dan beres terlebih dahulu?”

*Satu-satunya waktu agar segalanya sudah lengkap dan beres ialah bila kita sudah mati! Untuk mendidik mereka secara pelan-pelan akan memakan waktu beberapa generasi. Kita tidak perlu menulis tesis atau membasmi malaria sebelum kita memperoleh kemerdekaan! Indonesia merdeka SEKARANG! Setelah itu baru kita mendidik dan memperbaiki kesehatan rakyat dan negeri kita. Hayo, bangkitlah sekarang!”.*⁵⁴

Dalam kenyataannya, PNI yang mengandalkan pada massa inipun harus mengalami kehancuran, saat Soekarno sebagai pimpinan organisasi tersebut beserta beberapa kawannya ditangkap Polisi Kolonial Belanda pada 29 Desember 1929, setelah menghadiri dan berpidato pada acara musyawarah PPPKI di Solo. Pemerintah Kolonial geram atas kiprah Sukarno

yang dianggap semakin agitatif. Pada 1931, PNI terpaksa dibubarkan oleh Sartono yang diganti dengan Partindo (Partai Indonesia). Saat itu, Hatta menyarankan agar PNI tidak dibubarkan, meskipun tanpa Soekarno. Selain itu, menurut Hatta pembubaran PNI dianggap memalukan dan melemahkan pergerakan rakyat. Para pemimpin PNI yang membubarkan partainya itu menunjukkan kelemahan mereka yang dinilai Hatta, bahwa mereka tidak bersedia berkorban. Dalam hal ini, Hatta menyatakan bahwa kemauan memberikan korban itulah yang dididik bertahun-tahun oleh Perhimpunan Indonesia.

Penggantian PNI dengan Partindo ini memperoleh tentangan dan protes sebagian besar cabang-cabang PNI yang kemudian membentuk “Golongan Merdeka” di daerahnya masing-masing. Perhimpunan Indonesia di Belanda pun tergerak untuk membantu persoalan kemelut di tubuh PNI ini. Dalam hal ini, Mohammad Hatta membantu Golongan Merdeka tersebut dengan menyatakan:

“Baru empat orang pemimpin dihoekoem, partai diboebarkan” katanja. “Di India berpoeloeh-poeloeh riboe anggaoeta Indian National Congress ditangkapi, karena bergerak atas andjoeran Gandhi pergi kepantai oentoek memboeat garam, partai dan gerakan djalan teroes. Gerakan itu baroe berhenti sesoedah Pemerintah Kolonial di India mentjabut kembali berbagai peratoeran dan larangan”⁵⁵.

Antara beberapa pemimpin “Golongan Merdeka” dan Mohammad Hatta tercapai persetujuan melalui surat menyurat untuk mendirikan “**Pendidikan Nasional Indonesia**” (lebih dikenal sebagai **PNI Baru**). Pendirian ini mendorong Hatta, yang waktu itu masih di Belanda, membuat perjanjian dengan Soedjadi, salah seorang terkemuka dalam “Golongan Merdeka”, untuk menerbitkan sebuah majalah bernama “Daulat Ra’jat”. Dalam suratnya kepada Soedjadi, Hatta mengartikan pemilihan nama majalah itu mencerminkan:

“Bagaimana sikap kita terhadap rakyat. Daulat Ra’jat akan mempertahankan azaz kerakyatan yang sebenarnya dalam segala susunan: dalam politik, dalam perekonomian dan dalam pergaulan sosial. Bagi kitarakyat itu yang utama, rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan (sovereniteit). Karena rakyat itu jantung hati bangsa. Dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi rendahnya derajat kita. Dengan rakyat itu

kita akan naik dan dengan rakyat kita akan tenggelam. Hidup atau mati rakyat Indonesia bergantung kepada semangat rakyat. Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti, kalau dibelakangnya ada rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatan dirinya. Dalam penutup suratnya itu Hatta mengatakan: “Yang aku menulis itu dalam beberapa baris saja dijadikan inti didikan kita kepada kader partai. Aku dalam waktu yang dekat akan menulis ‘Kata pendahuluan’ untuk Daulat Ra’jat dan mungkin sebuah karangan tentang Koloniale Politiek, yang isinya akan menguraikan Dari Politiestaat ke Rechtsstaat dan kembali lagi ke Politiestaat”.⁵⁶

Sedangkan, dasar “**Pendidikan Nasional Indonesia**” (PNI Baru) ini terjelaskan dalam tulisan Hatta di “Daulat Ra’jat” no 37, 20 September 1932, setelah ia pulang ke tanah air dan memimpin organisasi ini. Adapun cuplikan tulisan yang menyesuaikan dengan ejaan baru, antara lain:

“.....Pendidikan nama perkumpulan kita, karena kita butuh akan didikan yang benar! Dengan jalan pendidikan rakyat jelata akan mendapat keyakinan bahwa tidak saja pemimpin harus tahu akan kewajibannya, tetapi juga rakyat semuanya. Bukan saja pemimpin yang harus berjuang, malahan rakyat juga turut berjuang. Ada suatu kebenaran yang sering dilupakan, bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dapat dicapai oleh pemimpin-pemimpin saja, melainkan oleh usahanya dan keyakinan rakyat yang banyak. Nasib rakyat Indonesia tenggelam di dalam tangan rakyat sendiri.

Maupun di kota maupun di desa, tempat rakyat berjuang mempertahankan penghidupannya sehari-hari, rakyat harus termakan Kedaulatan rakyat. Ia harus tahu akan hak dan harga dirinya. Kalau keyakinan itu sudah berkobar dan dipapah oleh iman yang teguh dan apekerti yang bulat, maka semangat rakyat yang sudah merdeka, biarpun Indonesia masih diperintah oleh orang asing. Diri orang boleh dirantai, akan tetapi semangat merdeka tidak dapat diikat.

Mendidik rakyat, supaya timbul semangat merdeka itulah pekerjaan kita yang utama. Ini bukan suatu pekerjaan yang mudah dan lekas tercapai, akan tetapi suatu pekerjaan yang berkehendak kepada iman, yakin, sabar dan kemauan yang keras. Dengan jalan mendidik diri kita itu, kita akan mencapai suatu organisasi yang teguh.

Ddmokrasi dan agitasi saja akan mudah, karena tidak berkehendak akan kerja dan usaha terus menerus. Dengan agitasi akan mudah mebangkitkan kegembiraan hati orang banyak, tetapi tidak membentuk pikiran orang. Karena kerap kali kegembiraan sementara itu lenyap dengan lekas.

*Agitasi baik pembuka jalan! Didikan membimbing rakyat ke organisasi! Sebab itu usaha kita sekarang: Pendidikan!*⁵⁷

Sementara itu, Mr Sartono, Ketua Partindo dengan perantaraan para pelajar yang baru tiba di negara Belanda berusaha untuk mempengaruhi para pemuda yang masih berada di negara tersebut untuk memihaknya. Begitu pula, Partai Komunis Nederland berusaha pula melakukan pengaruhnya dengan bekerja sama dengan para pelajar yang pro Partindo. Dalam susunan pengurus PI baru pada 1931 terpilih Rustam Effendi menjadi ketua dan, selanjutnya ia dikenal sebagai anggota dari Partai Komunis Nederland yang kemudian menjadi anggota parlemen Belanda sebagai wakil partai tersebut⁵⁸. Pengaruh Komunis yang berpengaruh terhadap kemerosotan PI menjadikan organisasi ini tidak lagi memiliki peran dan, kemudian berakhir sebagai pos terdepan pergerakan kemerdekaan Indonesia di Eropa.

5) Solidaritas Indonesia: Sumpah Pemuda

a. Kongres Pemuda Indonesia I

Perkembangan politik yang semakin kondusif bagi kaum pergerakan yang bangga berlabuh dalam suasana ke-Indonesiaan telah mendorong pelbagai gerakan pemuda yang semula masih bersifat kedaerahan, mendambakan persatuan Indonesia, bahkan kemudian berubah menjadi simbol kehidupan yang terus digelorakan dan diperjuangkan. Organisasi pergerakan nasional merupakan wadah bagi kaum intelektual yang disatu pihak telah mengalami alienasi sosio kultural dan di pihak lain memerlukan ceruk sosial baru untuk mewadahi arena bergerak dan forum komunikasi politik. Ide nasionalisme mentransenden etnosentrisme, primordialisme, dan komunalisme diganti dengan solidaritas nasional. Perhimpunan Indonesia dengan manifestasi politiknya pada 1925 telah menegaskan kesatuan sebagai faktor mutlak bagi terbentuknya *nation* Indonesia yang terbebas dari cengkraman kolonialisme.

Kesemuanya itu termanifestasikan dalam penyatuan kehendak organisasi-organisasi pemuda yang berlabelkan kedaerahan dan, juga atas nama perorangan bermusyawarah untuk menyiapkan penyelenggaraan Kongres Pemuda I di gedung *Lux Orientis* di Batavia pada 15 November 1925. Kongres Pertama yang diketuai oleh M. Thabroni -dari Perhimpunan

Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang lahir pada 1926 karena terinspirasi perjuangan PI, berhasil diselenggarakan pada 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia dengan tujuan “menggugah semangat kerja sama di antara bermacam-macam organisasi pemuda di tanah air guna mewujudkan persatuan Indonesia di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia”.

Dalam Kongres Pertama ini, M. Thabroni sebagai ketua, menyampaikan pidato yang diakhiri dengan kata-kata:

“Supaya kongres ini menyuarakan generasi muda sekarang yang nantinya terpanggil untuk bekerja, berkarya, berjuang, dan meninggal untuk kemerdekaan nusa dan bangsa, rakyat di seluruh Kepulauan Indonesia, bersatulah!”.

Di samping itu, Mohammad Yamin, seorang siswa AMS di Surakarta yang memiliki hubungan erat dengan peristiwa Kongres Pemuda dalam menggalang persatuan dan termasuk arsitek dari bangunan kesatuan Indonesia, menyampaikan pidato berjudul, *“Kemungkinan-Kemungkinan Untuk Bahasa dan Kesusasteraan di Kemudian Hari”*. Ia menguraikan dalam pidatonya, antara lain:

“Dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap bahasa daerah, seperti bahasa Sunda, Aceh, Bugis, Madura, Minangkabau, Rotti, Batak, dan lain-lain, hanya ada dua bahasa, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu yang mengandung harapan untuk menjadi bahasa persatuan. Bahasa Melayu akan berkembang secara perlahan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan bagi rakyat Indonesia”.

Di samping itu, Mohammad Yamin menyampaikan pula bahwa kebudayaan Indonesia di masa depan akan diutarakan dalam bahasa Melayu. Untuk itu, ia menyatakan betapa perlunya suku bangsa di tanah air segera memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa kebangsaan. Menurutny, hal ini telah diperagai oleh bahasa Melayu. Muhammad Yamin menutup pembicaraannya secara keseluruhannya yang disampaikan dalam bahasa Belanda, antara lain:

“Sejarah kini ialah menuju nasionalisme yang dalam dan luas, kearah kemerdekaan dan tujuan yang luhur, yaitu kebudayaan yang lebih tinggi nilainya, agar Indonesia dapat mempersembahkan kepada dunia hadiah yang lebih berharga dan lebih indah, selaras dengan kebangsaan kita”.

Pidato tersebut mendapat komentar Prof. Dr. Hooykaas, yakni:

“Mohammad Yamin akan menjadi pelopor dari usaha pemakaian bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pergaulan di Indonesia. Dan, bahasa Belanda secara perlahan pasti akan terdesak karenanya”⁵⁹.

Menurut M. Thabroni, sebenarnya pada Kongres Pemuda I secara aklamasi sudah dapat disetujui bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Pendapat Thabroni ini hanya diketahui oleh Muhammad Yamin dan Djamaluddin (Adi Negoro) bahwa tujuan sebenarnya yang hendak dicapai adalah satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Dan bahasa itu haruslah bernama bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Namun Yamin dan Djamaluddin belum dapat menerima pendapat Thabroni, dan oleh karena itu masalah nama bahasa persatuan ditunda pada Kongres ke II, dua tahun kemudian.

Kongres Pemuda I itu bertujuan, yakni: *Pertama*, memajukan faham persatuan kebangsaan. *Kedua*, mengeratkan hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Sementara itu, Kongres ini membicarakan pula “kewajiban agama dalam pergerakan kebangsaan”, diantaranya berisi anjuran agar bangsa Indonesia bersikap toleran terhadap agama lain. Thabroni pun menyatakan:

“Memang benar, tujuan Kongres I belum seluruhnya berhasil, antara lain perihal mengadakan fusi di antara organisasi-organisasi pemuda. Bolehlah, Kongres Pemuda I itu suatu kongres orientasi. Walaupun demikian, hasil kongres yang utama yaitu mengakui dan menerima cita-cita persatuan atau de Indonesische Eenheidgedachte, meski masih samar-samar”.

Pasca Kongres Pemuda I, usaha untuk persatuan di kalangan pemuda terus dilaksanakan. Pada 15 Agustus 1926 diadakan kembali pertemuan para perkumpulan, yakni Jong Java, Jong Sumatanen Bond, Jong Celebes, Voor Ambonsche Studeerenden, Jong Minahasa, Jong Islamieten Bond, Jong Bataks Bond dengan Panitia atau Komite Kongres pemuda I. Pertemuan itu diadakan di gedung bioskop “Java” di Jakarta. Acara rapat membahas usul Jong Java untuk mengadakan federasi di antara berbagai organisasi pemuda. Namun demikian, rapat tersebut belum membawa hasil positif. Enam bulan kemudian, tepatnya pada 20 Februari 1927 di Jakarta diadakan lagi pertemuan perkumpulan-perkumpulan pemuda kedaerahan dan PPPI. Rapat tersebut menunjukkan hasil yang lebih maju, karena telah membahas usul fusi dari Jong Java. Fusi lebih maju dari federasi yang hanya sekedar gabungan dari perkumpulan-perkumpulan pemuda daerah itu, namun belum menunjukkan kesatuan yang bulat. Organisasi-organisasi itu

tetap merupakan unit-unit kecil yang hanya tergabung dalam federasi besar. Sedangkan, pengertian fusi yakni semua perkumpulan pemuda tersebut mengalami proses peleburan dan akan menjelma menjadi satu organisasi pemuda Indonesia yang baru.

Proses persatuan itu tentu melalui berbagai cara, baik resmi maupun forum-forum rapat serta lobbying-lobbying seperti yang dilakukan di *Indonesische Clubhuis* di Kramat Raya 106, Batavia menjelang berlangsungnya Kongres Pemuda II dalam dialog-dialog ringan tapi bermakna dalam. Hal ini tercermin dari kelakar Adnan Kapau Gani, seorang pemuda Minangkabau yang mencintai Palembang dengan Jusupadi Danoehadiningrat, seorang putera bangsawan Yogyakarta, sebagai berikut:⁶⁰.

Adnan Kapau Gani, *"Sementara ini, enaknya gini aja dulu, Sup! Kalau situ dahar gudek ame nasi, jangan lupa plus ama empek-empeknya!"*

Muhammad Yamin menimpali, *".....dan bagus lagi.....tambah rendang". Kemudian disambut lagi oleh pemuda Bandung, "Yang paling baik gudek met empek-empek met sagu met oncom met lain-lainnya lagi!"*

Dalam perkembangannya, persatuan di kalangan pemuda akhirnya tercapai oleh intensifikasi dialog maupun diskusi-diskusi diantara mereka. Gedung *Indonesische Clubhuis* (I.C) di Kramat Raya 106, Batavia yang juga menjadi tempat tinggal para pemuda, diantaranya Mohammad Yamin yang telah menjadi mahasiswa *Recht Hogeschool*, sering menjadi tempat diskusi mereka dengan cara-cara unik dan lebih bersifat spontan. Biasanya, setelah makan malam mereka lanjutkan dengan diskusi di meja makan dengan topik-topik pembicaraan sekitar masalah politik, kemasyarakatan, kebudayaan, dan lain-lain yang berlangsung hampir setiap malam.

Para pemuda itu juga mendidik diri dan menggariskan tahun 1928 bahwa pemimpin harus pandai mendekati dan menyelami hati rakyat. Pemuda-pemuda pada tahun 1928 sudah menganggap puncak-puncak kebudayaan daerah sebagai kebudayaannya sendiri, yakni kebudayaan Indonesia. Salah satu contoh, yaitu Abu Hanifah, pemuda asal Sumatera Barat pandai menarikan "Gatotkaca Gandrung", tarian Minahasa, tarian Ambon, di samping tarian Sumatera Barat. Ia juga bisa berbahasa Jawa dan memahami "Epos Mahabarata", walaupun ia lulusan A.M.S bagian B (Ilmu Pasti Alam) dan mahasiswa Kedokteran yang tentu saja tidak mempelajari Sastra. Selain itu ia juga mahir bermain sepak bola. Jadi saat

itu, pemuda memiliki kemampuan serba komplit, baik dalam organisasi, seni, maupun sport.

Pemuda-pemuda tahun 1928, termasuk Mohammad Yamin adalah seorang pemuda idelais-utopis pada jaman itu. Mereka memiliki cita-cita sangat tinggi, padahal kondisi dan situasi saat itu sama sekali belum terbayangkan adanya kemungkinan untuk mewujudkannya. Mereka berbicara tentang tanah air, bangsa, bahasa, negara merdeka, padahal poltik pemerintah Kolonial Belanda sangat keras terhadap hal-hal yang remeh dan biasa sekalipun. Secara perorangan, para pemuda ini tidak mau kalah dengan para pemuda Belanda. Meskipun kebanyakan para pemuda tersebut berasal dari keluarga biasa pula, namun semangat belajar untuk menguasai bidang yang ditekuninya dilakukan rata-rata secara maksimal, di samping harus memikirkan keadaan bangsanya.

Secara internal, organisasi-organisasi pemuda itu juga diatur secara cermat dalam menyelenggarakan administrasinya. Semua anggota organisasi juga terdaftar, di samping itu salah satu persyaratan menjadi anggota, yakni memiliki prestasi dalam studinya. Apabila ada pemuda yang "sok pintar" ingin coba-coba tampil ke mimbar untuk berpidato, pemuda tersebut akan mendapat cemooh, kritik, dan teriakan., "*Belajar dulu, Bung!*" Oleh karena, pemuda-pemuda itu telah melakukan seleksi dalam diri mereka sendiri dan hanya pemuda-pemuda yang berbakat, serius dalam cita-citanya akan tampil ke depan sebagai pemimpin bangsanya.

b. Kongres Pemuda Indonesia II

Pada waktu tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia, yakni Mohammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Nazir Pamuncak, dan Abdulmajid ditangkap oleh polisi Belanda pada Desember 1927 karena kegiatan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, maka PPPI menganggap sudah tiba waktunya untuk lebih dalam merundingkan persatuan organisasi-organisasi pemuda Indonesia. Pada bulan Juni 1928 dibentuklah Panitia Kongres Pemuda ke-II dengan susunan, sebagai berikut:

Ketua	: Soegondo Djojopoespito (PPPI)
Wakil Ketua	: Djoko Marsaid (Jong Java)
Sekretaris	: Mohammad Yamin (JSB)
Bendahara	: Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond)

Pembantu I	: Djohan Mohammad Tjai (JIB)
Pembantu II	: Kontjosoengkono (Pemuda Indonesia)
Pembantu III	: Sendoek (Jong Celebes)
Pembantu IV	: J. Leimena (Jong Ambon)
Pembantu V	: Rochjani (Pemuda Kaum Betawi)

Tokoh-tokoh pemuda tersebut masing-masing sebagai pimpinan delegasi organisasi pemuda yang diwakilinya. Adapun yang menghadiri kongres adalah semua perkumpulan pemuda dan mahasiswa serta perkumpulan pemuda dan mahasiswa serta kumpulan kaum dewasa dan partai politik, dengan jumlah yang hadir yakni 750 orang. Seperti yang dikatakan ketuanya, Soegondo Djojopoespito, Kongres pemuda II ini sebetulnya tidak hanya untuk pemuda saja, tetapi merupakan rapat umum dan terbuka bagi semua orang yang suka menghadirinya. Dari pihak kaum dewasa yang hadir tokohnya adalah Mr Sartono, mewakili PNI cabang Betawi, Kartakoesoema dari PNI cabang Bandung, Abdulrachman dari Boedi Oetomo cabang Betawi, Mr. Soenario dari Persaudaraan Antar Pandu Indonesia (P.A.P.I), Kartosuwirjo dari Pengurus Besar partai Sarikat Islam, Sigit dari *Indonesische Club*, Moehidin mewakili Pasundan, A. Mononutu dari Persatuan Minahasa. Selain itu, hadir pula tokoh-tokoh dari perseorangan, seperti S. Mangoensarkoro, Nona Poernomowoelan, Mohammad Nazif, Siti Soendari, Emma Poeradiredja, Koentjoro Poerbopranoto, Kasman Singodimedjo, Soekmono, Soerjadi, Djaksodipoero (Wongsonegoro, SH), Djaksadipoero, Sjahboedin latief, Mohammad Roem, W.R. Soepratman, dan lain-lain. Adapun dari *Volksraad* hadir, diantaranya Soerjono dan Soekowati; dari Pemerintah Hindia Belanda, yakni Dr. Pyper dan Van der Plas; dari Surat kabar Keng Po, yakni Saeroen. Sedangkan polisi-polisi dari Hindia Belanda hadir dengan bersenjata lengkap⁶¹.

Kongres Pemuda II yang diprakarsai PPPI berlangsung di Weltevreden, Batavia pada 27 dan 28 Oktober 1928 dibuka dengan pidato sambutan dari Ketua Kongres, Soegondo yang menguraikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia menggambarkan latar belakang kelahiran Boedi Oetomo, berbagai organisasi kedaerahan hingga terjadinya Kongres Pemuda Pertama yang diprakarsai M. Tabhroni dari PPPI. Soegondo berpendapat bahwa pada kongres tersebut perasaan persatuan Indonesia mulai tertanam dan sebaliknya perbedaan-perbedaan sempit berdasarkan kedaerahan mulai luntur. Pada Kongres Pemuda kedua pada Oktober 1928

ini diharapkan akan terus memperkuat persatuan yang telah tertanam di hati sanubari para pemuda⁶².

Pidato-pidato yang disampaikan dalam kongres itu, diantaranya Mohammad Yamin dari JSB yang menjabat juga sebagai sekretaris kongres, berjudul "*Persatuan dan Kebangsaan Indonesia*" yang menguraikan arti persatuan dan hubungan antara persatuan dengan pemuda. Menurut Yamin, persatuan bukan hanya diperlukan oleh kalangan pergerakan saja, tetapi juga bagi para pemuda bahwa persatuan itu harus dapat dijadikan "darah daging" mereka. Dalam hal ini, Yamin menyebutkan lima faktor pengikat kekuatan bangsa Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Tentang bahasa, Yamin mengemukakan bahwa bahasa Melayu dalam Kongres Pemuda itu telah menjelma menjadi bahasa Indonesia. Dikatakan selanjutnya, bahwa Bahasa Indonesia memberi pengaruh pada persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa yang menggunakan ratusan bahasa daerah. Atas saran Mohammad Yamin itu pula, pada akhirnya Kongres Pemuda Indonesia ke-II diputuskan dan ditetapkan bahwa bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia⁶³.

Selain itu, pada Kongres Pemuda Indonesia II ini, Mohammad Yamin adalah sosok yang memainkan peranan besar. Ia sudah bekerja dari masa persiapan sebelum rapat-rapat dimulai, bahkan dua tahun sebelum kongres ini berlangsung sebagai perancang maupun pemikir. Selain memberi pidato yang menjadi inti dari Kongres Pemuda II, ia melaksanakan keputusan-keputusan akibat-akibat dari kongres. Mohammad Yamin juga menjadi penerjemah pidato-pidato yang ditulis dalam bahasa Belanda.

Pada hari berikutnya, pidato-pidato yang disampaikan membahas masalah pendidikan dan perempuan dengan para pembicara yakni Djokosarwono, R.M. Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara), Sarmidi Mangoen Sarkoro, dan Nono Poernomowoelan. Di samping itu, pidato juga dilakukan dari tokoh organisasi Pandu, yakni Ramelan, Ketua Sarekat Islam Afdeling Pandu (S.I.A.P) yang merupakan organisasi Pandu milik PSI dan Mr. Sunario, Ketua Gerakan Pandu Indonesia. Dalam pidatonya, Mr Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme Indonesia dan demokrasi, di samping perlunya gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dengan pergerakan nasional. Menurutnya, gerakan kepanduan sejak dini telah mendidik anak-anak muda untuk menjadi disiplin dan mandiri, suatu hal yang dibutuhkan dalam perjuangan⁶⁴.

Pada penutupan kongres didahului oleh penyampaian hasil perumusan tentang pokok-pokok pikiran yang berkembang dalam dua hari kongres tersebut. Oleh para utusan dari organisasi-organisasi pemuda yang hadir dalam kongres itu, rumusan tersebut dijadikan tanda janji pemuda untuk setia dalam pengabdian terhadap nusa dan bangsa. Kongres Pemuda Indonesia yang ditutup pada Minggu malam, 28 Oktober 1928 di gedung *Indonesich Clubhuis*, Kramat Raya 106, Weltevreden, Batavia berhasil mencetuskan naskah "Sumpah Pemuda" yang dirumuskan Mohammad Yamin dan kemudian dibacakan di depan sidang umum.

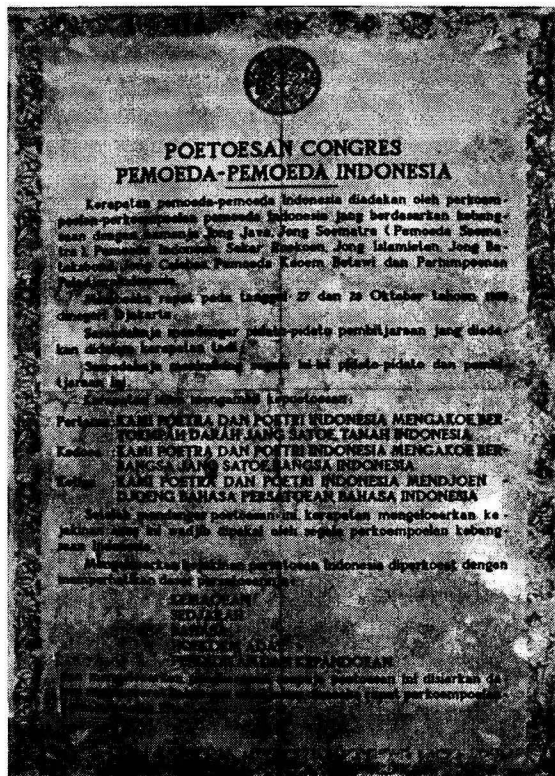
SUMPAH PEMUDA

Pertama: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia, Bangsa Indonesia.

Kedua : Kami putra dan putrid Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.

Ketiga : Kami putra dan putrid Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

Meskipun didahului suasana panas terhadap pemerintah Hindia Belanda yang mengawasi secara ketat selama sidang dan melarang arak-arakan Pandu pada malam hari dalam memeriahkan penutupan sidang, Kongres Pemuda Indonesia ke-II pada 28 Oktober 1928 memiliki nilai terpenting dan menentukan. Melalui janji pemuda yang dikrarkannya itu, semangat persatuan dalam "solidaritas Indonesia" telah menunjukkan bahwa dalam diri para pemuda tidak ada lagi perbedaan daerah, bangsa, dan bahasa serta perbedaan-perbedaan sempit lainnya.



Teks Sumpah Pemuda, Sumber : Museum Sumpah Pemuda, Jakarta

Catatan Akhir :

- 1) Sartono Kartodirdjo, *Sejak Indische Sampai Indonesia*. Jakarta: KOMPAS, 2005, hal. 117.
- 2) Bahder Djohan, *Bahder Djohan: Pengabdian Kemanusiaan*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1980, hal. 24.
- 3) John Pattikaihattu, Dr. Jacob Bernadus Sitanala: *Hasil Karya Dan Pengabdiannya*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai tradisional, Depdikbud, 1982/1983, hal. 63.
- 4) Suratmin. Dr. Sutomo. Jakarta: Direktorat dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1982/1983, hal. 52.
- 5) *Ibid*, hal. 52.
- 6) *Ibid*, hal. 85.
- 7) E.F.E. Douwes Dekker yang dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur pada 1879 berlatar belakang pendidikan *Indische Art*, seorang Indo Belanda yang berjiwa nasionalis. Ia adalah cucu dari kakak Eduard Douwes Dekker (Multatuli), penulis buku *Max Havelaar* yang menarik simpati, terutama dari kalangan kelompok pendukung politik Ethis di Belanda terhadap usaha-usaha pembaharuan di Indonesia. Douwes Dekker menerima gelar dan bintang *The Boer's Fighting Man* (Pejuang bangsa Boer) dari Presiden Republik Transvaal, Afrika Selatan Paul Kruger oleh karena jasanya dalam Perang Boer menghadapi penjajah Inggris. Bergabungnya Douwes Dekker dalam Perang Kemerdekaan di Afrika Selatan ini, tanpa persetujuan Ratu Wilhelmina yang mengakibatkan Douwes Dekker dicabut sebagai warga negara Belanda. Namun, ia merasa bangga tidak diakui sebagai orang Belanda, sebab ia merasa bahwa dirinya bukan Belanda. Ia mengaku sebagai orang Hindia (Soewito, Ima H.N. Hadi. *Soewardi Soerjoningrat Dalam Pengasingan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hal. 21).
- 8) Nama kecil : Raden Mas Soewardi Soerjaningrat. Lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Ia adalah seorang keturunan bangsawan kraton, cucu Paku Alam III, seorang raja di Yogyakarta. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 1813 kerajaan Yogyakarta oleh pemerintah kolonial Inggris di bawah pemerintah Raffles, kerajaan tersebut dibagi dua dengan mengangkat raja baru yaitu Paku Alam I di samping Sultan Hamengku Buana di Yogyakarta. Sekalipun ia seorang keturunan bangsawan, namun Soewardi Soerjaningrat tidak menonjolkan gelar kebangsawannya.

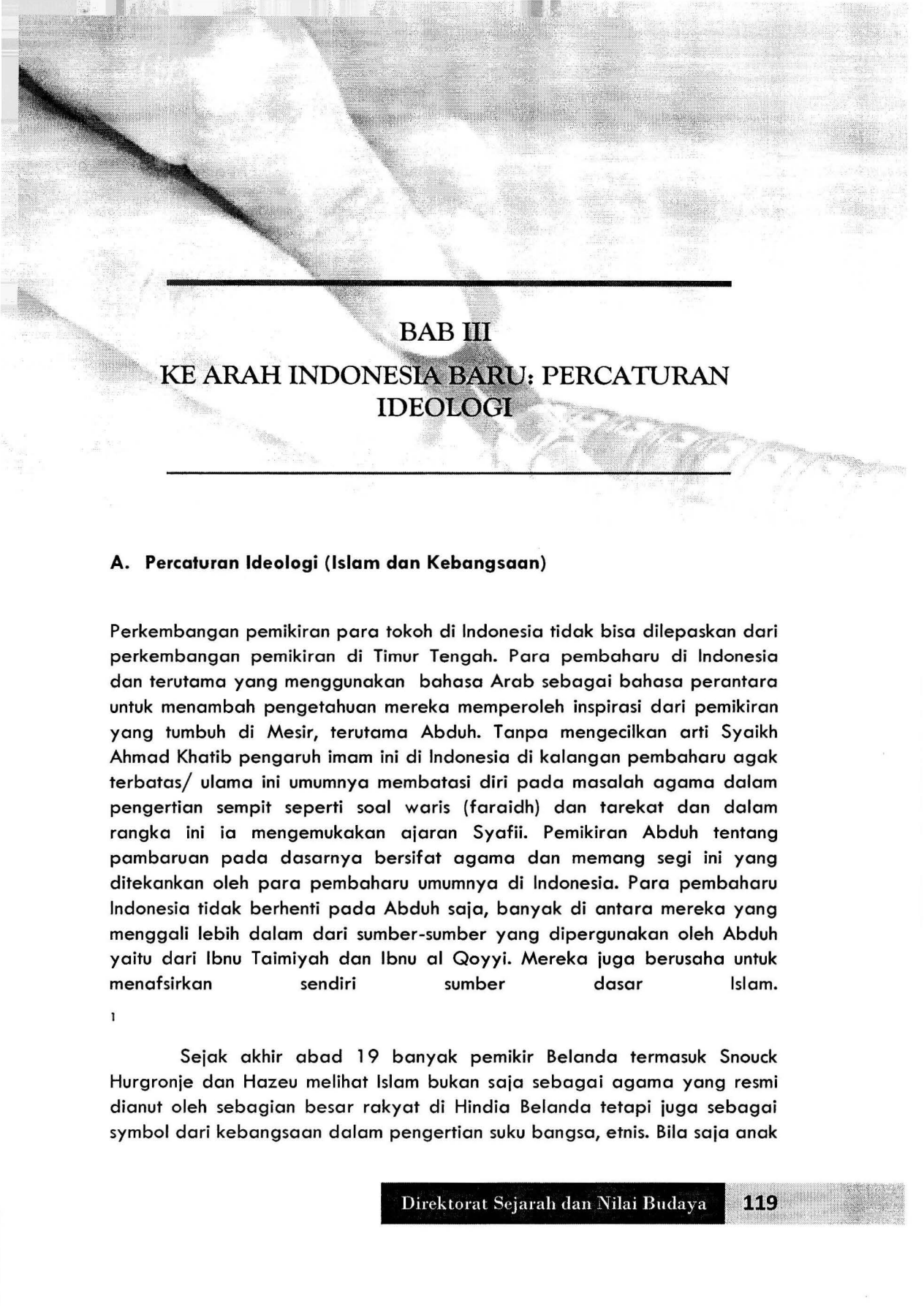
- 9) Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara*, Jakarta : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1983/1984, hal. 38.
- 10) Darsiti Soeratman, *Ibid*, hal. 39.
- 11) Soewito, Irna H.N. Hadi. Op. Cit., 1985, hal. 24
- 12) Komite Boemi Poetra didirikan pada Juli 1913 sebagai Panitia Peringatan 100 Tahun Kemerdekaan Negeri Belanda di bawah pimpinan dr Tjipto Mangunkusumo, R.M. Soewardi Surjaningrat sebagai bendahara dan penulis, dan Abdoel Moeis, sebagai salah satu komisaris. Komite ini juga memprotes adanya pungutan derma secara paksa kepada rakyat pribumi yang terjajah guna kepentingan perayaan ini. Komite ini juga mengirim telegram kepada Ratu Wilhelmina di Belanda, selain memberi ucapan selamat atas perayaan kemerdekaan Belanda, juga menuntut pencabutan Peraturan pemerintah Pasal 111 tentang larangan adanya perkumpulan dan rapat yang berbau politik serta menuntut adanya Dewan Perwakilan Rakyat di Hindia Belanda. *Ibid.*, hal. 25
- 13) Pranata SSP, *Ki Hadjar Dewantara: Perintis Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Djakarta: Balai Pustaka, 1959, hal. 43
- 14) *Ibid.*, hal. 33
- 15) Sutrisno Kutoyo, *Prof. H. Muhammad Yamin*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1981/1982, hal. 16.
- 16) Terbentuknya Tri Koro Darmo pada 1915 tidak bisa dilepaskan dari kegiatan Budi Utomo memasuki kancah politik. Budi Utomo berusaha menciptakan kaderisasi yang kuat bagi organisasinya dan terutama difokuskan untuk pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah di lingkungan Jawa. Satiman Wirjo Sandjojo menangkap gejala itu, sehingga atas inisiatifnya terbentuklah organisasi yang mewadahi pelajar-pelajar Jawa yang sedang menuntut ilmu pada sekolah menengah di perantauan. Organisasi Tri Koro Darmo diartikan tiga tujuan mulia yang menekankan aktivitas sosial, yakni: *pertama*, menjalin pertalian antara murid-murid bumi putera dan sekolah menengah dan kursus keguruan; *kedua*, menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya; *ketiga*, membangkitkan dan mempertajam perasaan yang berlaku untuk semua bahasa dan kebudayaan "Hindia". Namun, organisasi ini ternyata hanya didirikan bagi para pelajar di sekolah menengah yang berasal dari Jawa tengah dan Jawa Timur, sehingga para pelajar di luar kedua daerah itu enggan memasuki organisasi Tri Koro Darmo (Sidi Mawardi. *Bibit Persewaan Nasionalis Islam Vs nasionalis Sekuler: Pengalaman Jong Islamieten Bond 1925-1942*. Jakarta: Yayasan Studi Perkotaan, 2000: hal. 43
- 17) Sri Sutjiatiningih, *Soegondo Djojopoespito: Hasil Karya dan Pengabdianya*. Jakarta: Direktorat sejarah dan Nilai Tradisional, 1982/1983, hal. 12.

- 18) Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, *Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1978, hal. 78.
- 19) Sidi Mawardi, *Op. Cit.*, hal. 45
- 20) Sidi Mawardi, *Ibid.*, hal. 48
- 21) Sutrisno Kutoyo, *Op. Cit.*, hal 18
- 22) Bahder Djohan, *Op. Cit.*, hal. 39
- 23) Sutrisno Kutoyo, *Op. Cit.*, hal. 21
- 24) I.O. Nanulaitta, *Johannes Latuharhary, SH*. Jakarta: Direktorat dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1982/1983, hal. 27.
- 25) Bahder Djohan, *Op. Cit.*, hal. 35
- 26) Kasman Singodimedjo, *Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hal. 27.
- 27) Mohammad Roem, *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*. Jakarta: PT Gramedia, 1989, hal. 127.
- 28) Kasman Singodimedjo, *Op. Cit.*, hal. 27
- 29) Mohammad Roem, *Op. Cit.*, hal. 129
- 30) Sidi Mawardi, *Op. Cit.*, hal. 55
- 31) Mohammad Roem, *Op. Cit.*, hal. 131
- 32) Kasman Singodimedjo, *Op. Cit.*, hal. 31
- 33) Kasman Singodimedjo, *Ibid.*, hal. 31
- 34) Mohammad Roem, *Op. Cit.*, hal. 135
- 35) John Pattikaihattu, *Dr. Jacob Bernadus Sitanala: Hasil Karya Dan Pengabdianya*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai tradisional, Depdikbud, 1982/1983, hal. 56.
- 36) R. Nalenan, *Iskaq Tjokroadisurjo: Alumni Desa Bersemangat Banteng*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1982, hal. 15.
- 37) Ahmad Subardjo Djojoadisurjo. *Op. Cit.*, hal 119
- 38) Nama-nama samara beserta artikel yang ditulisnya dapat diketahui pada peringatan H.U.T. Bung Hatta ke-70, sebagai berikut: "Artikel pertama berjudul 'Terugblik' (Menengok Kebelakang) ditulis A.A. Maramis, artikel kedua berjudul 'Opgang' (maju Ke Depan) ditulis Ahmad Subardjo, artikel ketiga berjudul 'Nieuwe Banen' (Jalan Baru) ditulis dr. Sukiman Wirjosandjojo, artikel keempat berjudul 'Indonesia in de Wereldgemeenschap' (Indonesia Dalam Masyarakat Dunia) ditulis Mohammad Hatta, artikel kelima berjudul 'Nationale Geschiedenis' (Sejarah

Nasional) ditulis Mohammad Nazif, artikel kekenam berjudul '*Indonesia Di tengah-Tengah revolusi Asia*' ditulis Mohammad Hatta, artikel ketujuh berjudul '*Het nationale Recht*' (Hukum Nasional) ditulis Mohammad Nazif, artikel ke delapan berjudul '*De Gang des Tijds*' (Jalannya Waktu) ditulis Suleiman, artikel kesembilan '*Vertaling van ASTABRATA*' (Terjemahan ASTABRATA dalam bahasa Belanda) ditulis R. Ng. Purbatjaraka, artikel kesepuluh berjudul '*Kerjakanlah sendiri Pendidikan dan Pengadjaran Anak-Anak Kita*' ditulis salah seorang anggota PI, artikel kesebelas '*Driehonderd Jaren Overheersching*' ditulis Darmawan mangunkusumo, artikel keduabelas berjudul '*De Vakbeweging in Indonesia*' (Gerakan Serikat Kerdja) ditulis serorang anggota PI, artikel ketigabelas berjudul '*Communistische invloeden in het Oosten*' (Pengaruh Komunisme di Timur) ditulis Iwa Kusumasumantri. Anonim. *Bung Hatta: Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoengan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun ke-70, 1972, hal. 127)

- 39) R. Nalenan, *Op. Cit.*, hal. 1982
- 40) *Ibid*, 1972, hal. 128
- 41) Ahmad Subardjo. *Op. Cit.*, hal. 128
- 42) Anonim, 1972, *Op. Cit.*, hal. 13
- 43) Deliar Noer, *Mohammad Hatta : Hati Nurani Bangsa*, Jakarta : KOMPAS, 2012, hal. 23.
- 44) *Ibid.*, 1972, hal.129
- 45) Mohammad Hatta. *Memoir*, Jakarta: Tintamas, hal. 201
- 46) Anonim, 1972, hal 15
- 47) Mohammad Hatta, *Memoir*, Jakarta: Tintamas, 1978, hal . 218-223.
- 48) Anonim, *Op. Cit.*,1972, hal 16
- 49) Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Pembangunan Jakarta, 1984, hal. 51.
- 50) Wawan Tunggal Alam, *Pertentangan Sukarno VS Hatta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2003, hal. 40
- 51) *Ibid.*, 2003, hal. 40
- 52) *Ibid*, 2003, hal. 45
- 53) Iman Toto K. Rahardjo dan Herdianto WK (editor), *Bung Karno dan Partai Politik: Kenangan 100 Tahun Bung Karno*, Jakarta: Grasindo, 2001, hal. 132
- 54) Cindy Adams, *Bung Karno: Penyambung Lidah rakyat Indonesia*, edisi revisi (terjemahan), Jakarta: Yayasan bung Karno dan Media Pressindo, 2007, hal. 96
- 55) Anonim, 1972, hal. 17

- 56) Mohammad Hatta, *Op. Cit.*, 1978, hal. 242
- 57) *Ibid.*, hal. 260
- 58) *Anonim*, 1972 hal. 17
- 59) *Sutrisno Kutoyo*, *Op. Cit.*, hal. 24
- 60) *Sutrisno Kutoyo*, *Ibid.*, hal. 27
- 61) *Kasman Singodimedjo*, *Op. Cit.*, hal. 36
- 62) *Sidi Mawardi*, *Op. Cit.*, hal.86
- 63) *Bahder Djohan*. *Op. Cit.*, hal. 41
- 64) *Sidi Mawardi*, *Op. Cit.*, hal.88

A black and white photograph of a hand pointing its index finger towards a spiral-bound notebook. The notebook is open, and the hand is positioned as if pointing to a specific page or section. The background is slightly blurred, focusing attention on the hand and the notebook.

BAB III

KE ARAH INDONESIA BARU: PERCATUREAN IDEOLOGI

A. Percaturan Ideologi (Islam dan Kebangsaan)

Perkembangan pemikiran para tokoh di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pemikiran di Timur Tengah. Para pembaharu di Indonesia dan terutama yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perantara untuk menambah pengetahuan mereka memperoleh inspirasi dari pemikiran yang tumbuh di Mesir, terutama Abduh. Tanpa mengecilkan arti Syaikh Ahmad Khatib pengaruh imam ini di Indonesia di kalangan pembaharu agak terbatas/ ulama ini umumnya membatasi diri pada masalah agama dalam pengertian sempit seperti soal waris (faraidh) dan tarekat dan dalam rangka ini ia mengemukakan ajaran Syafii. Pemikiran Abduh tentang pamberuan pada dasarnya bersifat agama dan memang segi ini yang ditekankan oleh para pembaharu umumnya di Indonesia. Para pembaharu Indonesia tidak berhenti pada Abduh saja, banyak di antara mereka yang menggali lebih dalam dari sumber-sumber yang dipergunakan oleh Abduh yaitu dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu al Qoyyi. Mereka juga berusaha untuk menafsirkan sendiri sumber dasar Islam.

1

Sejak akhir abad 19 banyak pemikir Belanda termasuk Snouck Hurgronje dan Hazeu melihat Islam bukan saja sebagai agama yang resmi dianut oleh sebagian besar rakyat di Hindia Belanda tetapi juga sebagai symbol dari kebangsaan dalam pengertian suku bangsa, etnis. Bila saja anak

negeri merasa diinjak, pada Islamlah mereka menemukan pemecahannya. Mereka akan bergerak dan berbuat atau berontak di bawah panji-panji Islam. Untuk itulah mengapa Belanda terus melakukan penyebaran pendidikan barat sebagai upaya membendung derasnya pengaruh Islam. Akhir abad ke-19 memang ditandai dengan kecenderungan untuk mempersamakan Islam dengan bangsa itu. Sebagai contoh Budi Utomo dalam rancangan rumah tangga dan perumusan programnya (1912) mencantumkan memajukan Islam sebagai salah satu tujuannya. Atau kehadiran Sarekat Islam (1911) serta merta mendapat sambutan yang hangat dimana-mana tidak hanya di Pulau Jawa tetapi kemudian ke Sulawesi dan Sumatera, tetapi betapa beragamnya SI itu. Untuk itulah selama ideologi belum dirumuskan, SI terbuka bagi siapa saja. Tetapi serentak ketika asumsi SI yang telah dipengaruhi ajaran sosialis Marxis mewujudkan dirinya dalam perumusan yang lebih tegas maka perpecahan tak bisa dihindarkan. Hasrat SI untuk memperjuangkan 'kemajuan' bagi rakyat kecil 'bangsa Islam' dalam konteks masyarakat kolonial juga membuka kesempatan bagi munculnya Marxisme yang Islamistis. Hal inilah yang tegas disuarakan Haji Mischbah di Surakarta dan Haji Datuk Batuah di Padang Panjang. Dengan peralatan ilmu keagamaan yang lumayan, kedua ulama ini menyuarakan kesejajaran tujuan perjuangan Islam dan Komunisme. Mereka tidak hanya sibuk menulis dan berceramah tetapi juga langsung terlibat dalam pembentukan ikatan-ikatan solidaritas. Penangkapan serta pembuangan mereka para ulama Marxis ini, serta kemampuan tokoh-tokoh SI di Jawa atau para reformis Islam di Sumatera Barat untuk menangkis infiltrasi ideologi ke dalam barisan mereka sama sekali tidak menyebabkan terhantinya perdebatan ideologis. Tahun 1920-an dan awal 1930-an barangkali dapat disebut sebagai 'dasawarsa ideologi' dalam sejarah modern Indonesia. Ketika itulah berbagai ideologi yang kemudian akan berpengaruh dalam pertumbuhan keagamaan kita mulai dirumuskan. Dalam periode ini pula berbagai strategi perjuangan diperdebatkan.

Salah satu perdebatan ideologis yang terpenting dalam sejarah pergerakan adalah masalah dasar perjuangan. Bahwa kekuasaan kolonial adalah sesuatu yang tak diinginkan telah merupakan konsensus yang relatif umum diterima di kalangan kaum pergerakan. Agus Salim misalnya mempertanyakan apakah penghormatan terhadap 'ibu pertiwi' itu tidak melampaui ketaqwaan terhadap Allah, begitu juga Soekarno yang mengatakan kita tidak chauvinis, karena kebangsaan kita bertolak dari harkat kemanusiaan. Sedangkan A. Hasan pemimpin Persis dari Bandung

tetapi jika kita berjuang demi bangsa apapun mungkin perumusannya bukannya 'demi Allah' maka sesungguhnya kita telah melibatkan diri dalam dosa tanpa ampun. Bukankah salah satu yang paling ditentang oleh Nabi Besar Muhammad S.A.W adalah sifat *ashabiyah*, kesukuan, sedangkan Islam bersifat universal. Jadi berjuang demi bangsa adalah hal yang mengingkari ajaran pokok Islam.²

Masalahnya bukan anti atau pro kesatuan Indonesia dan juga bukan soal pro atau anti penjajahan tetapi dasar nilai yang melandasi perjuangan. Jadi menyangkut motivasi moral atau niat yang dari sudut pemikiran Islam mestilah *religious* sifatnya. Berjuang tak bisa didasarkan kepada sesuatu yang bukan berasal dari kesadaran agama. Agama adalah sumber makna dan dengan agama pulalah realitas harus dinilai. Dengan sangat sederhana dan tepat Agus Salim mengatakan bahwa perjuangan semata-mata *lillahi ta'ala*. Jadi perbedaan antara dasar perjuangan dan strategi dalam perjuangan memperlihatkan beberapa hal yang cukup penting³.

B. Nasionalisme Politik

Ketika dokter Tjipto Mangunkusumo, sang "demokrat sejati" sebagaimana biografinya menjulukinya gagal meyakinkan kongres BO agar terlibat dalam politik, ia keluar dari BO dan bersama-sama dengan Douwes Dekker dan Suwardi Suryaningrat ketua cabang SI Bandung, mendirikan Indische Partij, pada tahun 1922. Partai tidak berhasil mendapatkan ijin, tetapi gagasan yang ditinggalkannya adalah bagian yang otentik dalam pencarian batas-batas komunitas bangsa. Bangsa Hindia menurut gagasan partai ini ialah semua mereka yang menetap di kepulauan ini. Adapun latar belakang etnis atau bahkan ras mereka adalah *blijvers* yang sebangsa. Status mereka berbeda dengan mereka yang bolak balik ke negeri induk yaitu kaum *trekkers* yang merupakan kelas penguasa.

Status dalam struktur kekuasaan sebagai landasan pembatasan dalam konteks Negara kolonial memang cukup menarik. Akan tetapi ternyata landasan ideal ini menjadi tak realistis kalau telah dikenakan pada realitas masyarakat kolonial. Ketentuan hukum kolonial telah membagi mereka yang *blijvers* itu atas kelas-kelas rasial. Pribumi berada pada kelas yang terbawah entah kalau bisa mendapatkan *geleidgeste* atau persamaan status hukum⁴.

Meskipun demikian pembuangan 'tiga serangkai' partai Hindia ini ke Negeri Belanda membawa dampak yang cukup penting terhadap perkembangan Indische Vereeniging. Mereka memperkenalkan radikalisme politik kepada organisasi ini. Amka IV pun mulai diperkenalkan dengan semboyan 'indie los van nederland'. Dengan politik sikap ini maka keanggotaan IV mulai mengalami perubahan. Tahun 1924 atau perjuangan Hatta, IV pun mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Organnya bernama Indonesia Merdeka sedangkan slogan perjuangan pun mengalami radikalisasi pula Indonesia merdeka sekarang. Tak lama kemudian di Bandung Indonesische Studieclub berdiri dan kemudian 1927 di bawah pimpinan Soekarno mengubah namanya menjadi Perserikatan Nasional Indonesia. Pada bulan Oktober 1928, kongres pemuda yang kedua diadakan. Dua keputusan penting dibuat, pertama Sumpah Pemuda diikrarkan meskipun pada waktu itu belum disebut sebagai sumpah, kedua organisasi kepemudaan insuler dibubarkan dan Indonesia Muda didirikan.

Peristiwa sederhana ini sekaligus mengatakan tiga hal yang fundamental adanya sebuah bangsa yang bernama Indonesia, adanya sebuah negeri yang bernama Indonesia dan bangsa ini menuntut kemerdekaan bagi negerinya. Begitulah kalau sejarah pergerakan kebangsaan dikaji lebih teliti maka kelihatanlah bahwa mahasiswa yang tergabung dalam PI di negeri Belanda itulah yang sesungguhnya bisa dianggap pelopor pergerakan nasionalisme anti kolonial yang radikal. Muda terpelajar dan kosmopolitan para mahasiswa itu dengan jelas merumuskan kemana pergerakan kebangsaan mestinya harus diarahkan⁵.

Begitulah akhirnya sebuah paradigma telah ditemukan dan didalam kesadaran politik sebuah bangsa telah berdiri. Sejak wacana politik bahkan juga kebudayaan, semakin bertolak dari sudut pandangan paradigma baru ini. Dalam suasana inilah perdebatan kolonial antara pendekatan ko-operasi dan non-ko-operasi dilanjutkan atau seperti yang dilakukan Soekarno dijadikan tidak relevan dan lebih penting lagi dalam konteks paradigmatis ini pula berbagai pendekatan dan perbenturan ideologis diadakan. Satu golongan bisa meniadakan keabsyahan ideologi golongan lain, tetapi kesemuanya semakin bertolak dari kesadaran kebangsaan. Dalam paradigma baru ini berbagai kecenderungan ideologis diperdebatkan dan dipertentangkan mulai corak yang internasionalisme sampai dengan yang bersandarkan pada kepribadian asli mulai yang merelatifkan arti agama dalam kehidupan sampai dengan yang menjadikan agama sebagai landasan segalanya. Tahun 1920-an 1930-an boleh dikatakan sebagai

dasarwarsa ideologi dalam sejarah perjuangan kebangsaan. Dalam proses perdebatan ini cita-cita demokrasi atau kedaulatan rakyat dan keadilan sosial disamping nasionalisme Indonesia Raya yang mengalahkan nasionalisme lokal semakin tampil sebagai konsensus ideologis⁶.

Selain di dalam negeri, sejak awal abad 20-an mulai ada pemuda Indonesia yang pergi ke Belanda untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi antara lain Leiden, Amsterdam, Rotterdam, dan Wageningen. Timbullah kebutuhan di kalangan mahasiswa untuk mendirikan perkumpulan. Para mahasiswa di Belanda mendirikan organisasi mahasiswa mulai 1908 dengan nama *Indische Vereeniging* (Perhimpunan Hindia) pendahulu Perhimpunan Indonesia. *Indische Vereeniging* memasuki suatu periode baru dalam perkembangannya setelah pemimpin *Indische Partij* Dr. Tjipto Mangunkusumo, Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat dibuang ke Belanda pada tahun 1913, karena Gubernur Jenderal Idenburg takut pada gagasan revolusioner mereka. Bersama dengan kedatangan ketiga pemimpin *Indische Partij* ke negeri Belanda, masuk pula konsep Hindia Bebas dari Belanda dan pembentukan sebuah negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri.

Para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda membentuk komunitas kecil yang berhubungan erat dengan seluruh mahasiswa yang ada di Belanda. Para mahasiswa muda itu kebanyakan berusia 20 tahunan. Kesepian serta rasa keterasingan budaya merupakan masalah besar yang harus ditanggulangi. Mereka menjalin persaudaraan satu sama lain serta saling membantu dan hanya sedikit bergaul dengan mahasiswa Belanda. Mahasiswa yang membawa serta keluarganya ke negeri Belanda sering mengundang mahasiswa ke rumah mereka untuk makan malam dan menjalin persahabatan.

Pada tahun 1920-an datang lagi mahasiswa ke Belanda seperti Darsono, Semaun, Abdul Muis. Kehadiran mereka sangat mempengaruhi sesama teman seperjuangan yang lebih muda. Para pendatang baru itu dengan cepat mendominasi *Indische Vereeniging* dan menyalurkan anggotanya ke dalam kegiatan aktif sehubungan dengan masalah baru di Indonesia. Tahun 1923, Perhimpunan Indonesia memperingati usia 15 tahun, pada kesempatan itu menerbitkan buku peringatan. Adapun isi buku itu mencerminkan semangat yang menjiwai anggota Perhimpunan Indonesia. Susunan buku itu adalah artikel pertama berjudul *Tinjauan ke Belakang*, yang menguraikan pembentukan dan perkembangan Perhimpunan Indonesia disusun dengan karangan *Menanjak*, kemudian karangan tentang *Jalan Baru* dan berikutnya *Arah Zaman*. Dalam edisi Maret 1923 dalam majalah Hindia

Poetra berdasarkan ide kesatuan, demokrasi maka dibuat pernyataan bahwa:

1. masa depan bangsa Indonesia hanya semata-mata yang dalam pembentukan struktur pemerintah sendiri dapat dipertanggungjawabkan oleh bangsa Indonesia.
2. untuk mencapai itu setiap orang menurut kemampuan serta menurut kekuatan serta kecakapannya diusahakan tanpa bantuan pihak manapun
3. untuk mencapai tujuan bersama itu semua unsur atau lapisan rakyat perlu kerja sama seerat-eratnya.⁷

Kegiatan mahasiswa yang secara radikal disalurkan ke dalam aktifitas politik tercermin dengan perubahan namanya menjadi Perhimpunan Indonesia tahun 1924. Pada tahun itu muncul jurnalnya 'Indonesia Merdeka' sebagai ganti 'Hindia Poetra'. Dalam kata pengantar edisi pertama majalah dikatakan bahwa:

Dalam kata merdeka terkandung ungkapan tentang tujuan dan usaha keras kami dan mulai sekarang dan seterusnya, 'Indonesia Merdeka' akan menjadi semboyan perjuangan Pemuda Indonesia. 'merdeka' adalah cita-cita umum semua umat manusia, setiap bangsa mempunyai keinginan kuat untuk hidup merdeka. Gagasan tentang kemerdekaan tidak berbeda dari satu bagian dunia ke bagian dunia lainnya. Kemerdekaan adalah cita-cita umat manusia dan bukan cita-cita barat, seluruh bumi ini adalah kuil kemerdekaan.⁸

Indische Vereeniging, resmi menjadi sebuah organisasi politik yang radikal pada bulan Januari 1925. Dalam rapat yang diselenggarakan pada 3 Pebruari 1925, nama baru Perhimpunan Indonesia resmi dipakai. Cara yang dipakai para pemimpin Perhimpunan Indonesia dalam menjalankan tugasnya adalah mengembangkan suatu ideologi nasionalis yang baru yang khas Indonesia bebas dari batasan Islam atau komunisme yang akan lebih memecah bangsa Indonesia. Ada empat pikiran pokok dalam ideologi yang dikembangkan Perhimpunan Indonesia yang menjadi dasar dari arus utama gerakan nasionalis setelah PKI ditindas. Dengan memperhatikan masalah sosial ekonomi, ideologi itu menempatkan kemerdekaan sebagai tujuan politik yang utama: kesatuan nasional, perlunya mengesampingkan perbedaan khas dan bersifat kedaerahan serta membentuk front kesatuan

melawan Belanda untuk menciptakan suatu front kesatuan untuk melawan Belanda. Kedua solidaritas, menghindarkan perbedaan antarorang Indonesia sendiri, menyadari besarnya pertentangan kepentingan antara penjajah dan yang terjajah dan perlunya kaum nasionalis mempertajam konflik antar ras kulit sawo matang dan rass kulit putih. Ketiga non kooperasi, yaitu perlunya menyadari bahwa kemerdekaan tidak dapat diberikan secara cuma-cuma oleh Belanda tapi harus direbut oleh bangsa Indonesia sendiri. Keempat adalah swadaya yaitu menolong diri sendiri dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri.⁹

Selama berdiri Perhimpunan Indonesia memegang posisi penting dalam gerakan kebangsaan Indonesia dan kedudukan ini sangat sulit dibayangkan jika melihat jumlah anggotanya. Pada tahun 1926, misalnya jumlah anggotanya baru 38 orang. Perhimpunan Indonesia adalah katalisator yang mengarahkan putra-putra golongan elit Indonesia agar membuang rasa rendah diri yang dipaksakan oleh penguasa kolonial dan untuk pertama kalinya menuntut kemerdekaan. Sumbangan Perhimpunan Indonesia terbesar adalah usahanya mengembangkan ideologi sekulernya yang menjadi dasar dari arus utama gerak kebangsaan setelah tahun 1927. Perhimpunan Indonesia tidak hanya mengembangkan ideologi, anggota-anggotanya jadi terpicat oleh ide dan semangat nasionalisme baru tersebut dan ketika para anggotanya pulang ke tanah air, mereka tetap menjalankan aktifitas politik. PNI hampir seluruhnya adalah ciptaan Perhimpunan Indonesia demikian juga Partindo dan PNI baru. Selain itu, ada juga yang masuk Budi Utomo, Partai Sarekat Islam dan masuk kelompok studi di Surabaya.¹⁰

C. Politik Ko dan Nonkoperasi

Pada tahun 1932, polemik tentang perlu dan tidaknya melakukan kerjasama dengan Belanda merupakan polemik yang sangat keras antara para pejuangan masa itu. Bahkan antara Soekarno dan Hatta terlibat polemik terbuka dalam surat kabar. Menurut Soekarno, bahwa duduk di Tweede Kamer adalah suatu simbol kita telah bekerja sama dengan kolonial. Sementara Hatta lebih berpendapat bahwa meskipun masuk dalam Tweede Kamer dengan menjadi oposisi yang kuat dapat pula dikatakan sebagai nonkoperasi. Sementara itu dalam praktiknya sehari-hari yang mengatakan menolak kerjasama pada kenyataannya masih melakukan sumpah setia kepada Gubernur Jenderal dan lain-lain sementara masuk dalam *Volksraad*

dianggapnya sebagai koperasi, adalah sesuatu yang tidak tepat. Untuk itulah ada beberapa tokoh yang terlibat aktif di *Volksraad* tetapi sikapnya sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Misalnya yang dilakukan Muhammad Husni Thamrin.

Dalam periode 1928 – 1930 di *Volksraad* kegiatan pertama Thamrin adalah menantang pemerintah untuk memindahkan nasionalis veteran Cipto Mangukusumo dari pembuangannya di Banda ke Batavia untuk menduduki kursinya di dewan. Dalam sidang-sidang pertama ia selalu berbicara dan menekankan langkah-langkah untuk memperbaiki tingkat hidup penduduk miskin daerah pedalaman Jawa. Ia juga berbicara tentang bagaimana mengatasi kekurangan pangan yang merajalela di daerah perkebunan tebu. Untuk itu ia mengusulkan agar luas area untuk tanaman tebu dikurangi 25% agar kaum tani dapat bebas menentukan luas tanaman pada musim gadu. Cramer cs mengajukan mosi untuk mendukung usul Tjipto tetapi dikalahkan dengan suara 10 lawan 20. Di mata Thamrin, Tjipto tetaplah seorang pembela kepentingan penduduk pedesaan sebagai reka pengimbang baginya dalam upayanya yang panjang untuk kepentingan anti feodal Tjipto juga menunjukkan titik tolak yang berbeda dengan pandangan masyarakat Jawa yang diwakili oleh Soetomo dan Soewardi di masa itu. Kemudian tindakan kasar polisi terhadap rapat-rapat yang dilakukan oleh PNI di Surabaya dan Semarang serta reaksi pers pihak sana. Halini mendorong Thamrin untuk menguji lebih teliti lagi maksud sebenarnya pihak pemerintah terhadap nasionalisme evolusioner Indonesia sebagai yang baru saja disampaikan oleh Gubernur Jenderal De Graeff. Selanjutnya menurut Thamrin, Tjipto sepenuhnya tepat untuk mewakili nasionalisme emansipatoris di *Volksraad*.

Dengan duduknya Tjipto di dewan maka biasanya pendapat yang mewakili golongan konservatif pedalaman yakni para pangreh praja dan pejabat BB dapat ditandingi secara kuat dan ahli sama veteran nasionalis yang sangat terkenal dengan situasi pada masa itu. Stokvis dan Thamrin yang telah melakukan hubungan dengan sang buangan di Banda melakukan kerja sama agar Tjipto dapat dibebaskan dan duduk kembali di dewan guna memperkuat barisan progresif kelompok tengah kiri¹¹. Dewan sangat terkesan dengan pembelaan Thamrin yang penuh semangat untuk menerima kembali Tjipto sebagai anggota dewan. Akhirnya dewan membentuk komisi terdiri dari tiga orang untuk melakukan penyelidikan serta melaporkan hasilnya terhadap keabsahan permintaan Cipto untuk masuk kembali sebagai anggota dewan. Akhirnya dewan dengan mendengarkan saran

minoritas ketua komisi Mr. AS Oppenheim, mengalahkan mosi Thamrin cs dengan suara 35 lawan 6. Mosi tersebut sebenarnya mendapat dukungan dua anggota komisi, Thamrin dan Jonkman. Meskipun komisi dengan suara bulat menyarankan kepada *Volksraad* untuk menerima Tjipto kembali dengan alasan tidak ada dasar hukum bagi buangan untuk dihalangi masuk kembali. Akan tetapi terjadi perpecahan dalam cara memberitahu kepada pemerintah. Thamrin dan Jongkman sadar bahwa dewan tidak dapat menentukan ukuran yang disebut membahayakan ketenangan dan ketertiban umum dengan kembalinya Tjipto. Tetapi mereka tahu bahwa haruslah melakukan kerja sama penuh untuk mewujudkannya. Namun akhirnya Tjipto tetap ditolak oleh dewan dengan voting 29 menolak lawan 13 orang¹².

Masa setelah ditahannya Sukarno, nyawa gerakan nasional emansipatoris mereda. Sebagai yang ditulis oleh Jan Pluvier satu generasi kemudian dalam keadaan diam merenung setelah tahun-tahun bergelora dengan agitasi anti kolonial Sukarno yang memberikan ilham. Para pejabat kolonial sama sekali menyadari bahwa semangat menggebu kampanye anti kolonial tersebut jelas tidak dapat dibiarkan berlangsung terus. Hal ini harus dihadapi dengan cara menyingkirkan sang tokoh secara permanen atau setidaknya untuk jangka panjang dari pentas politik yang dikendalikan dan diracuninya. Thamrin sendiri setuju akan diktum diam merenung dengan tugas mendesak selanjutnya adalah mempertahankan sosok Soekarno cs yang dipisahkan dengan jalinan politik pergerakan yang tengah berada dalam ketidakpastian dan bahkan perpecahan. Thamrin segera mengambil langkah setelah dipenjarakannya Sukarno. Ia segera tampil di *Volksraad* untuk memimpin 10 anggota orang Indonesia di bawah satu bendera nasionalis. Langkah ini menurut Gobeer merupakan nasionalisme yang diorganisasi berdasarkan landasan radikal dengan bekerjasama dengan pemerintah. Thamrin sendiri menulis kepada Stokvis yang berada di Holland tentang akan diumumkannya pembentukan apa yang disebut Fraksi Nasional. Ada yang melihatnya sebagai nasionalis praktis. Karena banyaknya varian nasionalisme yang ada. Thamrin tidak melihat di dewan terdapat kemungkinan mengembangkan satu gaya kuat dan tegas tetapi berharga untuk dicoba. Suatu langkah bersama nonkooperatif membangkang untuk memasukkan kembali anggota nasionalis di *Gemeenteraad* ditenangkan dengan cara mengangkat Thamrin ke tingkatan yang tidak diakui sebelumnya. Tentang kemungkinan Sukarno dan kawan-kawannya memasuki kembali pergerakan, Thamrin merasa prihatin dengan keputusan De Graef. Thamrin merupakan sedikit di antara tokoh pergerakan yang mempunyai

harapan besar dan menghubungkan dirinya sendiri dengan Sukarno mengunjunginya dipenjara setiap ia mempunyai waktu. Ia juga terus menerus meminta perhatian di dalam dan luar negeri mengenai nasib Sukarno. Ia melanjutkan gagasan nasionalisme emansipatoris supaya tetap hidup dengan mempertahankan tujuan yang dekat dengan hatinya. Partai yang didirikannya sendiri Kaoem Betawi bersifat lokal dengan berorientasi terbatas, tetap kecil elitis terutama memperhatikan isu tipikal Betawi meskipun Thamrin sendiri berusaha untuk meningkatkannya. Terobosan mental dalam pengertian politik Thamrin masih akan mendominasi langkah-langkahnya dalam seluruh dekade mendatang. Sikap tepat ini menempatkan dirinya pada posisi kunci penting yang membanggakan dalam pencarian kebanggaan Indonesia.¹³

Thamrin memimpin di dalam dan luar *Volksraad* ketika PPPKI melakukan rapat protes pada 12 Januari 1930. Dalam rapat PPPKI di Gedong Permoefakatan Indonesia yang difasilitasi olehnya, dicanangkan kembali persatuan organisasi tersebut. Dr Soetomo menyimpulkan bahwa banyaknya yang hadir dalam pertemuan ini menunjukkan perasaan ingin tahu yang berkembang. Sejumlah pembicara menyatakan bahwa sikap pemerintah pada 10 Januari 1930 tentang hukuman terhadap PNI merupakan tindakan meragukan yang berlebihan dan tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam acara tertutup diputuskan diadakannya dana nasional untuk memberikan bantuan kepada para anggota dan keluarganya yang menjadi korban tindakan polisi. Di samping itu dana tersebut juga akan dipergunakan untuk melakukan aksi-aksi perjuangan selanjutnya bagi kemerdekaan nasional. Keputusan yang lain berkaitan dengan tindakan pemerintah yang salah. Akan tetapi segera setelah diambilnya keputusan tentang pembaruan persatuan PPKI, maka tak lama kemudian hal itu menguap. Thamrin merasakan benar bahwa kepemimpinan PNI yang imajinatif dan kohesif itu tidak lagi hadir, mesin propagandanya pun tersumbat dan terpecah dalam berbagai kekuatan PPPKI.

Selanjutnya muncul berbagai upaya untuk menangguk kekosongan politik yang ada. Sejumlah pakar memandang fraksi nasional yang dibentuk Thamrin hanya sebagai langkah terhadap reaksi VC yang hipersovistik. Akan tetapi Thamrin sendiri terlepas dari komentarnya di *Volksraad* dalam suratnya kepada Stokvis. Pada sidang 8 Pebruari 1930, Thamrin cs mengajukan mosi digantinya pasal 153 bis dan ter dan 161 dalam hukum pidana untuk mengendalikan kerusuhan revolusioner agar dapat didiskusikan. Dalam pembukaan pidatonya Thamrin mengulang kembali

argumen yang telah disampaikan pada 18 Juli 1929 dimana ia menyelaskan bahwa pasal-pasal tersebut jelas dan terbuka terhadap interpretasi menurut kehendak dan kegunaanya. Dalam pidatonya ia memperkuat dengan mengutip studi yang belum lama dilakukan pendiri PNI Mr. Soenarjo dan oleh seorang orientalis ahli adat C Snouck Hurgronje yang mendukung argumen-argumennya. Selanjutnya Thamrin bersama Mochtar dan Idih masih mengajukan mosi tentang apakah hak istimewa gubernur jenderal perlu dipertahankan. Mosi ini akhirnya dikalahkan melalui voting.

Selama masa sidang dewan 1929 – 1930, Thamrin hanya sekali menyampaikan pidatonya. Kali ini ia berbicara tentang sesuatu yang belum secara serius dimasukinya yakni tentang pertahanan Hindia. Dalam sidang 18 – 19 Maret 1930 dibicarakan tentang anggaran pertahanan yang menyangkut kekuatan laut, tentara laut setempat dan pertahanan darat Tarakan, Balikpapan yang terkenal dengan deposit minyaknya serta Surabaya. Hal-hal itu dibicarakan termasuk kemungkinan dibangunnya milisi pribumi. Dalam pidatonya Thamrin menjelaskan tentang akan terlibatnya Indonesia dalam perang Pasifik mendatang dan perlunya mobilisasi penduduk secara total. Untuk mempersiapkan rakyat ikut serta dalam pertahanan yang berguna bagi tanah air, Thamrin bekerja sama dengan Dwidjosedwojo dan Ratu Langie mengajukan mosi untuk memperkenalkan wajib milisi pribumi. Misi ini dengan telak ditolak oleh 36 suara lawan 13, mereka yang mendukung ialah Jahja, Thamrin, Ratu Langie, Soejono, Soeroso, Hadiwdjojo, Soangkoepon, Dwidjosewojo, Koesooemo Oetojo, laoh, Mochtar, Idih dan Soetadi. Dalam hubungannya dengan aspirasi Indonesia merdeka, baik jangkauan ideologi maupun legislatif dengan pertahanan tanah air sekali waktu akan muncul dalam berbagai pidatonya kemudian.

Sementara pada 24 Maret 1930, Thamrin menyampaikan pertanyaan tertulis kepada pemerintah dengan keluhan tentang kecilnya ukuran sel tempat Soekarno ditahan di penjara yakni 1,5 mx2,5 m. Disebutkan olehnya bahwa tahanan politik seperti Sukarno tidak bisa diperlakukan seperti tahanan kriminal¹⁴.

Pada akhir diadakan persidangan terhadap Sukarno, Maskun, Soepriadinata dan Gatot Mangkoepradja di Bandung. Thamrin dengan teratur menghadiri persidangan tersebut. Ia duduk di deretan depan bersaa Gobee dan Stokvis untuk memberikan dukungan moril kepada mereka. Dalam keterangannya di depan Volksraad pada 16 Juni 1930 Gubernur Jenderal mengindikasikan bahwa Sukarno diperkirakan telah melanggar

terhadap pasal 169 dan 153 bis. Oleh karena itu perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan. Thamrin dan Dwidjosewojo dari Fraksi Nasional memberikan reaksinya. Dwidjo menyebutkan tentang sel kecil tempat Sukarno diurung bagai kstaria sejati ia akan menjalani perlakuan buruk itu. Thamrin mengatakan bahwa penangkapan 29 Desember didasarkan pada tuduhan yang kini ditinggalkan dan diganti dengan pasal-pasal seperti 153 bis dan 169. Ia berpendapat bahwa dengan demikian langkah itu jelas keliru lalu segalanya menjadi salah. Apalagi menganggap PNI sebagai partai terlarang. Selain itu Thamrin juga mengkritik terhadap penangkapan dan pembuangan Iwa Kusuma Sumantri ke Banda yang tidak didasarkan bukti yang kuat, dan bukti-bukti yang diajukan adalah sekedar buatan pemerintah. Thamrin menyesalkan karena Thamrin tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Sambil menunggu keputusan hakim terhadap kasus PNI, maka Fraksi Nasional menyampaikan masalah-masalah sosial ekonomi. Thamrin, Soeroso, Mochtar dan de Dreu merupakan orang-orang pertama yang memperingatkan di *Volksraad* untuk kondisi berbalik mendatang bagi kaum pribumi pada permulaan diberlakukannya langkah-langkah pembatasan oleh pemerintah. Misalnya perkebunan karet rakyat dikelola lebih ekonomis daripada yang ditangani oleh perkebunan besar. Thamrin menyampaikan argumentasinya bahwa tidak ada perkebunan karet yang dikelola orang Eropa mampu bersaing dengan perkebunan rakyat yang lebih kecil¹⁵.

Sementara itu di pengadilan Bandung setelah beberapa bulan pemeriksaan dan persidangan, diberikan kesempatan kepada Sukarno untuk melakukan pembelaan. Sebanyak 60.000 kata-kata orasi pembelaannya disampaikan dengan data-data resmi maupun tidak resmi yang menunjukkan bahwa Sukarno merupakan korban sasaran yang dikelilingi oleh apa yang disebutnya *open door imperialism*. Penghisapan yang terus menerus dilakukan oleh sekelompok kekuatan pribumi yang menantang. Atas nama nasionalisme populis yang berakar pada kesadaran nasional yang sedang tumbuh yang tak dapat dibasmi, pimpinan PNI bangkit dengan massa aksi damai. Mereka bergerak dalam tataran nonkooperatif dari front sawo matang dengan setara menghadapi kekuatan kolonial secara damai. Pidato pembelaan Sukarno berlangsung selama dua hari secara keseluruhan merupakan penampilan yang mempesona dan hebat menyampaikan propaganda sedikit banyak dan berpengaruh secara mengagumkan. Sekalipun demikian hal ini tidaklah mempengaruhi para hakim bahkan pers. Emosi memuncak ketika pejabat RGZ Kiewiet de Jonge merasa sah untuk memberikan

salamnya kepada Sukarno yang duduk sebagai tertuduh ketika ia sendiri hendak memberikan kesaksiannya. Reaksi kemudian timbul dari Menteri Jajahan Simon de Graaf dengan menekan pemerintah Hindia Belanda agar Kiewiet de Jonge segera diberhentikan dari jabatannya. Sementara itu pada 22 Desember 1930 para pemimpin PNI itu dijatuhi hukuman Sukarno 4 tahun penjara, Gatot 2 tahun, Maskoen 20 bulan, Soeridinata 15 bulan. Keputusan pengadilan itu diumumkan dengan resmi pada 17 April 1931 oleh Dewan Peradilan. Hukuman dijalani di Sukamiskin.

Di *Volksraad* Thamrin menunjukkan tentangannya terhadap keputusan pengadilan itu dan akan melakukan rapat-rapat protes di seluruh Jawa yang digerakkan bersama dengan PPPKI. Salah satu rapat diadakan di Gedong Permoefakatan Indonesia di Gang Kenari pada 3 Mei 1931. Ia menjadi pembicara utama dan menyatakan bahwa pihaknya merasa sangat dilanggar kehormatannya dengan keputusan pengadilan yang tidak adil terhadap Sukarno dan kawan-kawan. PPPKI secara bulat menolak keputusan pengadilan tersebut. Thamrin menekankan bahwa tidak satu pun organisasi rakyat yang dapat ditindas dalam waktu jangka panjang oleh kekuatan yang menyimpang. Gobee melaporkan bahwa rapat yang dihadiri banyak orang itu menurut hematnya karena Thamrin hendak melakukan ajakan kuat kepada mereka agar gerakan bersatu kembali karena adanya perpecahan. Dalam bulan Desember 1930 PSII keluar dari PPPKI selanjutnya diperlemah dengan pembubaran PNI. Sementara itu di luar negeri Belanda, Hatta melakukan kritik terhadap postur PPPKI yang lemah serta pembubaran PNI yang tidak demokratis. Mengikuti konsep Hatta beberapa golongan merdeka dan klub Pendidikan Nasional Indonesia bersatu mengeluarkan suatu manifesto pada 1 Nopember 1931 dan menyatakan maksud mereka untuk membangkitkan kesadaran nasional massa melalui program menolong diri sendiri dan pendidikan sosial. Hatta bersama teman dekatnya Sutan Syahrir menjalankan konsep pendidikan sosial dari nonkooperasi ketika di Belanda. Dalam bulan Desember 1931 Syahrir yang baru datang dari Belanda mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia yang disingkat PNI Baroe. Pada akhir bulan tersebut Thamrin menjemput Soekarno di pintu gerbang Sukamiskin. De Graeff memberikan pengampunan seminggu sebelum kembali ke negaranya sebagai gubernur jenderal. Agaknya keputusan ini diambil atas pendapat seorang pakar hukum Prof. Schepper dan Direktur Kehakiman Schrieke. Resepsi di Balai Pertemuan di Bandung pada 31 Desember 1931 dipersiapkan oleh Thamrin. Selanjutnya di kongres Indonesia Raya di Surabaya pada 1 Januari 1932

ia diperkenalkan oleh Dr. Soetomo telah menjadi korban hukuman yang tidak adil. Ketika memberikan sambutannya, seperti biasanya Soekarno menyengat pendengarannya. Ia membandingkan dirinya dengan pahlawan wayang Kokrosono yang kembali dari penjara menemui saudaranya Banowati dan Irowati yang terpisah karena pertempuran, merujuk pada perpecahan Partindo/PNI Baru. Soekarno meminta mereka bersatu dalam front sawo matang. Akan tetapi karena berbagai sebab upaya ini tidak berhasil. Mungkin sekali alasan utama yang menyebabkan perpecahan dalam pergerakan ialah adanya perbedaan pendekatan dalam menghadapi kemerdekaan oleh pimpinan PNI Baru.

Segara setelah bebas dari penjara Sukamiskin, Soekarno melakukan pendekatan pada Syahrir pada 4 Januari 1932. Dengan pengertian yang bijak ia memintanya masuk ke dalam Partindo/PNI Baroe untuk membentuk front melawan Belanda. Langkah Soekarno tersebut benar-benar merupakan cara dia dengan gaya mencari konsensus sesuatu yang tidak dimiliki oleh Syahrir dan kawan-kawannya. Hatta sendiri sebelumnya ketika berdirinya Partindo telah menyatakan tidak hendak bergabung. Ia berencana untuk bergiat dalam program pendidikan sosial pada saat kembali ke Indonesia sebagai tercantum dalam suratnya. Seorang dari Sumatera Dr. Abdoel Rivai menilai Hatta tidaklah tepat memasuki politik kaum nasionalis di Jawa karena hal itu baik secara kultural maupun etis tidak menguntungkan. Sebaiknya ia menjadi seorang saudagar. Hatta kembali ke tanah air pada pertengahan Agustus 1932, ia bertemu sejenak dengan Soekarno akan tetapi tidak membicarakan politik. Soekarno yang berpegang pada janjinya untuk persatuan pergerakan segera menemui Syahrir dan Hatta cs guna membicarakan kemungkinan fusi Partindo/PNI Baroe. Syahrir dan Maskoen kemudian menolak bertemu Soekarno dengan demikian Hatta seorang diri menemuinya pada 25 September 1932 yang gagal menghasilkan sesuatu. Akhirnya Soekarno belajar bahwa tujuan yang dikejarinya untuk mempersatukan partai-partai merupakan sesuatu yang ada di luar kekuatan kharismatiknnya. Dengan demikian ia mencurahkan tenaganya untuk Partindo sementara Thamrin berusaha membawa Partindo ke dalam PPPKI sesegara mungkin. Sebelum Soekarno bergabung dengan Partindo dalam makloemat dari Bung Karno kepada kaum Marhaen ia menyatakan Partindo dan PNI Baroe merupakan dua partai kaum Marhaen.

Usaha pintu terbuka di pihak Soekarno demi persatuan bagi kompromi hari depan Indonesia ditolak dengan keras oleh grup Hatta. Menurut Hatta kepercayaan politik Soekarno serta cara-cara propaganda

yang dilakukannya sangat berbahaya bagi obat mengandung candu bagi kaum marhaen. Para pemimpin PNI Baroe juga menolak kharisma Soekarno yang mereka pandang sebagai eksklusif bertalian dengan mistik Jawa dan khayalan wayang. Soekarno dengan dasar pandangan dan keyakinannya terus mencoba mempersatukan kelompok sekuler dengan mereka yang berorientasi pada yang sakral dalam pergerakan nasional dianggap sebagai dangkal sama sekali bikinan dan buang-buang waktu. Apa yang dilakukan Soekarno itu merupakan per-sate-an (bukan persatuan) sedangkan hal ini harus dilakukan dengan cara rasional dengan pendidikan politik yang baik menuju front persatuan yang stabil dengan sekelompok kecil kader. PNI baroe berharap dapat mencapainya lewat latihan keras dan pendidikan jika perlu masuk ke dalam parlemen Belanda. Mereka hanya percaya sebagian saja pada kehendak Soekarno dan Partindo mengenai persatuan yang dihimpun dalam bentuk PPPKI. Menurut Hatta dalam kenyataannya hal itu melanggar prinsip marhaenisme.¹⁶

Pola acuan Mohammad Hatta relatif lebih kering, lebih analitis, lebih kurang goyah dan lebih kurang berapi-api daripada Sukarno. Sebagai pribadi Hatta tidak berwarna apabila dibandingkan secara kontras dengan Sukarno yang bertingkah laku sugestif bagaikan air raksa. Hatta tidak mampu mengguncang hadirin dan bahkan barangkali merasa bahwa memainkan emosi massa melalui tipudaya-tipudaya retorik adalah agak tidak jujur. Kehidupan pribadinya amat terkendali dan sederhana. Dan kualitas-kualitas pribadinya sedemikian diperbaiki oleh pendidikan akademisnya di Rotterdam. Baginya gagasan-gagasan dan perkataan-perkataan harus dikendalikan dalam bentuk yang berdisiplin dan tidak dipergunakan dengan perhitungan mencapai tujuan-tujuan yang bersifat menggelorakan emosi semata-mata. Sebaliknya bagi Sukarno, gagasan-gagasan dan kata-kata adalah alat bagi hasrat-hasrat tertentu dan hasratlah yang akan membawa aksi. Perbedaan kepribadian yang sangat mendasar ini secara alamiah menghambat usaha-usaha Soekarno untuk mencapai persetujuan dengan pengikut-pengikut Hatta dalam upaya menggabungkan kembali pergerakan nasional.¹⁷

Ketika akhirnya menjadi nyata bagi Sukarno bahwa Partindo dan PNI Baru tidak dapat bergabung, maka sejak itu arah tindakan Sukarno sedikit banyak ditentukan olehnya sendiri. Partindo pada saat itu telah mengikatkan diri pada politik non-kooperasi. Hal ini tetap merupakan suatu persoalan penting bagi Soekarno dan menyebabkan suatu pertentangan terbuka dengan Hatta, ketika Hatta dalam bulan November 1932 diundang

untuk menerima penunjukkan sebagai seorang calon Parlemen Belanda. Hatta tidak memproses pencalonannya tersebut, tetapi karena Hatta sudah mempertimbangkan serius tentang hal ini, membuka peluang bagi Sukarno untuk menyerang terhadap dirinya atas kesediaannya meninggalkan prinsip oposisi tanpa kompromi terhadap Belanda. Partindo dengan beberapa sukses yang pants dicatat telah berusaha menjadi partai massa dan telah berjumlah 7000 orang pada Oktober 1932. Partindo dalam langkah dan cirinya lebih mirip sebagai PNI lama.

Keputusan Soekarno masuk dalam barisan Partindo menyebabkan perpecahan yang berlarut-larut menjadi nyata dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Perpecahan ini yang sudah lama membara tetapi tidak pernah diselesaikan, sesungguhnya dimulai sejak pertemuan PI dan pimpinan pemuda nasionalis Bandung untuk membentuk PNI pada tahun 1927. Dalam pertemuan yang dipimpin Sukarno itu ketegangan antara kedua kelompok dapat dicegah. Tetapi setelah ia ditangkap terbuka kesempatan bagi kedua belah pihak untuk lebih nyata mengemukakan perbedaan-perbedaan pendirian dan sikap politiknya. Persaingan antara Partindo dan PNI Baru sering dilihat sebagai persaingan antara kaum radikal dan kaum moderat atau antara barisan kiri dan barisan kanan. Pada awal tahun 1930-an antitesis seperti ini sebenarnya tidak berlaku. Partindo yang menekankan nonkooperasi, swadaya dan aksi massa sesungguhnya serupa dengan PNI Lama. Tetapi PNI baru sama sekali tidak dapat dikatakan moderat karena penekanannya untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang mantap secara bertahap, ia berhak menyatakan dirinya lebih radikal dari Partindo yang mencoba memobilisasi massa.

Bagi Soekarno pertimbangan PNI Baroe tersebut sama sekali bertentangan dengan pandangannya. Pribadinya sendiri sebagai bentukan sikritisme serta prinsip rukun dan harmoni yang menjadi bagian pandangan hidup Jawa Bali, sehingga ia memandang upayanya untuk mempersatukan semua faksi dalam PPPKI merupakan langkah politik utama. Sudah pada 1926 dalam tulisannya ia mengumumkan dirinya sebagai seorang nasionalis, Islam sekaligus Marxis. Ia berpikir bahwa dirinya mampu mempersatukan semua aliran yang berjuang untuk menyatakan dirinya secara politis. Dari sini kelihatan adanya perbedaan ideologis di antara dua pandangan tersebut. Disatu pihak terdapat satu kelompok kecil tetapi terorganisir dengan baik dan merupakan partai kader. Pandangan ini dipengaruhi oleh pandangan sosialisme rasional menuju perbaikan masyarakat dan bersifat utilitarian humanis seperti kelompok-kelompok sayap kiri di barat. Dengan

demikian mereka ini siap menyaksikan pelaksanaan pembangunan konsep ini bagi masyarakat demokratis Indonesia mendatang berapa lama pun itu. Dipihak lain terdapat seorang pemimpin yang gandrung dengan visi penentuan nasib sendiri bagi Indonesia, dengan cara jauh lebih terpusat dan bersifat kejawaan yang didasarkan pada pendekatan dan pelaksanaannya bagi kepentingan rakyat. Dalam kedudukan tersebut ia nampak lebih bersifat Jawa atau lebih tepat Indonesia dan pasti lebih patriotik/nasionalis daripada sosialis/internasionalis. Sukarno menggunakan satu kata untuk menggugah emosi orang Jawa yakni 'manunggal' dengan rakyat yang dipimpinnya. Terlebih ia juga sembeda, memiliki kemampuan untuk menggambarkan bahwa kemerdekaan memang dapat direnggut. Ia pun mampu mengembalikan kepercayaan diri yang sempat hilang karena kekuatan kolonial Belanda yang bersifat merusak dan memecah-belah¹⁸.

Thamrin dalam pidatonya mengatakan bahwa nasionalis kooperatif dan nonkooperatif memiliki satu tujuan bersama yang sama-sama yakin pada Indonesia Merdeka! Jika kami kaum kooperator merasa bahwa pendekatan kami tidak efektif, maka kami akan menjadi yang pertama mengambil arah kebijakan politik yang diperlukan. Jurang antara pemerintah kolonial dan gerakan nasional bertambah lebar dari sebelumnya. Bahkan jika pihak sana lebih bersikap bersahabat pengalaman telah memperlemah kehendak bekerja sama di antara mereka dan golongan pribumi. Gerakan sarekat buruh pribumi seperti mati. Keadaan patah semangat daya amuk yang terkendali serta impotensi kini merupakan keadaan sehari-hari dari gerakan pribumi. Demikian kesimpulan Stokvis. Keadaan putus asa dalam pergerakan begitu jelas digambarkan oleh Thamrin dan Stokvis dalam korespondensi mereka, bahkan menjadi lebih jelas ketika rumor 'minta ampun' Soekarno beredar di kalangan politik Indonesia. Mula-mula laporan tentang tanda-tanda lemahnya Soekarno selama dalam interogasi dan kemungkinan dirinya berubah muncul dalam editorial pers pihak sana. Hal ini ditolak dengan cepat oleh pihak pers Indonesia yang menyebut hal itu sebagai upaya mengejek para pemimpin nasionalis dan memerosotkan moral pergerakan. Beberapa waktu kemudian laporan tentang perubahan yang dramatis yang dibuat Soekarno muncul terus menerus. Dua arus pendapat muncul dalam koran Indonesia. Satu pihak minoritas mati-matian membela Soekarno. Sedang (Kampret) Saeroen di *Pemandangan* dan Hatta di *Daulat Ra'jat* mengecam Soekarno karena pendiriannya tidak tetap. Dalam dua artikel Hatta, Tragedi Soekarno dan 'Sikap Pemimpin' menurutnya pemimpin Partindo itu telah mati secara politik

dan dengan begitu tak lagi ada gunanya bagi pergerakan. Untuk memberikan jalan bagi frustasinya sendiri yang tertekan pandangan Hatta sangatlah kasar dan mendekati pembunuhan karakter. Ia kembali dengan tema yang sama pada *Daulat Ra'jat*, No. 71, 30 Agustus dalam tulisannya *Oedara Politik*, lalu Pergerakan dalam rentangan 20 September selanjutnya tentang tindakan pemerintah dan polisi setempat yang bertindak sepihak dan sewenang-wenang dalam pertemuan organisasi pergerakan pada 10 Oktober. Dalam 'tragedi Soekarno' ia mengutip artikel sebelumnya dalam koran yang sama 10 Agustus 1933. Dikatakan olehnya bahwa karena Soekarno telah tampil sebagai seorang pemimpin, pertama pemimpin PNI kemudian Partindo, hidupnya diberikan untuk memenuhi tugas dan membawa pengabdian. Dalam tulisannya Hatta melanjutkan Soekarno bukanlah menjadi korban tindakan atau kekejaman pemerintah tetapi ia menjadi korban dirinya sendiri karena moralnya yang rendah dan karakternya yang merosot dengan jelas. Hatta kemudian bertanya apakah tepat seorang yang mempersiapkan diri untuk bertanggungjawab secara moral kini menolak konsekuensi kegiatannya sendiri. Ia menjawabnya 'perilaku Soekarno menodai pergerakan, dan untuk itu dia harus dikecam dengan keras'¹⁹. Dalam artikel 'sikap pemimpin' Hatta menolak pendapat pers sini bahwa Soekarno tidak boleh dinilai terlalu kasar dengan bertahan pada pandangan sebelumnya. Pandangan lebih elastis disampaikan Tjipto Mangunkusumo dan Sanoesi Pane. Cipto mengatakan bahwa pers terlalu cepat menjatuhkan tuduhan pada perilaku Soekarno menuduh dan menghukum sekaligus. Soal Soekarno minta ampun menjadi analisis psikologi Cipto. Sejak ia dibebaskan dari Sukamiskin karena adanya pengampunan yang diberikan oleh De Graeff, sejak itu ia menjadi pasien psikis. Waktu itu Thamrin mengusulkan agar Soekarno melakukan perjalanan ke luar negeri. Tetapi kalangan dalam partai tidak menyukai saran itu dengan alasan 'pergerakan membutuhkan dirinya siang malam. Perjalanan keluar negeri merupakan contoh pengecut. Sanusi Pane dalam *Soeara Oemoem* mengulangi lagi Cipto yang lebih terang-terangan mengenai pers. Menurut observasinya pers telah gagal dalam mengabdikan dirinya pada orang yang bernama Soekarno, pada otaknya yang brilliant, elan semangatnya, integritas dan hidupnya yang mendalam.²⁰

Setelah keluar dari Sukamiskin, Soekarno segera tampil baik didepan podium maupun melalui surat kabar. Dalam majalah *Fikiran Ra'jat* memuat karangan-karangan-diskusi-diskusi dalam gaya Marxist tentang khayalan demokrasi politik borjuis tanpa adanya demokrasi ekonomi,

pelajaran-pelajaran tentang nonkooperasi dan aksi massa, pertukaran pikiran yang bersifat polemik dengan Hatta, pendapatnya yang klasik tentang perbedaan marhaen dan proletar dan tulisan lain yang bersifat mendidik. Karya tulis terpenting Sukarno dalam periode ini adalah tulisan “Mencapai Indonesia Merdeka” dari hasil istirahatnya di Pengalengan pada bulan Maret 1933. Karangan ini banyak kesamaannya dengan pidato *Indonesia Menggugat*. Lembaran-lembaran pertama berisi tentang perbedaan antara imperialisme kuno dan baru dan pandangan yang sama bahwa surplus mengakibatkan penjajahan dan penghisapan kekayaan tanah jajahan²¹.

Menurut Soekarno Indonesia dulu pernah merdeka tetapi rakyatnya tidak merdeka, karena sebelum ditundukkan oleh imperialis Belanda mereka telah ditundukkan oleh feodalisme kerajaan-kerajaan Hindu. Untuk itu kemerdekaan yang diperjuangkan merupakan jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur, dan kemerdekaan adalah suatu syarat bukan tujuan akhir. Menjelang akhir karangan itu ia kembali pada pembedaannya antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi:

Demokrasi kita haruslah demokrasi baru, demokrasi sejati, demokrasi yang sebenar-benarnya yaitu pemerintahan rakyat. Bukan demokrasi ala Eropa dan Amerika yang hanya suatu potret dari partai-partai, demokrasi politik bukan pun demokrasi yang memberi kekuasaan 100% pada rakyat di dalam urusan politik sahaja, tetapi suatu demokrasi politik dan ekonomi yang memberi 100% kecakrawartian pada rakyat jelata di dalam urusan politik dan ekonomi.²²

Lebih lanjut Soekarno mengatakan bahwa ketika kemenangan sudah didapat, maka kendalinya harus berada ditangan kaum marhaen. ‘di seberang jembatan itu jalan pecah jadi dua, satu ke dunia keselamatan marhaen satu ke dunia kesengsaraan marhaen, satu ke dunia sama-rata-sama-rasa, satu ke dunia sama-ratap-sama-tangis’. Untuk itulah marhaen yang mengendalikan kereta itu harus menjaga agar kereta tidak membelok ke jalan yang kedua, menuju masyarakat kapitalis dan borjuis Indonesia. Memang kejahatan kapitalisme merupakan sesuatu yang tidak pernah lepas dari pikiran Sukarno tetapi gagasan bahwa rakyat kecil Indonesia harus melawan kapitalis Indonesia adalah pemikiran barunya.

Dengan dekrit pemerintah No. 2 z, 28 Desember 1933 maka kota Ende di Pulau Flores ditetapkan sebagai tempat pembuangan Soekarno. Pemerintah kolonial bergeming dengan perubahan Soekarno. Menghadapi hukuman itu mungkin ia merujuk pada filsafat Jawa *wani ngalah duwur*

wekasane. Pada awalnya tidak ada komentar mengenai hukuman Soekarno ini, tetapi setelah tulisan Cipto dan Sanuse Pane dimuat diberbagai pers barulah orang berkomentar bahwa Soekarno merupakan kampiuan kemerdekaan, ia berharap segera dikembalikan dan dimurnikan²³.

Pada bulan November 1933 Sukarno mengundurkan diri dari Partindo. Dalam surat pengunduran itu dinyatakan bahwa ia tidak lagi sepenuhnya sependapat dengan kebijaksanaan politik partai. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pendukungnya, apakah Sukarno akan mengubah jalan politiknya menjadi kooperatif, akibat ditangkap untuk kedua kalinya dan diasingkan ke Ende, Flores, suatu yang tidak pernah terjadi dalam diri Sukarno. Sementara itu setelah penangkapan Sukarno, tokoh-tokoh lain seperti Syahrir, Moh. Hatta juga ditangkap dan diasingkan ke Boven Digul tahun 1936 mereka dipindahkan ke Banda. Hatta dan Syahrir ditangkap selagi belum berhasil berbuat banyak terhadap PNI Baru, meskipun anggotanya masih dapat mempertahankan hidup partai sampai tahun 1930-an. Kini kedua partai tersebut kehilangan pemimpin-pemimpinnya. Sesudah itu pergerakan mengambil jalan moderat dan koperasi menyampingkan jalan *machtsvorming* dan pendidikan suatu elite yang tidak kenal kompromi. Bukan Partindo melainkan suatu partai baru yaitu Parindra yang mewakili gaya politik dalam suasana kelonggaran baru yang diberikan oleh pemerintah.

Suasana politik yang represif pada tahun 1930-an, bagi kalangan kaum nasionalis yang masih bebas pilihannya hanya sikap moderat atau tidak bekerja sama sekali. Pokoknya perubahan pola politik Eropa memaksa kaum intelektual Indonesia menempuh jalan yang sedikit lain dalam melaksanakan perjuangan. Kebangkitan fasisme di Eropa telah mendorong yang radikal di kalangan mereka Amir Syarifuddin, Wikana, Muhammad Yamin dan lain-lain untuk sementara menempatkan perjuangan kemerdekaan sebagai tujuan kedua. Mereka memperlihatkan perjuangan dalam perlawanan yang lebih luas yakni terhadap fasisme di Eropa dan Asia. Pokok pandangan ini tertuang dalam bentuk satu partai baru 1937 Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) partai ini lebih radikal dari Parindra. Meskipun menekankan perjuangan kemerdekaan sebagai sesuatu yang penting, mereka menempatkan pekerjaan utama pada kerja sama Indonesia dan Belanda dalam melawan fasisme Jerman di Eropa dan Jepang di Pasifik²⁴.

Catatan Akhir :

- 1) Deliar Noer; *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900 – 1942*; Jakarta: LP3ES, 1982, hal. 322
- 2) Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*; Jakarta: LP3ES, 1987, hal.15
- 3) *ibid.*, hal. 17
- 4) Taufik Abdullah; *Nasionalisme dan Sejarah*; Bandung: Satya Historika, 2001, hal. 32
- 5) Sartono Kartodirdjo; *Sejak Indische sampai Indonesia*; Jakarta: Kompas, 2005, hal. xii
- 6) Taufik Abdullah, *op. cit*, hal. 40
- 7) Sartono Kartodirdjo; *Sejak Indische Sampai Indonesia*; Jakarta: Kompas Gramedia, 2005, hal. 9
- 8) John Ingleson; *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*; Jakarta: Grafiti Pers, 1993, hal. 9
- 9) *Ibid*; hal 16
- 10) *Ibid*, hal 103
- 11) Bob Hering; *Mohammad Hoesni Thamrin*; Jakarta: Hasta Mitra, 2003, hal. 110
- 12) *Ibid*, hal. 111
- 13) *Ibid*, hal 149
- 14) *Ibid.*, hal 154
- 15) *Ibid*, hal. 158
- 16) *Ibid.*, hal 174
- 17) John Legge; *Biografi Politik Sukarno*; Jakarta: Sinar Harapan; 1996, hal. 156-157
- 18) Bob Hering, *op. cit*, hal.176
- 19) Mohammad Hatta; *Memoir*; Jakarta: Tintamas, 1978, hal. 284
- 20) Bob Hering, *op. cit*, hal 224
- 21) John Legge, *op. cit*, hal 160-161
- 22) John Legge; *op. cit*, hal 161
- 23) Bob Hering, *op. cit*, hal 226
- 24) John D Legge; *op. cit*, hal 172



BAB IV

BPUPKI, PANCASILA DAN UNDANG – UNDANG DASAR 1945

A. Janji Kemerdekaan di kelak kemudian hari

Di depan sidang istimewa Parlemen Jepang yang ke 85 di Tokyo. Perdana Menteri Jepang Jend. Koiso Kuniaki, mengumumkan bahwa di wilayah kemaharajaan Jepang di Hindia Timur (Indonesia) diperkenankan merdeka di kelak kemudian hari.

Setelah enam bulan jawaban atas janji Koiso tersebut, datang dari Panglima Tentara ke 16, Letnan Jenderal Harada, Kumakici, pada tanggal 1 Maret membentuk Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan atau *Dokuritu Junbi Cosakai*, yang disingkat Badan Penyelidik. Pembentukannya diumumkan dalam “lembaran Negara” atau bentuk pemerintahan (kan po). 10 Maret 1945, badan ini ditugasi untuk menyelidiki hal-hal yang penting yang berkenaan dengan Negara Indonesia merdeka.

Organisasi badan ini terdiri atas dua bagian :

- a. *Badan Perundingan* yang dipimpin oleh seorang ketua (*Kaico*) dan wakil ketua (*fuku kaico*) dengan 60 orang anggota (*lin*) terdiri atas tokoh-tokoh Pergerakan Nasional, Birokrat, Intelektual, polisi, tentara PETA dan empat orang keturunan asing (Cina, Arab, Belanda) dan tujuh anggota orang Jepang sebagai anggota tanpa hak suara
- b. ¹*Kantor Tata Usaha* (Sekretariat), bagian ini yang ditugasi menyusun agenda persidangan dan penyusunan pelaporan.

Bagian sekretariat dipimpin oleh R.P. Soeroso (Fuku Syucokan, Wakil Residen Kedu) dibantu oleh Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo dan seorang Jepang Masuda, Toyohiko. Bagian Sekretariat mengerahkan beberapa orang stenographer (penulis cepat/steno) untuk mencatat jalannya debat dalam siding-sidang. Para penulis cepat dipimpin oleh Karundeng.

Nama-nama para anggota Badan Penyelidik ini diumumkan pada 29 April 1945, yaitu hari Tenno Setsu, yaitu lahir Tenno Heiko, Kaisar Hirohito, Dr. Radjiman Wediodiningrat seorang pensiunan dokter Kesunanan Surakarta dan tokoh Partai Indonesia Raya (Parindra) diangkat sebagai Ketua Badan Penyelidik (Kaico) dan Ichibangase, (Cirebon Syucokan, Residen Cirebon) diangkat sebagai Wakil Ketua bersama R.P. Soeroso.

Pada tanggal 28 Mei 1945, dilangsungkan pelantikan anggota Badan Penyelidik di gedung Cuo Sangi In (Dewan Penasehat Pusat) di Pejambon (sekarang gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri). Sekali pun tidak hadir dalam pelantikan tersebut Jenderal Itagaki, Panglima Tentara Wilayah Ketujuh yang bermarkas di Singapura menyampaikan ucapan selamat atas terbentuknya Badan Penyelidik ini. Ia menyatakan "Negara Indonesia yang akan dibangun adalah satu mata rantai yang kokoh kuat dalam lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dan kewajibannya dalam usaha pembelaan Asia Timur Raya adalah sangat penting sekali".

Peristiwa yang bersejarah pada hari Senin (28 Mei 1945) dibuka dengan upacara, diawali oleh pengibaran dua bendera Jepang (Hinomaru) disusul dengan bendera merah putih disisi kirinya. Sesuai upacara para anggota istirahat. Acara pelantikan dimulai pada pukul 15.30 Waktu Jawa atau pukul 14.30 WIB. Amanat Saiko Sikikan (Panglima Tentara ke 16) Letnan Jenderal Harada, Kumakici sebagai pembukanya acara. Acara dilanjutkan oleh Gunseikan (Kepala Pemerintahan Militer) Mayor Jenderal Yamamoto, Moichiro. Ia menyampaikan pidato pelantikan.

"Pembentukan badan ini bermaksud menyelenggarakan pemeriksaan dasar tentang hal-hal yang penting, rancangan-rancangan dan penyelidikan yang berhubungan dengan usaha mendirikan Negara Indonesia Merdeka yang baru. Dengan jalan demikian akan dapat disampaikan bahan-bahan perundingan yang banyak dan saksama kepada Badan Penetapan Putusan Yang Terakhir. Kalau kita meninjau bermacam-macam hal di daerah yang dinamakan Indonesia, serta memikirkan kedudukan pulau Jawa ini, maka

kewajiban badan ini di Tanah Jawa dan cara untuk menjalankan usaha-usahanya akan jelaslah dengan sendirinya”.

Maknanya tugas BPUPKI hanyalah badan penyusun rancangan usul. Diterima atau ditolak sangat bergantung pemerintah Jepang di Tokyo.

Selanjutnya Gunseikan menyatakan :

“Jika suatu bangsa hendak meneguhkan dasar kemerdekaannya, maka ia harus mempunyai keyakinan diri untuk sanggup membela negara sendiri dan juga mempunyai kekuatan yang nyata sebagai bangsa. Oleh karena itu pada tingkatan yang sekarang ini, bangsa Indonesia harus terlebih dahulu insaf akan keyakinan dirinya dan kegiatan hatinya untuk memelihara tenaga bagi melangsungkan peperangan ini. Berhubungan dengan syarat-syarat dasar untuk negara merdeka yang baru, maka tuan-tuan harus memajukan diri dalam usaha penyelidikan dan pemeriksaan tentang soal-soal tadi dan demikian juga tentang soal-soal agama. Saya berharap supaya tenaga pembelaan dan tenaga rakyat diperkuat dan dimajukan tidak buat sekarang saja, tapi juga seterusnya”.

Pada akhir sambutannya Gunseikan berharap agar bangsa Indonesia tidak sempit pandangannya.

*“Oleh karena itu janganlah bangsa Indonesia sempit pandangannya dan jangan memikirkan kepentingan bangsa Indonesia saja”.*²

Anggota BPUPKI menurut Hatta, dipilih oleh badan-badan atau organisasi pada tiap-tiap Syu (Keresidenan) atau ditunjuk oleh Syucokan (Residen).³ Badan-badan di tiap Syu, antara lain Syu Sangi Kai, (Dewan Penasehat Keresidenan), pada umumnya mencalonkan tokoh-tokoh masyarakat daerah. KRT Radjiman Wediodiningrat adalah ketua Syu Sangi Kai Madiun, ia seorang tokoh daerah yang moderat. Beberapa orang yang ditunjuk berasal dari Dewan Penasehat Pusat (Cuo Sangi In) yang dipimpin oleh Soekarno. Bagaimana metode seleksi anggota BPUPKI, tidak ada sumber yang bias diacu.

Anggota-anggota BPUPKI yang berasal dari Chuo Sangi In berjumlah 13 orang :

- Soekarno, Kaico, Cuo Sangi In, Insinyur, Jakarta
- Buntaran Martoatmodjo, Wakil ketua (Fuku Kaiko) dokter, Jakarta
- Samsi Sastrowidagdo, akuntan, Chuo Sangi In Giin, Surabaya
- Roosseno Sumohadikusumo R, Ir, Chuo Sangi In Giin, birokrat Situbondo

- K.H. Abdul Halim, ulama *Chuo Sangi In Giin*, Ciamis, Jawa Barat
- Mas Aris, *Cuo Sangi In Giin*, Pati, Jawa tengah
- Wachid Hasyim, ulama *Chuo Sangi In Giin*, Jombang, Jawa Timur
- Roeslan Wongsokusumo, *Chuo Sangi In Giin*, wartawan, Sumenep, Madura
- Puboyo, Pangeran Haryo, *Chuo Sangi In Giin*, Surakarta
- Oei Tiong Hauw, peranakan Cina, *Chuo Sangi In Giin*, Jakarta
- Tan Eng Hoa, peranakan Cina, *Chuo Sangi In Giin*, Jakarta
- Sartono, Raden Mas Mr, *Chuo Sangi In Giin*, Jakarta
- Ki Hajar Dewantara, pendidik, *Chuo Sangi In Giin*, Yogyakarta
- Baswedan, Abdurachman, peranakan Arab, *Chuo Sangi In Giin*, Yogyakarta
- Liem Koen Hian, peranakan Cina, *Chuo Sangi In Giin*, Jakarta

Mereka yang berasal dari unsur pegawai negeri (birokrat) berjumlah 22 orang :

- RMTA Suryo, Residen Bojonegoro.
- Kolopaking Purbonegoro, Bupati Banjarnegara
- Soedirman R, Wakil Residen (Fuku Syucokan) Surabaya
- Abdurrahman Pratalykrama, Wakil Residen (Fuku Syucokan) Kediri
- Andi Pangeran Pattarani, kepala *Onderafdeling (Bunkenco)* Bone Sulawesi Selatan
- Sutardjo Kartohadikusumo, Syucokan (Residen) Jakarta
- Munandar Azhar Soetejo, Ir, Jawatan Listrik Bogor
- Mas Besar Mertokusumo, Mr, Hakim
- Mohammad Noor, Ir, Pangeran Jawatan Pengairan Bondowoso, Jawa Timur
- Kusumaatmaja Sulaiman Effendi, Mr, Hakim, Semarang
- Wongsonagoro, KRT, Fuku Syucokan (Wakil Residen) Semarang
- Asikin Natanegara, Polisi, Bandung
- I Gusti Ketut Pudja, Penasehat (Komon) pada Pemerintah Militer Angkatan Laut (Minseibu), Sunda Kecil
- Maria Ulfah Santosa, pegawai departemen kehakiman (Shihobu Gunseikanbu), Jakarta
- Sastromulyono, R, Mr. Hakim, Jakarta
- Singgih, R.P. Mr. kepala Bagian Perencanaan Umum (Naimubu Koseikaco) Gunseikanbu, Jakarta
- Soebardjo, Mr. Ahmad, Bagian Penerangan (Sendenbu) Gunseikanbu, Jakarta
- Muhammad Hasan, Staf Gunseikanbu, Sumatra, Medan

- Djenal Asikin Widjajakusuma, Prof Dr, dokter, guru besar Ika Dai Gakku (Sekolah Tinggi Kedokteran), Jakarta
- Supomo, Prof, Mr R, Pengadilan Tinggi Jakarta
- Roosseno Suryohadikusumo, Ir
- Abdul Kadir, Daidanco Peta, Cirebon
- Samsudin, Mr, Syico (Walikota) Sukabumi

Anggota-anggota dari unsur ulama berjumlah lima orang :

- Sanusi, Achmad A.H, Sukabumi, anggota Badan Penasehat Keresidenan (Syu Sangi Kai Giin), Bogor
- Abdul Kahar Mudzakkir, Pegawai Bagian Ekonomi Kesultanan Yogyakarta
- Masykur, K.H, Pesantren Singosari, Malang
- Ki Bagus Hadikusumo, Pengurus Besar Muhammadiyah Yogyakarta
- Hasan Abdul Fatah, anggota Badan Penasehat Keresidenan (Syu Sangi Kai), Banten

Anggota-anggota dari Wartawan, ada enam orang :

- Sayuti Melik, Semarang
- Oto Iskandar Dinata, Bandung
- Parada Harahap, Sukabumi
- Oey Tiang Tjoei, Surabaya
- Hamidan Abdul Anang, Banjarmasin, Borneo
- Soekardjo Wirjopranoto, Jakarta

Anggota BPUPKI dari unsur organisasi resmi, berjumlah lima orang :

- Ratulangie G.S.S.J, Jakarta
- Samsoedin, Raden Mr, Sukabumi
- Mohammad Hatta, Drs, *Fuku Gico* (Wakil Ketua – Jawa Hokokai), Jakarta
- Agus Salim, Majelis Pertimbangan Poetera, Jakarta
- Margono Djojohadikusumo, *Syomin Kumiai (Koperasi Tabungan)*, Cuo Sangi In, Jakarta

Anggota BPUPKI dari unsur pengusaha, enam orang :

- Dahler, P.F, swasta, Yogyakarta
- Dasaad, A.M, pengusaha swasta, Bangil, Jawa Timur
- Latuharhary, Mr, mantan pegawai negeri, Malang
- Iwa Kusuma Sumantri, R Mr, pengacara, swasta, Bandung
- Maramis, Mr, swasta, pengacara, Jakarta

- Hindromartono, R Mr, swasta, Yogyakarta

Pemilihan dan penunjukan para anggota BPUPKI dilakukan oleh badan-badan atau organisasi yang ada di tiap-tiap Syu, ditetapkan oleh Syucokan (Residen) Jepang.⁴ Dalam perjalanan waktu jumlah anggota BPUPKI ditambah enam orang, yaitu :

- K.H. Abdul Fatah Hasan, Banten
- R Asikin Natanegara, Bandung
- BKPA Soeryohamidjojo, Surakarta
- Ir. Pangeran M. Noor, Bondowoso
- Mr. M. Besar Mertokusumo, Jakarta
- Abdul Kaffar, Sumenep, Madura

B. Sidang-sidang BPUPKI

1) Pemaparan Pikiran tentang dasar negara

Sidang pertama BPUPKI dibuka pada hari Selasa tanggal 29 Mei 1945, oleh Kaico Dr. Radjiman Wediodiningrat. Pidato pembukaan sidang pertama dari ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wediodiningrat tidak tercatat, hanya dari ingatan beberapa peserta yang menyampaikan informasi. Bahwa Dr. Radjiman menyampaikan pertanyaan kepada sidang, sesuai dengan agenda. Muhd. Yamin sebagai pembicara pertama.

Sidang pertama ini dibuka oleh ketua dengan pidato ringkas, dengan pertanyaan mendasar : "Negara yang akan kita *bentuk dasarnya apa?*"

Menurut Hatta, tidak seorang anggota pun yang menjawab, karena khawatir akan terjadi perdebatan, membawa pertikaian filosofis yang akan memakan waktu panjang sekali. (Hatta, *Memoir*, 1978, 432).

Sesuai dengan agenda anggota Muhd. Yamin diberi kesempatan sebagai pembicara pertama; Muhd. Yamin menguraikan kerangka pemikirannya secara singkat, yang terdiri atas lima pokok :

I. Peri Kebangsaan

Indonesia merdeka berdasarkan nasionalisme lama dan baru. Dasar negara Sriwijaya dan Mojopahit karena perubahan zaman tradisi tatanegara putus, kesulitan mencari dasar asli. Karena cita-cita hancur di medan perjuangan kebangsaan Indonesia mengharuskan "menemukan" dasar sendiri.

II. Peri Kemanusiaan

Kemerdekaan akan menghidupkan kekuatan negara dengan status politik yang sempurna.

Menolak gagasan dominion status (sebagaimana yang dijanjikan oleh Ratu Wilhelmina) pada pidato Ratu Wilhelmina bulan Desember 1941 – tentang status baru Hindia Belanda pra betoral, mandat, Atlantic Charter pasal 3, status internasional yang berisi kemanusiaan dan kedaulatan yang sempurna.

III. Peri Ketuhanan

Peradaban luhur ber Tuhan. *Dasar negara* berasal dari peradaban dan agama.

IV. Peri Kerakyatan

- a. *Permusyawaratan*, kebaikan musyawarah dalam masyarakat pada masa khalifah Islam, musyawarah dengan dasar adat. *Perpaduan* adat dengan perintah agama.
- b. *Perwakilan*, dasar adat mengharuskan perwakilan sebagai ikatan masyarakat, sebagai *dasar abadi* bagi tatanegara.
- c. *Kebijaksanaan*, rationalisme – perubahan dalam adat dan masyarakat sebagai dinamika rakyat.
 1. Fahaman Indonesia. Membuang dasar falsafah barat. Terbentuknya Republik (?) Indonesia berdasar nasionalisme – unitarisme.
 2. Pembelaan. Dasar syariah membangkitkan perang jihad (suci). *Perwakilan secara adat* membangkitkan tenaga *keraman* (pemberontakan) kebijaksanaan (politik), teknik dan dasar perang.
 3. Budi Negara. Sesuatu yang abadi, setia kepada negara, percaya akan tenaga rakyat, ingin (semangat) untuk merdeka.

V. Kesejahteraan Rakyat

Keadilan sosial harapan bagi rakyat negara baru Republik Kesejahteraan.

Setelah membacakan sistematika pokok-pokok pikirannya Mr. Muhd. Yamin melanjutkan pidatonya tanpa teks.

“Kewajiban BPUPKI adalah kewajiban yang sangat istimewa, yaitu kewajiban untuk menyelidiki bahan-bahan (materi) yang akan menjadi dasar dan susunan negara yang akan dibentuk dalam suasana kemerdekaan yang telah dibela dan diakhiri oleh rakyat Indonesia dengan pengorbanan dan pertumpahan darah sejak beratus tahun yang lalu. Dalam menyongsong zaman yang gemilang bagi rakyat, yang akan diliputi suatu peradaban yang makmur dan bersifat adil sesuai dengan keinginan rakyat. *Mau merdeka dan ingin negara yang berkedaulatan.* Kita mendirikan negara Indonesia atas keinsafan atas dasar pengetahuan yang luas dan bebas

tentang seluruh Indonesia. Itulah keyakinan saya dan janganlah kita mengecewakan harapan mereka masyarakat Indonesia”.

Yang pertama adalah peri kebangsaan. Keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka sekarang juga, amat mendesak dan didukung oleh segenap lapisan masyarakat. Ada tiga usaha yang harus dilakukan : Pertama, tugas anggota panitia untuk menghimpun bahan-bahan untuk pembentukan negara. Kedua, menyusun undang-undang dasar negara dan hukum negara. Ketiga, menjalankan isi hukum-hukum yang terbentuk. Ketiga usaha ini harus disatupadukan dengan bekerja keras.

Negara baru yang akan dibentuk adalah negara kebangsaan Indonesia atau *nationale staat* yang sesuai dengan peradaban kita dan sesuai dengan tatanan dunia. Sekeluarga diatas dasar kebangsaan dan keTuhanan. Menurut Yamin, kedua dasar itulah yang menjadi keinginan yang terpendam berates-ratus tahun yang lalu. Keinginan itu bersumber pada nasionalisme atau dasar kebangsaan baru yang mengikat yang menjadi kemauan bersama. Nasionalisme baru yang menjadi sumber persatuan rakyat dalam ikatan sejarah.

Negara (Republik) Indonesia adalah bentuk negara yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Bentuk negara Republik pada hakekatnya adalah negara ketiga (*aritte reich*) sesudah Sriwijaya dan Majapahit.

Negara Sriwijaya dan Majapahit disusun atas dasar *Keprabuan* (kerajaan) yang bersandar kepada *agama*. Negara Republik Indonesia adalah nasional, sebagai perpaduan antara *adat* dan *perintah agama*, yang menuju kepada kehidupan masyarakat yang harmonis. Nilai, norma, tradisi, keyakinan, falsafah dan sejarah yang hidup dalam masyarakat, beradaptasi dengan pemikiran modern (nasionalisme, sosialisme, patriotisme, kesadaran adalah sumber bagi lahirnya negara yang merdeka dan berdaulat.

Inti dari pemikiran Yamin tentang dasar negara adalah :

- ✓ Dasar kebangsaan (nasionalisme yang mengikat, kemauan sesuatu bangsa sekuturunan, adalah nasionalisme baru, dengan tiga dasar (pilar?).
- Mempersatukan rakyat dalam ikatan sejarah yang dilindungi
- Membangun suatu negara yang berkeTuhanan
- Rakyat Indonesia tidak dapat diikat dengan dasar dan bentuk ketatanegaraan

2) Sidang kedua, BPUPKI tanggal 31 Mei 1945

Sidang kedua ini tidak sesuai agenda, karena sesuatu hal, namun pokok pembicaraannya masih mengenai dasar negara. Prof. Dr. Mr. Soepomo menjadi pembicara tunggal. Dalam menjawab pertanyaan ketua BPUPKI, ia menguraikan pendapatnya. Dasar negara yang merdeka ada tiga syarat mutlak.

Pertama, tentang daerah (wilayah). Indonesia merdeka pada dasarnya harus meliputi batas Hindia Belanda.

Kedua, rakyat sebagai warganegara yang berkebangsaan Indonesia dan peranannya yang telah turun-temurun tinggal di Indonesia harus diterima sebagai warganegara dengan diberi kebangsaan Indonesia. Soepomo menolak dwi kewarganegaraan (*dubbele onderdaanschap*) dan tanpa kewarganegaraan (*staatloosheid, stateless*).

Ketiga, pemerintah yang berdaulat bukan internasionalisme. Soepomo menegaskan menurut dasar apa negara Indonesia yang akan didirikan.

Ada tiga teori tentang negara :

1. Negara berdasar teori *individualis* (Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jaques Rousseau, Herbert spencer).
2. Negara berdasar teori *golongan* (Marx, Engels, dan Lenin).
3. Negara berdasar teori *integralistik* (Spinoza, Adam Muller, Hegel).

Soepomo mengajukan pertanyaan soal negara yang dibangun Republik atau monarki. Negara Republik atau monarki tidak mengenal dasar susunan pemerintahan yang penting, tegas Soepomo, hendaknya Kepala Negara bahwa semua badan pemerintahan mempunyai sifat pemimpin negara dan rakyat seluruhnya (negarawan). Kepala Negara memimpin rakyat seluruhnya, *mengatasi segala golongan dan bersifat mempersatukan*. Apakah Kepala Negara itu diberi kedudukan raja atau presiden, atau adipati seperti di Birma, atau sebagai fuhrer itu semua tidak mengenai dasar susunan pemerintahan. Apakah kita akan mengangkat seorang sebagai kepala Negara dengan hak turun temurun atau hanya waktu tertentu. Itu hanya mengenai dan bentuk pimpinan negara yang nanti akan kita selidiki dalam badan ini.

Cara mengangkat pemimpin negara, kata Soepomo "menekankan" jangan diturut cara pilihan menurut system demokrasi Barat, yang berdasar atas paham *perorangan*. Konsekuensi dari menolak dasar perorangan (*individualisme*) ini berarti juga *menolak* sistim parlementarisme, menolak system demokrasi Barat, menolak system menyamakan semuanya sama

harganya. Untuk menjamin pimpinan negara, terutama Kepala Negara terus menerus *bersatu jiwa dengan rakyat* dalam susunan pemerintahan negara Indonesia harus badan *permusyawaratan* supaya *mengetahui dan merasakan rasa keadilan rakyat dan cita-cita rakyat*. Bagaimana bentuk badan permusyawaratan ialah satu hal yang harus kita teliti. Masalah perekonomian negara. Dalam negara yang berdasar integralistik, yang berdasar persatuan, maka dalam ekonomi akan dipakai sistim “sosialisme negara” (*staatssocialisme*) perusahaan-perusahaan yang penting diurus oleh negara. Dasar kekeluargaan dari negara kebangsaan yang bersatu, mempunyai akibat-akibat di lapangan lain.

3) Soekarno, Pancasila *Weltanschauung* bangsa

Sesudah mengucapkan pidato pengantarnya Soekarno menyampaikan eksplanasi mengenai makna dan maksud Ketua BPUPKI.

Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta Paduka tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: “*Philosofische grondslag*” daripada Indonesia Merdeka. *Philosofische grondslag* itulah pondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan, Paduka tuan Ketua yang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saya membicarakan, memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah yang saya artikan dengan perkataan “merdeka”.

Merdeka buat saya ialah : “*political independence*”, *politieke onafhankelijkheid*. Apakah yang dinamakan *politieke onafhankelijkheid*?

Tuan-tuan sekalian! Dengan terus-terang saja saya berkata : Tatkala Dokuritu Zyunbi Tyoosakai akan bersidang, maka saya, di dalam hati saya banyak khawatir, kalau-kalau banyak anggota yang – saya katakan di dalam bahasa asing, maafkan perkataan ini – “*zwaarwichtig*” akan perkara yang kecil-kecil, *zwaarwichtig* sampai – kata orang Jawa – “*jelimet*”. Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai *jelimet*, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan.

Tuan-tuan yang terhormat! Lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu.

Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu sama lain ! Samakah isinya, samakah

derajatnya negara-negara yang merdeka itu ? Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingkanlah isinya!

Alangkah berbedanya isi itu! Jikalau kita berkata : Sebelum Negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai, itu selesai, sampai jelimet! Maka saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian kenapa Saudi Arabia merdeka, padahal 80% dari rakyatnya terdiri dari kaum Badui yang sama sekali tidak mengerti hal ini atau itu.

Bacalah buku Armstrong yang menceritakan tentang Ibn Saud! Di situ ternyata, bahwa tat kala Ibn Saud nebdirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari otomobil Ibn Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu !! Tokh Saudi Arabia merdeka!

Lihatlah pula – jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat – Sovyet Rusia! Pada masa Lenin mendirikan Negara Sovyet, adakah rakyat Sovyet sudah cerdas? Seratus lima puluh milyun rakyat Rusia adalah rakyat *Musyk* yang lebih daripada 80% tidak dapat membaca dan menulis; bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoi dan Fülöp Miller, tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Sovyet rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Sovyet itu. Dan kita sekarang di sini mau mendirikan Negara Indonesia Merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan!

Maaf, P.T.Zimukyokutyoo! Berdirilah saya punya bulu, kalau saya membaca tuan punya surat, yang minta kepada kita supaya dirancang sampai jelimet hal ini dan itu dahulu semuanya ! Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dulu, sampai jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, tuan tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, kita semuanya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, - sampai di lobang kubur!

Saudara-saudara! Apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun '33 saya telah menulis satu risalah. Risalah yang bernama "*Mencapai Indonesia Merdeka*". Maka di dalam risalah tahun '33 itu, telah saya katakana, bahwa kemerdekaan, *politieke onafhankelijkheid*, political independence, tak lain dan tak bukan, ialah satu jembatan, satu jembatan emas. Saya katakana di dalam kitab itu, bahwa diseberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat.

Ibn Saud mengadakan satu negara di dalam satu malam, - in one night only! – kata Armstrong di dalam kitabnya. Ibn Saud mendirikan Saudi Arabia Merdeka di satu malam sesudah ia masuk kota Riad dengan 6 orang! Sesudah “jembatan” itu diletakkan oleh Ibn Saud, maka di seberang jembatan, artinya kemudian daripada itu. Ibn Saud barulah memperbaiki masyarakat Saudi Arabia. Orang yang tidak dapat membaca diwajibkan belajar membaca, orang yang tadinya bergelandangan sebagai nomade yaitu orang Badui, diberi pelajaran oleh Ibn Saud jangan bergelandangan, dikasih tempat untuk bercocok-tanam. Nomade dirubah oleh Ibn Saud menjadi kaum tani, - semuanya di seberang jembatan.

Adakah Lenin ketika dia mendirikan negara Sovyet Rusia Merdeka, telah mempunyai Djnepprprostoff dam yang maha besar di sungai Djnepp? Apa ia telah mempunyai radio-station, yang menyundul ke angkasa? Apa ia telah mempunyai kereta-kereta api cukup, untuk meliputi seluruh negara Rusia? Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Sovyet-Rusia Merdeka telah dapat membaca dan menulis? Tidak, tuan-tuan yang terhormat! Di seberang jembatan emas yang diadakan oleh Lenin itulah, Lenin baru mengadakan radio-station, baru mengadakan sekolah, baru mengadakan Creche, baru mengadakan Djnepprprostoff! Maka oleh karena itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian, janganlah tuan-tuan gentar di dalam hati, janganlah mengingat bahwa ini dan itu lebih dulu harus selesai dengan jelimet, dan kalau sudah selesai, baru kita dapat merdeka. Alangkah berlainannya tuan-tuan punya semangat, - jikalau tuan-tuan demikian -, dengan semangat pemuda-pemuda kita yang 2 milyun banyaknya. Dua milyun pemuda ini menyampaikan seruan pada saya, 2 milyun pemuda ini semua berhasrat Indonesia Merdeka Sekarang!

Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat, yang mengetahui sejarah, menjadi zwaarwichtig, menjadi gentar, padahal semboyan Indonesia Merdeka, bukan sekarang saja kita siarkan? Berpuluh-puluh tahun yang lalu, kita telah menyiarkan semboyan Indonesia Merdeka, bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan “INDONESIA MERDEKA SEKARANG”. Bahkan 3 kali sekarang yaitu Indonesia Merdeka sekarang, sekarang, sekarang!

Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menyusun Indonesia Merdeka – kok lantas kita zwaarwichtig dan gentar hati! Saudara-saudara, saya peringatkan sekali lagi, Indonesia Merdeka, political independence, politieke onafhankelijkheid, tidak lain dan tidak bukan ialah satu jembatan! Jangan gentar! Jikalau umpamanya kita pada saat sekarang ini diberikan kesempatan oleh Dai Nippon untuk merdeka, maka dengan mudah Gunseikan diganti dengan orang yang bernama Condro Asmoro, atau

Somubuco diganti dengan orang yang bernama Abdul Halim. Jikalau umpamanya Buco-buco diganti dengan orang-orang Indonesia pada sekarang ini, sebenarnya kita telah mendapat political independence, politieke onafhankelijkheid – in one night, di dalam satu malam!

Pemuda-pemuda yang dua milyon, semuanya bersemboyan: Indonesia Merdeka, sekarang! Jikalau umpamanya Balatentara Dai Nippon sekarang menyerahkan urusan negara kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan menolak, serta berkata : *mangke rumiyin, tunggu dulu*, minta ini dan itu selesai dulu, baru kita berani menerima urusan Negara Indonesia Merdeka?

Saudara-saudara, kalau umpamanya pada saat sekarang ini Balatentara Dai Nippon menyerahkan urusan negara kepada kita maka satu menitpun kita tidak akan menolak, sekarangpun kita menerima urusan itu, sekarangpun kita mulai dengan Negara Indonesia yang Merdeka !

Saudara-saudara, tadi saya berkata, ada perbedaan antara Sovyet – Rusia, Saudi Arabia, Inggris, Amerika dll.: tentang isinya : tetapi ada satu yang sama, yaitu rakyat Saudi Arabai sanggup mempertahankan negaranya. Musyik-musyik di Rusia sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Amerika sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Inggris sanggup mempertahankan negaranya. Inilah yang menjadi minimum-eis. Artinya, kalau ada kecakapan yang lain, tentu lebih baik, tetapi manakala sesuatu bangsa telah sanggup mempertahankan negerinya dengan darahnya sendiri, dengan dagingnya sendiri, pada saat itu bangsa itu telah masuk untuk kemerdekaan. Kalau bangsa kita, Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, saudara-saudara, semua siap-sedia mati, mempertahankan tanah air kita Indonesia pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap-sedia, masuk untuk Merdeka.

Cobalah pikirkan hal ini dengan memperbandingkannya dengan manusia. Manusiapun demikian, saudara-saudara! Ibaratnya, kemerdekaan saya bandingkan dengan perkawinan. Ada yang berani kawin, lekas berani kawin, ada yang takut kawin. Ada yang berkata: Ah saya belum berani kawin tunggu dulu gaji Rp. 500,-. Kalau saya sudah mempunyai rumah gedung, sudah ada permadani, sudah ada lampu listrik, sudah mempunyai tempat tidur yang mentul-mentul, sudah mempunyai meja-kursi yang selengkap-lengkapnyanya, sudah mempunyai sendok-garpu perak satu kaset, sudah mempunyai ini dan itu, bahkan sudah mempunyai kinder-uitzer, barulah saya berani kawin.

Ada orang lain yang berkata: saya sudah berani kawin kalau saya sudah mempunyai meja satu, kursi empat, yaitu meja makan, lantas satu zitje, lantas satu tempat tidur.

Ada orang yang lebih berani lagi dari itu, yaitu saudara-saudara Marhaen! Kalau dia sudah mempunyai gubug saja dengan satu tikar, dengan satu periuk: dia kawin. Marhaen dengan satu tikar satu gubug: kawin. Sang Klerk dengan satu meja, empat kursi, satu zitje, satu tempat tidur : kawin.

Sang Ndro yang mempunyai rumah gedung, *electriche kookplaat*, tempat tidur, uang bertimbun-timbun: kawin. Belum tentu mana yang lebih *gelukkig*, belum tentu mana yang lebih bahagia. Sang Ndro dengan tempat tidurnya yang mentul-mentul atau Sarinem dan Samiun yang hanya mempunyai satu tikar dan satu periuk, saudara-saudara! (*Tepuk tangan, dan tertawa*). Tekad hatinya yang perlu, tekad hatinya Samiun kawin dengan satu tikar dan satu periuk, dan hati Sang Ndro yang baru berani kawin kalau sudah mempunyai *gerozilver* satu kaset plus *kinder-uitzet*, - buat 3 tahun lamanya.

Saudara-saudara, soalnya adalah demikian: - kita ini berani merdeka atau tidak? Inilah, saudara-saudara sekalian, Paduka tuan Ketua yang mulia ukuran saya terlebih dulu saja kemukakan sebelum saya bicarakan hal-hal yang mengenai dasarnya satu negara yang merdeka. Saya mendengar uraian P.T. Soetardjo beberapa hari yang lalu, tatkala menjawab apakah yang dinamakan merdeka beliau mengatakan: kalau tiap-tiap orang di dalam hatinya telah merdeka, itulah kemerdekaan. Saudara-saudara, jika tiap-tiap orang Indonesia yang 70 milyun ini lebih dulu harus merdeka di dalam hatinya, sebelum kita dapat mencapai *political independence*, saya ulangi lagi, sampau lebur kiamat kita belum dapat Indonesia Merdeka!

Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita! Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa kita! Di dalam Saudi Arabia Merdeka, Ibn Saud memerdekakan rakyat Arabia satu per-satu. Di dalam Sovyet-Rusia Merdeka Stalin memerdekakan hati bangsa Sovyet-Rusia satu per-satu.

Saudara-saudara! Sebagai juga salah seorang pembicara berkata: kita bangsa Indonesia tidak sehat badan, banyak penyakit malaria, banyak *dysenterie*, banyak penyakit *hongerodeem*, banyak ini banyak itu. "Sehatkan dulu bangsa kita, baru kemudian merdeka".

Saya berkata, kalau inipun harus diselesaikan lebih dulu, 20 tahun lagi kita belum merdeka. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita menyehatkan rakyat kita, walaupun misalnya tidak dengan kinine, tetapi kita kerahkan segenap masyarakat kita untuk menghilangkan penyakit malaria dengan menanam

ketepeng kerbau. Di dalam Indonesia Merdeka kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat, di dalam Indonesia Merdeka kita menyehatkan rakyat Indonesia sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan “jembatan”. Di seberang jembatan, jembatan emas inilah, baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia Merdeka yang gagah, kuat sehat, kekal dan abadi.

Tuan-tuan sekalian ! kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. Tidakkah kita mengetahui, sebagaimana telah diutarakan oleh berpuluh-puluh pembicara, bahwa sebenarnya *internationaalrecht*, hukum internasional, menggampangkan pekerjaan kita? Untuk menyusun, mengadakan, mengakui satu negara yang merdeka, tidak diadakan syarat yang neko-neko, yang menjelimet, tidak! Syaratnya sekedar buki, rakyat, pemerintah yang teguh! Ini sudah cukup untuk *internationalrecht*. Cukup, saudara-saudara. Asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, kemudian diakui oleh salah satu negara yang lain, yang merdeka inilah yang sudah bernama: merdeka. Tidak peduli rakyat dapat baca atau tidak, tidak peduli rakyat hebat ekonominya atau tidak, tidak peduli rakyat bodoh atau pintar, asal menurut hukum internasional mempunyai syarat-syarat suatu negara merdeka, yaitu ada rakyatnya, ada buminya dan ada pemerintahnya, - sudahlah ia merdeka.

Janganlah kita gentar, *zwaarwichtig*, lantas mau menyelesaikan lebih dulu 1001 soal yang bukan-bukan! Sekali lagi saya bertanya: Mau merdeka apa tidak? Mau merdeka apa tidak?

Sesudah saya bicarakan tentang hal “merdeka”, maka sekarang saya bicarakan tentang hal dasar.

Saya mengerti apakah yang paduka tuan Ketua kehendaki! Paduka tuan Ketua minta dasar, minta *philosophische grondslag*, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka tuan ketua yang mulia meminta suatu “*Weltanschauung*”, di atas mana kita mendirikan Negara Indonesia itu.

Kita melihat dalam dunia ini bahwa banyak negeri-negeri yang merdeka, dan banyak di antara neger-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu “*Weltanschauung*”. Hitler mendirikan Jermania di atas “*national-sozialistische Weltanschauung*”, - filsafat nasional – sosialisme telah menjadi dasar negara Jermania yang didirikan oleh Adolf hitler itu. Lenin mendrikan negara Sovyet di atas satu “*Weltanschauung*”, yaitu *Marxistische, Historische-Materialistische Weltanschauung*. Nippon mendirikan negara Dai Nippon di atas “*Tennoo koodoo Seishin*”. Di atas “*Tennoo Koodoo Seishin*” inilah negara Dai Nippon

didirikan. Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara Arabia di atas satu "Weltanschauung", bahkan di atas satu dasar agama, yaitu Islam. Demikian itulah yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia: Apakah "Weltanschauung" kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka?

"Weltanschauung" ini sudah lama harus kita bulatkan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita sebelum Indonesia Merdeka datang. Idealis-idealisme di seluruh dunia bekerja mati-matian untuk mengadakan bermacam-macam "Weltanschauung" bekerja mati-matian untuk "merealiteitkan" "Weltanschauung" mereka itu. Maka oleh karena itu sebenarnya tidak benar perkataan anggota yang terhormat Abikoesno, bila beliau berkata, bahwa banyak sekali negara-negara merdeka didirikan dengan isi seadanya saja, menurut keadaan. Tidak! Sebab misalnya, walaupun menurut perkataan John Reed: "Sovyet-Rusia didirikan di dalam 10 hari oleh Lenin c.s.", - John Reed, di dalam kitabnya: *Ten days that shook the world*, "sepuluh hari yang menggoncangkan dunia" - walaupun Lenin mendirikan Sovyet-Rusia di dalam 10 hari, tetapi "Weltanschauung"-nya telah tersedia berpuluh-puluh tahun. Terlebih dahulu telah tersedia "Weltanschauung"-nya, dan di dalam 10 hari itu hanya sekedar direbut kekuasaan, dan ditempatkan negara baru itu di atas "Weltanschauung" yang sudah ada. Dari 1895 "Weltanschauung" itu telah disusun. Bahkan dalam *revolutie* 1905, Weltanschauung itu "dicobakan", "di-generale-repetitie-kan".

Lenin di dalam revolusi tahun 1905 telah mengerjakan apa yang dikatakan oleh beliau sendiri "generale-repetitie" dari pada revolusi tahun 1917. Sudah lama sebelum 1917. "Weltanschauung" itu disediakan, bahkan diikhtiar-ikhtiarkan. Kemudian, hanya dalam 10 hari, sebagai dikatakan oleh John Reed, hanya dalam 10 hari itulah didirikan negara baru direbut kekuasaan, ditaruhkan kekuasaan itu di atas "Weltanschauung" yang telah berpuluh-puluh tahun umurnya itu. Tidakkah pula Hitler demikian?

Di dalam tahun 1933 Hitler menaiki singgasana kekuasaan, mendirikan negara Jermania di atas National-sozialistische Weltanschauung.

Tetapi kapankah Hitler mulai menyediakan dia punya "Weltanschauung" itu? Bukan di dalam tahun 1933, tetapi di dalam tahun 1921 dan 1922 beliau telah bekerja, kemudian telah mengikhtiarkan pula, agar supaya Naziisme ini, "Weltanschauung" ini, dapat menjelma dengan dia punya "Münchener Putsch", tetapi gagal. Di dalam 1933 barulah datang saatnya yang beliau dapat merebut kekuasaan, dan negara diletakkan oleh beliau di atas dasar "Weltanschauung" yang telah dipropagandakan berpuluh-puluh tahun itu.

Maka demikian pula, jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia Merdeka, Paduka tuan Ketua, timbullah pertanyaan : Apakah “Weltanschauung” kita, untuk mendirikan Negara Indonesia Merdeka di atasnya? Apakah nasional-sosialisme? Apakah historischmaterialisme? Apakah San Min chu I, sebagai dikatakan oleh Doktor Sun Yat Sen?

Di dalam tahun 1912 Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok merdeka, tetapi “Weltanschauung”-nya telah dalam tahun 1885, kalau saya tidak salah, dipikirkan, dirancang. Di dalam buku “*The three people’s principles*” San Min Chu I, - Mintsu, Min Chuan, Min Sheng, - nasionalisme, demokrasi, sosialisme, - telah digambarkan oleh Doktor Sun Yat Sen. Weltanschauung itu, tetapi baru dalam tahun 1912 beliau mendirikan negara baru di atas “Weltanschauung” San Min Chu I itu, yang telah disediakan terdahulu berpuluh-puluh tahun.

Kita hendak mendirikan Negara Indonesia Merdeka di atas “Weltanschauung” apa? Nasional-sosialisme-kah, Marxisme-kah, San Min Chu I-kah atau “Weltanschauung” apakah?

Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang tiga hari lamanya, banyak pikiran telah dikemukakan, - macam-macam – tetapi alangkah benarnya perkataan Dr. Soekiman, perkataan Ki Bagoes Hadikoesoemo, bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan faham. Kita bersama-sama mencari persetujuan filosofische grondslag, mencari satu “Weltanschauung” yang kita semuanya setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hadjar setuju, yang saudara Sanoesi setuju, yang saudara Abikoesno setuju, yang saudara Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan compromise, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju. Apakah itu? Pertama-tama, saudara-saudara, saya bertanya: Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan Negara Indonesia Merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan.

Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang disini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara “*semua buat semua*”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, - tetapi “*semua buat semua*”. Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti akan saya kupas lagi. Maka, yang selalu mendung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di

dalam beberapa hari di dalam sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, akan tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah: Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.

Kita mendirikan satu Negara Kebangsaan Indonesia

Saya minta, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain: maafkan saya memakai perkataan, "*kebangsaan*" ini! Sayapun orang Islam. Tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah faham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu *nationale staat*, seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu *Nationale Staat* Indonesia bukan berarti staat yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuanpun adalah orang Indonesia, nenek tuanpun bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nenek-moyang tuanpun bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan Negara Indonesia.

Satu *National Staat*! Hal ini perlu diterangkan lebih dahulu, meski saya di dalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikit-sedikit telah menerangkannya. Marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempo sedikit: Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa?

Menurut Renan syaratnya bangsa ialah "*kehendak akan bersatu*". Orang-orangny merasa diri bersatu dan mau bersatu.

Ernest Renan menyebut syarat bangsa; "*le desir d'être ensemble*", yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa, yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.

Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer, di dalam bukunya "*Die Nationalitätenfrage*", di situ ditanyakan: "*Was ist eine Nation?*" dan jawabnya ialah: "*Eine Nation ist eine aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft*". Inilah menurut Otto Bauer satu *natie*. (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib).

Tetapi kemarinpun, tat kala, kalau tidak salah, Prof. Soepomo mensitir Ernest Renan, maka anggota yang terhormat Mr. Yamin berkata: "*verouderd*", "sudah tua". Memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah

“verouderd”, sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala Ernest Renan mengadakan definisinya itu, tatkala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu *wetenschap* baru, satu ilmu baru, yang dinamakan *Geopolitik*.

Kemarin, kalau tidak salah, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo, atau tuan Moenandar mengatakan tentang “Persatuan antara orang dan tempat”. Persatuan antara orang dan tempat tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya!

Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan “*Gemeinschaft*”-nya dan perasaan orangnya, *I am et le dēsir*. Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu. Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu *tanah-air*. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah swt, membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana “kesatuan-kesatuan” di situ. Seorang anak kecilpun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara 2 lautan yang besar, lautan pacific dan lautan Hindia, dan di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan lain-lain pulau kecil di antaranya adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir Timur benua Asia sebagai “*golfbreker*” atau pengandang gelombang lautan Pacific, adalah satu kesatuan.

Anak kecilpun dapat melihat, bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan, bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan.

Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah swt, demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athene saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athena plus Macedonia plus daerah Yunani yang lain, segenap kepulauan Yunani adalah satu kesatuan.

Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah-darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Salebes saja,

atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah swt, menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah tanah-air kita!

Maka jikalau saya ingat perhubungan antara orang dan tempat, antara rakyat dan buminya, maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan oleh Ernest Ranan dan Otto Bauer itu. Tidak cukup "*le desir d'être ensemble*", tidak cukup definisi Otto Bauer, "*aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft*" itu. Maaf saudara-saudara saya mengambil contoh Minangkabau. Di antara bangsa di Indonesia, yang paling ada "*desir d'être ensemble*", adalah rakyat Minangkabau, yang banyaknya kira-kira 2 ½ milyon. Rakyat ini merasa dirinya satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan! Penduduk Yogyakarta adalah merasa "*le desir d'être ensemble*", tetapi Yogyakarta hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan. Di Jawa Barat rakyat Pasundan sangat merasakan "*le desir d'être ensemble*", tetapi Sundapun hanya satu bahagian kecil daripada satu kesatuan.

Pendek kata, bangsa Indonesia, Natie Indonesia, bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan "*le desir d'être ensemble*", di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah swt, tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya! Karena antara manusia 70.000.000,- ini sudah ada "*le desir d'être ensemble*", sudah terjadi "*character gemeinschaft*"! Natie Indonesia, bangsa Indonesia, umat Indonesia jumlah orangnya adalah 70.000,000 yang telah menjadi satu, satu, sekali lagi satu!

Ke sinilah kita semua harus menuju: mendirikan satu Nationale Staat, di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan "golongan kebangsaan". Ke sinilah kita harus menuju semuanya.

Saudara-saudara, jangan orang mengira, bahwa tiap-tiap negara merdeka dalam satu nationale staat! Bukan Pruisen, bukan Beieren, bukan Saksen adalah nationale staat, tetapi seluruh Jermanialah satu nationale staat. Bukan bagian kecil-kecil, bukan Venetia, bukan Lombardialah satu nationale staat, tetapi seluruh Italialah, yaitu seluruh semenanjung di Laut Tengah, yang di utara dibatasi oleh pegunungan Alpen, adalah nationale staat. Bukan Benggala, bukan Punjab, bukan Bihar dan Orissa, tetapi seluruh segi-tiga Indialah nanti harus menjadi nationale staat.

Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah-air kita yang merdeka di jaman dahulu, adalah nationale staat. Kita hanya dua kali mengalami nationale staat, yaitu di jaman Sriwijaya dan di jaman Majapahit. Di luar dari itu kita tidak mengalami nationale staat. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja dahulu, saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanjokrokoesoemo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata, bahwa kerajaannya bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa, saya berkata, bahwa kerajaannya di Banten, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanoeddin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata, bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan nationale staat.

Nationale staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di jaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama: *Kebangsaan Indonesia*. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat. Maaf, Tuan Liem Koen Hian, Tuan tidak mau akan kebangsaan? Di dalam pidato Tuan, waktu ditanya sekali lagi oleh paduka Tuan Fuku-Kaityoo, Tuan menjawab: "Saya tidak mau akan kebangsaan".

"Bukan begitu. Ada sambungannya lagi." Sahut Liem Koen Hian.

Kalau begitu, maaf, dan saya mengucapkan terima kasih, karena tuan Liem Koen Hian pun menyetujui dasar kebangsaan. Saya tahu, banyak juga orang-orang Tionghoa klasik yang tidak mau akan dasar kebangsaan, karena mereka memeluk faham kosmopolitisme, yang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada bangsa. Bangsa Tionghoa dahulu banyak yang kena penyakit kosmopolitisme, sehingga mereka berkata bahwa tidak ada bangsa Tionghoa, tidak ada bangsa Arab, tetapi semuanya "menschheid", "peri kemanusiaan". Tetapi Dr. Sun Yat Sen bangkit, member pengajaran kepada rakyat Tionghoa, bahwa ada kebangsaan Tionghoa! Saya mengaku, pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk dibangku sekolah H.B.S. di Surabaya, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis yang bernama A. Baars, yang member pelajaran kepada saya, - katanya: jangan berfaham kebangsaan, tetapi berfahamlah rasa kemanusiaan sedunia, jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikitpun. Itu terjadi pada tahun 17. Tetapi pada tahun 1918, Alhamdulillah, ada orang lain yang memperingatkan

saya, - ialah Dr. Sun Yat Sen! Di dalam tulisannya “San Min Chu I” atau “The Three People’s Principles”, saya mendapat pelajaran yang membongkar kosmopolitisme yang diajarkan oleh A. Baars itu. Dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan, oleh pengaruh “The Three People’s Principles” itu. Maka oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat Sen sebagai penganjurnya, yakinlah, bahwa bung Karno juga seorang Indonesia, yang dengan perasaan hormat-sehormatnya merasa berterima kasih kepada Dr. Sun Yat sen, - sampai masuk ke lobang kubur. Saudara-saudara. Tetapi tetapi Memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya! Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinism, sehingga berfaham “Indonesia über Alles”. Inilah bahayanya! Kita cinta tanah-air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi tanah-air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja daripada dunia! Ingatlah akan hal ini!

Gandhi berkata: “Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan”, “My nationalism is humanity”.

Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinism, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa, yang mengatakan “Deutschland über Alles”, tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya bangsanya minulyo, berambut jagung dan bermata biru, “bangsa Aria”, yang dianggapnya tertinggi di atas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas azas demikian, tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta memeremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.

Kita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

Justu inilah prinsip saya yang kedua. Inilah *filosofisch principe* yang nomor dua, yang saya usulkan kepada tuan-tuan, yang boleh saya namakan “*internasionalisme*”. Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitisme, yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika dan lain-lainnya.

Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme. Jadi, dua hal ini, saudara-

saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain.

Kemudian, apakah dasar yang ketiga? Dasar itu ialah dasar *mufakat*, dasar *perwakilan*, dasar *permusyawaratan*. Negara Indonesia bukan suatu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara "semua buat semua", "satu buat semua, semua buat satu". Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.

Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sayapun adalah orang Islam, - maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna, - tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat.

Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Di sinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi Badan Perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang sebagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu, agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya Badan Perwakilan Rakyat 100 orang anggotanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari Badan Perwakilan Rakyat itu, hukum Islam pula. Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup di dalam jiwa rakyat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya di atas bibir saja. Kita berkata, 90% daripada kita Bergama Islam, tetapi lihatlah di dalam sidang ini berapa % yang memberikan suaranya kepada Islam? Maaf seribu maaf, saya Tanya hal itu! Bagi saya hal itu adalah suatu bukti,

bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam, maupun terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomor tiga ini, yaitu prinsip permusyawaratan, perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candradimuka, kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya. Baik di dalam staat Islam, maupun di dalam staat Kristen, perjuangan selamanya ada. Terimalah prinsip nomor tiga, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakyat! Di dalam perwakilan rakyat saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen bekerjalah sehebat-hebatnya.

Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap *letter* di dalam peraturan-peraturan Negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah matimatian, agar supaya sebagian besar utusan-utusan yang masuk Badan Perwakilan Indonesia ialah orang Kristen. Itu adil, - *fair play*! Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perjuangan di dalamnya. Jangan kira di Turki tidak ada perjuangan. Jangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran. Allah subhanahu wata'ala member pikiran kepada kita, agar supaya dalam pergaulan kita sehari-hari, kita selalu bergosok, supaya keluar daripadanya beras, dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Terimalah saudara-saudara, prinsip nomor tiga, yaitu prinsip permusyawaratan!

Prinsip No. 4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam tiga hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip *kesejahteraan*, *prinsip* : *tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka*. Saya katakan tadi : prinsipnya *San Min Chu* ! ialah *Mintsu*, *Min Chuan*, *Min Cheng*: *nationalism*, *democracy*, *socialism*. Maka prinsip kita harus: Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, atautkah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup member sandang-pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, saudara-saudara? Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negara-negara Eropa adalah Badan Perwakilan, adalah *parlementaire democratie*. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela?

Di Amerika ada suatu Badan Perwakilan Rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua Barat kaum Kapitalis merajalela? Padahal ada Badan Perwakilan Rakyat! Tak lain tak bukan sebabnya, ialah oleh karena Badan-badan Perwakilan Rakyat yang diadakan di sana itu, sekedar menurut resepnya *Fransche Revolutie*. Tak lain

tak bukan adalah yang dinamakan *democratie* di sana itu hanyalah *politieke democratie* saja; semesta-mata tidak ada *sociale rechtvaardigheid*, - tak ada keadilan social, tidak ada *ekonomische democratie* sama sekali. Saudara-saudara, saya ingat akan kalimat seorang pemimpin Perancis, Jean Jaures yang menggambarkan *politieke democratie*. "Di dalam *Parlementaire Democratie*", kata Jean Jaures, "di dalam *Parlementaire Democratie*, tiap-tiap orang mempunyai hak sama. Hak politik yang sama, tiap-tiap orang boleh memilih, tiap—tiap orang boleh masuk di dalam Parlemen. Tetapi adakah *sociale rechtvaardigheid*, adakah kenyataan kesejahteraan di kalangan rakyat? Maka oleh Karena itu Jean Jaures berkata lagi :

Wakil kaum buruh yang mempunyai hak politik itu, di dalam Parlemen dapat menjatuhkan *minister*. Ia seperti Raja! Tetapi di dalam dia punya tempat bekerja, di dalam pabrik, - sekarang ia menjatuhkan *minister*, besok ia dapat dilempar keluar ke jalan raya, dibikin *werkloos*, tidak dapat makan suatu apa".

Adakah keadaan yang demikian yang kita kehendaki!

Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan Yang memberi hidup, yakni politik-economische *democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan social! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu-Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu-Adil, ialah *sociale rechtvaardigheid*, rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu-Adil. Maka oleh Karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal *sociale rechtvaardigheid* ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politik *democratie* saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: *politieke rechtvaardigheid* dan *sociale rechtvaardigheid*.

Kita akan bicarakan hal-hal bersama-sama, saudara-saudara, di dalam badan permusyawaratan. Saya ulangi lagi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal! Juga di dalam urusan Kepala Negara, saya teruus terang, saya tidak akan memilih *monarchie*. Apa sebab? Oleh karena *monarchie* "*vooronderstelt erfelijkheid*", - turun temurun. Saya seorang Islam, saya

democrat karena saya orang Islam, saya menghendaki mufakat, maka saya minta supaya tiap-tiap Kepala Negaraupun dipilih. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa Kepala-kepala Negara, baik *kalif*, maupun *Amirul mu'minin*, harus dipilih oleh rakyat? Tiap-tiap kali kita mengadakan Kepala Negara, kita pilih. Jikalau pada suatu hari Ki Bagoes Hadikoesoemo misalnya, menjadi Kepala Negara Indonesia, dan *mangkat*, meninggal dunia, jangan anaknya Ki Hadikoesoemo dengan sendirinya, dengan otomatis menjadi pengganti Ki Hadikoesoemo. Maka oleh karena itu saya tidak mufakat kepada prinsip monarchie itu.

Saudara-saudara, apakah prinsip ke-5? Saya telah mengemukakan empat prinsip :

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme,- atau peri-kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial

Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Prinsip ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuahnnya sendiri. Yang Kristen menyembah tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang belum ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad saw, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "*egoisme-agama*". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang beruhan.

Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? ialah hormat-menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad saw, telah member bukti yang cukup tentang *verdraagzaamheid*, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isapun telah menunjukkan *verdraagzaamheid* itu. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa!

Di sinilah, dalam pangkuan azas yang kelima inilah, saudara-saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan negara kita akan ber-tuhan pula!

Ingatlah, prinsip ketiga permufakatan, perwakilan, di situlah tempatnya kita mempropagandakan ide kita masing-masing dengan cara yang tidak *onverdraagzaam*, yaitu dengan cara yang berkebudayaan!

Saudara-saudara! “Dasar-dasar Negara” telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima pula jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indra. Apa lagi yang lima bilangannya? (seorang yang hadir: Pendawa lima). Pandawapun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya.

Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa-namanya ialah Panca sila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.

Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Saudara-saudara Tanya kepada saya, apakah “perasan” yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka, *Weltanschauung* kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan *socio-nationalisme*.

Dan demokrasi yang bukan demokrasi Barat, tapi politiek-economische democratie, yaitu politieke-democratie dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan, saya peraskan pula menjadi satu: inilah yang dulu saya namakan *socio-democratie*.

Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain.

Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan. Kalau tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada Tri sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi mejadi satu. Apakah yang satu itu?

Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia! – semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong”. Negara Indonesia yng kita dirikan haruslah negara gotong royong!

Alangkah hebatnya! Negara Gotong – Royong!

“Gotong-royong” adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”, saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekrdjo : *satu karyo, satu gawe*. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembanting tulang bersama pemerasan keringan bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopiskuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong-royong!

Prinsip gotong-royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Inilah saudara-saudara, yang saya usulkan kepada saudara-saudara.

Pancasila menjadi Tri Sila, Tri Sila menjadi Eka Sila. Tetapi terserah kepada tuan-tuan, mana yang tuan-tuan pilih: Tri Sila, Eka sila ataukah Panca Sila? Isinya telah saya katakan kepada saudara-saudara semuanya. Prinsip-prinsip seperti yang saya usulkan kepada saudara-saudara ini, adalah prinsip untuk Indonesia Merdeka yang abadi. Puluhan tahun dadaku telah menggelora dengan prinsip-prinsip itu. Tetapi jangan lupa, kita hidup di dalam masa peperangan, saudara-saudara. Di dalam masa peperangan itulah kita mendirikan Negara Indonesia, - di dalam guntunya peperangan! Bahkan saya mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah subhanahu wata’ala, bahwa kita mendirikan Negara Indonesia bukan di dalam sinarnya bulan purnama, tetapi di bawah palu *godam* peperangan dan di dalam api peperangan. Timbullah Indonesia Merdeka, Indonesia yang *gemplengan*, Indonesia Merdeka yang digempleng dalam api peperangan, dan Indonesia Merdeka yang demikian itu adalah Negara Indonesia yang kuat, bukan Negara Indonesia yang lambat-laun menjadi bubur. Karena itulah saya mengucap syukur kepada Allah swt.

Berhubung dengan itu, sebagai yang diusulkan oleh beberapa pembicara-pembicara tadi, barangkali perlu diadakan *noodmaatregel*, peraturan yang bersifat sementara. Tetapi dasarnya, isinya Indonesia Merdeka yang kekal abadi menurut pendapat saya, haruslah Panca Sila. Sebagai dikatakan tadi, saudara-saudara, itulah harus *weltanschauung* kita. Entah saudara-saudara mufakat atau tidak, tetapi saya berjuang sejak 1918 sampai 1945 sekarang ini untuk *weltanschauung* itu. Untuk membentuk nasionalistis Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia; untuk kebangsaan Indonesia yang hidup di dalam peri-kemanusiaan; untuk permufakatan; untuk *sociale rechtvaardigheid*; untuk ke-Tuhanan. Panca Sila, itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh tahun. Tetapi saudara-saudara, diterima atau tidak terserah kepada saudara-saudara. Tetapi saya sendiri mengerti seinsyaf-insyafnya, bahwa tidak ada satu *weltanschauung* dapat menjelma dengan sendirinya, menjadi realiteit dengan sendirinya. Tidak ada satu *weltanschauung* dapat menjadi kenyataan, menjadi realiteit, jika tidak dengan perjuangan!

Janganpun *weltanschauung* yang diadakan oleh manusia, janganpun yang diadakan oleh Hitler, oleh Stalin, oleh Lenin, oleh Sun Yat Sen!

“*De Mensch*”, - manusia! – harus perjuangkan itu. Zonder perjuangan itu tidaklah ia akan menjadi realiteit! Leninisme tidak bisa menjadi realiteit zonder perjuangan seluruh rakyat Rusia, San Min Chu I tidak dapat menjadi kenyataan zonder perjuangan bangsa Tionghoa, saudara-saudara! Tidak! Bahkan saya berkata lebih dari itu: zonder perjuangan manusia, tidak ada satu hal agama, tidak ada satu cita-cita agama, yang dapat menjadi realiteit. Janganpun buatan manusia, sedangkan perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Qur'an, *zwart op wit* (tertulis di atas kertas), tidak dapat menjelma menjadi realiteit zonder perjuangan manusia yang dinamakan ummat Islam. Begitu pula perkataan-perkataan yang tertulis di dalam kitab Injil, cita-cita yang termasuk di dalamnya tidak dapat menjelma zonder perjuangan ummat Kristen.

Maka dari itu, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Panca Sila yang saya usulkan itu, menjadi satu realiteit, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nationaliteit yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka yang penuh dengan peri-kemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan *sociale rechtvaardigheid*, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ke-Tuhanan yang luas dan sempurna, - janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan, dan sekali lagi perjuangan.

Jangan mengira bahwa dengan berdirinya Negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan saya berkata: Di dalam Indonesia Merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus, hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang, lain coraknya. Nanti kita bersama-sama, sebagai bangsa yang bersatu-padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Panca Sila. Dan terutama di dalam zaman peperangan ini, yakinlah, insyallah, tanamkanlah dalam kalbu saudara-saudara bahwa Indonesia Merdeka tidak dapat datang jika bangsa Indonesia tidak berani mengambil risiko, - tidak berani terjun menyelami mutiara di dalam samudera yang sedalam-dalamnya. Jikalau bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak mentekad mati-matian untuk mencapai merdeka, tidaklah kemerdekaan Indonesia itu akan menjadi milik bangsa Indonesia buat selama-lamanya sampai akhir jaman. Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa, yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad "Merdeka, - merdeka atau mati"!

Saudara-saudara! Demikianlah saya punya jawaban atas pertanyaan Paduka Tuan Ketua. Saya minta maaf, karena saya telah mengadakan kritik terhadap catatan *Zimukyokutyoo* yang saya anggap "*verschrikkelijk zwaarwichtig*" itu.

Terima kasih.

Sidang kedua, Rapat pertama tanggal 10 Juli 1945 pokok bahasan bentuk negara.

Sidang dibuka oleh Ketua Radjiman Wediodiningrat, dilanjutkan dengan memperkenalkan enam orang anggota baru. Sebelum melakukan pembahasan sesuai agenda persidangan, Ketua mengingatkan kepada seluruh anggota BPUPKI.

Di dalam persidangan ini haruslah kita senantiasa ingat, bahwa kita terikat oleh suatu kewajiban yang dilimpahkan Pemerintah Balatentara Dai Nippon kepada kita, yakni menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu di dalam pertukaran pikiran tentang soal-soal yang termasuk kewajiban kita bukanlah tujuan kita hendak tentang-menentang, berdebat-debatan, melainkan haruslah kita selalu berusaha mencari jalan yang sebaik-baiknya untuk memenuhi kewajiban kita tadi. Oleh karena itu sekalipun kita tidak dapat menyetujui pendirian seorang lain, wajiblah kita menghormati pendirian itu, pun janganlah hendaknya kita memaksa orang lain, supaya menerima dan menyetujui pendirian kita sendiri.

Di dalam persidangan ini perlu sekali setiap anggota menyatakan pendiriannya dengan merdeka, bebas daripada pengaruh atau paksaan, oleh karena jika tidak demikian, keputusan yang harus ditentukan oleh persidangan ini bukan pendapat Badan Penyelidik yang sejati. Kemerdekaan, kebebasan di dalam menyatakan pendirian harus dihargai dan dihormati sepenuhnya, selain dari itu kita tidak boleh pula ragu-ragu di dalam menyatakan pendirian kita, yaitu merasa kedudukannya terikat oleh orang lain, ataupun kuatir akan mendapat celaan dari pihak di luar Badan Penyelidik, yang tentulah tidak mungkin akan terjadi, oleh sebab persidangan ini *bersifat rahasia*. Maka di dalam suasana yang bebas dari segala paksaan itu mulai kita akan memenuhi persatuan yang tersusun dengan ikhlas dan suci hati. Dengan jalan demikian kita menunjukkan pula persatuan yang kokoh dan sejati sebagai lambang persatuan masyarakat Indonesia yang kita kehendaki.

Ketua Panitia Kecil Ir. Soekarno, kemudian melaporkan hasil kerjanya selama 10 hari. Sumbangan pikiran dari 7 anggota telah diterimanya dan diolah bersama laporan Soekarno sebagai berikut :

Adapun Panitia Kecil telah memeriksa usul-usul yang masuk dan telah menentukan kebulatan pendapatnya di dalam sidang bersama-sama beberapa hari yang lalu; seperti yang dikatakan oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia tadi, 40 iin ini telah memasukkan usul, dan jikalau kami tinjau, usul-usul dari 40 iin ini, adalah mengenai 32 soal. Tetapi jikalau kita golong-golongkan lagi soal-soal itu, maka bolehlah saya katakan, bahwa usul-usul itu bisa dimasukkan dalam beberapa golongan saja, yaitu:

1. Golongan usul yang minta Indonesia Merdeka selekas-lekasnya.
2. Golongan usul yang mengenai dasar.
3. Golongan usul yang mengenai soal unificatie atau federatie.
4. Golongan usul yang mengenai bentuk negara dan Kepala Negara.
5. Golongan usul yang mengenai warga-negara.
6. Golongan usul yang mengenai daerah.
7. Golongan usul yang mengenai soal agama dan negara.
8. Golongan usul yang mengenai pembelaan.
9. Golongan usul yang mengenai soal keuangan.

Paduka Tuan Ketua yang termulia! Demikianlah usul-usul yang masuk dengan surat. Tetapi Panitia Kecil berpendapat, bahwa kami harus pula menyelidiki usul-usul yang tidak dimasukkan dengan surat, melainkan dengan lisan.

Terutama sekali ialah usul-usul yang mengenai procedure Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan yang diterima oleh Panitia Kecil di dalam satu rapat pada tanggal 22 bulan yang lalu. Saya sebagai Kaityoo mengadakan rapat itu pada waktu anggota-anggota *Tyuo Sangiin* ada di kota Jakarta. Bersama dengan itu saya persilahkan semua anggota-anggota *Tyuo Sangiin* yang merangkap menjadi anggota *Dokuritu Zyunbi Tyoosakai* ditambah dengan anggota-anggota *Dokuritu Zyunbi Tyoosakai*, yang diam di Jakarta dan tidak menjadi anggota *Tyuo Sangiin*, untuk berkumpul di gedung Kantor Besar Jawa Hookoo Kai.

Maka di dalam rapat itu, yang dihadiri oleh 38 iin, kami menyatakan dengan tegas bahwa inilah rapat pertemuan antara Panitia Kecil dengan anggota-anggota *Dokuritu Zyunbi Tyoosakai*. Panitia Kecil ini ingin memperdengarkan usul-usul dari anggota-anggota tentang hal *procedure* yang harus kita lalui, agar supaya kita bisa lekas mencapai Indonesia Merdeka. Maka dengan demikian kami Panitia Kecil mendapat usul-usul yang tertulis dan usul-usul yang diucapkan dalam rapat pertemuan di gedung Jawa Hookoo Kai itu, yang dibuat notulennya setepat-tepatnya. Jikalau tuan-tuan menghendaki, saya akan memberitahukan isi notulen yang dibuat pada waktu rapat di dalam Kantor Besar Jawa Hookoo Kai itu. Jikalau saya sebagai Kaityoo Panitia Kecil harus membuat pemandangan sepintas lalu atau pemandangan yang global tentang semua usul-usul itu, maka apakah yang pengusulnya terbanyak, artinya apakah kehendak sebagian besar daripada anggota-anggota yang telah memasukkan usul secara tertulis dan tidak tertulis, apakah yang dikehendaki anggota-anggota yang terbanyak daripada kita itu, baik daripada usul yang tertulis maupun usul-usul yang tidak tertulis itu – tetapi ada notulennya -, sebagian besar daripada anggota-anggota *Dokuritu Zyunbi Tyoosakai* meminta dengan sangat supaya Indonesia Merdeka selekas-lekasnya.

Di dalam usul yang tertulispun 26 anggota mengusulkan hal ini, yaitu supaya Indonesia Merdeka selekas-lekasnya diselenggarakan. Adapun alasan-alasan meminta Indonesia Merdeka diselenggarakan selekas-lekasnya itu sudah tentu bermacam-macam. Ada yang memberi alasan bahwa inilah soal penghormatan bangsa. Seluruh dunia telah mengetahui bahwa *Dokuritu Zyunbi Tyoosakai*, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Indonesia Merdeka telah bersidang. Pengusul itu menganggap bahwa seluruh duniapun ingin lekas mendengar, bagaimanakah sikap rakyat Indonesia terhadap kepada soal kemerdekaan; bahkan meeningat kepada pesanan daripada konferensi Duta-duta Besar di Tokyo yang menetapkan akan membantu kita sekuat-kuatnya agar supaya lekas merdeka, dianggaplah oleh pengusul itu bahwa, jikalau kita tidak lekas menyelenggarakan Indonesia Merdeka, itu dianggap satu hal yang tidak sesuai dengan kehormatan bangsa.

Ada alasan lain pula yang dikemukakan oleh pengusul lain. Pengusul lain itu mengatakan, bahwa jika kita bangsa Indonesia tidak lekas-lekas selesai dengan pekerjaan menyelenggarakan Negara Indonesia Merdeka menurut kehendak kita, mungkin nanti ada *lain fihak* yang akan menyatakan kemerdekaan Indonesia itu dengan cara yang dia kehendaki, dengan pemerintah kebangsaan yang dia kehendaki.

Untuk mendahului kemungkinan ini maka dianggap oleh anggota-anggota pengusul itu perlu sekali kita selekas-lekasnya menyelenggarakan Indonesia Merdeka.

Ada pula alasan-alasan lain yang dikemukakan, yaitu bahwa pada saat ini boleh dikatakan segenap bangsa Indonesia yang 70 juta itu dan terutama bunga bangsa, pemuda harapan bangsa, terutama sekali mereka itu bersama-sama dengan hampir semua rakyat jelata, menunggu-nunggu hasilnya pekerjaan Dokuritu Zyunbi Tyosakai dengan secepat-cepatnya, yaitu ingin melihat Negara Indonesia Merdeka dengan selekas-lekasnya.

Marilah tuan-tuan yang terhormat, saya bacakan *beberapa contoh* alasan yang telah kami terima.

Ada yang berkata bahwa kita tidak kalah dengan lain-lain negeri yang sudah merdeka, seperti Saudi Arabia, Egypte, Irak, Afganistan, Yaman. Kemerdekaan perlu untuk menambah semangat perang.

Ada lain iin yang berkata bahwa Indonesia Merdeka yang selekas-lekasnya perlu untuk memperhebat perjuangan dan pembelaan.

Lain iin minta Indonesia Merdeka selekas-lekasnya untuk membinasakan musuh sekutu yang hendak menindas lagi bangsa-bangsa Asia Timur Raya.

Lain iin mengatakan bahwa Indonesia harus merdeka selekas-lekasnya oleh karena ini adalah harapan umum dari rakyat.

Lain iin mengemukakan bahwa alasan ini adalah harapan seluruh penduduk Indonesia dan minta lekas diadakan Badan Persiapan.

Anggota lain mengatakan bahwa inilah keiinginan dari segala lapisan untuk memperhebat nafsu menghancurleburkan musuh dengan semboyan: pasti menang dan pasti merdeka. Darah angkatan muda akan lebih-lebih mendidih untuk mempertahankan tanahh-airnya yang merdeka sekarang juga.

Lain anggota memberi alasan minta Indonesia Merdeka selekas-lekasnya oleh karena hal ini berfaedah sekali untuk menambah semangat bangsa kita, dan pandangan internasional, yaitu mengenai kehormatan kita.

Lain iin mengatakan tidak usah menunggu selesainya sekalian penyelidikan tentang susunan tata-negara.

Lain iin minta Indonesia Merdeka selekas-lekasnya, yaitu jangan Badan Penyelidik memakai tempo yang lama sekali untuk menyusun laporan-laporan yang panjang-lebar. Pemerintah Balatentara Dai Nippon mendirikan negara merdeka di Birma, di Philippina dan Indo China dengan tidak makan tempo yang lama.

Lain iin minta Indonesia Merdeka selekasnya dengan tidak perlu menunggu kesempurnaan rencana dasar dan bentuknya; ini akan menambah kekuatan tenaga perang Asia Timur Raya dan tercapainya kemenangan akhir di pihak kita.

Lain iin minta Indonesia Merdeka selekas-lekasnya dengan alasan bahwa di dalam riwayat tidak terdapat bahwa kemerdekaan suatu negara, kemerdekaan suatu bangsa, harus menunggu hasil-hasil usaha Badan Penyelidikny. Alasan-alasan buat kemerdekaan sekarang ialah bahwa kegentingan telah memuncak, bisa mata-mata musuh akan dapat mempengaruhi pikiran rakyat lagi dan bahwa kemerdekaan dapat menambah hebatnya dan besarnya perjuangan untuk mencapai kemenangan akhir.

Jika tidak tercapai kemerdekaan itu, maka akan hilanglah Indonesia Merdeka.

Lain anggota lagi mengemukakan bahwa untuk lebih mengobarkan semangat perlawanan dan rokh pertanggungan dan untuk meneguhkan semangat pembelaan negara, adalah syarat mutlak, bahwa Indonesia Merdeka selekas-lekasnya.

Lain iin mengemukakan alasan: Indonesia Merdeka itu adalah satu *middel* saja, dan bukan *doel*, untuk mencapai cita-cita kemakmuran bersama Asia Timur Raya seumumnya dan Indonesia khususnya. Harus dijaga juga, jangan sampai perasaan rakyat menjadi dingin karena menanti-nantikan waktu menyambut Indonesia Merdeka. Lain anggota lagi mengatakan, bahwa inilah harapan umum; dan ia minta supaya kita mengirimkan *mosi* kepada Dai Nippon Teikoku, supaya melaksanakan janjinyayang telah

diucapkan pada tanggal 7 bulan 9 tahun yang lalu itu dengan selekas-lekasnya. Lain ini lagi mengatakan, bahwa Badan Penyelidik harus bekerja untuk melaksanakan dan melepaskan datangnya Indonesia Merdeka, buat selama-lamanya hanyalah datang dari kaum Sekutu saja.

Demikianlah tuan-tuan yang terhormat, gambaran dari alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh pengusul-pengusul yang meminta lekas datangnya Indonesia Merdeka.

Mengingat akan hal-hal ini semua, artinya, mengingat, bahwa sebagian besar daripada usul-usul yang masuk dengan surat, menuntut Indonesia Merdeka selekas-lekasnya, dan mengingat pembicaraan dalam rapat di Kantor Besar Djawa Hookoo Kai, yang melulu mengenai procedure yang harus dijalankan, yaitu procedure agar supaya lekas tercapai Indonesia Merdeka itu, maka Panitia Kecil mengusulkan kepada Paduka Tuan Ketua yang mulia:

1. Badan Penyelidik ini menentukan bentuk negara dan menyusun Hukum Dasar Negara.
2. Minta lekas dari Pemerintah Agung di Tokyo pengesahan Hukum Dasar itu dan minta agar dengan selkas-lekasnya diadakan Badan Persiapan Kemerdekaan, yang kewajibannya ialah sekadar menyelenggarakan Negara Indonesia Merdeka di atas Hukum Dasar yang ditentukan oleh Badan Penyelidik, serta melantik pemerintah nasional.
3. Soal tentara kebangsaan dan soal keuangan.

Maka *Panitia Kecil* mengusulkan cara bekerja, cara berlakunya sidang Badan Penyelidik yang kedua yang mulai pada hari ini.

Tuan-tuan yang terhormat, rancangan pekerjaan itu telah kami persembahkan kepada Paduka Tuan Ketua; tersilah kepada paduka Tuan Ketua akan menentukan sikap beliau sendiri terhadap usul Panitia Kecil itu.

Tuan-tuan yang terhormat! Semua anggota *Panitia Kecil* sadar sama sekali, bahwa *jalannya pekerjaan yang kami usulkan itu sebenarnya ada menyimpang daripada formaliteit, menyimpang daripada aturan formeel yang telah diputuskan, telah ditentukan. Tetapi kami anggota Panitia kecil berkata :*

Apakah arti formaliteit di dalam zaman gegap-gempita sekarang ini!

Apa arti formaliteit terhadap desakan sejarah sekarang ini!

Apa arti formaliteit jika Sekutu telah mendirikan Netherlands Indies Civil Administration, telah menyerbu ke dalam daerah tanah-air kita dan membahayakan Indonesia merdeka!

Apa arti formaliteit jikalau di kanan-kiri kita mengguntur-menggeledeg gempa-petir-halilintar meriam, bom, dinamiet?

Saudara-saudara sekalian, Panitia Kecil berpendapat, bahwa jikalau formaliteit tidak sesuai dengan dinamik sejarah, maka harus dirobah formaliteit itu; harus diganti formaliteit itu, harus dibongkar formaliteit itu.

Panitia Kecil dengan *rasa malu dan iba-hati merasa* bahwa Indonesia sekarang ini adalah *satu-satunya negara dan bangsa Asia yang belum merdeka*.

India telah mempunyai pemerintah kebangsaan sementara;

Birma telah merdeka;

Thai telah merdeka;

Philipina telah merdeka;

Tiongkok telah merdeka;

Mantsukwo telah merdeka;

Anam telah merdeka;

Luang Prabang telah merdeka;

Kita bangsa Indonesia sendiri yang belum merdeka;

Ini kami anggap kecemaran nama bangsa kita Indonesia;

Malah ada satu iin yang berkata, ingin lekas merdeka, ingin lekas, walaupun hanya sepuluh hari merdeka, asal merdeka. Walaupun hanya sepuluh hari, walaupun dasarnya tidak sempurna, asal merdeka.

Demikianlah salah satu iin mengatakan.

Saya sendiri sebagai Kaityoo Panitia Kecil pada waktu saya membuat perjalanan akhir ini, baik di Bali maupun waktu kembali ke tanah Jawa, saya sendiri mengadakan kondankai-kondankai di amana-mana tempat, dan semua orang-orang yang saya temui minta lekas Indonesia Merdeka. Saya telah mengadakan pidato-pidato kepada heiho-heiho, kepada prajurit-prajurit pembela tanah air, dan misalnya semua heiho di Denpasar di pulau bali, baik heiho Rikugun, bersumpah di hadapan saya, bahwa mereka ingin mati mengikuti Amat di tempatnya, untuk Negara Indonesia. Demikianlah pula heiho-heiho yang dikumpulkan di kota Surabaya yang saya beri nasihat tentang Indonesia merdeka, heiho-heiho itupun menyatakan ingin menyusul Amat di tempatnya sekarang ini, untuk Negara Indonesia Merdeka. Dan kami bertemu dengan orang-orang dari Peta, semunyapun prajurit-prajurit kita yang gagah berani dalam tentara kebangsaan ini, minta supaya kita bekerja keras, agar supaya Indonesia lekas merdeka.

Saudara-saudara! Saya sekarang sebagai person, Soekarno, berkata, marilah kita bersidang terus dalam sidang yang kedua ini untuk menyelesaikan hukum dasar, dan jangan kita pulang kalau hukum dasar itu belum kita susun.

Sidang yang kedua ini hendaknya sidang yang terakhir daripada Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Indonesia Merdeka

Allah Subhanahu wata'ala memberkati kita.

Sebenarnya pada permulaan adalah kesukaran antara golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Mula-mula ada kesukaran mencari ertemuan paham antara kedua golongan ini, terutama yang mengenai soal agama dan negara, tetapi sebagai tadi saya katakan, Allah Subhanahu wata'ala memberkati kita sekarang ini; kita sekarang sudah ada persetujuan.

Pada waktu sesudah sidang Tyuo Sangiin kami mengadakan rapat denga 38 orang anggota-anggota dari Dokuritu Zyunbi Tyoosakai di dalam Kantor Besar Djawa Hookoo Kai. Pada waktu itu 38 orang ini *membentuk lagi satu panitia kecil* yang terdiri daripada anggota-anggota yang terhormat :

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 1. Hatta, | 6. Kiai Abd. Kahar Moezakkir, |
| 2. Muh. Yamin, | 7. Wachid Hasjim, |
| 3. Subardjo, | 8. Abikusno Tjokrosujoso, dan |
| 4. Maramis, | 9. Hadji Agus Salim. |
| 5. Soekarno, | |

Panitia 9 orang inilah sesudah mengadakan pembicaraan yang masak dan sempurna telah mencapai hasil baik untuk mendapatkan satu modus, satu persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Modus, persetujuan itu termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar, rancangan preambule hukum dasar, yang dipersembahkan sekarang oleh Panitia Kecil kepada sidang sekarang ini, sebagai usul. Menjadi artinya: Panitia Kecil menyetujui sebulat-bulatnya rancangan preambule yang disusun oleh anggota-anggota yang terhormat Moh. Hatta, Muhd. Yamin, Subardjo, Maramis, Moezakkir, Wachid Hasjim, Soekarno, Abikusno Tjokrosujoso dan Haji Agus Salim itu. Marilah sekarang saya bacakan usul rancangan pembukaan itu kepada tuan-tuan.

"Pembukaan: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan

perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Sekianlah tuan-tuan yang terhormat, Paduka Tuan Kaityoo yang termulia, rancangan preambule yang diusulkan oleh Panitia Kecil penyelidik usul-usul. Di dalam preambule itu ternyatalah, seperti yang saya katakan tempo hari, segenap pokok-pokok pikiran yang mengisi dada sebagian besar daripada anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai. Masuk di dalamnya ke-Tuhanan, dan terutama sekali kewajiban ummat Islam untuk menjalankan syari'at Islam masuk di dalamnya; kebulatan nasionalisme Indonesia, persatuan bangsa Indonesia masuk di dalamnya; kemanusiaan atau Indonesia Merdeka di dalam susunan peri-kemanusiaan dunia masuk di dalamnya; keadilan sosial, sociale rechtvaardigheid, masuk di dalamnya. Maka oleh karena itu Panitia Kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa inilah preambule yang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran yang ada di kalangan anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai.

Saya sebagai Ketua Panitia Kecil, walaupun seruan saya ini seperti melemparkan garam di dalam lautan, yaitu satu seruan yang tidak perlu lagi, saya berseru, supaya kita mengingat ketetapan hati untuk lekas-lekas mendatangkan Indonesia Merdeka, mengingat ketetapan hati kita, sebagai ternyata daripada tepuk tangan tuan-tuan tadi itu, bahwa sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai yang kedua ini hendaknya menjadi sidang terakhir daripada Dokuritu Zyunbi Tyoosakai. Kami Panitia Kecil berharap supaya lekaslah dijemakan di muka bumi persatuan kita antara kita. Saya beberapa waktu bersidang, sebagai Gityoo Zyunbi Sangiin berkata : persatuan membawa kekuatan, tetapi kekuatan tidak boleh tidak pun

menyelenggarakan persatuan. Siapa yang bersatu, bangsa yang bersatu tentu bangsa itu kuat; bangsa yang kuat, tentu bersatu. Marilah kita sekarang menunjukkan ke hadapan Allah swt dan di hadapan manusia seluruh dunia melintasi lima benua dan tujuh samudera, bahwa bangsa Indonesia telah kuat untuk merdeka, dan oleh karenanya bangsa Indonesia itu bersatu bulat dan tidak ada retak di dalam dada bangsa itu. Persatuan membawa kekuatan, kekuatan membawa persatuan. Siapa yang tidak bersatu tidak kuat. Siapa tidak kuat, tidak bersatu. "Dharma evehato hanta". Inilah ucapan saya sebagai semboyan pengunci daripada pidato saya untuk menutup sidang Tyuoo Sangiin. Marilah tuan-tuan yang terhormat, demikianlah ajakan Panitia Kecil kepada tuan-tuan sekalian, marilah kita lekas bersatu faham agar lekas menyelenggarakan hukum dasar Indonesia, marilah kita dengan lekas mendapat Indonesia Merdeka, dengan lekas mendapat Negara Indonesia Merdeka.

Kemudian saudara tua bangsa Nippon yang hadir pula di dalam sidang ini pernah menasihati saya supaya saya sering melihat bintang-bintang di langit. Dengan melihat bintang-bintang di langit itulah saya bisa menentapkan kedudukan saya sebagai manusia, sebagai putera Indonesia. Nasihat saudara tua yang hadir ini, hadir sekarang ini, tadi malam saya jalankan. Tengah malam saya keluar dari rumah saya menuju ke padang luas, memandang bintang-bintang yang berpuluh-puluh, beribu-ribu, bermiliun-miliun berkemerlip di angkasa. Saya arahkan pikiran saya kepada Allah swt, dan pada saat itulah saya teringat kepada anak-anak kita yang sekarang *bertempur di Morotai, Tarakan, Balikpapan. Ratusan anak-anak Indonesia sekarang mati di Tarakan dan Balikpapan, mereka mati buat apa, dengan harapan apa? Mereka mati barangkali tertelungkup di tanah, mencium bumi Indonesia.*

Anggota YAMIN:

Yang tidak merdeka.

Anggota SOEKARNO:

Yang tidak merdeka. Mereka mati barangkali dengan seruan senyuman di atas bibir: "hiduplah Negara Indonesia Merdeka!" mati menyebutkann: "O Ibu" dan menyebutkan pula: "O Ibu Pertiwi yang kucintai".

Kita harus *merasa berdosa, saudara-saudara, terhadap kepada pemuda-pemuda kita yang mati di Tarakan dan Balikpapan, kalau kita, yang tidak memanggul senapan dan bedil, tidak menyelenggarakan Negara Indonesia Merdeka dengan selekas-lekasnya. Mereka mati zonder negara, saudara-saudara. Saya ulangi, berdosa kita kalau kita biarkan mereka mati zonder*

negara, berdosa kita kalau kita tidak bekerja keras untuk memberi kepada mereka yang mati itu Negara Indonesia yang Merdeka.

Marilah kita menetapkan hati kita. Demikianlah ajakan Panitia Kecil pada tuan-tuan sekalian, anggota-anggota yang hadir. Marilah kita selesaikan pekerjaan kita dengan selekas-lekasnya.

Saudara-saudara, sekianlah harapan Panitia kecil. Saudara Ketua sendiri telah berkata, bahwa *rol Dai Nippon Teikoku* dalam pekerjaan menyelenggarakan Indonesia Merdeka itu *tidak lain dan tidak bukan rol dukun beranak, rol bidan*. Dukun beranak dan bidan tidak bisa melambatkan lahirnya seorang bayi, tidak bisa mempengaruhi lahirnya seorang bayi. Tentang hal detik ia dilahirkan oleh Allah swt, di dunia ini, adalah hak Allah yang Maha Kuasa sendiri untuk menentukan detik seorang bayi dilahirkan di dunia.

Saudara-saudara, *natuur Ibu* menjalankan kewajiban atas perintah Allah swt. *Sekarang Ibu Indonesia*, artinya segenap rakyat Indonesia, segenap masyarakat Indonesia sedang melahirkan bayi itu. Kami *mengharap dengan hormat dari Dai Nippon Teikoku*, sekedar bantulah, seperti dukun beranak dan bidan, lahirnya Negara Indonesia Merdeka itu Allah swt, menentukan lahirnya ini, hendaklah lekas.

Sekianlah saudara-saudara *perslah* saya kepada tuan-tuan sekalian sebagai ketua Panitia penyelidik usul.

Sesudah sidang mendengarkan laporan Ketua Panitia Kecil, Ketua BPUPKI, Radjiman menyambut gembira hasil laporan tersebut. Ia mengharapkan draft yang dihasilkan oleh Panitia Kecil, mengharapkan adanya kritik dan saran. Ia menyatakan :

“Dalam pembentukan Indonesia Merdeka kita memerlukan sekali *zelfcritiek*. Pengakuan Panitia Kecil yang dengan perantaraan tuan Soekarno menyatakan bahwa Panitia kecil melangkah dari kewajiban yang sudah dilimpahkan oleh persidangan, mengharukan sekali perasaan, dan hati saya, karena dikatakan begitu terang dan Karena di dalam Panitia Kecil ada suasana yang bersih, asas-asas kemanusiaan, keberanian mengakui apa yang betul dan apa yang tidak tepat. Tetapi anggota sekalian, saya kira, menerima asas dari apa yang dijalankan itu. Apa yang diwajibkan sudah terang sekali dan dasarnya sudah jelas. Maka saya ulangi lagi : Tuan Soekarno haraplah menyampaikan kepada para anggota Panitia Kecil yang ini hari bersidang di sini, ucapan terima kasih saya sebagai Kaityoo, dan sebagai manusia. Suasana dalam Panitia Kecil yang mengindahkan

zelfcritiek, adalah satu tanda bahwa disitu ada biji kesatriaian dan keperwiraan. Itulah menurut pendirian saya. Atas hal itu saya mengucapkan terima kasih. Dan lagi Karena hari ini kita mendengarkan pendirian yang dalam-dalam.

Sidang kedua, rapat kedua, 10 Juli 1945.

Rapat dibuka oleh Ketua pada pukul 12.16. Ia menyampaikan keinginan pemerintah Jepang.

“Pemerintah juga ingin sekali agar lekas terdapat keputusan-keputusan dan sidang-sidang BPUPKI, pemerintah *merasa keprluannya*....

Lain daripada itu nanti dalam permusyawaratan ini, saya peringatkan sebagai tadi saya uraikan dalam pembukaan ini, bahwa kita akan *melahirkan* pendirian kita dengan semerdeka-merdekanya. Jadi kita harus menghormati tiap-tiap pendirian. Biarpun kita tidak setuju dengan pendirian anggota yang lain, kita harus menghormati pendirian yang lain itu. Oleh karena itu saya berharap dengan hormat tetapi dengan sangat agar kita mewujudkan *kesatuan kehendak*. Di situ letaknya hasil persidangan ini dan kita harus merasakan, bahwa kita semua ini adalah menjadi *satu badan yang mendapat kewajiban untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan*. Saya hanya ingin memperingatkan, hendaklah pembicaraan kita sedapat-dapat itinggal dalam suasana persaudaraan dan suasana kemerdekaan.

Sekarang saya harap agar tuan-tuan memikirkan soal hukum dasar. Ataupun kita membicarakan bentuk negara dan hukum dasar, ataupun tuan-tuan setuju membicarakan yang satu dahulu. Sedapat mungkin kita akan bekerja secara methodis, agar supaya pembicaraan rapat menuju kepada maksud.

Setelah perdebatan prosedur pembahasan, ketua mempersilahkan Mr. Wongsonegoro berbicara :

“Kita mempersiapkan cara, bagaimana kita secepat ungkin dapat menangkap votum rakyat sebulat-bulatnya dan sebaik-baiknya. Bilamana kami menerima dan membaca usul Panitia, janganlah diartikan bahwa kita dapat menyetujuinya 100%, sebab ada *sebuah perkataan* di dalamnya yang menurut keyakinan, barangkali dapat bertentangan dengan perasaan rakyat, yaitu perkataan “*republik*”. Tentunya Panitia Kecil dapat juga mengatakan : “*kita yang betul*”. Dapat juga saya mengatakan “saya yang betul”, tetapi saya sama sekali tidak menyatakan bahwa saya betul dan sama sekali tidak anti republik, akan tetapi janganlah itu yang dijadikan soal : kami tidak akan mendahului votum rakyat.

Pembahasan mengenai bentuk dan kepala negara Ki Bagoes Hadikoesoemo berpendapat :

“semua orang mufakat juga, bahwa republik yang akan dibangun memakai majelis wakil rakyat. Tetapi kalau saya katakan, agar republik yang bersifat begitulah yang dibangun, orang akan menolaknya pula, karena dalam dua buah perkataan itu pada waktu sekarang ini menurut pendapat saya, terkandung setan dan iblis. Tentang maksudnya saya mufakat, apalagi untuk mempercepat datangnya kemerdekaan, yang Pemerintah sendiri juga sudah mengharap-harapkan dan kita minta, supaya kita segera bersatu. Hendaklah tujuannya saja diambil, dan jangan ditambah dengan “republik” yang tidak tuan sukai. Gambarkan saja apa yang tuan sukai yaitu bahwa negara dikepalai oleh seorang pemimpin yang tidak turun-temurun dan dimufakati oleh rakyat, dengan pemerintahan yang berdasarkan rakyat dan permusyawaratan. Adapun nama “republik” itu, dapat juga disebutkan dalam bahasa Indonesiayan dengan singkat, ialah “kedaulatan rakyat”. Kalau perkataan itu tidak disukai marilah kita mencari yang lain. Pendeknya maksudnya sajalah yang diperlukan. Biar pun perbantahan disini tidak akan menimbulkan apa-apa, karena kita semua sudah saudara yang serapat-rapatnya, tetapi kalau dilihat oleh mata musuh, perbantahan itu tidak baik. Perbantahan itu tidaklah baik, sungguhpun di dalamnya ada sifat yang baik dan tidak menyebabkan sesuatu apa, tetapi memberi kesan keluar yang tidak baik. Sebab itu ambil saja isinya. Saya mufakat dengan isinya dan dengan lekas datangnya Indonesia Merdeka. Dahulu saya tidak mufakat, tetapi karena kemudian tujuan itu yang saya rasa benar, saya sekarang mufakat sekali”.

Giliran berikutnya ketua menyalakan Mr Susanto Tirtoprojo untuk menyampaikan pendapatnya :

Menurut pendapat saya, bentuk mengenai dua soal, yaitu pertama soal *uni federasi*; kedua soal *republik atau kerajaan*. Dengan singkat, akan saya bacakan apa yang telah diajukan, supaya jangan banya-banyak minta waktu yang sekarang sangat berharga. Tentang *uni atau federasi* – sebab dalam rapat yang dahulu ada aliran yang suka kepada *federasi* dan yang menyukai *uni* – di sini pertama saya berpendapat bahwa kita harus memahamkan arti dan perbedaan antara *uni* dan *federasi* itu, yang mengenai tiga macam susunan negara.

Uni: yang berhak untuk berhubungan dengan luar negeri, hanya dan melalui pemerintah pusat.

Federasi yang bercorak *Bondstaat*: baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berhak berhubungan dengan luar negeri. Dan

Pemerintah pusatberhak mengadakan aturan langsung untuk semua penduduk.

Adapun perbedaan antara *Bondstaat* dan *Statenbond* ialah demikian. Dalam negara yang bersifat *Bondstaat* baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berhak berhubungan dengan luar negeri. Tetapi di dalam *Statenbond*, pemerintah pusat tidak berhak langsung membuat aturan untuk penduduk, melainkan hanya dengan perantaraan pemerintah daerah. Dengan mengingat itu saya memilih bentuk *Uni*, seperti juga yang dirancangan di dalam rancangan Undang-undang Dasar yang telah saya usulkan. Tentang *republik* atau *kerajaan*, seperti saya alami di desa-desa, memang rakyat jelata hanya mengenal bentuk negara sebagai *kerajaan* mengenai pekerjaannya. Akan tetapi kita harus membentuk negara dengan segera. Jadi sukarnya, ialah memilih raja pada waktu sekarang. Sendainya yang dipilih menjadi raja-raja itu salah satu daripada raja-raja yang sekarang ada, maka menurut hemat saya, tidak ada raja yang dapat diterima dengan puas oleh seluruh rakyat. Apabila yang dijadikan raja itu lain daripada raja-raja yang sekarang ada, maka pun menurut hemat kami mungkin ia oleh seluruh rakyat diterima sebagai pemimpin negara tetapi tidak atau belum sebagai raja. Maka untuk menjamin persatuan, kami merencanakan adanya Kepala Negara yang dipilih untuk waktu yang tertentu tetapi tidak disebut *presiden*, dan bentuk negara yang tidak disebut *republik*, malahan dalam Undang-undang Dasar dimuat kemungkinan, bahwa Kepala Negara yang sangat berjasa dan dicintai oleh rakyat, dapat *dinobatkan jadi raja* kemudian hari. Saya cantumkan dalam rancangan Undang-undang Dasar, bahwa Kepala Negara dipilih untuk beberapa lama, tetapi Kepala Negara yang sangat berjasa dan dicintai oleh rakyat dapat *dinobatkan menjadi raja*. Jadi inilah dalam pokoknya pendirian saya tentang bentuk negara.

Sekarang saya persilakan anggota yang terhormat tun Dahler.

Paduka Tuan Saudara Ketua! Tendorong jugalah hati saya menuju ke mimbar ini akan menguraikan dengan sepatah dua patah pendirian saya tentang yang dibicarakan sekarang ini.

Terutama sekali saya mengumumkan, saudara ketua, bahwa saya sangat memuji segala pekerjaan yang sudah dilakukan, terutama pekerjaan Panitia Sembilan orang, yang sudah merancangkan *preamble* tadi yang sangat saya setuju.

Mula-mula saudara Ketua saya terangkan di sini pada sidang yang pertama pendirian saya tentang bentuk negara, dan saya minta bentuk

negara itu hendaknya keerajaan. Sebab pendirian saya tentang politik umum boleh dikatakan sudah terkenal sama sekali, sudah puluhan tahun saya menguraikan pendirian saya tentang hal itu. Boleh dikatakan bahwa saya republikein 100%. Akan tetapi kalau orang bertanya: apakah sebabnya engkau sekarang minta monarchie, jawab saya: karena waktu itu saya memikirkan pepatah atau perkataan seorang filsafat ketimuran yang, saying sekali, saya lupa namanya, maka saya mengatakan kerajaanlah yang memang merupakan suatu corak kemajuan kemanusiaan, kemajuan agama dan kemajuan segala-galanya di dunia ini, sebab raja itulah yang selalu menjadi wakil Allah di dunia ini.

Menurut perkataan dalam bahasa Barat juga, selalu raja disertai beberapa gelaran perkataan misalnya: *Bij de genade God's*. Saya mengeluarkan perkataan itu dengan memikirkan keadaan bangsa Indonesia seumumnya, keadaan pikiran dan agama bangsa Indonesia yang seumumnya, yaitu yang masih bertalian teguh dengan adat-istiadat dahulu kala yang masih terasa dan hidup dalam sanubari masyarakat Indonesia.

Pikiran saya sekarang belum sampai kepada pertanyaan republik atau kerajaan, bagaimanapun juga, yang terutama dewasa ini ialah sudah tentu soal kemerdekaan. Bagaimanapun juga jalannya, bagaimana juga ikhtiarnya, bagaimana juga akalnya, asal kita mendapat kemerdekaan dulu, dan menurut pikiran dan pendirian saya, lain daripada kita bangsa Indonesia sendiri tidak ada yang dapat memberikan kemerdekaan kepada kita, tidak ada yang dapat menyatakan kita merdeka. Menurut perkataan yang tersebut di preambule ini rakyat Indonesia menyatakan dengan itu kemerdekaannya. Segala soal yang lain boleh kita sampingkan. Jadi saya harap dengan penuh pengharapan, supaya dalam sidang yang kedua kali daripada Dokuritu Zyunbi Tyoosakai ini, cukuplah dan sampailah waktunya untuk mewujudkan cita-cita kita yang sudah berpuluh-puluh tahun kita idam-idamkan:

Indonesia Merdeka.

Ketua RADJIMAN, menyilakan pembicara berikutnya Mr. Muhd. Yamin.

Dalam hal itu terlebih dahulu saya ingin mengemukakan keyakinan, bahwa dalam melakukan pembicaraan tertuju kepada *bentuk*, kepada *unitarisme* atau *federalism*, maka lebih dahulu saya menegaskan lagi ucapan ketua panitia kecil, yaitu bahwa tiap-tiap langkah yang kita lakukan dalam sidang pada hari ini, hendaklah *mendekatkan kita kepada langkah yang paling akhir di hadapan pintu gerbang negara Indonesia merdeka*, dengan secepat-cepatnya merencanakan suatu undang-undang negara Indonesia merdeka. Saya menegaskan hal itu, karena pertama kali langkah daripada rakyat Indonesia yang paling akhir adalah menentukan dan menetapkan konstitusi seperti kita ingini, maka hendaklah kita segera menyudahi langkah

yang paling akhir itu, supaya pihak Dai Nippon Teikoku dapat pula memberikan perkataan yang paling akhir ialah *mengakui persatuan yang kita ingini*. Oleh sebab itu dalam hal ini saya ringkaskan segala pembicaraan dan segala pertimbangan dengan harapan sepenuh-penuhnya, supaya kita sedapat-dapat ini hari juga sampai kepada langkah yang paling akhir itu sehingga penetapan bentuk Negara Indonesia Merdeka jangan terlambat oleh karena kita, tetapi tinggal tergantung kepada perkataan terakhir daripada Dai Nippon Teikoku.

Saya meminta perhatian, bahwa dalam rapat tanggal 29 Mei dahulu saya telah melampirkan suatu rancangan Undang-undangan Dasar Republik Indonesia.⁵

Dalam pada itu mengenai bentuk tentu saja ada beberapa paham. Sebenarnya mengenai hal itu saya *tidak akan memajukan pendapat*, meskipun saya siap untuk memberi penerangan daripada pendapat saya sendiri tentang bentuk-bentuk yang saya pandang sebaiknya untuk seluruh rakyat Indonesia, tetapi hal itu tidak dapat saya jalankan, oleh karena suara yang mempertimbangkan bentuk yang terbaik untuk tanah-air dan negara kita seluruhnya telah banyak disampaikan. Mengenai hal itu tentu saya akan mendapat kesempatan di tempat lain untuk melanjutkan pembicaraan, misalnya di dalam panitia yang dibayangkan oleh Ketua Panitia Kecil tadi. Dengan ringkas, maka pemandangan-pemandangan tertuju kepada Negara Indonesia tidak berbentuk, kepada Negara Indonesia yang *berbentuk monarchie*, dan kepada Negara Indonesia yang *berbentuk republik*. Dengan ringkas saya mengajukan, bahwa terhadap cita-cita untuk mengadakan Negara Indonesia yang tidak berbentuk, jadi yang *bukan monarchie dan bukan republik*, saya mempunyai beberapa keberatan, dan keberatan yang terpenting, ada empat buah.

Kalau negara kit tidak berbentuk, maka buat kita sendiri akan bersifat sesuatu negara yang diperintah oleh Pemerintah yang sementara, ini barangkali tidak diingini oleh rakyat. Rakyat pasti mau bernegara yang ada bentuknya dan tiap-tiap langkah yang akan mengadakan negara yang tidak berbentuk, dianggap oleh rakyat melambatkan datangnya Indonesia merdeka yang sempurna.

Yang kedua, yaitu, kalau negara kita *tidak berbentuk*, maka ada satu pihak yang tidak puas, yaitu rakyat Indonesia sendiri; oleh sebab itu saya berkeyakinan, bahwa mengingat pembagian kekuasaan dalam negara yang akan datang itu, perlulah rakyat menyetujui sepenuhnya bentuknya, ialah bentuk yang jelas.

Keberatan ketiga, *yaitu, jikalau sekiranya negara kita dibentuk dengan pelantikan di tengah-tengah rakyat dan di tengah perjuangan internasional sekarang ini, maka nyatalah, bahwa negara yang tidak berbentuk tentu akan mempunyai status yang tidak terang, yang tidak memuaskan. Dan kita mengerti, bahwa kemauan kita adalah merebut status internasional yang sepenuhnya dan status internasional tidak tercapai dengan negara yang tidak berbentuk.*

Yang keempat, *yaitu, siapa atau golongan apapun yang hendak mendirikan negara yang tidak berbentuk, akan menjalankan struisvogelpolitik, artinya menunda penyelesaian segala kesulitan di dalam negara yang akan dibangun, sedangkan hal itu dapat diputuskan pada hari ini juga. Keadaan demikian itu adalah berlawanan dengan bukti-bukti dalam politik Dai Nippon Teikoku sendiri, karena semua negara-negara dalam lingkungan Asia Timur Raya, sesuai dengan pelaksanaan politik Dai Nippon Teikoku, adalah berbentuk. Tanah Tiongkok memang berdiri di bawah kekuasaan Pemerintah Kebangsaan, tetapi buat rakyat Tiongkok sendiri Tiongkok Kebangsaan itu berupa republik.*

Mantjoekwo memakai bentuk yang tentu, *monarchie*. Anam, Kamboja, Luang Prabang memakai bentuk yang tentu, *monarchie*. Tanah Filipina mendapat bentuk tentu, *yaitu republik*. Jadi marilah kita menyesuaikan diri dengan politik Asia Timur Raya sekarang, *yaitu mendirikan negara merdeka dengan bentuk yang tentu supaya rakyat Indonesia puas dan kita mendapat status internasional yang sempurna.*

Tentang *monarchie* saya tidak akan menimbang baik atau jeleknya dalam hal ini, hanya *saya akan memajukan lima buah keberatan terhadap bentuk monarchy untuk Indonesia. Kalau ditimbang dengan ukuran kepentingan rakyat dan tidak sekali-kali dengan ukuran pendirian perseorangan.*

Pertama-tama, dipandang secara umum, maka tidaklah memberi kepastian, bahwa keturunan dalam monarchy akan kuat memerintah negara kita dan keturunan yang tertentu tidak pula memberi jaminan akan melahirkan kepada negara pimpinan yang kuat dan sempurna untuk berkuasa sebagai Kepala Negara, Negara Indonesia kita ini, padahal kita bermaksud mendirikan negara yang makmur dan abadi.

Kedua, monarchy tentulah mendatangkan dynastie, baik dynastie yang baru atau yang dipilih daripada dynastie-dynastie yang ada di tanah kami ini. Pemandangan itu hanya berarti pandangan teori saja, oleh karena dalam keadaan yang hebat seperti sekarang ini, mencari dynastie baru

adalah suatu usaha yang semata-mata menolak datangnya Indonesia Merdeka, dan keadaan itu bertentangan pula dengan kemauan rakyat umumnya, yang tidak mau diperintah lagi oleh kerajaan yang turun-temurun. Andaikata pilihan keturunan di jatuhkan antara keturunan-keturunan yang ada di tanah Indonesia ini, maka sungguhlah lapangan pemilihan kita terlampau besar: 4 kooti⁶ di tanah Jawa, 8 Syuutyoo⁷ di tanah Bali, 100 di Sumatera, 200 di Borneo, Sulawesi dan Maluku, sehingga meliputi lebih-kurang 300 Kooti di Indonesia; lagi pula saya yakin, bahwa dorongan rakyat tidak akan meminta dynastie yang ada. Keberatan-keberatan yang lain berhubungan dengan pembagian kekuasaan dalam negara monarchie, yang acapkali mendapat sifat sistim oligarchie, ialah suatu pemerintahan *kekeluargaan*. Saya yakin, bahwa monarchie dapat dibatasi dengan jalan konstitusi, tetapi bentuk monarchie itu sendiri tidak diinginkan oleh rakyat, menurut pendapat saya, oleh karena mengenai kekuasaan rakyat, yang akan kita atur. Kekuasaan rakyat tidak dapatlah diatur di dalam suatu monarchie, melainkan hanya dapat dalam bentuk republik.

Keempat, saya yakin-seperti saya ucapkan dalam pidato saya dalam rapat Dokuritu Zyunbi Tyoosakai yang pertama – bahwa tradisi Negara Indonesia yang berjalan dalam waktu selama 350 tahun yang lampau sudah berakhir sama sekali.

Kenang-kenangan kepada monarchie memang ada, tetapi bangsa Indonesia pada waktu ini tidak dapat dihubungkan dengan tradisi monarchie dahulu, sehingga dengan sendirinya kita dalam membentuk negara ini, perlu mengikuti kemauan kita sendiri, yaitu bukan monarchie, melainkan suatu pembagian kekuasaan rakyat dalam bentuk republik. Keadaan di dalam pergerakan selama 40 tahun yang akhir, ialah *pergerakan kemerdekaan mendekatkan kita kepada pintu gerbang kemerdekaan*, dan kita, yang mengetahui sejarah pergerakan kemerdekaan dalam 40 tahun itu yakni, bahwa tidak pernah terdengar suara untuk membentuk negara yang tidak berbentuk, atau untuk mengadakan suatu monarchie, tetapi dengan langsung ataupun tidak dengan langsung terbayanglah dalam cita-cita kemerdekaan itu suatu Negara Indonesia yang di dalamnya aka ada pembagian kekuasaan rakyat seluruhnya, sebagai cita-cita *pergerakan kemerdekaan*, tidak lain dan tidak bukan terbayang dalam suatu republik. 40 tahun pergerakan kemerdekaan Indonesia mendekatkan kita kepada cita-cita suatu negara merdeka, Indonesia Merdeka. Pada ketika kita masuk ke dalam pintu Negara Indonesia itu, maka kita harus wujudkan syarat dan sifat negara kita, yaitu suatu negara merdeka, yang di dalamnya teratur pembagian kekuasaan rakyat yang tidak boleh dengan bentuk monarchie melainkan hanya dengan bentuk republik. Kemudian sampailah saya kepada bentuk ketiga, yang menurut keyakinan saya sendiri adalah suatu bentuk yang sempurna dan yang memberi jaminan kepada bangsa dan tanah-air kita, yaitu bentuk republik.

Dalam rapat ini tidaklah saya akan mengemukakan baik dan jeleknya republik pada umumnya, melainkan saya hendak menyandarkan pilihan saya atas tiga alasan.

Pertama-tama, saya yakin bahwa rakyat Indonesia menghendaki republik dan republiklah yang memberi jiwa kepada bangsa Indonesia, bukannya bentuk lain yang manapun.

Kedua, saya sebagai seorang nasionalis, hendak mengeluarkan perasaan rakyat terhadap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar memerintahkan, supaya pemerintahan negara kita dijalankan secara musyawarat atau perundingan, dengan pembagian kekuasaan, dan hal itu dapat dilaksanakan dalam suatu negara yang tersusun dalam bentuk republik, dikepalai oleh Kepala Negara yang dipilih oleh badan permusyawaratan rakyat.

Ketiga, negara kita didirikan tidaklah hanya menurut syarat kebangsaan, kemauan rakyat dan perintah agama, melainkan juga untuk mencukupi syarat-syarat dunia internasional, yaitu untuk mendapat bentuk yang jelas supaya dapat diberi status internasional yang sempurna.

Seperti oleh tuan Ketua Panitia Kecil dikatakan, di luar negeri didirikan suatu macam pemerintahan yang *tidak berbentuk*, yaitu "*Netherlands Indie Civil Administration*". Jangan kita membentuk negara yang lebih rendah derajatnya, melainkan harus yang lebih tinggi. Dunia internasional tidak menghargai dan mencemoohkan kita, kalau Negara Indonesia dibentuk tidak dengan syarat kebangsaan dan kemauan rakyat. Luar Negeri hanya menghargai Negara Indonesia, jikalau Negara Indonesia terbentuk menurut syarat kebangsaan dan kemauan rakyat serta dihargai oleh rakyat. Oleh sebab itu saya tidak bimbang dalam pemilihan, melainkan dengan tegas memilih bentuk republik, ialah Republik Indonesia. Tentang baik dan jeleknya pada umumnya telah saya hindari saja. Mengenai syarat-syarat lain, seperti yang dimajukan oleh pembicara yang lebih dahulu, Mr. Wongsonegoro, yaitu tentang mengadakan votum atau suara rakyat, dalam beberapa hal pertimbangan saya seperti berikut:

Pertama kali, yaitu, Mr. Wongsonegoro tadi sebagai jurist mengetahui bahwa contoh syarat untuk mendengar votum sudah ada, yaitu dalam pembentukan Negara Republik Filippina. Di sanalah rakyat Filippina yang berkumpul di Manilla pada suatu ketika akan membentuk suatu republik Filippina sebagai sumbangan daripada rakyat. Dalam pada itu, di dalam grondwet dan beberapa wet lainnya, sesudah pecah peperangan Asia Timur Raya, telah ditetapkan, bahwa akan didengar suara rakyat secara

langsung. Cara yang begitu dapat ditiru di dalam pembentukan Republik Indonesia.

Mengenai syarat yang kedua, maka kita sekalian maupun tuan Wongsonegoro sendiri tidak berbicara untuk diri sendiri, melainkan sekurang-kurangnya kita memandang diri kita sebagai wakil pergerakan politik seluas-luasnya. Dengan demikian rapat ini bersifat rapat perwakilan rakyat di mana duduk beberapa anggota yang asalnya dari pulau sumatera, dari pulau Borneo, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Ambon, sehingga kita dapat berpikir secara rakyat untuk rakyat. Dengan ini maka syarat yang kedua, walaupun tidak sempurna, telah kita cukupi.

Mengenai syarat yang ketiga, tidaklah benar kalau dikatakan, bahwa rakyat belum mengeluarkan suaranya pada masa ini. Suara rakyat yang didengar bukan bisikan saja, tetapi suara gemuruh yang meminta Republik Indonesia. Orang yang tidak bisa mendengar suara rakyat yang gemuruh itu, kupingnya sangat tuli. Orang Indonesia yang mengikuti syarat Indonesia Merdeka, mau hidup dalam Republik Indonesia.

Inilah syarat-syarat yang saya sumbangkan di samping perkataan-perkataan Mr. Wongsonegoro.

Adapun tentang dua perkataan *republik* dan *monarchie*, yang dikatakan berasal dari iblis atau setan, saya tidak menyetujui pernyataan yang demikian itu, karena setan tidak ada di dalam republik atau *monarchie*, melainkan ada di dalam hati manusia. Marilah kita tetapkan putusan di sini, secara ang murni.

Keberatan, bahwa *republic* itu kata asing, banrangkali sangat ringan, karena di antara segala perkataan yang sangat gemuruh, yang sangat lazim, ada banyak pula yang asing. Oleh sebab itu jangan kita malu memakai perkataan itu, karena perkataan harus berhubungan juga dengan kemauan kita. Oleh sebab itu, alasan yang diajukan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo, dalam anggapan saya, tidak penting dan sangat tidak berhubungan dengan kenyataan.

Tentang *unitarisme* dan *federalism* tidak akan saya bicarakan di sini, tetapi akan saya majukan dalam rapat Panitia yang tadi telah dibayangkan-bayangkan oleh tuan Ir. Soekarno. Dengan membicarakan hal ini sekarang, kita hanya menimbangkan hal yang bersifat teori, dan dalam penyusunan egara ini saya tetap berpendirian menolak *federalism* dan menyetujui *unitarisme*; kalau mendapat kesempatan dalam penyusunan aturan negara nanti, akan saya bicarakan dasar *unitarisme*, yaitu kesatuan Indonesia, tidak

pecah-pecah, baik mengenai pemerintahnya, maupun mengenai bangsanya, maupun daerahnya.

Oleh sebab itu alasan-alasan ini saya ringkas saja dengan permintaan, supaya dalam rapat ini juga tuan Ketua *memungut suara tentang monarchisme atau republik*, supaya kita sesudah itu dapat bekerja terus atas suatu dasar yang sudah tentu: dasar republik atau dasar monarchie.

Itulah jalan supaya kita segera dapat mengatasi syarat-syarat yang paling akhir untuk menghadapi negara merdeka.

Ketua WEDIODININGRAT, menyilakan pembicara terakhir tuan singgih.

Apakah dipilih bentuk monarchie atau republik, atau bentuk lain dengan memakai nama Kepala Negara, itu baiklah diserahkan kepada suara rakyat yang dapat ditangkap dengan semurni-murninya. Itu tidak akan mengenai kedudukan kita di dalam dunia internasional.

Rapat kedua, dibuka kembali pada pukul 03.30 sesudah istirahat selama dua jam.

Soetardjo Wiryopratomo sebagai pembicara pertama. Ia menyatakan memilih republik atau monarchie adalah satu sistim, tidak perlu lagi diperdebatkan. Sutardjo menyarankan satu jalan keluar, yaitu untuk mengadakan *bentuk perang* (war style) bentuk darurat. Indonesia merdeka hendaknya jangan dilahirkan di dalam suasana pecah-belah. Buat saya bukan bentuknya yang penting dalam Negara Indonesia, tetapi *jiwa daripada bentuk itu*, yaitu pemimpinnya, Kepala Negaranya. Itulah buat saya lebih penting daripada bentuk. Bentuk adalah bahan mati.

Tetapi Kepala Negara adalah bahan yang hidup. Di dalam tangan Kepala Negara, di dalam orangnya Kepala Negara harus dapat diijelmakan keadilan, aadikesucian, kesatuan dan terutama sekarang ini dinamik perang. Maka dari itu sekali lagi bukan bentuknya tetapi jiwanya, orangnyalah yang terpenting dan dengan sendirinya pemilihan bentuk menjadi no. 2; pemilihan Kepala Negara sudah semestinya, sudah seadilnya, dengan jalan *permusyawaratan*, artinya dengan *jalan gotong-royong*. Dengan jalan gotong-royong kita mengadakan Kepala Negara. Dengan jalan gotong-royong kita menjaga Kepala Negara. Dengan jalan gotong-royong kita membentuk Indonesia Merdeka, dengan jalan gotong-royong kita mengalahkan musuh.

Pikiran itu diperkuat dan jiwa saya telah dapat dinyala-nyalakan oleh pidato tuan Soekarno di dalam rapat yang dulu sebagai salah satu pembicaraan yang penghabisan. Di dalam pidato saudara kita tuan Soekarno telah dibentangkan beberapa hal-hal yang kesimpulannya ialah memperkuat gotong-royong di dalam segala hal.

Bentuk gotong-royong tidak saja buat selama perang tetapi juga buat sesudah perang, sebab bentuk gotong-royong adalah bentuk yang cocok dengan tabiat jiwa ketimuran yang asli. Dalam hal ini perlu saya utarakan, bahwa *saya tidak setuju*, jika di dalam memilih *bentuk negara* atau *di dalam menyusun pemerintahan dipakai nama sementara*.

Nama sementara seharusnya diasingkan sejauh-jauhnya, sebab segala pilihan, segala sikap adalah tidak untuk sementara, tetapi untuk waktu seperti sekarang ini di mana kita menghadapi segala kemungkinan. Kalau ada yang mengusulkan sifat sementara di dalam Undang-undang Dasar, preambule dan lain-lainnya hendaknya usul itu jangan diterima.

Tuan Ketua, berhubung dengan itu sesungguhnya harus ada sikap yang lebih nyata, artinya jika sekarang ini *sudah dipersoalkan bentuk republik atau monarchie*, kita harus mengeluarkan suara kita, harus *memilih* satu dari dua, artinya kita harus memilih dari antara sistim-sistim itu. Saya berpendapat, bahwa pembentukan gotong-royong itu pembentukan yang tepat bagi kita maka saya sendiri akan memilih bentuk *republik*, oleh karena bentuk *irepublik* *dekat sekali dekat dengan gotong royong*.

Ketua Radjiman, selanjutnya menyilakan Dr. Sukiman menguraikan pendiriannya.

Dr. Sukiman: mengisahkan pengalamannya mengenai kehendak rakyat sebagai sumber pilihannya.

Sebagaimana saya terangkan di dalam rapat yang pertama, sidang yang pertama, maka tentang bentuk republik atau kerajaan, Islam memang tidak memilih, karena, pada hemat saya, menentukan bahwa negara harus *berbentuk republik* atau harus *berbentuk kerajaan*, adalah suatu keadaan yang boleh dikatakan sudah diketahui oleh umum. Bagi saya soal *republik* atau *kerajaan* itu, di dalam jaman sekarang, adalah suatu hal "*etiket*" saja, sebab di dalamnya terjaminlah atau diakui bahwa *kekuasaan yang terpokok ada pada rakyat*, ialah *kedaulatan rakyat*, walaupun di dalam suatu negara yang berbentuk kerajaan; di dalam jaman modern ini tidak ada lagi suatu bentuk kerajaan yang "*despotisch*" atau *feodalisch*", seperti dahulu apa lagi buat bangsa kita yang sudah mempunyai tingkatan peradaban yang

sudah tidak kalah dengan di beberapa negara-negara lain di muka bumi ini. Akan tetapi juga di dalam hal ini kita harus memeriksa riwayat daripada negara-negara. Riwayat itu menunjukkan sesungguhnya, bahwa pada mulanya memang kerajaanlah yang kita kenali. Umpamanya saja, hal ini ternyata sekalai di dalam riwayat negara Inggris.

Di situ kita mendapat kesan daripada perjalanan perjuangan antar kekuasaan negara dengan kekuasaan rakyat, hingga di dalam negara seperti Inggris yang dulu diperintah secara *despotisch*, secara paksaan oleh pihak raja. Sekarang terdapatlah suatu bentuk yang di dalam hakekatnya adalah republikeins, akan tetapi di dalam merknya dinamakan kerajaan, yaitu hanya *symbolisch* atau sebagai *etiket saja*. Akan tetapi, saudara-saudara, riwayat negara-negara lain memang menunjukkan, bahwa kemajuan di dalam hal ini mulai dengan kerajaan, tetapi berakhir dengan republik. Apa lagi, saudara-saudara, dalam perjanjian yang kita setuju itu kita mengadakan cara-cara tanpa kekuasaan turun-temurun. Menurut ahli hukum, menurut advokat kita, maka kalau hal turun-temurun itu ditetapkan demikian di dalam suatu bentuk sesungguhnya *bentuk itu sudah meninggalkan prinsip kerajaan, sudah berbau republik*, ialah tanpa kekuasaan turun-temurun. Kalau pimpinannya *tidak turun-temurun*, sesungguhnya negara itu sudah bukan lagi *berprinsip kerajaan*, akan tetapi sudah memakai *prinsip republik*, karena ketentuan, bahwa pemimpin negara tidak turun-temurun, sesungguhnya sudah mengandung prinsip republik yang kepalanya dipilih untuk jangka waktu yang tertentu. Jadi, saudara-saudara, kalau demikian halnya – dan saya kira bahwa kita tidak akan dipengaruhi oleh sentiment saja – kalau sudah terang bagi mereka atau bagi kita yang menghendaki bentuk kerajaan, tetapi tidak memakai prinsip kerajaan, kalau memang demikianlah jalan yang dipilih untuk mempersatukan kita, apakah tidak bisa kiranya didapat suatu etiket baru yang sesungguhnya bisa diterima oleh kita semua? *Etiket baru yang mengandung prinsip yang sesungguhnya sama, yaitu Kepala Negara harus dipilih pada waktu yang tertentu. Jadi dengan begitu pertentangan antara prinsip kerajaan dan prinsip republik sudah tidak ada lagi.*

Pokoknya ialah, bahwa yang masih menjadi soal perjuangan sesungguhnya, hanya nama negara kita.

Sementara itu ada interupsi dari Soekarno: Apa Kepala Negara dipilih buat seumur hidup?

Dr. Sukiman, menjawab: “Boleh diusulkan sampai umur 60 tahun. Tetapi sesungguhnya tentang *prinsip tidak turun-temurun dan harus dipilih*, kita sudah yakin semuanya. Itu sesungguhnya sudah berarti suatu kemajuan lagi dalam soal republik atau kerajaan. Saya memang setuju sekali dengan pendapat

saudara Muzakkir, mengenai apa yang sesungguhnya Islam itu, dan yang walaupun demikian di dalam pidatonya menerangkan, bahwa *bentuk negara Islam adalah mirip dengan republik*. Tentang bentuk “*unitaristic*” atau *federalistic*”, juga di dalam hal ini riwayat menunjukkan sesungguhnya, bahwa pada permulaan hubungan negara-negara adalah sebagai perserikatan negara-negara “*statenbond*”, kemudian meningkat kepada “*bondstaat*” dan pada akhirnya meningkat lagi kepada *eenheidsstaat*, karena “*eenheidsstaat*” sesungguhnya menjamin satu urusan, satu bentuk yang se-efficient-efficient-nya. Maka tiap-tiap daripada kita sesungguhnya mempunyai cita-cita yang setinggi-tingginya, yaitu *satu negara buat satu bangsa dan satu tanah-air*. Di dalam kalangan kita sesungguhnya saya juga tergolong mereka yang menyetujui tingkat kedua itu, karena tingkat kedua sesungguhnya – dalam usahanya – akan *memperkuat pemerintahan pusat* sehingga di dalam praktek, sesungguhnya sudah mewujudkan bentuk yang *unitaristic*, maka lebih baiklah saya terima bentuk yang paling akhir, yaitu bentuk sebagai *eenheidsstaat*, yaitu *negara persatuan*.

Sekian tuan Ketua, pemandangan saya.

Ketua Radjiman, menyilakan K.H. Sanusi, ulama dari Sukabumi.

Anggota Sanusi, menyatakan: Mengenai bentuk negara baru, kerajaan atau republik, belum terdapat seorang yang menerangkannya dari jurusan Islam. Saya akan mengemukakan kepada tuan-tuan soal kerajaan atau republik dipandang dari Qur'an suci, dari firman Tuhan. Mudah-mudahan uraian saya menjadi jembatan untuk persatuan antara kita sekalian. Hadirin yang mulia, bentuk kerajaan memang diterima oleh agama Islam, dipuji oleh agama Islam. Hanya kita harus menyelidiki syarat-syarat untuk menjadi raja, syarat-syarat untuk menjadi pemimpin besar atau Kepala Negara. Saudara-saudara, di dalam Qur'an yang suci, di dalam surat Al-an'am, tertulis pernyataan yang artinya:

Membangun negara kerajaan adalah sangat berat, karena, bilamana seseorang di-angkat menjadi raja ia sudah menjadi wakil mutlak daripada Tuhan. Tidak boleh ia dipotong, dibelah atau dipecah. Kedudukan kerajaan harus terus-menerus. Oleh karena itu yang menjadi raja harus orang yang sangat suci, kalau orang hanya suci saja ia tidak pantas menjadi raja; ia harus seratus kalisuci. Sucilah yang menjadi raja.

Lagi dalam Qur'an dikatakan:

Seorang yang diangkat menjadi raja tidak boleh tidak harus pantas menjadi raja; ia tidak boleh masih memikirkan diri sendiri atau kerabatnya atau keluarganya, tetapi yang dipikirkan harus umum saja. Jikalau raja masih terpengaruh oleh hawa nafsunya, oleh keduniaan, tentu baginya

berlaku ayat yang mengatakan bahwa raja yang belum suci, yang tidak suci atau masih terpengaruh oleh hawa nafsu, oleh keduniaan, bila ia datang ke suatu tempat ia akan menyebabkan kerusakan, kebinasaan segala harta-benda rakyat; Bahkan jiwa rakyat diambilnya, dimakan olehnya.

Oleh karena itu, di dalam surat Al-Ajas ada firman Tuhan begini: Bila suatu bangsa akan membentuk suatu negara, memang asalnya ialah pengetahuan nyaman, kesucian, maka harus negara itu dibangkitkan, dibangun dengan *memilih raja* sebagai Kepala Negara. Jika negara memilih raja akan bahagian negara, belum sempurna, belum tinggi, kalau dijadikan negara, kerajaan harus mengangkat *seorang Imam*.

Ada dikatakan dalam surat Jusuf yang artinya: wajib mengangkat seorang yang menjadi Kepala Negara, yang memimpin negara. Oleh karena itu, supaya kita bahagia, saya setuju bahwa di Negara Indonesia yang menjadi kepala *seorang imam*, sesuai dengan agama Islam, karena yang 95% adalah umat Islam. 95% itu, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, belajar bahwa negara harus dibentuk dengan mengangkat seorang kepala, sedang saudara-saudara, kita semua keturunan senabi; nabi semuanya ada 124.000, tetapi tidak ada seorang dari mereka menjadi raja, semuanya adalah imam; maka Kepala Negara yang harus mengganti, yang harus merdeka, harus dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, dalam menghadapi Susana pengangkatan seorang kepala, saya kuatir, bahwa, jika kita mengangkat raja, perkataan yang disebut Maswa, artinya kelebihan, ialah perkataan yang begitu berfaedah, malahan boleh jadi membawa suatu akibat hal lain yang kurang mendatangkan keamanan, atau yang mendatangkan kelemahan atau perpecahan. Oleh karena itu, seperti sudah saya tinjau, mudah-mudahan kemungkinan yang begitu ditiadakan.

Ketua Radjiman, menutup rapat dan menyarankan agar diadakan pemilihan tentang bentuk negara, yaitu republik atau kerajaan atau lainnya.

Saya kira pemilihan baiknya dilakukan tertulis saja dan tidak usah ditandatangani. Yang hadir sekarang ada 64 anggota. Itulah yang akan menyatakan suaranya, berapa mufakat dengan republik berapa dengan kerajaan.

Dengan didahului berdoa berdasarkan keyakinan dan agama masing-masing pemungutan suara dimulai.

Dari 64 anggota yang hadir, pemungutan suara diselenggarakan dua kali. Hasil pemungutan suara pertama adalah: Republik 55 suara, Kerajaan 6 suara, tidak memilih 2 suara, blanko 1 suara.

Hasil pemungutan suara kedua adalah: Republik 55 suara, Kerajaan 6 suara, blanko 1 suara, tidak memilih 2 suara.

4) Wilayah Negara

Sidang Kedua, Rapat Besar tanggal 10 Juli 1945

Waktu : 16.35 – 18.00 (15.05 – 16.30 WIB)

Acara : Pembahasan tentang wilayah negara

Pimpinan Rapat : Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat

Ketua Radjiman: pada pukul 16.35 (15.05 WIB), rapat dibuka oleh ketua dengan pertanyaan “apakah kita membentuk negara yang tidak ada batasnya?”

“Dalam Undang-undang Dasar tidak perlu penetapan batasnya, sambut Hatta”

Kembali ketua menegaskan.

Soekarno menjawab: tidak perlu.

Wurjaningrat, pembicara pertama, tentang batas-batas sudah dibicarakan. Bagi saya sendiri, batas Indonesia tentunya sedikit-sedikitnya seperti waktu zaman Belanda dulu. Akan tetapi apakah bisa ditentukan begitu? Kalau memang akan diadakan negara, jangan ditanyakan batas yang begitu akan tetapi saya mengusulkan batas-batas meliputi daerah yang sudah dapat dihubungi dan yang dapat dimerdekakan.

Anggota Muzakkir mengusulkan agar “pagar” halaman tanah-air kita berdasarkan sejarah Sriwijaya, Majapahit dan Demak. Pertama-tama yang penting bagi kita ialah mempertahankan halaman rumah-tangga itu. Musuh bukan saja mulai mendarat di halaman-halaman yang jauh, akan tetapi pula mencoba mendarat di halaman tanah-air kita yang dekat: oleh karena kita berada dalam peperangan yang genting, peperangan di antara negeri Dai Nippon dan Sekutu. Di kepulauan Indonesia telah terjadi beberapa kejadian-kejadian yang berhubungan dengan peperangan itu. Kalau kita hanya *menunggu-nunggu bantuan Balatentara Dai Nippon dan menerahkannya kepada kekuatan mereka*. Oleh karena itu, kalau memang bangsa Indonesia menghendaki kemerdekaan dan dapat pula *memagari*, menjaga halaman rumahnya, tentulah *kekuatan* itu pula hendaknya disesuaikan dengan sebaik-baiknya. Kita mengalami masa peperangan sekarang ini.

Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan, dan menjunjung tinggi apa yang diangan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui, bahwa tanah Melayu itu sebagian daripada tanah-air kita. Sungguh, beberapa halaman tanah-air kita telah jatuh daripada tangan kita. Oleh karena itu, maka kewajiban kita

bukan saja, membela tanah-air yang masih selamat akan tetapi juga mengembalikan setiap jengkal daripada tanah-air kita dengan kekuatan kita. Oleh karena itu untuk menyelamattkan seluruh tanah-air kita, untuk menyelamatkan sebidang tanah yang ditempati oleh bangsa kita, bangsa Melayu, yang tinggal di semenanjung Melayu, baiklah mereka kita masukkan dalam tanah-air kita dengan kerelaan mereka, dengan sukarela mereka, yang telah lama mencita-citakan kesatuan dengan kita. Bukan tanah Melayu saja, akan tetapi juga pulau Papua walaupun bangsanya agak berlainan daripada bangsa kita, daripada bangsa Melayu, umumnya seperti keterangan tuan Hatta. Maka biarlah yang tinggal di Papua agak lebih hitam-hitaman sedikit daripada kita, akan tetapi tanah Papua itu pula menjadi sumber kekayaan kita.

Ketua Radjiman; menyilakan anggota Yamin, untuk menyumbangkan pikirannya.

Saya tidak menyangka, bahwa pada petang hari ini (akan dibicarakan) daerah Negara Republik Indonesia, yang telah kita putuskan itu. Oleh sebab itu saya terpaksa mengulangi uraian yang telahh saya ucapkan tanggal 31 Mei yang lampau.⁸

Menurut perasaan dan pikiran, maka dalam pembentukan dasar-dasar daerah daripada negara Republik Indonesia ini, adalah pengertian, bahwa negara yang akan kita dirikan tidaklah sama dengan negara-negara yang lain, karena akan menentukan Pemerintah yang baru, daerah yang akan dibatasi baru dan keluarga negara yang baru pula. Oleh sebab itu perlulah kita mengemukakan *syarat-syarat daripada negara-negara yang lebih dahulu daripada kita sudah merdeka.*

Pertama-tama berdasar kepada dasar hukum internasional, tetapi juga berdasar kepada apa yang lebih tinggi daripada itu, maka bangsa yang *tidak merdeka hendak menjadi merdeka menurut dasar kemanusiaan, kemauan Illahi*, yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bertanah-air. Menurut dasar ini yang akan menjadi daaerah susunan Negara republik Indonesia, ialah tumpah darah Indonesia.

Dasar yang *kedua*, yaitu hendaklah negara, daerah negara ini, meliputi tanah kepungan atau *enclaves*. Dalam negara kita hendaklah *enclaves*, tanah kepungan itu dihilangkan, karena beberapa pahampun telah mengemukakan, bahwa tumpah-darah Indonesia yang akan menjadi daerah Republik Indonesia adalah bulat keluar dan bulat juga ke dalam.

Dasar *ketiga*, yang akan meliputi *kehendak* kita untuk menjadikan daerah tumpah-darah kita daerah negara, hendaklah juga dibatasi oleh

satu dasar kemanusiaan, yang membatasi nafsu kita untuk meluaskan daerah negara kita. Nafsu itu yang diikuti oleh beberapa konferensi internasional, yang juga diucapkan oleh Jozef Stalin, yaitu bahwa *kita tidak akan memberikan sejenkal daerah tumpah-darah kita kepada kekuasaan lain, tetapi kita juga tidak menghendaki sejenkal tumpah-darah yang bukan tanah-air kita*. Dengan dasar tiga ini, yakni tumpah-darah menjadi daerah negara Republik Indonesia, yang *tidak mengenal enclaves dan supaya menjaga nasionalisme jangan menjadi imperialism*, maka boleh saya jelaskan daerah apa yang kita namakan tumpah-darah, yang akan menjelma menjadi daerah negara itu.

Pertama-tama sekali dalam hal ini suara telah diucapkan, baik di dalam gedung ini, ataupun juga di kalangan rakyat, bahwa perbedaan paham tentang daerah sungguh-sungguh tidaklah banyak. Pembicara yang pertama mengucapkan, bahwa *minimum daripada keinginan kita, yaitu Hindia Belanda*, seperti telah diucapkan oleh anggota yang terhormat Wurjaningrat. Tetapi hal ini sama sekali *tidak dapat diturut*, karena dalam peperangan Asia Timur Raya kita membentuk negara tidaklah dengan *mengangkat kita sendiri menjadi ahli waris daripada kerajaan-kerajaan Belanda*, yang telah jatuh itu. *Cita-cita kita tidak diikat oleh kolonialisme Belanda dan daerah tumpah-darah kita tidak dapat terkepung oleh tanah yang hanya menjadi enclaves* atau sebagian daripada seluruh tanah Indonesia di bawah beberapa kekuasaan imperialism dalam sejarah 350 – 400 tahun yang belakangan ini. Oleh sebab itu *“Hindia Belanda atau tidak”* buat kita *janganlah menjadi ukuran*, melainkan kita tetap pada dasar pertama, yaitu yang akan menjadi daerah Republik Indonesia, *tumpah-darah Indonesia yang bulat*. Tentu saja dalam hal ini untuk sementara waktu ada pertikaian paham. Sekiranya bukan daerah Hindia-Belanda dahulu, maka tentulah Hindia-Belanda meliputi juga Borneo Utara, Portugis Timor, Papua, tanah Melayu. Imperialism dalam hal itu adalah nyata sekali pengaruhnya dalam perjalanan sejarah, tetapi pada waktu ini hendak mendirikan negara kita dengan mengingat *ideologi dan dengan pandangan dunia*. Pembentukan dan pelantikan negara baru menjadi puncak daripada politik meng-Indonesia-kan bangsa kita, maka dengan sendirinya kita tidaklah hendak mengadakan keinginan minimum ataupun suatu keinginan maksimum, melainkan bahwa negara kita selaras dengan dasar yang telah kita majukan itu, ialah kita *hendak berdaulat atas tumpah-darah yang menjadi daerah Indonesia*. Dalam hal ini hanya ada *differentiatie, tertuju kepada tanah Malaya*. Menurut paham saya, maka dalam daerah Indonesiapun hendak dimasukkan tanah Malaya, oleh karena, atas beberapa alasan dan beberapa sebab, ternyatalah dengan sesungguhnya, bahwa hubungan antar tanah Malaya dengan pulau-pulau yang lain di Indonesia seperti tidak dengan tanah lain, melainkan bisa saja seperti dalam bagian dari tumpah-darah Indonesia kita. Pun sejarah

memberi bukti yang jelas bahwa sejak zaman 1200 sampai sekarang tiada berpisah daripada tanah Indonesia, dan menyatakan dengan pasti bahwa *tanah Malaya adalah dalam satu hubungan dengan segala kepulauan yang lain di tanah Indonesia kita ini*. Di antara orang Indonesia yang hidup di tanah Indonesia di sebelah Barat, baik di Borneo Barat, atau seluruh Sumatera, semenanjung Malaya, Jazirah Malaya ada kesatuan hati yang betul-betul merupakan suatu realiteit, yaitu orang-orang di daerah yang disebut tadi mengadakan "*mission sacree*" dan orang Malaya melanjutkan "*mission sacree*" di seluruh Indonesia yang saya sebut tadi itu. Saudara Muzakkir telah memajukan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya; kedua kerajaan itu menyatakan, bahwa *lompatan yang terakhir dari tanah Indonesia menuju Asia, ataupun lompatan yang terakhir dari benua Asia menuju tanah-air kita tidak lain dan tidak bukan selalu Malaya*. Selain daripada sejarah politik, geopolitik menyatakan, bahwa tanah Malaya merupakan satu rangkaian yang tidak dapat *dicerai* dari tanah Indonesia yang lainnya. Rangkaian itu begitu hebat, sehingga peperangan Asia Timur Raya sekarang ini menyatakan lagi, bahwa lompatan ke tanah Indonesia ini dilakukan dari tanah Malaya atau Jazirah Malaka. Trengganau dan Kelantan adalah sebagai jembatan yang paling hebat untuk menuju ke tanah-air kita ini.

Yang ketiga, yaitu bahwa ada juga warisan daripada orang Indonesia untuk bekerja bersama-sama dalam suasana persatuan dengan tanah Melayu. Warisan itu tidak perlu diceritakan dengan panjang lebar, tetapi menurut keyakinan kita, sekarang inilah masa yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sesudah bercerai selama waktu yang lama, sekarang kita bertemu lagi dalam Negara Republik Indonesia.

Tanah Melayu adalah satu pistol yang paling hebat tertuju ke tanah Indonesia, sehingga, kalau tanah Semenanjung itu dilepaskan kepada tangan negara lain, maka dengan sendirinya kekuatan negara Republik Indonesia tidaklah sempurna. Padahal dari permulaan kita bermaksud menjadikan Negara Republik Indonesia negara yang kuat dalam susunan kita.

Oleh sebab itu, mengingat kedudukan itu, dengan selekas-lekasnya persatuan kita luaskan sampai meliputi tanah Melayu. Tentu saja dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama-tama, yaitu dalam soal tanah Melayu termasuk daerah-daerah yang penting, yaitu : Kedah, Perlis dan Trengganau, yang oleh kemurahan politik Tojo diserahkan kepada kerajaan Muang Thai. Hal ini tidak saya bicakan panjang-lebar, tetapi dengantegas saya memajukan keterangan di sini, bahwa tidak saja penduduk Melayu, melainkan penduduk seluruh tanah Indonesia mengharapkan, bahwa kalau Republik Indonesia sudah dilantik,

dengan sendirinya juga daerah yang 4 itu dikembalikan kepada daerah kita, karena menurut azas yang saya katakan tadi, yaitu kita tidak menghendaki berdaulat atas tanah orang lain, tetapi dengan ikhlas dan bersih, kita tidak mau juga melepaskan sejengkalpun kepada kedaulatan asing.

Kesukaran yang kedua, pembagian tanah Melayu atas beberapa kooti.⁹ Tentu saja hal ini dapat kita selesaikan. Kalau kita dalam membentuk Negara Republik Indonesia bersifat jantan, berani menghadapi kesukaran-kesukaran, berani mencari jalan untuk mempersatukan kedaerahan ini dengan daerah Kooti di bawah Republik Indonesia yang kita putuskan tadi.

Soal lain lagi yaitu bahwa penduduk pulau Syonan atau Singapura dan penduduk Jazirah Malaka lebih daripada 50% orang Tionghoa.

Tetapi hal ini hendaklah jangan disinggung sehingga mengecilkan daerah Negara Republik, karena soal bangsa Tionghoa di tanah Melayu memang penting, tetapi tidak begitu penting sehingga dapat melepaskan daerah ini keluar daerah Republik Indonesia.

Dengan ringkas saya terangkan lagi, bahwa kita tetap berpendirian, supaya daerah Negara Indonesia meliputi daerahh Melayu juga dengan memperhatikan soal-soal yang saya sebutkan tadi.

Soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Memang dalam hal ini dalam ilmu pengetahuan, ethnologie, bahasa, geografie ada yang menyebutkan, bahwa pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan, bahwa seluruh pulau Papua masuk Indonesia. Perkataan "Indonesia" dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan, bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan "Indonesia" lahir, dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk ke dalam daerah Indonesia.

Menurut faham geopolitik, pulau papua adalah lompatan yang paling akhir dari kepulauan Indonesia menuju lautan pasifik, dan lompatan itu berarti, lompatan yang pertama dari lautan pasifik menuju tanah kita. Jadi dengan faham geopolitik kita tidak dapat memberikan lompatan ini kepada kekuasaan lain, sehingga untuk menyempurnakan daerah yang berarti kuat dan abadi, perlulah pulau Papua seluruhnya dimasukkan ke dalam Republik Indonesia.

Menurut faham Indonesia sebahagian besar daripada pulau Papua adalah masuk lingkungan tanah dan adat kerajaan Tidore, sehingga dengan sendirinya daerah itu benar-benar daerah Indonesia.

Tuan Ketua, bolehlah saya memperpanjangkan sedikit pembicaraan berkenaan dengan tanah Papua in? Dalam seluruh pergerakan kita di tanah Indonesia, tanah Papua adalah yang memberi bunyi internasional. Digul adalah sebagai puncak pengurbanan daripada penganjur-penganjur kita, sehingga melepaskan tanah Digul keluar daerah Indonesia melanggar perasaan keadilan karena tanah Digul adalah tempat pengurbanan pergerakan kita menuju kemerdekaan. Janganlah mereka yang telah berjuang untuk mendapat kemerdekaan itu, pada waktu gembira karena kita mendirikan Negara Merdeka, dikesilkan dan kita lupakan.¹⁰

Bahwa tanah Papua adalah termasuk tanah Indonesia, bbagi penduduk Timor, Ambon, Tidore, Halmahera, tidak asing lagi. Bagi penduduk pulau-pulau yang saya sebut itu, pulau Papua tidak tercerai dari tanah Indonesia.

Pada perasaan penduduk Maluku tanah Papua adalah sebagian daripada tanah Indonesia, dan sudah berpuluh-puluh tahun lamanya orang Indonesia dari Ambon, Tidore dan lain-lain daerah melakukan usaha di pulau-pulau itu, dan dalam perasaan mereka itu tanah Papua tidak tercerai dari tanah Maluku. Oleh sebab itu, kita harap betul-betul, supaya Papua (sebagai lanjutan pekerjaan orang Indonesia) jangan dilepaskan daripada daerah Indonesia.

Kita membentuk negara untuk bangsa yang akan datang. Dengan sendirinya juga segala pembicaraan-pembicaraan kita dapat dilengkapi dengan perkataan-perkataan lain, tertuju ke tanah Borneo Utara dan daerah lain. Hendaklah juga daerah-daerah itu selengkapny dimasukkan ke dalam daerah tanah Indonesia.

Jadi dengan sendirinya baiklah Borneo Utara dan Borneo Selatan dimasukkan dengan sesempurna-sempurnanya ke dalam kedaulatan negara kita.

Dan kemudian kepada Portugis Timor perlu kita ketahui, bahwa Portugis Timor itu jatuh ke dalam kekuasaan Dai Nippon. Oleh karena kekuasaan Belanda dahulu telah merampas tanah itu daripada tangan orang Portugis, sehingga, setelah kekuasaan Belanda jatuh jatuhlah Portugis Timor itu ke dalam tangan Balatentara Dai Nippon. Saya membicarakan hal ini, karena adalah suatu kebetulan dalam sejarah dunia yang diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, bahwa seluruh daerah yang kita perbincangkan tadi telah bersatu di dalam tangan Balatentara Dai Nippon. Oleh sebab itu maka

bersatu-daerah-daerah itu diserahkan ke bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia, dan jikalau kiranya ada di antara kita yang berfikir akan mengecilkan daerah itu, lebih kecil daripada yang saya sebut tadi, lebih baik turutlah dengan taktik dan juga hikmat kebijaksanaan kita untuk bertemu di dalam daerah yang lebih besar, berpendirian sama untuk menjadikan seluruh tanah tumpah-darah Indonesia daerah negara kita sekarang ini. Dalam hal itu perlulah kita memandang secara riil, karena beberapa daerah yang disebutkan tadi adalah menjadi daerah peperangan. Papua, Morotai, Tidore, Tarakan, Balikpapan sudah menjadi daerah peperangan pada waktu ini. Tetapi pada ketika kita membentuk Negara Indonesia, maka kedaulatan rakyat Indonesia dengan beberapa hal menjadi kedaulatan Negara Republik Indonesia, dan kedaulatan ini tidak saja tertuju kepada bangsa Indonesia, tetapi juga tertuju kepada daerahnya. Dengan sendirinya *souvereiniteit* Republik Indonesia meliputi medan peperangan, dan suara ini juga terdengar oleh dunia: kita tidak melepaskan dia, walaupun daerah itu telah menjadi daerah peperangan. Harusnya kita dalam hal ini bersifat jantan, dan berani memasukkan daerah peperangan ke dalam kedaulatan kita, sehingga ideal dan riil negara-negara atau daerah-daerah peperangan itu jangan dikecualikan, melainkan dengan segala kebersihan dan keberanian hati dimasukkan ke dalam daerah negara kita.

Dalam hal ini perlu kita ketahui, bahwa bagaimana juga lamanya peperangan dunia atau peperangan Asia Timur Raya berjalan, akhirnya tentulah juga akan memuncak di dalam waktu konferensi internasional. Di dalam konferensi internasional tentulah dipersoalkan, tidak boleh tidak, bahwa sungguhlah Republik Indonesia yang meliputi segala tanah tumpah-darah kita, berjuang untuk kemerdekaan – sehingga berdiri merdeka, (dengan bangsa dan daerah yang tersebut tadi).

Dengan ringkas kesimpulan pembicaraan saya yaitu :

1. Daerah tumpah-darah Indonesia adalah daerah kepulauan delapan dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, yaitu : Sumatera dan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Melayu dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Borneo dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Jawa dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Sulawesi dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Sunda Kecil dengan pulau-pulau kecil sertanya, Maluku dengan pulau-pulau kecil di antaranya dan Papua dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, seluruhnya dinamai tanah tumpah-darah Indonesia yang kita ingini menjadi daerah Negara Republik Indonesia yang kita tetapkan tadi.

Sebenarnya perkataan saya bukan keinginan pada waktu sekarang saja. Sejak tanah tumpah-darah Indonesia terbentuk dengan melewati

beribu-ribu tahun sampai kepada jaman Gadjah Mada, ternyata sampai sekarang batas tumpah-darah Indonesia tidak berubah-ubah, sehingga dalam *testamen Gadjah Mada* tersebut sebagai daerah Indonesia tanah-tanah yang saya sebutkan di dalam pidato saya pada pertemuan yang pertama badan penyelidik ini.

2. Kita ambil seluruh tanah Indonesia menjadi daerah Indonesia dan tidak memberikan sejengkal keluar kekuasaan Republik Indonesia yang kita ingini.

Pembicara berikutnya anggota *abdul Kaffar*.

Saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat *Muh. Yamin*, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak Indonesia baru, begitu pula Borneo Utara, di mana terletak Serawak, dan juga negara Papua. Bukanlah kita bersifat meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Saya sebagai anggota pengurus Badan Pembelaan selalu mengikuti gerak-gerik tenaga pemuda di lapangan-lapangan Asia Timur ini.

Bukan saja di Jawa atau di Sulawesi mereka mengalirkan darah dalam peperangan sekarang ini, pun di Birma dan putera Indonesia memberikan darahnya, dengan ikhlas apa lagi di Sonanto dan sebagainya, sedang mereka, putera-putera Indonesia itu pun pula mengejar ilmu pengetahuan, bukan saja di Jawa, tetapi pun di Sonanto mereka menuntut ilmu pelajaran tinggi dan sebagainya.

Jadi itulah alasan, bahwa sewajarnya putera Indonesia mempunyai negara yang tadi telah dibentangkan oleh anggota yang terhormat *Muh. Yamin*. Jadii bukan sekali-kali kita minta, tetapi hal itu memang beralasan.

Dan akhirnya, bilamana pintu-pintu kita itu dapat dijaga oleh kita sendiri, ditutup dan dibuka sesuka kita sendiri, maka barulah tepat penjagaan dalam ilmu *strategie* sempurna. Paduka tuan-tuan juga mengetahui bagaimana garis atau bentuknya kalau kita, umpamanya menarik garis ke Selatan dari teluk Timor melalui lautan, apakah di sana sudah ada penjagaan? Dari situlah tentu datang tiap-tiap perkosaan musuh, artinya di sana mulai tiap-tiap percobaan musuh untuk merebut negara kita. Akhirnya, kalau kita sudah menciptakan atau menentukan garis-garis batas-batas negara sedemikian itu, maka tentulah timbul pertanyaan dari kita sekalian, bagaimanakah cara pembelaan negara : di situlah letak janji kita sehidup semati dengan Dai Nippon sebelum dan sesudah mencapai kemenangan akhir.

Dengan demikian tuan-tuan sekalian dapat mengira-ngirakan bagaimana jalannya dan bagaimana pentingnya tiap-tiap daerah dalam

ilmu penjagaan dan sebagainya. Selanjutnya kami mengusulkan seperti anggota yang terhormat Yamin tadi ialah, bahwa alangkah baiknya; bila penetapan batas negara ini kita serahkan kepada panitia; bilaman panitia sudah membikin rancangan, kita bicarakan bersama-sama.

Ketua Radjiman, menyilakan anggota Sumitro Kolopaking.

Yang terpenting pada waktu ini ialah, supaya kita lekas mencapai cita-cita kita Indonesia Merdeka. Meskipun banyak soal-soal yang belum sempurna 100%, tidaklah jadi apa, asal kemerdekaan ini lekas tercapai. Jikalau kita telah mendapat kemerdekaan itu, dapat segala sesuatu di kemudian hari diperbaiki, dilengkapkan. Sebetulnya hal daerah, soal daerah dalam pandangan saya tidak dapat dipisahkan dari soal yang besar yaitu rancangan Undang-undang Dasar Indonesia Merdeka. Memang bagian inilah yang terpenting. Jadi saya mengikuti dan menyetujui pendapat-pendapat tuan-tuan lain.

Hal ini sebetulnya juga harus termasuk dalam urusan Panitia Kecil yang akan merancang Undang-undang Dasar Indonesia merdeka itu. Buat mempercepat pekerjaan, buat menggampangkan jalannya cita-cita kita, buat saya sendiri, lebih baik pada waktu ini menentukan sebagai daerah kita daerah Hindia Belanda dahulu. Keadaan Indonesia juga dipengaruhi oleh peperangan, itu sudah nyata. Dari sebab itu kita terpaksa mengadakan aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan peperangan ini. Jikalau di dalam peperangan ini juga telah terdapat kemerdekaan, tentu saja aturan-aturan disusun buat sementara waktu. Jikalau peperangan sudah berakhir, dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapi aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu, dengan permintaan Indonesia Merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia Merdeka. Tetapi itulah urusan di kemudian hari. Pada waktu ini kita harus mengadakan usul yang praktis, yang nyata dapat dijalankan, secepat mungkin jangan kita minta keadaan 100% yang tidak mungkin dilaksanakan dalam peperangan, sebab keadaan sehari-hari dipengaruhi oleh peperangan. Asal keadaan bisa berjalan, sedikit demi sedikit kita dapat menambah dengan 5%, 10%, 15%, lama-kelamaan tercapailah Indonesia Merdeka yang bulat. Itulah secara singkat pemandangan saya, tuan Ketua.

Sidang kedua, 11 Juli 1945

Acara : pembahasan tentang wilayah negara

Dalam sidang kedua, melanjutkan pembahasan mengenai wilayah negara. Sidang dibuka oleh ketua yang didahului oleh dua pengumuman.

Pertama, Gunseikan ingin segera memperoleh laporan tentang kemauan rakyat.

Kedua, hendaknya BPUPKI segera menyelesaikan pekerjaannya dan segera dilaporkan kepada Gunseikan.

Hatta sebagai pembicara pertama mengingatkan pendiriannya yang disampaikan pada Rapat tanggal 10 Juli 1945. Waktu itu saya katakan, bahwa *saya tidak minta lebih daripada daerah Indonesia yang dahulu dijajah oleh Belanda.*

Kalau itu seluruhnya diberikan kembali kepada kita oleh Pemerintah Dai Nippon, saya sudah senang. Dahulu saya sudah mengatakan pendapat saya tentang Malaka; *bagi saya, saya lebih suka melihat Malaka menjadi negara yang merdeka sendiri dalam lingkungan Asia Timur Raya.* Akan tetapi kalau sekiranya rakyat Malaka sendiri ingin bersatu dengan kita, saya tidak melarang hal itu. Hanya tentang Papua saya dengar kemarin uraian-uraian yang *agak menguatirkan*, oleh karena dapat timbul kesan ke luar, bahwa *kita seolah-olah mulai dengan tuntutan yang agak imperialistis.* Kemudian saya dengar teori bahwa Malaka dan Papua diminta supaya masuk tanah-air Indonesia berdasarkan strategi. Saya bukan ahli strategi, akan tetapi berhubung dengan pembacaan saya tentang politik internasional, saya mengerti, bahwa strategi itu tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung kepada konstellasi politik dalam lingkungan internasional. Umpamanya Chamberlain mengatakan, bahwa batas Inggris bukan Kanaal melainkan sungai Rijn. Jadi jikalau ini diteruskan, mungkin kita tidak puas dengan Papua saja tetapi Salomon masih juga kita minta dan begitu seterusnya sampai ke tengah laut pasifik. Apakah kita bisa mempertahankan daerah yang begitu luas? Cukupkah tenaga kita untuk menyusun daerah itu semua ke dalam lingkungan tanah-air kita? Oleh karena itu *bagi saya, batas negara bukanlah suatu soal yang dapat ditetapkan secara exact*, tetapi hanyalah soal *opportunism dengan doelmatigheid*, yakni tujuan yang tepat. Tujuan kita yang tepat itu, ialah lingkungan Indonesia yang dahulu dijajah oleh Pemerintah Belanda. Itulah yang tepat, *pun berhubungan dengan politik internasional*, itulah suatu kebulatan yang harus diakui dahulu. Hanya yang menjadi pembicaraan sekarang ialah *pemindahan dari tangan Belanda kepada kita, yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Nippon.* Selain daripada itu, kita harus hati-hati memakai teori-teori seperti yang dikemukakan oleh Mr. Muhd Yamin kemarin tentang tumpah-darah, yang disebutkan dalam bahasa Jerman *Kultur und Boden.*

Itu berbahaya sekali, karena akibat dasar imperialism yang dimajukan oleh Jerman itu dapat kita lihat, ialah bahwa perasaan tidak puas meluap keluar dan mau menjajah Oostenrijk dan Ceko Slovakia (Austria). Akhirnya Jerman mengalami akibat dari-pada nafsu tadi. Maka hendaklah kita mengajak pemuda-pemuda kita – saya sendiri menghargai pemuda-pemuda kita – akan tetapi hendaklah kita mengajak pemuda kita berpikir secara realistis sedikit dan menghilangkan nafsu yang mau meluap ke luar, mengubah tujuannya menjadi meluap ke dalam, membangun negara dengan sebaiknya dan mempertahankan negara kita dengan sehebat-hebatnya. Bagi saya, terutama untuk pemuda kita, hendaklah ditunjukkan minat kepada pertahanan negara. Karena itu maka bagi saya, hal itu hanyalah ini Cuma soal doelmatigheid saja, tujuan yang tepat.

Papua, seperti dikatakan kemarin oleh Mr. Muhd Yamin, menurut penyelidikan akhir tentang ethnologie adalah sebangsa dengan bangsa Indonesia. Mungkin penyelidikan itu betul, tetapi saya belum dapat menerimanya oleh karena kalau kita tinjau dari ilmu pengetahuan – saya banyak terpengaruh oleh tinjauan dari ilmu pengetahuan – maka ilmu selalu mulai dengan twijfel, tidak percaya. Kalau sudah ada bukti, bukti bertumpuk-tumpuk yang menyatakan bahwa bangsa Papua sebangsa dengan kita dan bukti-bukti itu nyata betul-betul, barulah saya mau menerimanya. Tetapi buat sementara saya hanya mau mengakui, bahwa bangsa Papua adalah bangsa Melanesia. Maka jangan pula kita lupa, bahwa bangsa kita di sebelah Timur banyak bercampur dengan bangsa Melanesia, seperti juga bangsa Indonesia di sebelah Tengah dan Barat tercampur dengan bangsa Arab, Tiongkok dan Hindu. Inilah nasib bangsa-bangsa yang hidup di tengah pergaulan internasional, bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Jadi janganlah tanah Papua kita dasarkan pada keadaan yang kita dapat di Timur, yaitu campuran antara bangsa Indonesia dengan Bangsa Melanesia. Mungkin, kalau kita mencari persatuan asal, kita tidak melihat Melanesia, tetapi Polinesia, yang lebih jauh letaknya, di tengah-tengah kepulauan pasifik. Maka saya katakan di sini, bahwa baiklah kita mengambil pendirian yang doelmatig saja dahulu, yang tepat dengan politik internasional dan tepat juga dengan pengakuan Pemerintah Dai Nippon, dan bahwa yang akan dimerdekakan ialah apa yang disebut To Indo, yaitu Indonesia yang dahulu dijajah oleh Pemerintah Belanda dengan sebagian dari Papua. Saya sendiri ingin menyatakan bahwa Papua sama sekali tidak saya pusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Saya mengakui bahwa bangsa Papua juga berhak untuk menjadi bangsa merdeka, akan tetapi bangsa Indonesia buat sementara waktu, yaitu dalam beberapa puluh tahun, belum sanggup, belum mempunyai tenaga cukup, untuk mendidik bangsa Papua sehingga menjadi bangsa yang merdeka. Kemarin, dikemukakan pula, *saya hendak berhati-hati, oleh saudara Abd.*

Kaffar tentang darah yang dikurbankan; saya kira para prajurit Nippon juga banyak mengurbankan darahnya untuk mengusir imperialisme Barat dari Papua, Salomon dan daerah-daerah lain. Janganlah kita memikirkan kita sendiri saja, akan tetapi berikanlah hak kepada Nippon untuk menentukan bagaimana status daerah yang bukan tuntutan kita dulu. Saya *dasarkan batas Indonesia kepada tuntutan kita dulu. Tuntutan kita dulu tidak lebih daripada Indonesia atau daripada Hindia Belanda dulu*, malahan dari dulu, ketika duduk dalam perhimpunan Indonesia, saya sendiri mau mengurangi daerah itu. *Bagian Papua saya serahkan kepada orang lain. Akan tetapi kalau Pemerintah Nippon memberikan Papua yang dulu di bawah Pemerintah Belanda kepada Indonesia, saya tidak berkeberatan, hanya saya tidak menuntutnya dan kalau sekiranya bagian Papua itu ditukar-tukar dengan Borneo Utara, saya tidak berkeberatan, malah bersyukur, karena, seperti saya katakan dahulu, saya tidak minta lebih daripada tanah-air Indonesia yang dulu dijah oleh Belanda, tetapi kalau ditukar memang merupakan satu kebulatan.*

Kemarin tepat Mr. Yamin mengatakan agar janganlah hendaknya di tanah-air kita ada *enclaves*, yaitu bagian yang di dalam tangan orang asing. Seperti dahulu juga saya mengatakan hendaknya itu diserahkan kepada kebijaksanaan Dai Nippon. Sukar juga soal *Pulau Timor* yang sebagian dikuasai oleh Portugal *tidak bisa* itu kita putuskan di sini, kita tidak mau bertindak begitu. Kita menurut status internasional. Biarlah kita serahkan hal itu kepada Dai Nippon. Memang, kita ingin melihat juga agar *enclaves* itu hendaknya janganlah ada, tetapi buat sementara soal itu baiklah diserahkan kepada Pemerintah Balatentara untuk dibereskan. Marilah kita *menentukan dasar tanah-air kita menurut garis internasional yang tetap yaitu Hindia Belanda dulu*. Bagi saya sendiri *tidak ada keberatan, kalau tanah Papua diberikan kepada kita*. Dan tentang Malaka, biarlah diserahkan kepada rakyat Malaka, apakah mereka mau berdiri sendiri ataukah bersatu dengan Indonesia, tetapi janganlah dituntut oleh pihak Indonesia. Seolah-olah kita sebelum mereka, sudah menganjurkan politik imperialisme: mau ini, mau itu. Jadi mengenai Malaka, kalau rakyat Malaka sendiri mau bersatu dengan kita, kita terima mereka dengan dua belah tangan terbuka. Tetapi saya kemukakan di sini *janganlah kita mengeluarkan alasan-alasan yang agak menyerupai semangat imperialistis. Biarlah kita hidup dalam daerah lingkungan kita sendiri. Seumur hidup kita menentang imperialism, janganlah kita memberi kepada pemuda kita anjuran atau semangat imperialism*. Semangat “meluap keluar”. Marilah kita mendidik pemuda kita, supaya semangat imperialism meluap ke dalam, membereskan pekerjaan kita ke dalam, yang memang masih banyak harus diperkuat dan disempurnakan. Sekianlah tuan Ketua keterangan saya tentang batas Indonesia.

Ketua Radjiman, kemudian menyilakan Soekarno

Anggota Soekarno

Paduka Tuan Yang termulia, anggota-anggota yang terhormat !

Saya bukan seorang imperialis, bukan. Hidup saya sejak dari umur 18 tahun sampai umur 43 tahun sekarang ini, 25 tahun lamanya saya abdikan kepada perjuangan melawan imperialism itu. Jikalau saya di sini mengemukakan *pikiran saya tentang luasnya daerah Indonesia*, maka bersihlah pendirian saya itu daripada suatu nafsu hendak menjalankan imperialis di atas suatu bagian tanah air kita. Lebih dahulu juga, berhubungan dengan perjuangan kita yang 25 tahun lamanya itu, saya bisa menyatakan bahwa *perjuangan saya tidak pernah menuntut bahwa Indonesia itu hanyalah Hindia Belanda saja*. Belum pernah saya menyatakan bahwa Indonesia itu adalah *gebied*, daerah yang diperintah oleh Belanda. Bahkan pernah ada suatu waktu di dalam hidup saya bahwa saya *mengenang-ngenangkan suatu Pan Indonesia, satu Pan Indonesia yang meliputi pula di dalamnya bukan saja Malaya dan Papua, tetapi pun kepulauan Pilipina*. Pernah ada suatu tingkatan di dalam jiwa saya yang *mengenang-ngenangkan Pan Indonesia itu*. Tetapi Pilipina telah merdeka. Kedaulatan bangsa Pilipina harus kita hormati, sehingga sekarang pembicaraan *tentang Pan Indonesia sudah tidak akan dijalankan lagi*. Sekarang tinggal kita menentukan: Indonesia yang akan datang itu, bagaimanakah daerahnya?

Tuan-tuan yang terhormat, Dai Nippon Teikoku pada tanggal 7 bulan 9 tahun yang lalu menjanjikan *kemerdekaan To Indo. To Indo no djorai dokuritu!* lalah *Hindia Belanda*, belum pernah dikatakan yang demikian oleh Dai Nippon Teikoku. Bahkan sekarang Dai Nippon Teikoku dengan mulutnya Gunseikanbu, dengan mulutnya Paduka Tuan Kaityoo menanyakan kepada kita, apakah daerah *To Indo itu?* Maka oleh karena itu saya setuju sekali dengan pendirian anggota yang terhormat Mr Yamin kemarin, bahwa tidak ada hukum moral sedikitpun, tidak ada hukum internasional sedikitpun, yang mewajibkan kita menjadi ahli waris daripada Belanda. Kita di sini membicarakan daerah Indonesia itu dengan sadar, mengingat kepentingan tanah-air kita Indonesia sendiri, tidak sebagai ahli waris Belanda, dan tidak diikat oleh sesuatu moral yang diadakan oleh Belanda itu. Saya mufakat sekali dengan pendirian anggota yang terhormat Muhd. Yamin. Sudah banyak sekali alasan-alasan yang beliau kemukakan, sehingga jikalau alasan-alasan itu juga saya katakan di sini, hanya berarti mengulangi apa yang telah dikatakan saja.

Saudara-saudara anggota yang terhormat!

Kita belum sampai ke Volksvotum, kita belum mengadakan pemungutan suara yang jelas, tetapi saya bisa memberitahukan pada tuan-tuan yang terhormat, bahwa di rumah saya ada terletak berpuluhan surat dan

telegram yang asalnya dari Malaya, yang maksudnya minta dipersatukan dengan Indonesia.

Anggota Yamin.

Di luar menanti pemuda-pemuda Malaya tuan ketua !

Ketua Radjiman.

Tuan Yamin, saya minta supaya jangan memutuskan pembicaraan.

Anggota Soekarno.

Kemarin dulupun datang menghadap kepada saya 3 orang pemuda dari Syonanto¹¹ dan mereka pun menyampaikan pesan daripada pemuda-pemuda di Malaya kepada saya, supaya Malayya dimasukkan ke dalam Indonesia. Salah seorang pemimpin Malaya, yang terkenal yaitu, Letnan Kolonel Abdullah Ibrahim menyampaikan pesanan yang meminta supaya Malaya dimasukkan ke dalam daerah Indonesia. Kecuali daripada itu tuan-tuan yang terhormat, kecuali keyakinan saya, bahwa rakyat Malaya sendiri merasa dirinya bangsa Indonesia, merasa dirinya bertaanah-air Indonesia, merasa dirinya bersatu dengan kita, kecuali daripada itu saya berkata, bahwa walaupun ada bahaya akan dikatakan, bahwa saya seorang imperialis, Indonesia tidak akan bisa kuat dan selamat, jikalau tidak seluruh Selat Malaka ada di dalam tangan kita. Jikalau hanya pantai barat saja daripada Selat Malaka di tangan kita dan musuh misalnya menguasai pantai timur daripada Selat Malaka itu, maka itu berarti bahwa keselamatan Indonesia terancam.

Tentang hal Papua, tuan-tuan yang terhormat sekalian, rakyat di Papua saya *tidak mengenal kehendaknya*. Malahan saya mau menerima, bahawa rakyat di Papua belum bisa mengerti politik, tetapi di sini saya sekedar bersandar kepada *kekuatan sejarah* kita yang dulu. Bukalah, tuan-tuan, Negara Kratagama yang ditulis Prapanca. Maka tuan akan membaca di dalamnya beberapa nama tempat dan daerah yang menunjukkan bahwa kerajaan Majapahitpun daerahnya melebar sampai kepada Papua. Kecuali daripada itu, tuan-tuan yang terhormat, di dalam pidato saya yang pertama, di dalam sidang yang pertama, saya telah mengatakan tentang *geopolitik*. Tuhan swt, membuat peta dunia ini dengan penuh kebijaksanaan. Jikalau orang melihat peta dunia, dan dia mengerti apa kehendak Tuhan yang terlukis dip eta dunia.

Lihatlah tuan-tuan di peta dunia gambar kepulauan Indonesia. Nyatalah sekali bahwa itu satu kesatuan. Maka oleh karena itu di dalam sidang ini saya akan *memberikan suara* saya kepada *paham*, bahwa *negara Indonesia merdeka harus meliputi pula Malaya dan Papua* itu saja. Kita bukan waris

orang Belanda. Malaya telah di dalam tangan Dai Nippon Teikoku, Papua telah di dalam tangan Dai Nippon Teikoku, Borneo Utara telah di dalam tangan Dai Nippon Teikoku, Timor bagian Timur, telah di dalam tangan Dai Nippon Teikoku. Kita sekarang tidak akan berbicara dengan Belanda atau dengan Inggris, tetapi kita bicara dengan Dai Nippon Teikoku. Tangan Dai Nippon Teikoku itulah menentukan pula apa yang akan menjadi daerah negara Indonesia itu nanti. Tuan-tuan yang terhormat, demikianlah pendirian saya. Saya ulangi lagi, *saya 100% mupakat dengan pendirian anggota yang terhormat Muhd Yamin.*

Ketua Radjiman, menyilakan pembicara berikutnya Sutardjo Kartohadikusumo.

Saya tidak hendak membentangkan pendirian saya tentang batas Indonesia yang akan merdeka. Maksud saya meminta bicara hanya hendak menambah keterangan tentang apa yang tadi diuraikan oleh P.T. Ir. Soekarno, yang menguatkan pendirian tuan Mr. Muhd Yamin. Keterangan saya ialah begini :

Waktu saya bersama 19 orang saudara-saudara dari Jawa pergi ke Nippon dan singgah di Syonanto. Di situ berkali-kali, berulang-ulang kita diminta mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil dari rakyat di Malaya, tidak saja putera-putera Indonesia yang bertempat tinggal di situ, tetapi juga wakil-wakil dari penduduk Malaya asli. Tidak usah saya ceritakan dengan panjang lebar apa yang dibicarakan di situ, hanya saya hendak menyampaikan keterangan tentang pesan yang berat sekali dari wakil-wakil rakyat di Malaya, yang bunyinya begini :

"Kalau saudara-saudara mendapat kurnia Tuhan nanti bahwa Indonesia dimerdekakan, janganlah hendak memperoleh keenakan sendiri, tetapi ingatlah kepada kita, sebab kitapun sebagian dari bangsa Indonesia. Hendaknya, saudara-saudara jangan lupakan hal itu". Pesan mereka, supaya kalau Indonesia Merdeka, Malaya dimasukkan dalam daerah Indonesia itu.

Malah waktu itu orang-orang meminta disampaikan kepada P.T. Ir. Soekarno, supaya dari Jawa dikirimkan pemimpin-pemimpin yang cakap buat memimpin rakyat di Malaya untuk mencapai persatuan dengan bagian daerah Indonesia yang lain. Ini yang perlu saya kemukakan.

Dan kedua, tentang Papua. Saya hendak mengeluarkan pendapat saya bahwa pada hari yang lain kita boleh membicarakan soal Papua, tetapi soal sekarang, untuk sementara waktu, *kita tunda saja soal Papua.* Tuan Ketua, *satu kali terlepas* dari tangan kita, *nanti Papua itu menjadi benda pertikaian, menjadi benda perselisihan* antara saudara-saudara. Saya harap, mudah-mudahan rapat ini menyelesaikan hal itu.

Ketua Radjiman, menyilakan anggota Agus Salim menyampaikan pendiriannya.

Salah satu tujuan yang mulia, yang terpakai di dalam hukum syariat dalam Islam dan hidup di dalam adat bangsa-bangsa kita Indonesia, yaitu satu perkara yang mustahil menurut paham bangsa Barat adalah: *Mencapai kebulatan pendapat*. Adapun dunia Barat menunjukkan kepada kita cara *musyawarah* sebagai pengganti pertengkaran, *memenangkan suara* yang banyak daripada suara yang sedikit;

Riwayat demokrasi Eropah sudah menunjukkan kepada kita, bahwa suara yang banyak itu hanya sebagian terdiri daripada aliran yang berkeyakinan tepat sedang sebagian besar adalah suara daripada suatu golongan tengah, yang tidak tentu berkeyakinan sama, dan yang baginya pada azasnya sama saja dapat atau tidaknya tercapai sesuatu soal yang disokongnya dengan suaranya, sehingga jikalau golongan yang kecil tidak mau menyerah karena kalah suara saja dan mau beradu tenaga dengan memaksa usaha golongan yang kecil itu bisa juga mendapat kemenangan sebagaimana sudah terbukti dalam beberapa negeri di dunia Barat itu. Di situ bangkit salah satu partai yang meninggalkan segala azas-azas moral yang terpakai oleh partai lain dan yang berkata: *"Kalau dengan menghitung suara barangkali kita kalah, tetapi kalau memakai kepala kita menang"*. Itulah sudah terjadi di dunia Barat dalam zaman akhir ini. Kebetulan cara permufakatan yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi Barat itu. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan, bahwa di situ ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu, jikalau tidak nyata-nyata maksud itu dapat diterangkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain dalam permusyawaratan itu *tidak berkeras menyangkal*, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk dengan ikhlas menjalankan keputusan bersama itu, sehingga bolehlah terbukti betul atau salahnya.

Riwayat dunia tidak dibuat oleh manusia, melainkan oleh Allah ta'ala yang menentukan bagaimana bentuk dan caranya kemudian; oleh karena itu saya minta bicara juga, sebab saya lihat ada satu perkara yang mungkin memerlukan suara kita terhadapnya yaitu berkenaan dengan daerah *tanah Melayu, Serawak, Brunei, Sandakan dan Papua*, yang menjadi pokok pertikaian itu.

Yang satu mengatakan, bahwa kita menghendaki Indonesia Merdeka; kita mengatakan kenyataan itu tidak berhubungan dengan Belanda, tetapi dengan kekuasaan Dai Nippon Teikoku. Oleh Karena itu untuk menghubungkan perjalanan riwayat kita dengan masa sebelum perang ini, nyatalah bahwa yang *terlebih tepat*, yang *boleh menjadi pokok permusyawaratan* kita adalah *"To Indo"* dan *"To Indo"* itu dalam perkataan

internasional memang menjadi salinan daripada *Nederlands Oost Indië*; tidak lain dari-pada itu bukanlah daerah Selatan yang berlainan batasnya dengan *To Indo* itu menurut paham *Dai Nippon*. Sikap bagaimanakah hendaknya yang akan kita pakai? Di sini kita mendengar kesaksian yang dengan nyata-nyata mengatakan, bahwa dengan kebulatan suara tanah Melayu sendiri ingin hendak masuk ke dalam lingkungan Negara Indonesia. Saya tidak tahu, bagaimanakah kehendak *Serawak*, *Brunei*, *Sandakan* tentang itu; tetapi saya percaya, bahwa mereka itu bersama aliran darah dan turunan dengan kita dan memang sudah rapat kekeluargaannya dengan Indonesia dalam abad-abad yang lalu. Artinya kita boleh menetapkan keyakinan, bahwa bangsa-bangsa di situpun tentu ingin hendak masuk kemari. Maka berhubung dengan itu teringat saya kepada Undang-undang Dasar negara yang dikarangkan oleh Weimar, tatkala Jerman setelah sebagai negara kalah dalam perang dunia tidak rela dengan batas-batas negara yang diberikan kepadanya oleh pihak yang menang perang.

Daerah Indonesia Merdeka pertama-tama ialah segala daerah Hindia Belanda Timur yang telah dibebaskan oleh *Dai Nippon* daripada kekuasaan Belanda dan kita bangsa Indonesia tidak ingin memberikan kembali kekuasaan kepada Belanda, kemudian termasuk pula di dalamnya segala bagian daerah dalam kepualauan Indonesia dan daerah tanah Melayu seperti yang menjadi kehendak satu pihak itu dengan menyangkutkan masuknya itu kepada satu syarat, yaitu apabila suara rakyat daerah-daerah itu menyatakan kehendaknya masuk ke dalam Indonesia, dengan memajukan permintaan kepada *Dai Nippon Teikoku*, agar memberi jalan cara bagaimana rakyat-rakyat di tanah Melayu, *Serawak*, *Brunei*, *Sandakan*, *Papua* itu menyatakan kehendaknya itu dalam masa segala kita membicarakan hal ini.

Dengan jalan demikian itu, bukanlah atas dasar suara dua-tiga orang utusan saja yang kebetulan datang, permusyawaratan kita yang diadakan di sini menetapkan keputusan, melainkan keputusan itu berdasar kepada suara rakyat umumnya di dalam daerah-daerah itu. Suara dari tanah Melayu, *Serawak*, *Brunei* dan *Sandakan* dan bagian daerah *Papua* yang penduduknya sudah dapat menyatakan suaranya, hendaklah diberi jalan oleh kekuasaan *Dai Nippon* untuk menyatakan yakin atau tidaknya mereka hendak dimasukkan ke dalam daerah Indonesia Merdeka. Kiranya dengan cara begini hasrat yang didasarkan kepada tarikh lama dan yang didasarkan kepada realiteit, dapat didamaikan.

Ketua Radjiman, giliran berikutnya Maramis.

Dalam usaha akan menetapkan daerah-daerah yang akan dimasukkan dalam Negara Indonesia Merdeka, saya berpendapat bahwa kita tidak hanya harus melihat kepada sejarah bangsa Indonesia, tetapi kita harus melihat juga kepada hukum internasional.

Dalam peperangan ini Dai Nippon telah menguasai beberapa daerah-daerah yang dahulu dikuasai oleh negara-negara yang lain. Saya berpendapat, bahwa, karena Pemerintah Belanda telah meninggalkan negara Belanda di dalam tahun 1940, Pemerintah Belanda itu boleh dianggap tidak ada lagi. Oleh karena itu, karena Dai Nippon telah menduduki negara Indonesia. Dai Nippon sudah bisa menganggap daerah ini sebagai daerah yang sudah takluk kepada Dai Nippon. Akan tetapi daerah-daerah Malaka, Borneo Utara, Timor Portugis dan sebagian daripada Papua, daerah ini dahulu di bawah kekuasaan negara Inggris. Maka oleh karena itu saya berpendapat, bahwa kita mufakat sekali dengan pendapat anggota-anggota Muid. Yamin dan Ir. Soekarno yaitu bahwa kita harus menilik soal itu juga dari sudut hukum internasional.

Seperti saya katakan tadi Indonesia sudah dikuasai oleh negeri Dai Nippon. Kita sudah bisa menetapkan sekarang, bahwa kita suka melepaskan diri dan memang sudah melepaskan diri dari Pemerintah Belanda. Akan tetapi Pemerintah Inggris dan Portugis masih hidup, tuan Ketua. Oleh karena itu harus kita menunggu, bagaimana sikap penduduk Malaya, Borneo Utara, Timor dan Papua yang di bawah kekuasaan negara Inggris.

Tuan Agus Salim telah memberikan jalan, bahwa sebaiknya kita mohon kepada Pemerintah Dai Nippon supaya memberi jalan kepada rakyat Malaka, Borneo Utara, Timor dan Papua yang dikuasai oleh Inggris, untuk *menentukan nasibnya sendiri*, apakah rakyat itu suka bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Saya ulangi lagi, kita harus menilik hal ini, ialah hal menetapkan daerah dimasukkan dalam daerah Indonesia kita, dari sudut hukum internasional.

Ketua Radjiman, menyilakan Sanusi.

Saya akan menerangkan di sini keadaan *watas negara Arabia* sewaktu tertahan oleh karena peperangan. Nabi Besar *menunda adanya watas negara* sampai telah selesai peperangan, meskipun sahabat-sahabatnya meminta akan menetapkan watas negara. Sahabat-sahabat Nabi hendak menetapkan watas negara Arab sampai ke watas negara Syria, tetapi Nabi Besar minta diurungkan usul itu *sampai peperangan selesai*. Oleh sebab itu kita juga harus *mengurungkan ketetapan watas negara, sampai pada waktu peperangan selesai*.

Ketua Radjiman, menyilakan Wakil Ketua Suroso untuk menyimpulkan kemudian diadakan pemungutan suara.

Wakil Ketua Suroso :

Sebelum disetem akan saya terangkan aliran-aliran terhadap batas negara, supaya dengan begitu tuan-tuan dapat memberi suara dengan sebaiknya. Ada tiga aliran yaitu :

1. Memandang batasnya, ialah Hindia Belanda dahulu.
 2. Hindia Belanda dahulu ditambah Borneo Utara, ditambah Papua, ditambah Timor semuanya.
 3. Hindia Belanda dahulu ditambah Malaka, ditambah Borneo Utara, ditambah Papua ditambah Timor dan kepulauan sekelilingnya.
- Jadi apa yang saya tangkap ada tiga aliran.

Anggota Hatta menambahkan :

Pendirian saya, bagi saya Hindia Belanda minus Papua, tetapi saya tidak ada keberatan kalau rakyat Malaka mau masuk Indonesia. Tetapi pendapat saya ialah Hindia Belanda dahulu minus Papua.

Wakil Ketua Suroso, mengoreksi kesimpulannya.

Kalau begitu ada empat.

Anggota Mr. Besar, menyampaikan saran.

"Saya mufakat dengan anjuran tuan Oto agar dibentuk panitia kecil. Hal ini penting sekali, yaitu batas negara kita. Jika disetem, saya kira belum semua begitu mengerti apa yang disetem.

Nanti kita sudah mengeluarkan suara, akan tetapi belum terang akan soalnya. Saya sendiri belum mengerti terang. Dari itu, sebelum dikeluarkan suara, tuan Ketua, baiklah diadakan panitia untuk dalam 10 atau 15 menit, menentukan apa yang harus kita setem. Sebab tadi, tuan Ketua, disebut *Nederlands Indie* dahulu ditambah Borneo Utara dan Papua, akan tetapi usul tuan Agus Salim lain. Dari itu, yang dahulu dinamakan *Nederlands Indie* begitu juga lain-lain yang diberi kesempatan masuk di situ, saya kira belum dimasukkan dalam usul. Kita menunggu siapa yang minta, akan tetapi tidak diterangkan dimana mintanya dalam pembicaraan itu. Pendapat saya hal ini penting, sebab ini bukan hanya hal menetapkan buat keperluan kita sendiri, akan tetapi buat seluruh rakyat. Jadi wajib kita mengeluarkan suara sebetul-betulnya, yaitu apa yang dikehendaki anggota.

Ketua Radjiman, mengulangi bagian yang disusulkan ialah :

1. Hindia Belanda dahulu.
2. Hindia Belanda dahulu, Malaka, Borneo Utara, Papua, Timor dan kepulauan sekelilingnya.

Anggota Hatta, menambahkan :

Ada satu lagi : *Hindia Belanda dahulu ditambah Malaka dipotong Papua.*

Wakil Ketua Suroso, menunjuk *Oto Iskandardinata, Abikusno dan Latuharhary* sebagai anggota komisi.

Anggota Oto Iskandardinata.

"Tuan-tuan yang terhormat, yang ikut mengeluarkan suara ada 66 anggota dan adanya kertas pun 66. Biarpun di antaranya itu, ada yang corak dan bentuknya kertas lain daripada yang dibagikan, tetapi panitia menentukan, ini pun dianggap sah.

Anggota Oto Iskandardinata: melaporkan hasil pemungutan suara.

Paduka tuan Ketua, suara yang dikeluarkan oleh anggota-anggota yang terhormat, ialah 66. Daripada 66 ini, yang jatuh kepada No. 2 ialah 39, kepada No. 1 ada 19, kepada No. 3 ada 6, yang blangko 1 dan kosong lain-lain 1, jumlahnya 66. Jadi dengan pilihan yang baru dilakukan ini yang dipilih, ialah No. 2. Sekianlah. (No. 2 ialah: *Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis dan pulau-pulau sekelilingnya*).

Ketua Radjiman :

"*Saya tetapkan pada saat ini, para anggota yang terhormat, yang diputuskan, yang disahkan hari ini oleh persidangan, yaitu bahwa daerah yang masuk Indonesia Merdeka Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis dan pulau-pulau sekitarnya.*

5) Sidang Kedua, tanggal 15 Juli 1945

Rapat Besar.

Waktu : 10.20 – 13.05, 15.10 – 18.00, 21.10 – 22.11, 22.20 – 23.25.
(08.50 – 11.35, 13.40 – 16.30, 19.40 – 20.41, 20.50 – 21.55 WIB)

Acara : Pembahasan Rancangan Undang-undang Dasar (lanjutan)

Pimpinan : Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat

Ketua Radjiman:

Hari ini kita masuk persidangan untuk merembuk hal Undang-undang Dasar. Saya minta tuan Ketua Panitia menerangkan apa yang perlu diterangkan dalam hal ini.

Anggota Soekarno.

Sekarang saya sebagai Syusa Panitia Perancang Undang-undang Dasar hendak memberi penerangan sekedarnya yang *mengenai Undang-undang dasar yang telah kami susun*. Cara bekerja Panitia membuat rancangan Undang-undang itu ialah dengan mengadakan *satu Panitia Kecil* yang diketuai oleh anggota yang terhormat *Proof. Supomo*, dan nanti pun *Ketua Panitia Kecil itu, Prof. Supomo akan menyambung pidato penerangan saya ini dengan keterangan-keterangan yang lebih lanjut*. Saya di sini sekedar hendak memberi keterangan-keterangan tentang soal dasar, falsafah apakah, *systeem* apakah yang kami pakai sebagai dasar rancangan Undang-undang Dasar yang kita bikin.

Sebenarnya soal *syeteem*, soal dasar, soal falsafah itu, meskipun tidak berupa sebagai keputusan yang nyata daripada Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, sudah kita tentukan. Saya kira, saya boleh mengatakan bahwa *semua anggota-anggota telah memufakati dasar yang dibicarakan di dalam sidang pertama daripada Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, yaitu dasar kekeluargaan atau dasar yang saya namakan dasar gotong-royong*. Tetapi meskipun kita telah dengan diam-diam atau tidak dengan diam-diam menyetujui dasar kekeluargaan atas dasar *gotong-royong ini*, maka sesudah rancangan Undang-undang dasar ini dibagikan di kalangan anggota-anggota, kami panitia didatangi oleh banyak sekali anggota-anggota yang menanyakan apa sebabnya di dalam Undang-undang Dasar, Undang-undang Dasar yang kita rancang, misanya tidak dimaktubkan *hak-hak manusia, hak-hak warga negara*, tidak diterangkan di situ, bahwa kitapun menghendaki di dalam Undang-undang Dasar itu apa yang dinamakan *"droits de l'homme et du citoyen"* atau *"rights of the citizen"*. Kenapa di dalam Undang-undang Dasar ini tidak dinyatakan dengan tegas bahwa misalnya manusia mempunyai hak akan kemerdekaan, bahwa misalnya dijamin keamanan rumah-tangga, bahwa misalnya dijamin kerahasiaan surat, bahwa misalnya dijamin kemerdekaan mengeluarkan pikiran, bahwa misalnya dijamin hak bersidang dan berkumpul dan lain-lain sebagainya?

Tuan-tuan sekalian dan nyonya-nyonya, *kita sekarang duduk di dalam satu saat yang maha penting di dalam sejarah dunia*. Bukan saja saat yang maha penting di dalam sejarah kita, tetapi pun *saat yang maha genting di dalam sejarah dunia*. Kita insaf benar-benar akan perkataan yang dahulu saya pakai sebagai kunci pidato saya, yaitu bahwa kita hidup *di dalam*

saat-saat yang menentukan nasib ratusan tahun, - uren die het lot van eeuwen beheerschen. Bukankah kita sekarang ini mengunci proses kemerdekaan seluruh Asia? Bukankah waktu itu saya katakan, bahwa negara-negara, bangsa-bangsa Asia yang lain telah merdeka, bahwa kita sendirilah yang belum merdeka, tetapi bahwa sekarang ini kita harus menyudahi proses penyelenggaraan kemerdekaan seluruh bangsa-bangsa Asia itu dengan menyelenggarakan kemerdekaan kita sendiri? Tidakkah kita pada hari ini menyudahi sejarah 350 tahun, menyudahi sejarah kolonialisme dan mulai lagi dengan sejarah kemerdekaan?

Pada saat kita menentukan Undang-undang dasar kita itu. Kita sadar betul-betul akan kedudukan kita, bahwa kita pertama memang bekerja buat tanah-air dan bangsa kita, tetapi bukan saja pula untuk tanah-air dan bangsa kita, tetapi sebenarnya *mission sacree* kita adalah *mission sacree* yang lebih luas dari batas-batas tanah-air dan bangsa kita sendiri meluap sampai ke Asia, bahkan meluap sampai seluruh dunia. Kita menyusun tanah-air dan bangsa yang merdeka, tetapi pun kita bekerja untuk seluruh peri-kemanusiaan. Karena kita sadar akan hal itu, sadar pula akan pentingnya pekerjaan kita sekarang ini, ialah pekerjaan yang tidak boleh kita selesaikan dengan gugup, tetapi dengan merenungkan sedalam-dalamnya segala pekerjaan yang sejarah dunia memberikan kepada kita. Kita sekarang menyusun Undang-undang Dasar. Alangkah keramatnya, tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat, Undang-undang Dasar bagi sesuatu bangsa. Tidakkah Undang-undang sesuatu bangsa biasanya didahului sebelum dia lahir, oleh pertentangan paham yang maha hebat, oleh perselisihan pendirian-pendirian yang maha hebat, bahkan kadang-kadang oleh *revolutie* yang maha hebat, dengan pertumpahan darah yang maha hebat, sehingga seringkali sesuatu bangsa melahirkan Undang-undang Dasarnya dengan sesungguhnya di dalam lautan darah dan lautan air mata? Oleh karena itu nyatalah bahwa sesuatu Undang-undang Dasar sebenarnya adalah satu hal yang amat keramat bagi sesuatu rakyat, dan jika kitapun hendak menetapkan Undang-undang Dasar kita, kita perlu mengingat akan kekeramatan pekerjaan itu. Dan oleh karena itu kita beberapa hari yang lalu sadar akan pentingnya dan keramatnya pekerjaan kita. Kita beberapa hari yang lalu memohon petunjuk kepada Allah swt, mohon dipimpin Allah swt, mengucapkan: *Rabbana, ihdinashshiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdhubi 'alaihim waladhdholin*. Dengan pimpinan Allah swt, kita telah menentukan bentuk daripada Undang-undang Dasar kita, bentuk negara kita, yaitu sebagai yang tertulis atau sudah kita putuskan : Indonesia Merdeka adalah rancangan Undang-undang Dasar yang kita persembahkan ini bunyinya: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik.

Sekali lagi tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat, pada saat yang penting di dalam sejarah dunia dan sejarah kita itu, wajib kita merenungkan segala hal dengan sedalam-dalamnya, wajib kita membuka kitab sejarah, histori, sebab sebagai salah seorang mahaguru, yaitu Prof. Sir John Seeley, pernah berkata: "*Wij studeren historie om wijs te worden van te voren*" "*Kita mempelajari sejarah untuk menjadi lebih bijaksana terlebih dulu*". Tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian, bagaimanakah adanya sejarah, jikalau kita melihat sejarah yang belakangan sekarang ini? Di dalam 30 tahun saja, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kita mengalami 2 peperangan, bahkan jikalau saya hendak saksama, saya berkata di dalam 30 tahun itu kita mengalami 3 peperangan;

1. Peperangan dunia I tahun 1914 – 1918,
2. Peperangan 1939, yaitu peperangan dari kaum sekutu melawan Jermania,
3. Kita mengalami peperangan Asia Timur Raya, yang pecahnya sejak J.M.M. Tennenbach pada tanggal 8 Desember beberapa tahun yang lalu memerintahkan kepada segala rakyat Dai Nippon Teikoku untuk mengangkat senjata terhadap kepada Amerika dan Inggris.

Di dalam 30 tahun ini kita mengalami 3 peperangan. Tetapi kalau kita selidiki betul-betul sifat hakekat tiga buah peperangan itu, ternyata bahwa peperangan yang ketiga itu, yaitu peperangan Dai Toa, peperangan Asia timur raya, berdasarkan falsafah yang lain daripada peperangan ke - 1 dan ke - 2. Bahwa peperangan Dai Toa Sensoo ini berakar dalam sistem-sistem pikiran, yang lain daripada peperangan ke - 1, dan ke - 2. Ambillah tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat, misalnya hal yang mengenai kemerdekaan bangsa-bangsa. Di dalam peperangan yang ke - 3 ini, peperangan Dai Toa Sensoo, nyatalah bahwa bangsa-bangsa Asia mendapat kemerdekaan, nyatalah pula bahwa kita di dalam peperangan Dai Toa Sensoo ini mencapai kemerdekaan kita. Tetapi bagaimanakah keadaan di dalam peperangan ke - 1 dan ke - 2, peperangan 1914 – 1918 dan peperangan 1939? Nyata di dalam peperangan ke - 1 dan ke - 2 itu ada suara tentang kemerdekaan, tetapi nyata suara itu tipuan semata-mata.

Tidakkah kita dalam peperangan ke-1 itu mendengarkan suara *self-determination*, hak menentukan nasib diri sendiri. *Selfbeschikkingsrecht der volkeren*.

Tetapi alangkah tercengang bangsa-bangsa Asia, tatkala, sesudah peperangan itu, ternyata bahwa perkataan *self determination* ini hanyalah tipuan semata-mata.

Self-determination ternyata hanyalah sel-determination buat bangsa-bangsa di Eropa Tengah dan Eropa Timur saja. Diadakan self-determination buat bangsa-bangsa Eropa Tengah dan Eropa Timur itu, tidak lain dan tidak bukan oleh karena negara-negara imperialis yang mengadakan semboyan self-determination itu ingin membendung banjirnya komunisme yang datang dari Rusia.

Tidaklah pula nyata kebohongan dasar *falsafah peperangan kedua*? Kita mendengarkan perkataan *Atlantic Charter*. Kita mendengar *democratie* diucapkan, tetapi sekarang *democratie* diucapkan, sekarang *Atlantic Charter* diucapkan, besok Rasjid Ali di Irak ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Sekarang *Atlantic Charter* diucapkan, besok Mahatma Ghandi, Jawaharlal Nehru dan 67 ribu orang India dimasukkan dimasukkan kedalam penjara. Sekarang ada *Atlantic Charter* diucapkan, besok Suria diinjak-injak, Afghanistan hendak dirampas, penjajahan atas mesir dan India diteruskan. Nyata semboyan *democratiedan* semboyan *Atlantic Charter* didalam peperangan ke-2 pun kebohongan adanya.

Didalam semua Undang-undang Dasar negara merdeka, dimasukkan apa yang kita sebut dengan bahasa asing "*les droits de l'home et du citoyen*" atau "*the rights of the citizens*" yaitu hak kemerdekaan tiap-tiap individu, yang berhak atas kemerdekaan, berhak memiliki rumah-tangga, bersidang dan berkumpul. Semuanya itu rancangan Undang-undang Dasar kita Indonesia tidak tertulis terletak dalam Undang-undang Dasar negara-negara yang kita kenal semuanya. Oleh karena itu, melihat Undang-undang Dasar itu beberapa anggota datang kepada kami dan menanyakan apa sebab dalam "*les droits de l'home et du citoyen*" itu.

Mengapa tidak dituliskan hak individu bagi orang-orang Indonesia?

Tuan-tuan yang terhormat, inilah justru yang hendak saya terangkan. Inilah yang menjadi sumber *malapetaka-malapetaka* di dunia ini. Negara-negara di Eropa dan Amerika didirikan di atas dasar hak kedaulatan *staat* yang dinamakan *staatssouvereiniteit*.

Sebenarnya sebagai yang diterangkan oleh Prof. Supomo kemarin, itu sudah mengandung suatu konflik. Hak kemerdekaan manusia sebagai individu, dan hak kemerdekaan kedaulatan *staat* sebagai satu badan pula. Itu sebenarnya sudah mengandung satu konflik, dan sebagai tadi saya terangkan kepada tuan-tuan dan nyonya sekalian, justru pertentangan dalam kebatinan negara-negara, itulah yang membuat dunia Eropa dan Amerika menjadi dunia yang penuh dengan konflik, dengan pergoncangan, dengan *pertikaian klassentrijd*, dengan peperangan.

Kita semuanya mengetahui bahwa paham atau dasar falsafah *individualism* telah menjadi sumber *ekonomisch liberalism*. Adam Smith dengan bukunya yang terkenal yang sebenarnya tidak lain tidak bukan menjalankan teori-teori ekonomi di atas dasar-dasar falsafah yang *individualistis*. Tetapi kita mengenal apakah hasil ekonomi *individualism*, dengan adanya persaingan merdeka.

Dengan adanya *ekonomisch liberalism*, yang bersemboyan: "*laissez faire, laissez passer*" dengan persaingan merdeka, timbullah kapitalisme yang sehebat-hebatnya di negeri-negeri yang merdeka. Timbullah itu oleh karena *ekonomisch liberalism* itu sistim yang memberi hak sepenuh-penuhnya kepada beberapa orang manusia saja, untuk *menghisap, memeras, menindas* sesama manusia yang lain. Inilah sebabnya suburnya kapitalisme dan imperialisme di Eropa dan Amerika itu. Dan kitapun telah mengetahui bahwa justru oleh karena dasar ini kapitalisme sendiri pun merasa dirinya sebagai satu individu yang merdeka, yang merdeka berkembang, merdeka mengadakan *concurrentie*, persaingan yang tidak terbatas terhadap kepada kapitalisme-kapitalisme lain. *Concurrentie* yang demikian ini merasa dirinya merdeka melintasi batas-batas negerinya sendiri, mengulurkannya kepada daerah-daerah lain, negeri-negeri lain di atas dunia. Kapitalisme yang demikian ini menimbulkan imperialisme. Itulah yang sebagai di sini telah saya terangkan asalnya daripada kapitalisme, kapitalisme yang asalnya daripada *ekonomisch liberalism*, yang *ekonomisch liberlisme* daripada *individualisme*. Dengan adanya imperialisme itulah, kita 350 tahun tidak merdeka, maka India tidak merdeka, maka Mesir tidak merdeka, maka negara-negara lain tidak merdeka. Tadipun saya terangkan tentang persaingan merdeka, tidak ada satu paham persaingan, tidak ada ssatu *concurrentie* yang tidak mengandung satu konflik di dalam batinnya. Maka oleh karena itu penuhlah dunia dengan konflik. Terutama sekali dengan adanya telegram yang membuat suara bisa terdengar dalam satu detik, lalu-lintas yang membuat satu dunia menjadi rapat. Dengan adanya tehnik modem ini, menjadilah konflik semakin hebat. *Internationale diplomatiek* selalu selalu menunjukkan konflik-konflik yang terkandung dalam kalbu bangsa-bangsa. *Internationale diplomatiek* itu adalah hasil daripada konflik-konflik itu tadi. Maka oleh karena adanya konflik-konflik itu di dalam masing-masing bangsa, timbullah perasaan nasionalisme yang sempit, rasa nasionalisme yang mau menyerang, rasa nasionalisme yang agresief yang di dalam kalbu bangsa Inggris misalnya menimbulkan semboyan "*Rule Britannia, rule the waves, Britains never shall be slaves*", yang dalam kalbunya bangsa Jerman menimbulkan semboyan "*Deutschland uber alles*", pendek kata nationalism sempit yang membenci kepada bangsa lain, dan hendak

menentang bangsa lain. Akhirnya terjadilah segala malapetaka yang telah membawa bencana kepada segenap perikemanusiaan.

Bahwa dasar falsafah negara-negara Eropa dan Amerika itu adalah benar falsafah yang salah. Apakah kita hendak menjadi satu bangsa yang akan mendapat nasib yang sama dengan bangsa-bangsa yang telah saya gambarkan?

Saya yakin “tidak”. Sebab dasar yang demikian itu telah menimbulkan kapitalisme, imperialisme, peperangan. Dasar falsafah yang demikian itu tidak boleh tidak tentu hancur-lebur, oleh karena apa? Oleh karena tenaga-tenaga penentang yang ada di dalam batin sendiri, menghancurkan-segenap system yang didasarkan atas dasar individualisme itu.

Tuan-tuan mengetahui, bahwa di negeri-negeri jajahanpun timbul tenaga penentang yang hebat. Dengan adanya gerakan kemerdekaan dari bangsa-bangsa yang terjajah, niscaya nanti jatuh gugurlah karena tenaga penentang yang ada dalam batin itu sendiri.

Tenaga-penentang yang datang dari kalbu bangsa-bangsa yang dijajah. Terutama sekali di Asia. Gerakan India, Mesir, Filipina, Birma, Tiongkok, Indonesia, semuanya itu sebenarnya adalah tenaga-penentang yang dilahirkan oleh dasar yang salah itu.

Apa sebabnya, bangsa Asia seluruhnya serempak gembira dengan kemenangan Dai Nippon pada Rusia tahun 1905? Oleh karena dalam kalbu seluruh bangsa Asia semua terkandung kehendak menentang segala pengaruh daripada imperialisme itu.

Apa sebabnya ada rasa kekecewaan dalam kalbu bangsa-bangsa Asia, sesudah Dai Nippon Teikoku telah menaklukkan Rusia? Menurut fikiran bangsa Asia, Dai Nippon Teikoku kemudian bekerja terlalu rapat, terlalu bersahabat dengan negara-negara imperialisme. Apa sebab kita seluruh bangsa-bangsa Asia sedikit kecewa kepada politik demikian, yang dijalankan oleh Dai Nippon Teikoku? Tidak lain tidak oleh karena rasa menentang tidak merasa puas dengan adanya politik Dai Nippon Teikoku yang terlalu rapat kepada negara-negara imperialisme.

Tetapi mulai dengan tahun 1933, Dai Nippon Teikoku meninggalkan politik persahabatan dengan negara-negara imperialisme, meninggalkan kursi *Volkenbond*, menjalankan politik yang semata-mata dipusatkan kepada Asia,, hiduplah lagi kegembiraan itu.

Tuan-tuan dan nyonya-nyonua yang terhormat !

Kegembiraan itu timbul pula daripada keyakinan seluruh bangsa Asia, bahwa untuk menghancurkan, mengugurkan imperialisme yang hendak menguasai bangsa-bangsa Asia, adalah syarat mutlak, yakni Persatuan segenap bangsa-bangsa Asia. Persatuan segenap tenaga gerakan Asia. Persatuan segenap tenaga-penentang, pemberontakan dari segenap bangsa Asia. Coordinatie daripada tenaga-tenaga itu, mengetahui, terjadilah di dalam perang Dai Toa sekarang ini.

Alhamdulillah, kemerdekaan kita, diadakan, dilahirkan, di dalam perang, Alhamdulillah digembleng dengan palu-godamnya perang. Kini mendapat kemerdekaan bukan di dalam sinar bulan purnama, tapi kemerdekaan yang ditempa dalam api peperangan dan dengan palu-godam peperangan. Kemerdekaan yang demikian, akan lebih kuat daripada kemerdekaan yang didapat dalam sinar bulan purnama. Tapi ada lagi satu syarat mutlak untuk memberi kekuatan dasar filsafat, ialah dasar filsafat yang benar. Kita mengadakan kemerdekaan, mengadakan Undang-undang yang berdasar kepada filsafat bangsa-bangsa Eropa dan Amerika itu, bahwa kalbu kita akan penuh dengan konflik, bukan saja konflik di dalam negeri, konflik antara kaum buruh dan majikan, konflik antara golongan ini dan itu, konflik antara faham dengan faham, tetapi pula konflik ke luar negeri. Jikalau semua bangsa-bangsa Asia Timur Raya satu-persatunya, mengikuti contoh yang salah dari Amerika dan Eropa, kalau umpamanya bangsa-bangsa Asia satu-persatu mengikuti faham individualisme amerika dan Eropa, di dalam tempo tidak lebih dari sepuluh tahun akan menyala-nyala dengan api peperangan; bukan lagi api peperangan antara Sekutu dengan kita, tetapi api peperangan antara kita dengan kita. Buanglah sama sekali faham individualisme itu, janganlah dimasukkan dalam Undang-undang Dasar kita yang dinamakan "*rights of citizens*".

Kita telah menentukan di dalam sidang yang pertama, bahwa kita menyetujui kata keadilan sosial dan *preamble*. Keadilan sosial inilah protes kita yang maha hebat kepada dasar individualisme, demokrasi yang berdasarkan liberalism itu. Jaures menyatakan bahwa di dalam liberalism, maka parlemen menjadi rapat raja-raja. Di dalam liberalism tiap-tiap wakil yang duduk sebagai anggota di dalam parlemen berkuasa seperti raja? Kaum buruh yang menjadi wakil dalam parlemenpun berkuasa sebagai raja. Dia bisa menggugurkan rancangan-rancangan yang dibuat oleh pemerintah. Dia bisa menggugurkan menteri-menteri daripada singgasananya. Tetapi pada saat yang ia berkuasa sebagai raja. Pada saat itu pula dia adalah budak belian daripada si majikan, dia adalah budak belian daripada si majikan, yang bisa melemparkan dia dari pekerjaan, sehingga ia menjadi orang miskin yang tidak punya

pekerjaan. Inilah konflik dalam kalbu liberalism yang telah menjelma dalam *parlementaire demokrasi* bangsa-bangsa Eropa dan Amerika.

Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa *grondwet* menuliskan, bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan suara, kemerdekaan hak memberi suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau misalnya tidak ada *sociale rechtvaardigheid* kelaparan. *Grondwet* yang berisi "*droit de l'homme et du citoyen*" itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalism daripadanya.

Kita rancangan Undang-undang Dasar dengankedaulatan rakyat, dan bukan kedaulatan individu.

Kedaulatan rakyat sekali lagi, dan bukan kedaulatan individu. Inilah menurut faham Panitia Perancang Undang-undang Dasar, satu-satunya jaminan, bahwa bangsa Indonesia seluruhnya akan selamat di kemudian hari. Jikalau faham kita inipun dipakai oleh bangsa-bangsa lain, itu akan memberi jaminan akan perdamaian dunia yang kekal dan abadi.

Dahulu kita pernah membaca kitab yang dikarang oleh Colijin. Di dalam kitab itu Colijin mengatakan dengan mencemoohkan dan mencerca pahlawan-pahlawan yang kita hormati dalam pernyataan kemerdekaan kita, dengan mencerca rakyat-rakyat Aceh. Pangeran Diponegoro, pahlawan-pahlawan pergerakan nasional dalam melawan bangsa Belanda, dalam bahasa Belanda: "*Het zijn muitende lafaards*" : dikatakan bahwa pahlawan-pahlawan nasional kita itu, tidak lain dan tidak bukan ialah : pengecut-pengecut yang memberontak. Marilah kita tunjukkan sekarang pada saat yang genting dan penting ini, keberanian kita di hadapan seluruh dunia; pertama-tama keberanian menyatakan kemerdekaan kita, walaupun Sekutu hendak merebutnya kembali, walaupun barangkali tiap-tiap manusia yang hadir di sini, jikalau musuh datang mendarat, akan dipentang di tembok dan akan ditembak dengan pelor ke dalam kepalanya. Marilah kita menunjukkan keberanian kita dalam menjunjung hak kedaulatan bangsa kita, dan bukan saja keberanian yang begitu, tetapi juga keberanian merebut faham yang salah di dalam kalbu kita. Keberanian menunjukkan, bahwa kita tidak hanya membebek kepada contoh-contoh Undang-undang Dasar negara lain, tetapi membuat sendiri Undang-undang yang baru, yang bersifat kefahaman keadilan yang menentang individualisme dan liberalism yang berjiwa kekeluargaan dan gotong-royong.

Sekianlah anjuran saya. *"Buanglah tiap-tiap individualisme"*, mufakatilah Undang-undang Dasar yang kita persembahkan ini.

Ketua radjiman:

Saya persilahkan tuan Hatta

Anggota Hatta:

Pokok-pokok yang dikemukakan oleh Syusa Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar, saya *setujui*. Memang kita harus menentang individualisme dan saya sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang untuk menentang individualisme. Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya *kuatirkan*, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungan kepada rakyat dalam Undang-undang Dasar yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara, yaitu bahwa nanti di atas Undang-undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi suatu bentukan negara yang tidak kita *setujui*. Sebab dalam hukum negara *sebagai sekarang ini mungkin timbul suatu keadaan "cadaver discipline"* seperti yang kita lihat di Rusia dan Jerman. *Inilah yang saya kuatirkan*. Tentang memasukkan hukum yang disebut *"droits de l'homme et du citoyen"*, memang tidak perlu dimasukkan disini, sebab itu semata-mata adalah syarat-syarat untuk mempertahankan hak-hak orang seorang terhadap kezaliman raja-raja di masa dahulu. Hak-hak ini dimasukkan dalam *grondwet-grondwet* sesudah Franse Revolutie semata-mata untuk menentang kezaliman itu. Akan tetapi kita mendirikan negara yang baru. Hendaklah kita *memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin jangan menjadi Negara Kekuasaan*. Kita menghendaki negara pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasar kepada gotong-royong, usaha bersama; tujuan kita ialah membaharui masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu fasal, *misalnya fasal yang mengenai warga-negara*, disebutkan juga di sebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya *tiap-tiap warga-negara jangan takut mengeluarkan suaranya*. Yang perlu disebut di sini hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. Formuleringnya atau redaksinya boleh kita serahkan kepada Panitia Kecil. Tetapi tanggungan ini perlu untuk menjaga, supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita mendasarkan negara kita atas kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat bisa dipergunakan oleh negara, apa lagi menurut susunan Undang-undang Dasar sekarang ini yang menghendaki kedaulatan rakyat yang kita temui di dalam majelis permusyawaratan rakyat dan penyerahan kekuasaan kepada Presiden, ialah Presiden jangan sanggup menimbulkan suatu negara kekuasaan. Jadi

bagaimanapun juga, kita menghargai tinggi keyakinan itu atas kemauan kita untuk menyusun negara baru, tetapi ada baiknya jaminan diberikan kepada rakyat, yaitu hak untuk *merdeka berfikir*. Memang ini agak sedikit berbau *individualisme*, tetapi saya katakan tadi bahwa ini bukan *indivudulisme*.

Juga dalam *collectivisme* ada sedikit hak bagi anggota-anggota *collectivisme*, anggota-anggota dari keluarga itu untuk mengeluarkan perasaannya untuk mengadakan, menjadikan badan *collectivisme* itu dengan sebaik-baiknya. Usul saya ini tidak lain dan tidak bukan hanya menjaga supaya negara yang kita dirikan itu ialah *negara pengurus*, supaya *negara pengurus* ini nanti jangan menjadi *negara kekuasaan*, *negara penindas*. Dasar yang kita kemukakan adalah dasar *gotong-royong* dan usaha bersama. Pendek kata dasar *collectivisme*.

Ketua Radjiman:

Saya minta terlebih dulu supaya tuan Supomo menjelaskan artikel-artikel itu. Saya persilahkan tuan Supomo maju naik mimbar.

Anggota Supomo

Pertama saya minta maaf, saya tidak pandai berbicara dan uraian saya tidak saya tulis dengan lengkap, hanya saya menulis soal-soal saja yang hendak saya kemukakan.

Undang-undang Dasar, di sini perlu kami terangkan, bahwa dalam agenda disebut "*hukum dasar*", akan tetapi saya dengan sengaja memakai perkataan "*Undanag-undang Dasar*". Apa sebabnya? Kita dalam membicarakan atau merancang peraturan yang resmi, yang akan mempunyai kekuatan Undang-undang, harus berdisiplin dalam memakainya kata-kata Undnag-undang. Kita harus memakai istilah-istilah hukum juga untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Di Jakarta ada suatu panitia yang bernama *Hooten Seibi linkai* untuk menetapkan *istilah-istilah hukum*. Anggota-anggota panitia itu diangkat oleh P.Y.M. Gunseikan dan saya sendiri menjadi ketua dari panitia itu. Maka atas anjuran panitia ini istilah : "*hukum*" itu dipakai sebagai salinan dari istilah : *recht* dalam bahasa Belanda. Artinya hukum itu bisa tertulis atau tidak tertulis. Jadi segala *recht* yang tertulis dan yang tidak tertulis dapat disalin dengan perkataan "*hukum*" akan tetapi Undang-undang itu justru hukum yang tertulis. Oleh karena kami *merancang hukum dasar yang tertulis* maka saya memakai perkataan "*Undang-undang Dasar*", jadi belum *hukum dasar*.

Undang-undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui

keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar Undang-undang itu. Oleh karena itu segala pembicaraan di dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan Undang-undang Dasar ini sangat penting oleh karena segala pembicaraan disini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya Undang-undang Dasar ini.

Tuan-tuan dan nyonya-nyonya tentu sudah membaca ini. Pasal 23 ayat ke-5 berbunyi :

“Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang”.

Ayat ini dikurung, tetapi kurungan ini salah, jadi kurungan ini harus dihilangkan.

Pasal 36 berbunyi :

“Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyelenggarakan dengan semupakat Pemerintah Balatentara Dai Nippon mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintah Indonesia”.

Perkataan menyelenggarakan yang pertama itu salah dan harus *dicoret, jadi bunyinya :*

“Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan semupakat Pemerintah Balatentara Dai Nippon mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintah kepada Pemerintah Indonesia”.

Sebelum saya menerangkan beberapa pasal, tidak usah semua pasal diterangkan, ada banyak pasal yang dengan sendirinya tuan-tuan sudah mengerti – sebagai tambahan dari penerangan dari paduka tuan Soekarno yang panjang lebar tadi saya hendak memajukan beberapa hal. Kemarin sidang ini telah menerima *pembukaan, preambule, dari Undang-undang Dasar*, telah menerima dengan suara bulat *pembukaan ini*, maka *pembukaan ini* mengandung cita-cita luhur dan pokok-pokok pikiran tentang dasar dan tentang sifat-sifatnya negara Indonesia yang hendak kita bentuk. Saya percaya bahwa tuan-tuan sekalian sudah mengerti betul-betul apakah artinya *pembukaan itu*, apakah isinya *pembukaan itu*, akan tetapi oleh oleh karena kita hendak membicarakan isinya rancangan Undang-undang Dasar, maka marilah kita sekarang menyelidiki dengan sepatah dua patah kata, marilah kita menginsyafkan diri dahulu apakah cita-cita dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam “*pembukaan*” itu, oleh karena atas cita-cita dan pokok-pokok itu Undang-undang Dasar harus dibentuk. Dengan menerimanya *pembukaan tersebut* kita tidak bisa bertindak lain dari pada membentuk Undang-undang Dasar yang berdasar atas aliran pikiran yang termasuk dalam *pembukaan ini*. Tadi dengan panjang lebar sudah diterangkan oleh anggota Tuan Soekarno bahwa dengan menerimanya

pembukaan ini kita telah menolak aliran pikiran perseorangan. Kita menerima dan menganjurkan aliran pikiran kekeluargaan. Oleh karena itu Undang-undang Dasar kita tidak bisa lain, harus juga mengandung sistem kekeluargaan.

Jikalau kita membuat suatu Undang-undang, Undang-undang itu *harus mempunyai sistem*. Maka dalam Undang-undang Dasar negara itu, segala pasal-pasal harus sesuai dengan *sistem hukum* yang dipakai dalam Undang-undang itu, artinya dalam Undang-undang Dasar pasal-pasalannya tidak boleh mengandung aliran-aliran pikiran yang bertentangan satu sama lain. Misalnya dalam Undang-undang Dasar kita *tidak boleh memasukkan pasal-pasal yang tidak berdasar aliran kekeluargaan*

Apakah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam “pembukaan” Undang-undang Dasar ini?

1. “Negara” – begitu bunyinya – yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini kita menolak bentukan negara yang berdasar atas individualisme dan juga kita bentukan negara sebagai “*klasse-staat*”, sebagai negara yang hanya mengutamakan satu *klasse*, satu golongan seperti bentukan negara menurut sistem Soviet, yang mengutamakan golongan pekerja dan tamni.
Dalam pembukaan ini kita menerima aliran pengertian negara persatuan yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh kita lupakan
2. Negara yang berdasar atas hidup kekeluargaan, akan menyelenggarakan dasar itu bukan saja ke dalam, akan tetapi juga keluar. Hal ini telah termaktub dalam “pembukaan” yang berbunyi : “negara menyuburkan hidup kekeluargaan Asia Timur Raya”. Jadi dengan ini, kita akan membentuk negara yang berdasar atas kekeluargaan, tidak saja terhadap dunia dalam negeri, akan tetapi juga terhadap dunia diluar negeri, yaitu terhadap persaudaraan bangsa-bangsa dalam lingkungan Asia Timur Raya. Dengan inipun kita insyaf kepada kedudukan Indonesia sebagai negara dalam lingkungan Asia Timur Raya.
3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam “pembukaan”, ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang pada waktu persidangan Dokuritu Zyunbi Tyosakai yang pertama telah saya uraikan.
4. Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas ke-Tuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang

adil dan beradab. Oleh karena itu Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

5. Aliran pokok pikiran yang kelima dalam pembukaan, ialah negara Indonesia memperhatikan keistimewaan penduduk yang terbesar dalam lingkungan daerahnya, ialah penduduk yang beragama Islam. Dengan terang dikatakan dalam “pembukaan” kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dengan itu negara memperhatikan keistimewaan penduduk yang terbesar, ialah yang beragama Islam. Sebagai kemarin dengan panjang lebar telah diuraikan dan sesudahnya tuan Abikoesno berpidato, telah dimupakati dengan suara bulat, maka perkataan-perkataan ini hasilnya kompromis “Gentlemen agreement”, dari dua golongan yang dinamakan *golongan kebangsaan dan golongan agama*. Oleh karena itu pasal ini harus kita pegang teguh, supaya dapat mempersatukan dua golongan itu. Gentlemen agreement itu berarti memberi dan menerima atas dasar kompromis itu. Kedua pihak tidak boleh menghendaki lebih daripada yang telah termuat dalam kompromis. Sebab kalau tidak begitu, kita akan melanggar dasar kemanusiaan dan dasar keutamaan yang telah kita terima dalam pembukaan. Panitia perancang Undang-undang Dasar, dimana termasuk anggota-anggota baik dari golongan Islam, yaitu Tuan-tuan Kiai Wachid Hasim dan Agoes Salim, maupun dari golongan lain, misalnya Tuan-tuan Latuharhary dan Maramis, menerima dengan bulat pasal 28 bab 11 Agama, yang bunyinya: 1. Negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sebetulnya menurut Gentlemen agreement, pembukaan saja sudah cukup, akan tetapi kita maju selangkah, memasukkan juga dalam Undang-undang Dasar perkataan tersebut.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Sekali-kali bukan maksudnya kompromis tadi untuk membatasi kemerdekaan penduduk untuk beragama lain, sama sekali tidak ! Kita menghendaki dasar ke-Tuhanan dan dasar kemanusiaan dan atas dasar-dasar itu kita menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Sekali lagi atas dasar kompromis tadi golongan kebangsaan tidak boleh mengurangi jaminan kepada golongan Islam dan sebaliknya golongan Islam tidak boleh minta tambahan jaminan lagi terhadap agama Islam. Sudah tentu golongan Islam yang merupakan golongan yang terbesar dari masyarakat Indonesia, akan merasa terjamin sebesar-besarnya dalam negara ; 95% dari penduduk beragama Islam. Oleh karena besarnya golongan ini, golongan Islam tentu mempunyai pengaruh besar di dalam lapangan apapun juga.

Demikian Paduka Tuan Ketua, aliran-aliran pikiran yang terkandung dalam “Pembukaan” Undang-undang Dasar itu. Kita hendak membentuk negara yang modern, artinya yang insyaf kepada kedudukan Indonesia

di dunia umpamanya dan di Asia Timur Raya pada khususnya dan yang insyaf juga kepada aliran jaman, misalnya yang hendak ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian dan keadilan sosial. Inilah sidang yang terhormat, pokok-pokok pikiran yang telah kita terima, dan Undang-undang Dasar harus menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal-pasal. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan, (*geistlicchen Hintergrund*) dari Undang-undang Dasar kita. Pokok-pokok pikiran ini mengisi suasana batin Undang-undang Dasar Indonesia; pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar yang tidak tertulis, ialah hukum dasar yang akan timbul dan terpelihara dalam praktek pemerintahan negara Indonesia. Memang jikalau kita hendak menyelidiki hukum dasar suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasar saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya dari Undang-undang Dasar itu.

Rancangan Undang-undang Dasar hanya memuat 35 pasal. Pasal lain-lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rancangan ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya dengan Undang-undang Dasar Pilipina, akan tetapi sebagai Undang-undang Dasar singkat, sama sifatnya dengan misalnya Undang-undang Dasar Dai Nippon Teikoku, malahan lebih singkat. Maka saya menganggap telah cukup jikalau Undang-undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok dari pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, menurut pendapat panitia lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada Undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut. Demikian sistem rancangan Undang-undang Dasar panitia.

Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh jaman berubah, terutama pada jaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (*Gestaltung*) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah.

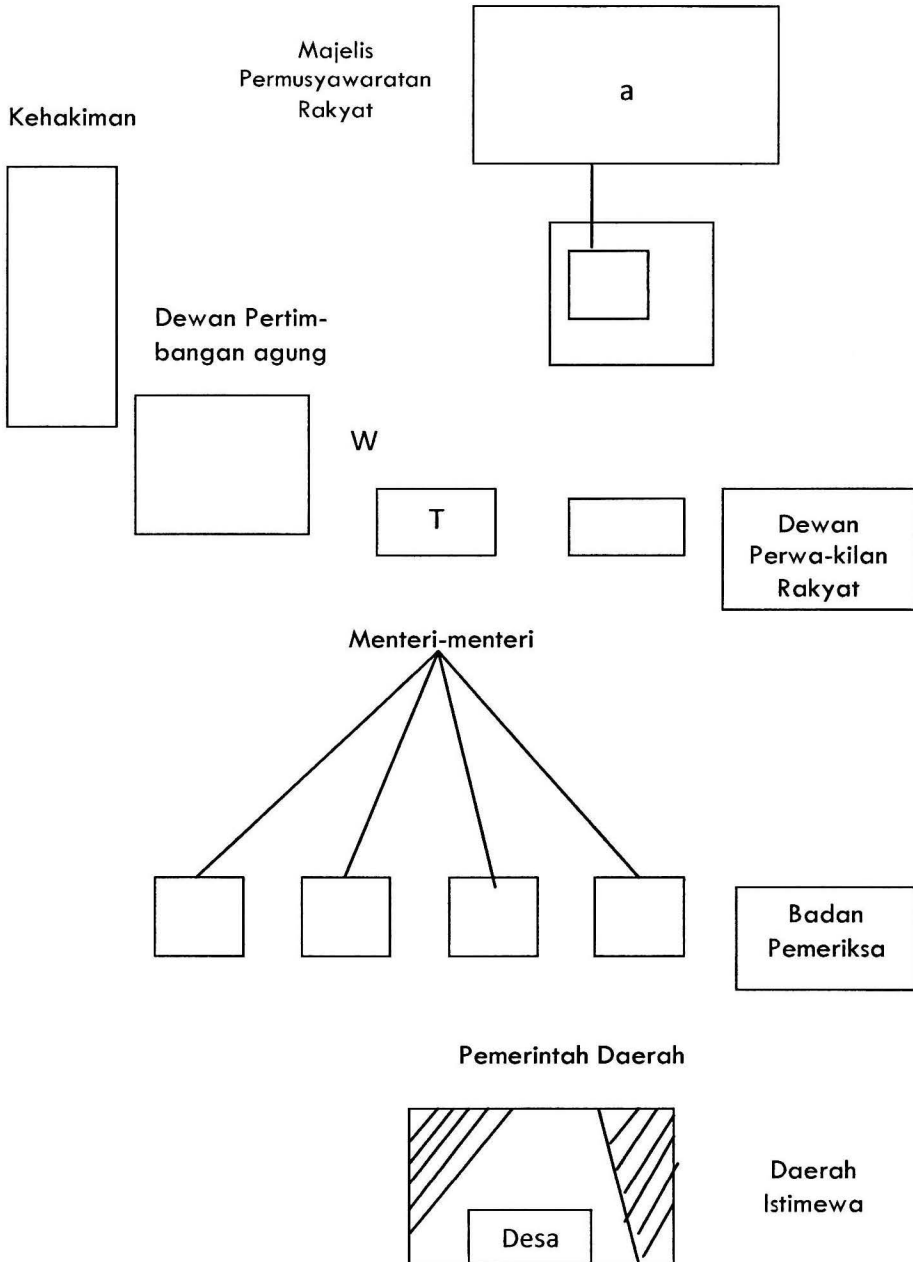
Memang sifatnya aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin "supel" sifatnya aturan itu, makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistem Undang-undang Dasar jangan sampai ketinggalan jaman. Jangan sampai kita membikin Undang-undang yang lekas usang (*verouderd*). Saya insyaf sedalam-dalamnya, bahwa rancangan panitia itu jauh dari sempurna, memang kami hanya manusia belaka dan juga bukan ahli. Oleh karena itu kami mengakui betul-betul, bahwa pekerjaan kami tidak sempurna. Kami mencoba merancang Undang-undang Dasar yang bersifat "supel". Apa yang sekarang termuat dalam rancangan kami, barangkali tidak akan ketinggalan jaman.

Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun kita membikin Undang-undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya meskipun Undang-undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup atau dengan lain perkataan dinamis. Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok saja harus kita tetapkan dalam Undang-undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada Undang-undang.

Bentuk negara kesatuan (*eenheidsstaat, unie*) telah ditetapkan dalam ayat 1 dari pasal 1 bab 1 : Bentuk dan kedaulatan negara "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik". Ayat 2 dari pasal tersebut mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat : "Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Kedaulatan adalah ditangan rakyat, yang menjelma dalam *Majelis Permusyawaratan Rakyat*. Dengan lain perkataan : Majelis Permusyawaratan rakyat, ialah penyelenggara negara yang tertinggi. Majelis itu sebagai penjelmaan seluruh rakyat seluruh daerah dan seluruh golongan mempunyai wakil disitu. Susunan dan bentuknya Majelis itu diatur dengan Undang-undang. Pasal 17 ayat 1 rancangan Undang-undang Dasar menetapkan, bahwa *Majelis Permusyawaratan rakyat* harus terdiri atas anggota-anggota *Dewan Perwakilan Rakyat* ditambah dengan *utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan*. Dengan ayat ini, panitia berkeyakinan bahwa seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis Permusyawaratan rakyat sehingga majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai *penjelmaan rakyat*, yang memegang kedaulatan negara. Sudah tentu badan yang begitu besar jumlah anggotanya tidak bisa dan juga tidak perlu bersidang saban hari. Maka Majelis itu, menurut ayat 2 dari pasal 17 akan bersidang sedikit-sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibukota negara. Sedikit-dikitnya jadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari satu kali.

Pekerjaan Majelis ditegaskan dalam pasal 18 : "*Majelis Permusyawaratan rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara*".

Rancangan Bentuk Pemerintahan Negara



Oleh karena Majelis Permusyawaratan memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas. Majelis ini bersidang 5 tahun sekali sedikit-dikitnya. Mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam 5 tahun Majelis Permusyawaratan Rakyat memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk dikemudian hari. Jika perlu, Majelis dapat merubah Undang-undang Dasar. Dengan isitem ini panitia yakin, bahwa Undang-undang Dasar senantiasa dapat disesuaikan dengan aliran zaman.

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan rakyat, ialah Badan yang mengangkat Kepala Negara. Hendaknya Kepala Negara itu diberi gelar "Presiden". Majelis Permusyawaratan Rakyat mengangkat juga satu atau dua wakil Presiden. Undang-undang Dasar memberi kelonggaran, jikalau perlu dapat mengangkat dua wakil presiden. Ini tergantung dari pada keadaan dalam negara.

Menurut keyakinan panitia, pada saat peperangan sekarang ini perlu diadakan dua wakil presiden. Presiden dalam pekerjaannya sehari-hari dibantu, oleh Wakil Presiden. Jika Presiden berhalangan, Wakil Presiden melakukan kewajiban Presiden. Wakil Presiden mempunyai kedudukan sangat tinggi. Kedudukannya tidak tergantung dari Presiden, oleh karena Wakil Presiden diangkat juga oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut pasal 142 Presiden dibantu juga oleh suatu Dewan Pertimbangan Agung (Raad van State). Susunan dewan ini ditetapkan dengan Undang-undang. Dewan ini memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah. Dewan ini ialah "komon" Pemerintah.

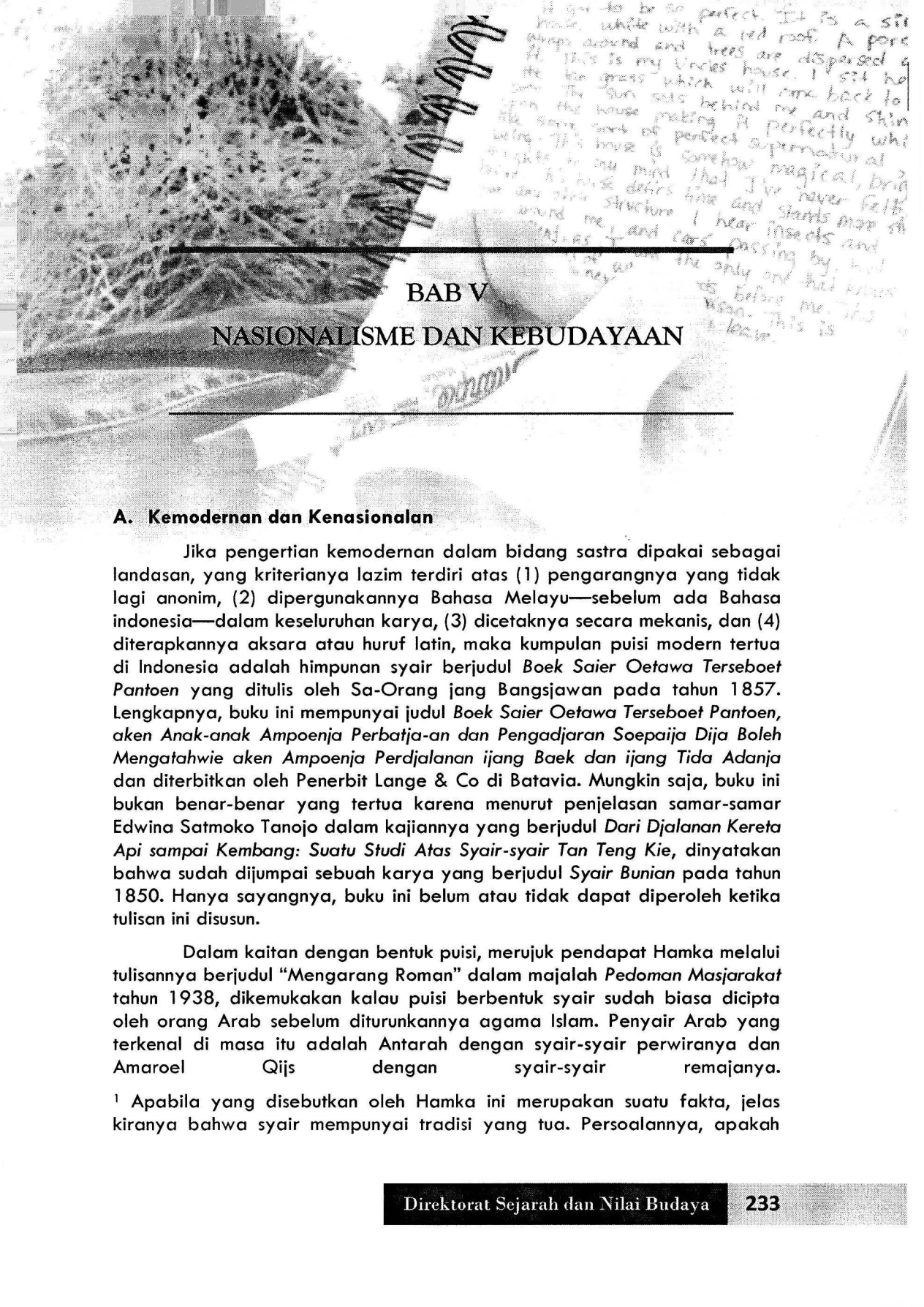
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang memimpin departemen pemerintahan. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (pasal 15). Demikianlah bentuknya Pemerintah pusat, yang menjalankan dan memegang kekuasaan pemerintah negara. Jadi Pemerintah pusat terdiri atas Presiden dan menteri-menteri negara dengan Dewan Pertimbangan Agung sebagai Badan Penasehat.

Sekarang tentang *pemerintahan daerah*. Kita telah menyetujui bentuk negara kesatuan (*eenheidstaat*). Oleh karena itu dibawah Negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada "*onderstaat*", akan tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka. Pembagian daerah Indonesia dan bentuknya pemerintahan daerah ditetapkan dengan Undang-undang. Menurut pasal 16 pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah

yang bersifat istimewa. Jadi rancangan undang-undang Dasar memberi kemungkinan untuk mengadakan pembagian daerah Indonesia dalam daerah-daerah yang besar dan untuk membagi daerah-daerah besar itu atas daerah-daerah kecil. Dengan memandang dan mengingat "dasar permusyawaratan", artinya bagaimanapun bentuknya pemerintahan daerah, pemerintahan itu harus berdasar atas permusyawaratan, jadi misalnya dengan mengadakan dewan perwakilan daerah. Hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah pertama daerah kerajaan (Kooti), baik di Jawa maupun diluar Jawa, daerah-daerah yang dalam bahasa Belanda dinamakan "zelfbesturende landschappen". Kedua daerah—daerah kecil yang mempunyai susunan asli, ialah *Dorpgemeenschappen*, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh. Maksud panitia ialah hendaknya adanya daerah-daerah istimewa tadi, ialah daerah kerajaan (*zelfbesturende landschappen*) dan desa-desa itu dihormati dengan menghormati dan memperbaiki susunannya asli. Begitulah maksud pasal 16.

Catatan Akhir :

- 1) Jumlah anggota Badan Penyelidik tidak berbeda dengan jumlah anggota *Volksraad*, 67 orang.
- 2) Sekretariat Negara RI, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 1995, hlm 367 – 369.
- 3) Mohammad Hatta, *Memoir*, 1978, hlm 932.
- 4) Moh. Hatta, *Memoir*, 1975. Hlm 432
- 5) Baik dalam Koleksi yamin maupun Arsip Pringgogidgo, kalimat ini tidak ada.
- 6) Kesultanan (Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegara dll).
- 7) Swapraja dan Cirebon.
- 8) Kalimat ini tidak terdapat dalam koleksi M. Yamin maupun arsip Pringgogidgo.
- 9) Kooti, kesultanan, kerajaan.
- 10) Imbuhan Mr. M. Yamin
- 11) Syonanto - Singapura



BAB V

NASIONALISME DAN KEBUDAYAAN

A. Kemodernan dan Kenasionalan

Jika pengertian kemodernan dalam bidang sastra dipakai sebagai landasan, yang kriterianya lazim terdiri atas (1) pengarangnya yang tidak lagi anonim, (2) dipergunakannya Bahasa Melayu—sebelum ada Bahasa Indonesia—dalam keseluruhan karya, (3) dicetaknya secara mekanis, dan (4) diterapkannya aksara atau huruf latin, maka kumpulan puisi modern tertua di Indonesia adalah himpunan syair berjudul *Boek Saier Oetawa Terseboet Pantoen* yang ditulis oleh Sa-Orang jang Bangsjawan pada tahun 1857. Lengkapnya, buku ini mempunyai judul *Boek Saier Oetawa Terseboet Pantoen, aken Anak-anak Ampoenja Perbatja-an dan Pengadjaran Soepaija Dija Boleh Mengatahwie aken Ampoenja Perdjalanan ijang Baek dan ijang Tida Adanja* dan diterbitkan oleh Penerbit Lange & Co di Batavia. Mungkin saja, buku ini bukan benar-benar yang tertua karena menurut penjelasan samar-samar Edwina Satmoko Tanojo dalam kajiannya yang berjudul *Dari Djalanan Kereta Api sampai Kembang: Suatu Studi Atas Syair-syair Tan Teng Kie*, dinyatakan bahwa sudah dijumpai sebuah karya yang berjudul *Syair Bunian* pada tahun 1850. Hanya sayangnya, buku ini belum atau tidak dapat diperoleh ketika tulisan ini disusun.

Dalam kaitan dengan bentuk puisi, merujuk pendapat Hamka melalui tulisannya berjudul “Mengarang Roman” dalam majalah *Pedoman Masyarakat* tahun 1938, dikemukakan kalau puisi berbentuk syair sudah biasa dicipta oleh orang Arab sebelum diturunkannya agama Islam. Penyair Arab yang terkenal di masa itu adalah Antarah dengan syair-syair perwiranya dan Amaroel Qijs dengan syair-syair remajanya.

¹ Apabila yang disebutkan oleh Hamka ini merupakan suatu fakta, jelas kiranya bahwa syair mempunyai tradisi yang tua. Persoalannya, apakah

syair yang ditulis oleh orang-orang Arab itu sama dengan syair-syair dalam bahasa Melayu jika dilihat dari pola dan kaidahnya, tidak dijelaskan secara rinci oleh Hamka. Sementara itu, dalam kaitannya dengan syair sebagai bagian kekayaan sastra di tanah Melayu, belum mempunyai umur yang setua seperti dikemukakan Hamka sebab karya berupa syair ini diketahui pertama kali diciptakan pada kira-kira tahun 1600-an oleh Hamzah Fansuri. Demikian pendapat A. Teeuw seperti termaktub dalam buku karyanya yang berjudul *Shair Ken Tambuhan*.²

Kendati demikian, ada kenyataan yang layak diindahkan, yaitu bahwa sejak dahulu kala, syair sudah dibuat dan merupakan hasil dari tradisi tulis;³ bukan lisan. Bahwa syair berasal dari Arab, dibenarkan oleh Dick Hartoko dan B. Rahmanto. Dikatakannya bahwa syair adalah “jenis puisi Melayu yang berasal dari Arab. [...] Syair banyak dipakai untuk bercerita yang mengandung unsur mitos ataupun sejarah”⁴ di samping ada pula yang mengandung “unsur agama, atau rekaan belaka. Sifatnya menghibur dan mendidik.”⁵ C. Hooykaas pun menegaskan perihal fungsi syair yang berhubungan dengan aspek pengajaran ini. Dikatakannya, “bentuk ini sering sekali dipakai untuk mengajarkan sesuatu, sebab lebih mudah untuk murid mengingatnya. Lebih mudah menghafal syair-syair demikian daripada mengingat prosa, sebab mendapat bantuan kata-kata sajak.”⁶

Dilihat dari segi kelaziman atau konvensinya, syair terdiri atas empat larik yang berima dengan sebuah huruf hidup atau vokal ditambah dengan huruf mati atau konsonan, atau sebaliknya, konsonan dengan vokal. Dalam pengertian sederhananya, pola syair dikatakan sebagai mempunyai rima a-a-a-a. Setiap baris, menurut Hooykaas, sekurang-kurangnya harus berjumlah delapan sukukata, “mendapat empat kali tekanan suara, dan biasanya tidak lebih dari sebelas sukukata”.⁷ Walaupun demikian, seperti dijelaskan Hooykaas, aturan yang seperti itu banyak perkecualiannya.

Antara bait satu dengan bait lainnya, secara semantik pada syair saling berkait, mengingat bahwa syair pada hakikatnya adalah suatu cerita atau kisah yang dibentuk dengan pola atau formula tertentu sehingga sering juga disebut sebagai puisi panjang. Berbentuk demikian, berupa puisi panjang, sebab sifat syair pada intinya memang adalah suatu epik atau bersifat naratif. Demikian pula dengan syair dalam *Boek Saier Oetawa Terseboet Pantoen* ini, dapat dikatakan cukup panjang karena terdiri atas 80 bait syair.

Di lain pihak, jika syair pada hakikatnya adalah salah satu bentuk karya puisi dalam tradisi tulis maka sebaliknya adalah pantun yang sesungguhnya berasal dari suatu komunikasi bersastra dalam tradisi lisan.⁸ Bentuk pantun yang lazimnya terdiri atas sampiran (larik pertama dan

kedua) dan isi (larik ketiga dan keempat) dengan pola persajakan a-b-a-b tentu tidak hanya mengindikasikan bahwa pantun adalah “jenis puisi lama” sebagaimana secara simplistik sering dipakai oleh para penyusun kamus istilah sastra untuk mendefinisikan pantun,⁹ melainkan pada hakikatnya menggambarkan atau merepresentasikan suatu bentuk komunikasi lisan yang saling berbalas atau bersahut, atau juga mengarah kepada suatu penerusan ujaran yang manasuka tetapi berjalanan. Dengan pengertian lain, pantun yang mewadahi suatu komunikasi bersahutan atau berbalasan akan mengekspresikan suatu pola yang mengulang beberapa larik, biasanya dua larik, dari pantun yang sudah diujarkan terlebih dahulu.

Pantun yang dimungkinkan untuk diteruskan larik-lariknya akan mengarah kepada pola persajakan yang rimanya telah diletakkan melalui vokal atau konsonan pada larik pertama dan kedua. Lazimnya, pantun yang segera dapat diduga arah terusnya adalah khazanah pantun yang sudah sangat dikenal, sehingga walaupun tidak diteruskan, atau hanya dilisankan dalam hati saja lanjutannya itu, komunikasi sebetulnya telah terbangun atau terbina dan makna yang diharapkan pun sudah disampaikan meskipun tidak ada jaminan terbalas dengan setimpal secara verbal. Penggalan pantun—biasanya berupa sampiran—yang dapat diteruskan dengan cukup mudah akan memicu lahirnya baris ketiga dan keempat, tanpa perlu merasa takut salah dalam melahirkan baris-baris itu. Kenyataan seperti ini jelas berbeda dengan syair yang hampir tidak memungkinkan adanya penerusan baris-baris lantaran sumber utama—yang dapat berupa mitos, sejarah, ataupun juga ide-ide tertentu—adalah bukan milik kolektif melainkan lebih menjadi milik individual.

Halnya berbeda dengan pantun; penerusan cenderung mudah dilanjutkan sebab lazimnya menyangkut pengetahuan umum atau ihwal yang telah diketahui awam. Sebagai contoh, ketika seseorang mengujarkan pantun yang larik pertama dan keduanya berbunyi *//Kalau ada sumur di ladang/ Bolehlah kita menumpang mandi/*, maka lawan bicaranya pun dengan cepat dapat merespon larik-larik pantun tersebut atau mendiamkannya saja dengan kemakluman atas pesan yang tersirat dari lanjutan pantun tersebut. Amir Hamzah memberi contoh lain dengan pantun yang hanya terdiri atas dua baris yang menurutnya memang ada. Dijelaskannya, ketika dalam percakapan sehari-hari ada orang mengucapkan larik yang berbunyi *//Sayangkan kain buangkan baju/*, orang atau lawan bicaranya “telah mengerti apa yang dimaksud dan bagaimana suara kalimat yang datang. (Sayangkan lain buangkan daku)”.¹⁰

Lanjutan dari contoh larik-larik pantun *//Kalau ada sumur di ladang/ Bolehlah kita menumpang mandi/*, pada galibnya tidak harus dilanjutkan dengan */kalau ada umurku panjang/ bolehlah kita bertemu lagi//*, melainkan

dengan ungkapan yang lain. Malahan dalam situasi nonformal atau penuh canda, lanjutan tadi bisa saja menjadi */kalau ada umurku panjang/ bolehlah kita menumpang mandi/*. Lanjutan seperti ini dapat diduga tidak akan menimbulkan rasa kesal atau bahkan rasa marah sebab kembali ke hakikat pantun itu yang tidak lain merupakan salah satu bentuk berkomunikasi. Sudah barang tentu, lanjutan yang sedemikian ini jelas tidak elok jika diucapkan dalam situasi formal atau saat berhadapan dengan orang atau kenalan baru.

Pantun, bagaimanapun, tetaplah representasi dari situasi kelisanan yang tidak akan mampu selalu menjaga kekonsistenan. Sebab, yang terpenting dalam ranah lisan ini bukan pada pola yang tetap dan pasti melainkan pada stimulus yang terjaga untuk merangsang hadirnya larik-larik lainnya, asal secara bunyi atau rima menunjukkan keserasian dan keselarasan. Inilah, paling tidak, dimensi kelisanan yang tetap menyeruak dari bentuk puisi yang bernama pantun.

Kemudian, kalau kembali kepada buku puisi yang telah disebutkan, jelas bahwa bait-bait yang terkumpul dalam buku ini sama sekali bukan pantun, melainkan syair. Oleh karena itu, judul kumpulan puisi yang mengisyaratkan adanya pantun di dalamnya, agaknya, sekali lagi, bukan bertolak dari kata “pantun” sebagai konsep sastra tetapi lebih pada pengertian umum atau bahkan mungkin semacam etimologi rakyat. Contoh pantun dalam buku tersebut, dengan demikian, tidak mungkin disebutkan sebab yang ada memang kesemuanya adalah syair.

Pada awal tulisan ini sudah dikemukakan, bahwa jika berlandaskan pada kriteria kemodernan, maka buku kumpulan puisi ini memang dapat dinyatakan sebagai pemula kebudayaan baru—khususnya kesusastraan—mengingat bahwa anasir kemodernan telah dipenuhi. Akan tetapi, banyak pihak yang masih keberatan atau belum bersedia menerima kenyataan yang sesungguhnya telah terjadi pada pertengahan abad ke-19 itu, sewaktu memang dunia pendidikan dan kepustakaan memang masih jarang atau sangat sedikit di Hindia Belanda ketika itu. Adanya semacam kebelumterimaan atau penolakan ini sesungguhnya wajar saja mengingat alam pikir atau cara pandang orang Indonesia masih terlalu dikooptasi atau dikungkung oleh sudut pandang yang kolonialistik, termasuk dalam bidang kebudayaan dan kesusastraan pada khususnya.

Kemodernan yang muncul pada pertengahan hingga akhir abad ke-19 tentu bukan hanya bersangkut paut dengan jenis puisi; dalam bidang prosa dan drama pun terjadi. Hal semacam ini merupakan sesuatu yang tidak terlalu istimewa mengingat bahwa perkembangan dan dinamika zaman secara tidak langsung terjadi secara simultan dalam berbagai bidang yang tentu saja sangat bergantung pada masuknya faktor dari luar

melalui dunia pendidikan. Oleh sebab itu, bermulanya kemodernan dalam bidang sastra ini dapat dikatakan sebagai tidak terlalu berjauhan atau berdekatan masanya. Untuk film, tentu saja berbeda sebab dunia perfilman merupakan akibat langsung dari perkembangan teknologi multimedia yang memang baru muncul pada akhir abad ke-19.

Apa-apa yang dipesankan melalui syair dalam buku yang telah disebutkan merupakan permasalahan yang sangat sehari-hari, manusiawi, dan bukan sesuatu yang luar biasa. Berkenaan dengan tema yang sedemikian ini, maka jelas bahwa syair dalam buku ini berbeda dengan syair-syair sebelumnya yang biasanya ditulis dengan huruf Jawi dan cenderung berisi hal-hal yang bersinggungan dengan mitos, sejarah, serta melukiskan dunia antah berantah. Kenyataan ini setidaknya-tidaknya menunjukkan bahwa kumpulan syair ini telah berhasil keluar dari konvensi penulisan sastra lama, baik dari sisi tema maupun stilistikanya. Oleh sebab itu, tidak ada kesangsian lagi di sini untuk menyatakan bahwa buku kumpulan puisi yang berupa syair ini adalah khazanah sastra modern atau lebih tepatnya disebut sebagai pemula khazanah sastra Indonesia modern.

B. Kemunculan Bentuk Kesenian Baru

1) Puisi

Uraian pada bagian sebelumnya lebih berkaitan dengan kemodernan yang ditampilkan secara keseluruhan pada kumpulan puisi tertua di Indonesia tersebut, yang berkaitan dengan anasir seperti telah disebutkan. Ditilik dari bentuk, tentu saja “syair” tidak dapat dikatakan sebagai sungguh-sungguh baru sebab—seperti telah dikemukakan—syair adalah bentuk yang sudah lama ada dengan pelbagai aksara yang digunakan. Dengan demikian, dilihat dari segi bentuk, bukan “syair” atau “pantun” yang tentu merupakan bentuk kesenian baru melainkan bentuk puisi lain, baik yang berpola seperti “soneta”¹¹ maupun yang tidak berpola atau bebas.

Yang patut dicatat, meskipun sampai memasuki abad ke-20 bentuk pantun dan syair masih banyak dimanfaatkan orang untuk menuangkan ide atau gagasan, percobaan atau upaya menghasilkan puisi yang tidak terikat pola sesungguhnya sudah muncul pada tahun 1870. Sejauh data yang dapat diperoleh, pernah ada sastrawan yang memakai inisial A.D. yang telah memublikasi karyanya di *Bianglala* pada tanggal 19 Agustus 1870, dengan bentuk yang berbeda dari syair atau pantun. Tentu, jika dilihat dari sudut pandang sekarang, hal tersebut bukan sesuatu yang layak diherankan; namun jika disadari bahwa hal semacam ini terjadi pada masa ketika tradisi menulis puisi masih sangat terbatas, jelas kenyataan tersebut merupakan suatu realitas yang layak diperhatikan. Di bawah ini adalah contoh karyanya.

Keuntungan Anak¹²

1

Meski saya muda,
Dicinta Tuhan Allah,
Diperanakan selamat,
Murah Tuhan ya amat,
Sudah kasih saya,
Ma bapa yang percaya!

2

Makan saya sampai,
Bermain boleh capai,
Diajari sekolah,
Yang kasih Tuhan Allah,
Biar juga saya,
Berbudi dan percaya!

3

Habis siang saya kantuk,
Boleh tidur sampai enak!
Matahari keluar pagi,
Saya buka mata lagi!
Lantas bangun dapat lihat,
Sanak saya masih selamat.

4

Dari itu saya suka,
Hati saya lantas buka!
Suka puji maha Tuhan,
Dengan unjuk kehormatan,
Saya minta rendah hati,
Tuntun saya sampai mati.

Selain itu, ada pula karya yang sepintas lalu berbentuk seperti syair atau pantun, namun jika diperiksa dengan seksama, ternyata tulisan tersebut bukanlah pantun atau syair. Karya yang dimaksudkan ini, telah terbit pada tahun 1873. Dinyatakan di sini sebagai bukan syair sebab pada setiap bait bervariasi rimanya; ada yang //a-b-a-b//, //a-a-a-a//, atau //a-a-b-b//, sementara pola syair yang lazim dipahami khalayak mempunyai rima //a-a-a-a//. Demikian pula untuk dikatakan sebagai pantun, pun meragukan sebab di dalam sebuah baitnya tidak terdapat larik atau baris yang menunjukkan adanya sampiran dan isi, serta tidak mempunyai rima

//a-b-a-b//. Bentuk yang sedemikian ini, tentu juga dapat dicatat sebagai upaya melakukan pembaruan atau kreasi yang tidak terkungkung oleh kelaziman, entah disengaja atau hanya muncul secara kebetulan. Sajak yang baru saja disebutkan ini, ditampilkan setelah penjelasan ini dan seperti pada contoh sebelumnya, karya ini juga ditulis oleh penulis yang lebih memilih menggunakan inisial, yaitu M.J.

Musim Derep, Musim Melajo¹³

Musim motong sudat datang,
Apa kita dengar itu?
Padi di sawah sudah matang,
Kita orang ramai pergi di situ.

Pada waktu siang hari,
Teranglah cahyanya matahari,
Dengar di kanan dan di kiri,
Segala burung pada menyanyi.

Pada tengah malam yang sepi,
Burung kucipet menyanyilah,
Memberi tahu pada kami,
Musim motong sudah datanglah!

Ini musim penuaian,
Kita dapat badan segar,
Potong dengan kesukaan,
Janganlah sayang suar (keringat).

Petik! Kumpul, dengan baik,
Janganlah ingat sungut,
Potong padi itu bai,
Buah-buah kelak dipungut.

Syukurlah bulan Maulud,
Memberi kita isi perut,
Engkau kasih perasaan,
Allah punya kecintaan.

Ini bulan memang waktunya,
Hasil tanah dikumpulkan,
Tetapi biar semuanya,
Tuhan jangan dilupakan.

Tuhan ada pohon selamat,
Yang kasih segala berkat,
Biarlah kita jangan lambat,
Dari dosa lekas tobat.

Padi yang jeli selamanya,
Tunduk dirinya pada temannya,
Tapi padi yang tiada isinya,
Tinggi hati itu adanya.

Biarlah kita semuanya,
Seperti padi yang berisi,
Tunduk diri selamanya,
Pada Allah yang Mahasuci.

Sementara itu, bentuk pengucapan yang memang tidak terlalu terikat oleh bentuk pantun dan syair tercatat mulai banyak dihasilkan oleh sastrawan pada abad ke-20 dan sesudahnya. Para sastrawan ini melakukan cara yang sedemikian itu tentu sebagai akibat dari perkembangan intelektualitas atau pendidikan yang telah mereka tempuh atau mereka dapatkan yang dengan sendirinya memberi mereka wawasan akan khazanah sastra dunia yang memang tidak lagi selalu mengikuti atau terikat pada pola-pola tertentu. Salah seorang pesastra Indonesia, sebagai contoh, yang banyak menuangkan gagasan kebangsaannya melalui sajak, adalah Muhammad Yamin, yang salah sebuah sajaknya dikutip di sini.

BAHASA, BANGSA

Was du ererbt von deinen Vatern hast,
Erwirb es um es zu besitzen.

Selagi kecil berusia muda,
Tidur si anak di pangkuan bunda
Ibu bernyanyi, lagu dan dendang
Memuji si anak banyaknya sedang;
Berbuai sayang malam dan siang
Buaian tergantung di tanah moyang.

Terlahir di bangsa, berbahasa sendiri
Diapit keluarga kanan dan kiri
Besar budiman di tanah Melayu

Berduka suka, sertakan rayu;
Perasaan serikat menjadi padu
Dalam bahasanya, permai merdu

Meratap menangis bersuka raya
Dalam bahagia bala dan baya
Bernafas kita memanjangkan nyawa
Dalam bahasa sambungan jiwa
Di mana Sumatra, di situ bangsa,
Di mana Perca, di sana bahasa.

Andalasku sayang, jana bejana
Sejakkan kecil muda teruna
Sampai mati berkalang tanah
Lupa ke bahasa, tiadakan pernah
Ingat pemuda, Sumatera malang
Tiada bahasa, bangsa pun hilang.

Sedangkan bentuk soneta, seperti telah disebutkan, adalah puisi berpola yang mendapat tempat cukup baik pada pesastra yang berkarya pada tahun 1920-an sampai dengan 1930-an. Dikenal dan digemarinya soneta ini, sangat boleh jadi, merupakan akibat logis dari dunia pendidikan yang ketika itu masih sangat berorientasi kepada pendidikan Eropa, sementara di sisi lain, soneta memang bentuk yang populer di Eropa pada beberapa tahun sebelumnya. Hampir semua penulis yang menghasilkan dan memublikasikan karya mereka pada tahun 1920-an maupun di masa Pujangga Baru, menggemari bentuk soneta ini sebagai wadah ekspresi diri mereka. Untuk memberikan gambaran akan dikenal luasnya bentuk soneta, berikut ini ditampilkan sebuah contoh soneta yang ditulis oleh Muhammad Hatta, berjudul "Beranta Indera".

BERANTA INDERA

Lihatlah timur indah berwarna,
Fajar menyingsing hari pun siang;
Syamsyu memancarkan sinar yang terang,
Khayal tersenyum berpanca indera.

Angin sepoi bertiup dari angkasa,
Merembus ke tanah ranting diguncang;
Margasatwa melompat keluar sarang,
Melihat beranta indera indah semata.

Langit lazuardi teranglah sudah,
Bintang pun hilang berganti-ganti;
Cahaya zuhari mulai muram.

Haiwan menerima selawat alam,
Hati pun girang tiada terperi;
Melihat kekayaan subhan Allah.

Dengan menampilkan karya Hatta—yang di kemudian hari sangat dikenal sebagai satu dari “dwitunggal” yang populer dengan “Soekarno-Hatta” dan kemudian menjadi Wakil Presiden Indonesia yang pertama—dimaksudkan sebagai semacam gambaran bahwa kesusastraan sangat erat berjalanan dengan kaum intelektual dan pergerakan, tidak terkecuali di masa Hindia Belanda. Bahkan Soekarno pun, selain sebagai aktivis dan pejuang kemerdekaan, adalah juga sastrawan sebab beberapa karya sastra telah dihasilkannya. Demikian pula dengan para pejuang yang lain, dunia kesusastraan adalah dunia yang dapat dikatakan sangat dekat dengan mereka.

2) Prosa

Di masa ketika kelisanan masih begitu kuat melingkupi kehidupan masyarakat di Indonesia, bentuk-bentuk dongeng, cerita rakyat, atau pun hikayat yang penuh berisi kisah antah-berantah atau cerita kerajaan-kerajaan di masa lalu, dapat dikatakan mendominasi narasi yang beredar. Kehidupan sehari-hari yang menyangkut manusia biasa dalam interaksinya dengan manusia atau tokoh lain, hampir tidak memperoleh tempat dalam ruang berkisah itu. Baru pada akhir abad ke-19, bentuk prosa berupa novelet, *feuilleton* atau cerita bersambung, maupun novel mulai ditulis orang dengan pengungkapan peristiwa biasa dengan penyelesaian yang biasa pula.

Berkaitan dengan genre prosa ini, baik yang berjud cerpen, novelet, atau novel, data yang ada menunjukkan bahwa karya terawal yang dapat disebutkan di sini adalah karya G. Francis yang berjudul *Tjerita Njai Dasima* dengan anak judul *Soewatoe korban dari pada pemboedjoek. Tjerita bagoes sekali, jang belon berapa lama soedah djadi di Betawi, akan mendjadi peladjaran bagei sekalian prempoean jang soeka menoeroet boedjoekan laki-laki. Satoe nasehat kepada anak-anak moeda* dan bukan karya Adi Negoro yang berjudul *Melawat ke Barat*, misalnya, seperti disebutkan oleh

Hooykaas.¹⁴ Novel G. Francis ini terbit pertama kali pada tahun 1896 di Jakarta, diterbitkan oleh Kho Tjeng Bie & Co.¹⁵

Secara alami, terutama juga dengan mengindahkan kecenderungan dunia penulisan pada umumnya serta situasi sosiologis yang melingkupi masa itu, sejujurnya harus diakui bahwa semestinya bukan karya sastra berbentuk novel yang mengawalinya tetapi cerpen sebab energi yang dipakai untuk merangkai narasi dengan kompleksitas masalah bukan hal yang sederhana. Akan tetapi, dari pendataan yang telah dilakukan, novel inilah yang dapat diketemukan dan akhirnya untuk sementara ini harus ditetapkan pula sebagai novel paling awal dalam lintasan sejarah sastra Indonesia modern. Bahwa pengarangnya bukan orang “Indonesia asli” melainkan seorang Indo, tidak perlu dipertentangkan sebab di masa ketika identitas keindonesiaan belum jelas benar, merupakan hal yang naif dan mengada-ada sekiranya orang “Indonesia asli” yang harus dipakai sebagai penanda. Perihal “keaslian” ini adalah suatu wacana yang akan sulit diketemukan titik-temunya mengingat keheterogenan masyarakat atau bangsa Indonesia dari dulu sampai sekarang.

3) Drama

Populasi drama, kapan dan di mana pun, selalu menunjukkan tingkat yang selalu tertinggal dibandingkan dengan populasi prosa maupun puisi. Di Indonesia, keadaan dan situasi penulisan drama juga seperti itu. Namun demikian, karya drama modern Indonesia yang pertama ternyata tidak terlalu ketinggalan keberadaan atau eksistensinya, khususnya jika dibandingkan dengan novel, karena drama yang berusia paling awal ini bertanda tahun pembuatan dan penerbitan pada 1901 yang artinya hanya tertinggal lima tahun. Drama yang ditulis oleh F. Wiggers—yang lagi-lagi barangkali akan diragukan “keindonesiaannya” sebab ia adalah seorang Indo—dan berjudul *Lelakon Raden Beij Soerio Retno* ini dilihat dari struktur dramaturginya dapat dikatakan sudah sangat modern, bahkan jauh lebih modern dibandingkan drama-drama Indonesia sesudahnya.

Jika selama ini pandangan umum sudah diarahkan untuk memahami bahwa drama Indonesia pertama adalah *Bebasari* karya Roestam Effendi yang terbit pertama kali tahun 1927, maka dengan terungkapnya keberadaan *Lelakon Raden Beij Soerio Retno* ini, “mitos” mengenai awal mula drama di Indonesia harus direvisi.¹⁶ Secara struktur dan gaya ucapya pun, drama karya F. Wiggers ini dapat dikatakan jauh lebih memadai dari karya Roestam Effendi itu. Dan barangkali karena terlalu “modern”nya drama ini untuk ukuran masa itu, ada kecurigaan yang timbul bahwa drama ini jangankan-jangan merupakan karya saduran dari karya Eropa.¹⁷ Namun

demikian, selama belum dapat dibuktikan bahwa karya ini merupakan sebuah saduran atau bahkan mungkin sebuah plagiat, ia tetap harus disebut sebagai khazanah saha Sastra Indonesia dan drama pertama di Indonesia.

Sebagai gambaran ringkas, berikut ini ditampilkan cuplikan drama karya F. Wiggers dan karya Roestam Effendi, sekadar untuk menunjukkan suatu kenyataan bahwa *Lelakon Raden Beij Soerio Retno* yang terbit pada tahun 1901 itu sudah lebih modern dibandingkan dengan *Bebasari* yang selama ini banyak dianggap sebagai karya drama pertama Indonesia. Silakan simak kedua cuplikan ini.

Kalu kelir lelangse terangkat maka kaliatanlah dalem rumahnya COLLECTEUR. Ada meja di tengah dengan lampu gantung, korsi, bangku, perihasan tembok (seperti figura-figura dan laen-laen) di pojok dekat pintu kamar tidurnya. COLLECTEUR ada peti besi tempat uang Kompeni.

RADEN ONGKO lagi duduk dengan menungkat dagu. KARTANI datang di blakangnya. KARTANI pakai krabunya yang baru.

KARTANI: *(Dengan bermesem)* Aai, Kakang, kenapa begini bersusah hati?

RADEN ONGKO: Okh! Sudah.

KARTANI: O! O! Tentu sudaraku ini kena sakit rindu, ada yang ditinggal di Betawi.

RADEN ONGKO: Akh, Kartani, jangan maen gila.

KARTANI: Na, masa kenapa sudara? Apa aku tida bisa ajak maen? Tida bole girang-girang sedikit yang aku bakalan dapet ipar?

RADEN ONGKO: *(Dengan lebi merengut)* Ipar apa?

KARTANI: Ipar apa laen? Apakah angkau bukan datang kemari buwat membujuk romo sebab angkau mau kawin sama orang prampuwan pilihanmu sendiri? Sebab orang datang dari begitu kemari tida ada laen sebab buwat menjadi berduka cita Cuma kalu orang tinggalin kacintaannya, ia itulah baru seperti angkau bersusah hati seperti tadi aku liat.

RADEN ONGKO: Tida ada laen sebab aken berduka cita?

KARTANI: Ya, tida ada.

RADEN ONGKO: Apa orang tida ada laen kasusahan hati, cuma dari sebab tunangan? O! Kalu itu sih, aku tida nanti begini. Sudaraku, bukan dari sebab meninggalkan tunangan aku yang bersusah begini, ada laen susahku yang keliwat keras memberatkan hatiku.

KARTANI: Ai, sudaraku sudah kenal laen kasusahan hati? Aku tadinya kira, orang muda tida ada laen penggoda.

RADEN ONGKO: O! Barangkali dari sebab kalu angkau punya Raden Achmad tida dateng, angkau merasa sudah hati, dari itu angkau kira yang aku juga begitu.

KARTANI: Akh, kendati Achmad tida dateng juga, surat-suratnya menjadi sambung mulutnya. O! Dia begitu bisa tulis surat, ceritain kehidupannya di Magelang dalem Skola Jaksa. Akh, kalu dibaca surat itu sama juga kita turut sama-sama berjalan di mana-mana tempat dia ceritain yang dia pegi-in. Apa lagi waktu pesta Raja, dia tulis begitu lucu. Sekarang ampir satu bulan aku tida dapet surat sebab dia tida sempat, dia lagi kurung dirinya dengan buku-bukunya, sebab lagi duwa bulan ada examen, dia misti turut, dan dia misti terus katanya, supaya kaluwar dari sekola lantas bekerja.

RADEN ONGKO: Abis bole kawin.¹⁸

Bandingkan cuplikan drama di atas dengan cuplikan drama berikut ini, setidak-tidaknya dari aspek bentuk atau stilistikanya.

Di dalam taman, sebelah di belakang kebun bunga, sebelah ke muka batu-batu dan pohon-pohon, yang besar-besar. Diterangi achtergrond dengan cahaya hijau. Voorgrond kelam; voetlight tiada dipasang. Seorang tua duduk bersela, bersidekap tangan, diam menunggu. Suara dari belakang meratap, orangnya tiada kelihatan.

BEBASARI: O Kanda, kekasih hatiku.
 Sampai sungguh hati tuanku,
 Membiarkan beta menahan rajam,
 Tidak tertahan bagi badanku.
 O Kakanda, kalbuku rindu,
 Menangisi tilam setiap malam.

Di mana gerangan Kakanda sekarang,
Di mana Kakanda diragu orang,
Membiarkan beta berduka cita.
Lamalah sudah beta seorang,
Menantikan Rawana diusir orang,
Menantikan kakanda menggantikan tahta.

Aduhai kakanda pembela diri,
Dengarkan ratapan beta yang ngeri,
Harapan tak lain pada kakanda
Beta bak tidur di atas duri,
Inilah penyakit setiap hari,
O kakanda bilakah tuan membela adinda.

Tiada sakit sesakit ini, kakandaku,
Jikalau badan dalam terungku,
Tiada sedikit boleh berkata.
Apakah salahnya beta dahulu,
Maka selalu berduka kalbu,
Maka selalu mencucuri mata.

Setiap saat menaruh dendam,
Setiap detik menahan kasam,
Kepada Rawanan raja yang keji,
Raja lalim bangsa yang kejam,
O, ilahi Junjungan Alam,
Berilah bujang perebut Panji.

Wahai kakanda kekasih beta,
Mari lepaskan badan adinda,
Dari kungkungan nafsu yang ganas,
Tiada dapat beta derita.

RAWANA: *(Kasar dan terbahak)* Ha, ha, ha, mainan kakanda.

BEBASARI: O, bujangga, bila beta akan terlepas.

(Hening kembali. ORANG TUA, ALZAMANUR, bergerak dari duduknya menunggu.)

ALZAMANUR: *(Perlahan)* Kudengar angin menderu,
Kulihat dahan melambai,

Kudengar ombak mengadu,
Kulihat air bersorai,
Kurasa bumi menggegap,
Kupandang bunga berbisik,
Kupandang tanah meratap,
Kupandang awa berbisik.

Inilah tanda kan sampai,
Bujangga dalam berjalan,
Inilah makna yang permai,
Inilah janji zaman,
Inilah tandanya dekat,
Tetapan nujum dahulu,
Inilah satu alamat,
Bujangga merebut judu.

Berderak dahan berkata,
Menderum laut berseru,
Menggigir tanah meminta
Melulung angin menyeru,
Terjingsap pelang yang merah,
Terbayang zaman yang datang,
Terbentang panji berdarah,
Kedatang bujang menyerang.

Kesampai Bujang di sini,
Keramai perang di bumi,
Kebebas adinda Sari
Kealah raja Pencuri.
Kesenang bangsa berkota,
Lah sampai orang bertkhta.

*(Terdengar suara dari belakang, suara
Bangsawan BUJANGGA)*

BUJANGGA: Adinda sedang di mana?
Kembalikan Lela O, Rawana

*(Bangsawan BUJANGGA datang, berdiri
sebelah di tooneel)*

BUJANGGA: Inilah tempat Raja Rawana
Menawan Lela dalam penjara.

Di mana tuan Cinta Kencana
Mengeluh sebab dera angkara
O, Bebasari jantung hatiku.

ALZAMANUR: Siapa tuan yang datang itu?

BUJANGGA: Beta Bujangga anak piatu,
Tidak bertanah tidak beribu¹⁹

4) Film

Sebagai bentuk kesenian baru yang tidak lagi berdimensi satu namun berwujud multidimensi, film sudah mulai diperkenalkan kepada publik Indonesia tidak berselang lama dari awal diperkenalkannya film kepada khalayak di luar negeri. Dalam buku *Film Indonesia: Bagian I (1900-1950)* disebutkan bahwa film mulai dipertunjukkan pada awal Desember tahun 1900 di Batavia, di tahun pertama politik etis diberlakukan.²⁰ Akan tetapi, film cerita—yang masih bisu—baru diproduksi di Hindia Belanda pada tahun 1926, “ketika bioskop telah makin memperlihatkan diri sebagai gejala kultural baru dari kehidupan kota.”²¹ Baru pada tahun 1936, atau sepuluh tahun kemudian, produksi film cerita mulai diproduksi secara teratur namun tentu tetap masih dengan keterbatasan sarana dan prasarana sinematografinya. Kendati demikian, meski masih serba sederhana, film sungguh sudah berperan sebagai pemroduksi budaya baru bagi para konsumen atau penontonnya dengan secara diam-diam menanamkan “nilai-nilai” baru yang serba identik dengan apa yang disebut sebagai “kemoderenan”. Segala penampilan, cara berdandan, logat bicara, dan segenap atribut yang beroperasi di dalam film melalui tokoh-tokoh dalam film itu, secara terselubung telah mengkonstruksi suatu budaya baru yang kemudian identik dengan kekotaan dan tentu juga kemoderenan.

Kehadiran film yang mampu menampilkan gambar serta cerita yang lebih memikat karena banyak adegan atau aksi yang dianggap lebih menawan, secara perlahan-lahan menggeser atau meminggirkan seni pertunjukan lain seperti sandiwara dan komedi stambul yang sebelumnya merupakan primadona dalam dunia hiburan. Akan tetapi, hal yang paling lekat dengan berkembangnya budaya baru ini adalah berkembangnya budaya kota, sebab, khususnya di masa kolonial itu, bioskop hanya ada di kota besar yang artinya hanya masyarakat kota saja sebagai konsumen film.

C. Keindonesiaan yang Terefleksi dalam Karya

Dalam menghasilkan suatu karya, siapa pun tentu memiliki kebebasan untuk memilih tema yang akan ditampilkan. Bisa saja seorang pengarang menulis mengenai persoalan yang muncul antara tokoh dengan tokoh lain, tokoh dengan lingkungan sosial, tokoh dengan dirinya sendiri, tokoh dengan lingkungan alam, maupun tokoh dengan Sang Pencipta. Persoalan yang muncul dari relasi antara tokoh dengan entitas lain itu, dapat bermuara pada masalah percintaan, kedengkian, keiri-hatian, kesetiaan, perselingkuhan, atau persoalan kemanusiaan pada umumnya; baik yang bersifat sendiri-sendiri maupun yang mencakup satu komunitas atau masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kaitan dengan karya-karya sastra yang terbit pada masa kolonial di Hindia Belanda, berbagai tema seperti telah disebutkan tentu juga dapat dijumpai, baik yang masih bernuansa tradisional maupun yang sudah menggambarkan kehidupan orang per orang secara personal, namun tentu dengan cara ungkap maupun wawasan yang berbeda dengan ketika Indonesia sudah merdeka atau dengan situasi Indonesia di masa kini. Sekaitan dengan aspek tematik ini, pembatasan difokuskan pada hadirnya kesadaran akan identitas Indonesia maupun keindonesiaan, di masa ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda atau ketika masih di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Bagi pembaca sekarang, jika mau masuk ke ruang kesadaran kontekstual di kala penjajahan itu, niscaya tidak akan dengan mudah menjumpai ekspresi seperti “merdeka” yang dengan ringan dan tanpa konsekuensi saat sekarang diucapkan, atau bahkan dengan sekadar menyebut identitas kebangsaan yang dibayangkan atau yang diharapkan. Konteks zaman yang sedemikian itu, penting diingat agar ruang pemahaman kita tidak penuh dengan cibiran atau kesinisan yang bersumber dari perbedaan keadaan zaman.

Dengan meletakkan kesadaran secara proporsional seperti itulah, niscaya pembaca akan lebih memahami ungkapan atau pilihan kata yang secara kualitas barangkali tidak ada apa-apanya dipandang dari kacamata sekarang, namun sangat boleh jadi merupakan hal yang istimewa di kala itu. Agar pemahaman kita menjadi lebih lengkap, kita harus langsung membaca karya-karya sastra yang pernah terbit di masa penjajahan itu. Dalam kaitan ini yang lebih banyak dipakai sebagai contoh adalah karya yang berupa puisi mengingat bahwa ekspresi akan kehendak untuk menjadi bangsa merdeka atau terbebas dari belenggu penjajahan, banyak muncul dalam ragam sastra ini.

Puisi pertama yang dimanfaatkan sebagai contoh adalah karya Djoemantan yang diterbitkan dalam *Poetri Hindia*, pada tahun 1909. Dalam puisi ini dengan mudah dapat kita rasakan adanya pemahaman akan makna

“kemajuan” dengan menampilkan kontras antara “kaum kuno” dengan “kaum muda” yang identik dengan pikiran maju. Yang lebih menarik lagi sesungguhnya, dilihat dari dimensi kesetaraan gender, sudah ada suara untuk mengedepankan kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan di masa ketika laki-laki sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, hingga sekarang, tidak dapat dilacak, siapakah sesungguhnya Djoemantan itu. Adakah ia nama asli atau samaran? Atau, mungkinkah ia seorang wanita? Jika Djoemantan adalah seorang wanita, perlu kiranya ada penelitian lanjutan berkenaan dengan keberadaan wanita pengarang dalam perjalanan sastra modern di Indonesia mengingat bahwa sejauh ini, wanita pengarang yang dianggap awal menuliskan idenya melalui karya sastra adalah Selasih, yang menghasilkan karya pada tahun 1930-an.

Agar pemahaman kita mengenai hal-hal yang telah disinggung tersebut menjadi konkret, puisi karya Djoemantan yang secara tersirat dapat dikatakan mempunyai tujuan yang jelas dalam menanggapi situasi zaman di masa itu, sangat layak disimak. Berikut adalah puisi karyanya yang berjudul “Seruan yang Singkat”.

Seruan yang Singkat²²

...

Ya inilah sekarang zaman kemajuan
masanya bergerak pihak perempuan;
maju ke medan pengetahuan,
hilangkan segala adat kekunoan.

Asyiklah sekarang orang berkata,
hulu dan hilir semuanya rata;
zaman berubah sekarang nyata,
kaum kuno lenyap di mata.

Marilah saudaraku muda yang syahda,
tuntut pengetahuan jangan tiada;
laki-laki perempuan tiada berbeda,
di Taman ini bergurau senda.

...

Nyatalah di pikir di dalam hati
serta ditimbang diperamat;
kaum kuno hilanglah pasti,
kaum muda pasti berganti.

...

“Seruan” dalam puisi ini dapat dikatakan jelas dan cukup istimewa untuk zamannya. Demikian pula dengan tema yang cukup maju untuk masa itu, yaitu tema mengenai kesetaraan gender. Memang bukan hanya Djoemantan yang menyinggung posisi wanita dalam kehidupan; pejuang yang juga aktif dalam dunia intelektual, bernama Sutomo, pun telah menempatkan wanita dalam kesetaraannya dengan pria. Sajaknya yang berjudul “Teringat Tanah Air”²³ secara tersurat telah memperlakukan wanita secara sejajar dengan pria, dan secara tersirat diajak untuk turut ambil bagian dalam menjaga tanah air. Sutomo yang adalah “Dr. Sutomo” yang ikut mendirikan Budi Utomo, adalah penulis sajak ini yang besar kemungkinan menuliskan sajak ini sepulangnya kembali dari menempuh pendidikan di Amsterdam.

Latar belakang pendidikan dan keterlibatannya yang intensif dalam olah nalar secara formal di dunia akademis itulah yang agaknya telah menggerakkannya untuk mempunyai sikap yang intelektualistis dan mendahului zamannya. Pikiran-pikiran yang tersirat dalam sajak di bawah ini dapat dikatakan sudah moderen dibandingkan dengan alam pikiran yang biasanya ada pada zaman itu. Sajak karya Sutomo ini adalah sebagai berikut.

Teringat Tanah Air

Nyanyian, suara pencari yang Nyata
Mengetuk pintu alam yang baka,
Tetapi, ... tetapi,
Jangan lalui kemasyhuran dan kemewahan,
Hiduplah di hadapan Tuhan dan kemanusiaan.

Kebaikan dan kejahatan,
Yang timbul dari napsu durhaka,
Kebaikan serupa itu, jahat.
Kejahatan selalu jahat,
Kesucian yang di dalam hati,
Hamburkan di segenap sanubari.

Wahai, anak kita, putri putra
Putra ibu Pertiwi Ayah Akasa,
Berbuat dan siarkan kemauan Tuhan,
Jadikan dia sinar negeri kita,
Jadilah mata air sinar dunia.

Persoalan pria-wanita atau kesetaraan gender memang adalah hal yang tak boleh diabaikan atau dikesampingkan, namun persoalan penjajahan adalah hal yang lebih penting lagi untuk diekspresikan. Tentu, pengertian “penjajah” di sini bukan dalam kaitan dengan rasa hormat atau pemujaan terhadap praktik penjajahan melainkan pada kenyataan yang telah melecehkan bangsa lain. Di masa ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda atau masih di bawah kolonialisme Belanda, jelas tidak mudah bagi intelektual pribumi untuk menyuarakan perlawanan atau rasa anti kepada pihak penjajah. Sebab, jika ada perlawanan dalam bentuk apa pun pasti akan langsung ditindas sebab hal itu tentu merongrong wibawa penjajah. Oleh kenyataan yang seperti ini maka banyak siasat harus dilakukan, termasuk dengan menyamarkan identitas penjajah dengan nama lain. Kalau hal ini tidak dilakukan, nasib penulis yang berani menyuarakan ketidaksubukan terhadap praktik kolonialisme itu akan mengalami penangkapan atau penahanan seperti dialami oleh Mas Marco Kartodikromo.

Dalam salah sebuah sajaknya yang dimuat di *Sinar Hindia* pada tanggal 23 Desember 1918, Mas Marco memakai kata “kafir” yang sangat mungkin memang ditujukan kepada pihak penjajah, dan celaknya kata ini dibaca oleh oknum dari pemerintah Hindia Belanda, sehingga akibatnya Mas Marco harus menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Asisten Residen Polisi Semarang.²⁴ Dalam menjawab penyelidikan oleh pihak kolonial itu, Mas Marco megaku bahwa ada salah penulisan; yang seharusnya “fakir” telah salah ditulis sebagai “kafir”. Akan tetapi, kalau sajaknya dibaca dengan lebih seksama, secara tersirat Mas Marco agaknya telah memanfaatkan metafora pula, yang memang mengacu kepada pihak penjajah, yang artinya bahwa kata “fakir” yang dipakai sebagai pembelaannya adalah suatu pembelaan diri yang penuh siasat sebab agaknya peulisan “kafir” itu adalah suatu kesengajaan.

Potongan sajak Mas Marco yang memuat kata “kafir” tersebut dengan sejumlah metafora yang “mengarah” kepada suatu pemaknaan yang lebih dari sekadar yang tersurat dari kata-kata yang dipakai, dapat dibaca di bawah ini.

Bajak Laut

...

Si bajak laut menjadi gemuk
Uangnya banyak bertumpuk-tumpuk
Hasilnya banyak tinggal menggaruk
Saban hari musti main mabuk

Apa kabar orang bumi situ?
Banyak yang menguli mikul batu
Badannya rusak hatinya pilu
Pikiran bingung menjadi denggu

Sehari-hari bertambah-tambah
Bangsa bajak yang datang mitnah
Di tanah itu yang amat murah
Mencari makan tak dengan susah

Jangan tanya lagi orang bumi
Bertambah susah mencari nasi
Sebab tanahnya yang keluar padi
Banyak yang sama dijual

Untung sekali si bajak laut
Pinter menipu bisa memikul
Supaya dia suka menurut
Perintahnya yang tiada patut

Si Bajak laut semangkin kuat
Penjagaannya pun sudah rapat
Bertambah pinter pat-pat gulipat
Sampai mereka itu bersambat

Dia sambat-sambat minta makan
Kerna dia sudah kelaparan
Dan dihinakan seperti hewan
Oleh bangsa orang pemabukan

Bajak laut tak mempedulikan
Sambatnya orang yang kelaparan
Si bajak selalu meneruskan
Menghisap mereka sampai pingsan

Maka hal ini harus dipikir
Akan gunanya mengubah takdir
Supaya kita bisa mengusir
Manusia bangsa orang kafir

Apabila Mas Marco terkesan berani langsung berhadapan dengan pihak kolonial, penulis yang lain sangat mungkin juga mempunyai keberanian yang sama, namun berbeda dalam cara menyampaikan atau mengekspresikannya. Atau sangat mungkin juga, bukan pihak kolonial atau penjajah yang langsung menjadi sasaran tembak, melainkan pada kehendak untuk mempunyai tanah air sendiri yang terbebas dari penjajahan, baik oleh penjajah dari luar maupun penjajah yang dianggap sebagai sebangsa pada waktu itu. Dari sejumlah sajak yang mengungkap ihwal “tanah air”, konsep atau pemahaman mengenai entitas ini tidak semuanya sama dengan konsep tanah air sebagaimana kita pahami sekarang, baik secara ideologis maupun geografis. Pesastra yang bernama Sanoesi Pane, misalnya, membayangkan “tanah air” itu hanya sebatas meliputi atau berkenaan dengan “nasib” Pulau Sumatra yang adalah asal dari dirinya, seperti tampak pada sajaknya yang diterakan berikut ini.

Tanah Airku²⁵

Laksana mahkota intan permata,
Kujunjung tinggi, muda juwita;
Emas kencana permainan kata,
Kujunjung tinggi tandanya cinta.

Biar dicencang sampai mati,
Tiada ‘kan musnah cinta di hati;
Biarpun uang beribu keti,
Tiada kan kujual perasaan di hati.

Pulau Perca, Pula Andalas,
Hatiku selamanya suci dan ikhlas;
Menolong engkau tiadalah malas,
Senantiasa hari tiadalah tewas.

Walau di pasir, ditanami sari
Di kebun bunga, hutan baiduri;
Wajahmu di hati berseri-seri,
Kuingat-ingati setiap hari.

Ayuhai Sumatera permata ratna,
Meninggalkan engkau badanku lena;
Rasakan hati sudahlah fana,
Sakitnya tak dapat dituliskan pena.

Apa yang telah disuratkan oleh Sanoesi Pane dalam karyanya, yang membayangkan “tanah air”-nya hanya sebatas Sumatra, berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh sastrawan lain, semisal oleh Muhammad Yamin, yang dalam sajaknya tidak lagi sekadar berkutat atau berkenaan dengan semata-mata hanya Sumatra. Penyebabnya barangkali pada dinamika zaman kala itu yang secara cepat mengalami suatu pergerakan pemahaman akan konsep “tanah air” yang tentu saja bermuara pada wawasan serta gagasan yang melandasi atau yang berkembang pada masing-masing orang. Kembali kepada pemahaman Sanoesi Pane mengenai “tanah air” ini, pada dasarnya cukup dapat dipahami sebab ia mengemukakan gagasannya itu jauh sebelum ada peristiwa Kongres Pemuda. Seperti sudah diungkapkan juga, sajak Sanoesi Pane ditulis pada tahun 1921 sedangkan sajak Muhammad Yamin ditulis dua hari menjelang peristiwa Sumpah Pemuda di tahun 1928, yang secara nalar tentu dapat dimengerti adanya pemahaman dan penghayatan yang berbeda akan identitas “tanah air” itu. Sekaitan dengan hal ini silakan simak sajak Muhammad Yamin yang dikutip secara lengkap berikut ini.

Indonesia, Tumpah Darahku²⁶

Bersatu kita teguh
Bercerai kita jatuh

Duduk di pantai tanah yang permai
Tempat gelombang pecah berderai
Berbuih putih di pasir berderai,
Tampaklah pulau di lautan hijau
Gunung gemunung bagus rupanya,
Dilingkar air mulia tampaknya:
Tumpah darahku Indonesia namanya.

Lihatlah kelapa melambai-lambai
Berdesir bunyinya sesayup sampai
Tumbuh di pantai bercerai berai
Memagar daratan aman kelihatan;
Dengarlah ombak datang berlagu
Mengejari bumi ayah dan ibu,
Indonesia namanya, tanah airku.

Tanahku bercerai seberang menyeberang
Merapung di air malam dan siang
Sebagai telaga dihiasi kiambang,
Sejak malam di hari kelam

Sampai purnama terang benderang;
Di sanalah bangsaku gerangan menompang
Selama berteduh di 'alam nan lapang.

Tumpah darah nusa India
Dalam hatiku selalu mulia
Dijunjung tinggi atas kepala
Semenjak diri lahir ke bumi
Sampai bercerai badan dan nyawa
Karena kita sedarah sebangsa
Bertanah air di Indonesia

Bangsa Indonesia bagiku mulia
Terjunjung tinggi pagi dan senja,
Sejak syamsiar di langit nirmala
Sampaikan malam di hari kelam
Penuh berbintang cahaya bulan;
Mengapalah mulia, handai dan taulan,
Badan dan nyawa a pancarkan.

Selama matari di alam beredar
Bulan dan bintang di langit berkisar
Kepada bangsaku berani berikrar;
Selama awan putih gemawan
Memayungi telaga ombak-ombakan,
Sela itu bangsaku muliawan
Kepada jiwanya kami setiawan.

Ke Indonesia kami setia
Di manakah ia di hatiku lupa,
Jikalau darah di badan dan muka
Berasal gerangan di tanah awal;
Sekiranya selasih batang kemboja
Banyak kulihat ditentang mata
Menutupi ayah dan bunda?

Di batasan lautan penuh gelombang,
Mendekati pantai buih berjuang,
Terberai tanahku gewang-gemewang,
Sebagai intan jatuh terberai
Dilingkari kerambil lambai melambai
Menyanyikan lagu nan indah permai
Di sela ombak memecah ke pantai.

Duduk di pantai tanah yang permai
 Tempat gelombang pecah berderai
 Berbuih putih di pasar berderai
 Tampaklah pula di lautan hijau
 Gunung gemunung bagus rupanya,
 Dilingkari air mulia tampaknya;
 Tumpah darahku Indonesia namanya.

Memandang 'alam demikian indahnya
 Ditutupi langit dengan awannya
 Berbilalkan buih putih rupanya,
 Rindulah badan ingin dan rewan,
 Terkenangkan negeri dengan bangsanya
 Berumah tangga selama-lamanya
 Penuh peruntungan berbagai sejarahnya

Pasundan, 26 Oktober 1928

Dari sajak ini sudah sangat terasa kuat adanya pemahaman mengenai “tanah air” yang sudah seperti pemahaman umumnya kita pada masa sekarang, yang artinya, apa yang pernah dipikirkan atau dibayangkan oleh Muhammad Yamin ini merupakan suatu gambaran pemikiran yang dapat dikatakan sebagai telah mampu melampaui masa atau zamannya. Inilah kelebihan para sastrawan kita di masa itu, yang dengan penanya secara tidak langsung mampu melakukan semacam prediksi akan “nasib” bangsa ini ketika peristiwa “proklamasi” pun masih jauh dari kenyataan.

1) Polemik Kebudayaan

a. Polemik sebagai Representasi Dialektika Pemikiran

Dalam konteks atau kaitan dengan kegairahan “menjadi” suatu bangsa, utamanya hal ini dipicu salah satunya oleh semacam euforia dari peristiwa yang sangat bersejarah, yakni Kongres Pemuda II pada tahun 1928 yang melahirkan “Sumpah Pemuda”, merupakan hal yang sangat wajar apabila penentuan akan kedirian atau identitas kemudian mewujudkan menjadi semacam orientasi atau obsesi bagi sebagian orang, khususnya adalah mereka yang dengan sangat sadar perlu turut memikirkan persoalan ini. Sudah barang tentu, dari sekian banyak pemikiran yang sangat mungkin

ada dan barangkali saja juga sering diperdebatkan, yang pada gilirannya dikenal luas dan menjadi ramai sebagai polemik, adalah pikiran-pikiran yang dinyatakan atau dipublikasikan. Dengan memanfaatkan surat kabar atau majalah sebagai media yang terbit pada pertengahan tahun 1930-an, pikiran-pikiran itu secara nyata telah mampu mengajak siapa saja—khususnya para pembaca—untuk sama-sama memasuki wilayah dialektika yang bersifat intelektualistis. Lontaran-lontaran pikiran Sutan Takdir Alisjahbana yang kemudian ditanggapi oleh sejumlah seniman dan pemikir terkemuka di masa itu seperti Sanoesi Pane, Poerbatjaraka, Sutomo, Tjindarbumi, Adinegoro, M. Amir, dan Ki Hadjar Dewantoro, telah menunjukkan kepada kita akan kualitas perdebatan mereka yang sepertinya tidak lekang oleh waktu. Sampai kini pun, setelah lebih dari tiga perempat abad berlalu, perdebatan mereka masih terasa gaung dan maknanya, dan senantiasa tetap memberi inspirasi serta menyediakan ruang untuk berkaca dan mengintrospeksi diri, istimewanya dalam permasalahan identitas dan rasa kebangsa.

Perdebatan atau polemik di antara mereka, yang sesungguhnya berupa polemik antara Sutan Takdir Alisjahbana dengan para tokoh yang lain itu, dapat dikatakan sebagai fenomenal karena dimensi lintas-zamannya. Beruntunglah generasi sekarang karena masih dapat menyimak perdebatan itu dan rasa terima kasih pantas diberikan kepada Achdiat K. Miharja yang telah menghimpun perdebatan itu ke dalam buku “Polemik Kebudayaan”. Namun dalam perjalanan sejarah kebudayaan bangsa ini, bukan hanya perdebatan ini saja yang pernah terjadi, sebab memang ada beberapa peristiwa serupa, hanya secara cakupan permasalahan dan publikasinya tidak seintensif polemik di tahun 1930-an tersebut. Sebagai contoh, pada akhir tahun 1960-an, sempat terjadi perdebatan atas “Aliran Rawamangun” yang melahirkan buku *Kritik Atas Kritik Atas Kritik* (1975) atau *Pengadilan Puisi* yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1974.

Perdebatan yang kemudian sangat dikenal dengan “Polemik Kebudayaan” inilah yang hingga kini masih tetap relevan sebab inti perdebatannya adalah permasalahan yang penting dan mendasar, yaitu mengenai identitas sebagai bangsa atau dalam hal ini adalah “keindonesiaan”. Dari perdebatan yang terjadi, yang sangat menarik, adalah pada wujud perdebatan tersebut ketika Indonesia masih di bawah Pemerintah Hindia Belanda, yang bahkan dari sudut pandang sekarang pun, jalannya perdebatan itu dapat dinyatakan sebagai sudah sangat bertanggung jawab. Dapat dikatakan sebagai “bertanggung jawab” mengingat bahwa perdebatan yang terjadi bukan sekadar perdebatan tanpa dasar melainkan perdebatan yang jelas landasan logika atau nalarinya. Oleh kenyataan seperti ini, tidak salah kiranya jika apa yang telah ditunjukkan oleh Sutan Takdir Alisjahbana dan “kawan-lawannya” itu

dapat disebut sebagai representasi dari suatu dialektika pemikiran, yang dalam hal ini adalah pemikiran mengenai nasib atau kondisi bangsa yang tengah “menjadi” serta mengenai Indonesia di masa hadapan, yang sudah memperlihatkan taraf kedewasaan dan kematangan dalam bertukar pendapat.

b. Polemik Mengenai Indonesia dan Keindonesiaan

Satu hal yang mampu menyebabkan perdebatan di antara para tokoh tersebut tetap terasa selalu aktual, relevan, dan penting, adalah karena apa yang diperdebatkan menyangkut persoalan yang amat mendasar, yaitu mengenai jati diri atau identitas sebagai sebuah bangsa, serta orientasi yang sepatutnya dituju. Dalam kaitan dengan identitas sebagai bangsa “Indonesia”, Sutan Takdir Alisjahbana melontarkan pikiran-pikiran tajamnya yang memang bagi siapa saja, kiranya, akan terpicu untuk memberikan tanggapan atau pandangan yang berseberangan, terlepas dari benar atau tidaknya. Mengenai identitas “Indonesia” yang pada tahun-tahun itu masih merupakan suatu impian atau baru sebatas “bayang-bayang” belaka, Sutan Takdir Alisjahbana pernah mengemukakan gagasan yang dapat dinyatakan di sini sebagai telah melampaui umumnya kesadaran kolektif bangsa Indonesia di masa itu.

Apa yang dilontarkan oleh Sutan Takdir Alisjahbana sangat esensial dan mendasar sebagai pondasi bagi suatu kesadaran eksistensialistis yang sangat diperlukan. Berikut ini adalah pandangan kritisnya yang berkenaan dengan permasalahan “Indonesia” dan “keindonesiaan” yang dalam tulisan Sutan Takdir Alisjahbana ini langsung terdapat di awal tulisannya—sebuah awal yang sudah langsung mampu menarik perhatian dan mengundang perdebatan karena dengan terang benderang mampu menegaskan atau menggarisbawahi akan telah kacaunya pemahaman mengenai “Indonesia”.

Berbicara tentang masyarakat dan kebudayaan baru, yang dimaksud tentu adalah masyarakat dan kebudayaan Indonesia Raya, yakni masyarakat dan kebudayaan yang tergambar dalam hati semua penduduk kepulauan ini, terutama yang mengharapkan tempat yang layak bagi negeri dan bangsanya, berdampingan dengan bangsa lain di muka bumi ini. Untuk membicarakan masyarakat dan kebudayaan Indonesia Raya, pertama sekali kita harus memahami arti Indonesia sejelas-jelasnya, terlepas dari segala bungkus dan tambahan yang mengaburkannya.

Sesungguhnya, arti kata “Indonesia” sekarang ini sudah sangat kacau. Menurut para ahli bangsa, kata “Indonesia” dipakai untuk melingkupi seluruh penduduk di daerah yang membentang dari Pulau Formosa sampai ke Pantai Samudra Hindia, dari Madagaskar sampai ke Nieuw Guinea. Dalam pergaulan sehari-hari di negeri kita kata itu telah sangat populer.

Bagaimanapun menggembirakannya kepopuleran—menjadi lazimnya—kata “Indonesia” itu, tetapi satu hal tidak boleh kita lupakan: lantaran kepopuleran atau kelaziman itu artinya menjadi amat meluas sehingga menjadi kabur.

Segala yang ada dan yang terjadi, segala yang pernah ada dan pernah terjadi di lingkungan kepulauan kita ini, diberi nama “Indonesia”.²⁷

Melalui kutipan di atas, jelas bahwa ada kekhawatiran pada diri Sutan Takdir Alisjahbana akan telah disederhanakannya makna “Indonesia” oleh orang Indonesia sendiri di masa itu. Gugatan pun ia lontarkan dengan menyatakan bahwa telah terjadi ketidaktepatan ketika tokoh-tokoh yang hidup di masa lalu, seperti Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar, Diponegoro, Gajah Mada, dan yang lainnya, dianggap sebagai telah berjuang untuk Indonesia. Dalam pandangannya, para tokoh itu belum tentu berjuang untuk Indonesia sebagaimana Indonesia yang dicita-citakan maupun yang kita pahami sekarang ini. Ia menegaskan bahwa Diponegoro misalnya, memang telah menunjukkan perjuangannya, tetapi hanya untuk Tanah Jawa, dan bukan untuk Jawa secara keseluruhan. Demikian pula dengan Tuanku Imam Bonjol, menurutnya, berjuang hanya untuk Minangkabau dan Teuku Umar hanya untuk Aceh. Baginya, tidak ada fakta atau indikator yang menjamin bahwa masing-masing “pejuang” itu dapat bekerja sama dan tidak saling menyerang sebab jika ada kesempatan, mungkin saja mereka akan saling menginvasi atau menaklukkan.

Demikian pula dengan pembangunan Borobudur atau keindahan musik gamelan, menurut Sutan Takdir Alisjahbana, belum terbukti berkenaan atau merepresentasi ihwal keindonesiaan. Bahkan, ditulisnya, “buku *Hang Tuah* menurut ukuran sekarang jelas dapat dikatakan *anti-Indonesia*, sebab di dalamnya terdapat bagian-bagian yang menghina suku bangsa dalam wilayah kepulauan ini.” Dalam pandangannya lebih lanjut, disebutkan bahwa telah banyak orang yang secara gegabah mengaitkan setiap eksistensi atau peristiwa sebagai bersemangat keindonesiaan. Ke dalam

pengertian “Indonesia” itu, menurutnya, “diam-diam orang memasukkan beberapa hal yang sama sekali tak ada kaitannya dengan *perasaan* keindonesiaan. Hal itu lebih banyak merugikan daripada menguntungkan”. Dalam pandangan atau penilaiannya, “pengertian Indonesia yang sejati telah kabur, menjadi cerai-berai”.

Tentu saja, dalam kaitan ini, orang menjadi penasaran dan ingin tahu, “keindonesiaan” atau Indonesia seperti apa yang dicita-citakan Sutan Takdir Alisjahbana, jika pengertian “Indonesia” atau “keindonesiaan” yang telah ada ia ragukan atau bahkan ia tolak. Menjawab kemungkinan adanya rasa kepenasaran seperti ini, ia menjawab dengan pernyataan bahwa “semangat keindonesiaan itu merupakan ciptaan generasi abad kedua puluh, sebagai penjelmaan kebangkitan jiwa dan tenaga”.

Semangat Indonesia itu sesuatu yang baru, menurut isi dan menurut bangunnya. Ia tidak bertopang pada masa silam. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang kebesarannya dulu menguasai sebagian besar dari kepulauan ini, bukan *pelopor* keindonesiaan. Sebab waktu itu, suatu wilayah sama sekali tidak suka dikuasai oleh wilayah lain. Baik di dalam bangunan Sriwijaya maupun dalam bangunan Majapahit tidak ada sedikit pun hakikat semangat Indonesia, yaitu kemauan untuk bersatu yang didesak oleh kesadaran akan kepentingan dan cita-cita bersama.

Semangat Indonesia juga bukan berdasarkan asal bangsa atau ras yang satu, sebagaimana menurut hasil penelitian para ahli Barat. Meskipun penelitian di kemudian hari membuktikan bahwa yang mendiami kepulauan ini bukan hanya satu jenis bangsa, semangat Indonesia akan tetap hidup. Sebab ia lahir dari dasar *semangat membaja suatu generasi muda* yang lebih kukuh dari segala teori *keturunan*. Setinggi-tingginya teori keturunan yang mati itu hanya dapat memberi kekuatan dan kepercayaan kepada mereka yang lemah, yang perlu dorongan dari belakang. Namun bagi mereka yang kuat tulang belakangnya, adalah mengatasi segala dorongan kemauan, cita-cita, dan keyakinan yang bernyala-nyala, yang berkobar-kobar di dalam hatinya.

Sangat perlu dinyatakan dengan tegas, bahwa sejarah Indonesia dimulai pada abad kedua puluh, ketika lahir generasi baru di wilayah Nusantara ini, yang dengan sadar ingin menempuh jalan baru untuk bangsa dan negerinya.

Zaman sebelum itu, zaman hingga akhir abad kesembilan belas, ialah zaman pra-Indonesia, zaman jahiliyah keindonesiaan, yang hanya mengenal sejarah Hindia Belanda atau *Oost Indische Compagnie*, sejarah Mataram, sejarah Aceh, sejarah Banjarmasin, dan lain-lain.²⁸

Pendapat Sutan Takdir Alisjahbana yang sepertinya hendak menafikan dimensi kesejarahan pada bangsa ini atau memotong keterjalinannya dengan masa lalu, dapat diduga akan memperoleh tanggapan atau kritikan dari banyak pemikir atau pihak. Dan memang, tanggapan muncul, sehingga lahirlah apa yang dalam konteks ini disebut sebagai “Polemik Kebudayaan”. Namun sebelum menyimak tanggapan yang diberikan oleh beberapa tokoh kala itu, ada baiknya pula jika dipahami terlebih dahulu secara menyeluruh pendapat Sutan Takdir Alisjahbana, khususnya dalam kaitan ini yang berkenaan dengan Indonesia atau keindonesiaan, yang ditegaskan sebagai bukan kelanjutan atau penerusan dari zaman sebelumnya. Pendapat Sutan Takdir Alisjahbana yang sedemikian itu terkutip di bawah ini.

Zaman pra-Indonesia, zaman jahiliyah Indonesia, itu setinggi-tingginya hanya dapat menegaskan pandangan dan pengertian tentang lahirnya zaman Indonesia. Namun, zaman Indonesia sama sekali bukan kelanjutan atau terusan dari zaman sebelumnya. Sebab dalam isi dan bentuknya, keduanya berbeda: Indonesia yang dicita-citakan oleh generasi baru bukan kelanjutan Mataram, bukan kelanjutan kerajaan Banten, bukan kerajaan Minangkabau, atau Banjarmasin.

Menurut susunan pikiran ini, kebudayaan Indonesia pun tidak mungkin merupakan kelanjutan kebudayaan Jawa, kelanjutan kebudayaan Melayu, kelanjutan kebudayaan Sunda, atau kebudayaan yang lain. Pekerjaan Indonesia Muda bukanlah merestorasi Borobudur dan Prambanan, bukan pula mendirikan bangunan lain yang serupa dengan itu. Pekerjaan yang pertama dapat kita serahkan kepada para ahli purbakala, yang akan mencari batu yang telah dimakan zaman, yang akan membalik buku-buku tua untuk mengetahui bagaimana bentuk asli bangunan-bangunan itu. Sementara pekerjaan yang kedua ialah pekerjaan mereka yang kepandaianya hanya mengulang dan meniru. Indonesia muda

yang kuat degup jantungnya, yang darah mudanya deras mengalir, hanya akan membuka mata, membuka telinga, membuka pikiran untuk segala hal yang diterimanya. Dengan jalan demikian, informasi dari seluruh dunia kemudian dicerna di dalam jiwanya.

Dan ia akan menciptakan sesuatu yang dimiliki sendiri, cap Indonesia.

Sebab dalam hati kecilnya ia yakin seyakini-yakinnya bahwa tinggi rendahnya vonis sejarah atas dirinya bukan bergantung pada berapa banyak puja-puji, menghormati, dan meniru yang lama. Namun, pada apa yang dapat dibangunnya, yang lahir dari dasar jiwanya sendiri, yang setara bahkan melebihi zaman lampau.²⁹

Pernyataan Sutan Takdir Alisjahbana mengenai “Cap Indonesia” yang mandiri dan tidak bertalian dengan zaman lampau, niscaya akan sulit diterima oleh banyak orang. Demikian pula dengan pengabaian atas upaya melestarikan peninggalan masa lalu yang banyak dianggap orang sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap warisan nenek-moyang, tak pelak akan menimbulkan suatu tanggapan, sebab pandangan yang sedemikian ini jelas berselisihan dengan keumuman pandangan, bukan hanya bagi masa itu namun sangat mungkin juga bagi masa kini. Akan tetapi, sebelum menampilkan tanggapan-tanggapan berkenaan dengan hal ini, ada baiknya pandangan Sutan Takdir Alisjahbana kita biarkan mengemuka dulu secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Berikut ini lanjutan pandangannya.

Pada pikiran saya, pandu-pandu kebudayaan Indonesia harus bebas benar dari warisan kebudayaan zaman pra-Indonesia. Bebas bukan berarti *tidak tahu seluk-beluknya*; bebas hanya berarti *tidak terikat*. Sebab siapa pun yang belum dapat melepaskan dirinya dari kebudayaan Jawa akan berusaha memasukkan semangat kejawaan ke dalam kebudayaan Indonesia. Yang belum terlepas dari kebudayaan Melayu akan berupaya memasukkan semangat kemelayuan ke dalam kebudayaan Indonesia dan demikian seterusnya. Bagi mereka yang berpikir demikian, kebudayaan Indonesia ialah kebudayaan Jawa atau kebudayaan Melayu yang sedikit baru.

Hal itu berarti menimbulkan perselisihan dalam lingkungan Indonesia Muda sendiri. Suku Jawa tak akan

senang jika yang disebut kebudayaan Indonesia ialah kebudayaan Melayu yang diubah sedikit. Sebaliknya, suku yang lain pun tidak akan senang jika kebudayaan Indonesia merupakan kebudayaan Jawa yang diubah sedikit.

Sesungguhnya, mengaitkan ke masa yang sudah lampau berarti membangkitkan perselisihan. Sebab pada zaman pra-Indonesia bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara ini tak pernah mempunyai kemauan, cita-cita, dan pikiran bersatu dan berhubungan sehingga tak pernah melahirkan kebudayaan dengan semangat demikian.

Berarti kemauan bersatu yang mengandung semangat Indonesia tidak sedikit pun berurat akar ke masa yang silam, tetapi sebaliknya bertumpu ke masa yang akan datang dengan harapan agar mampu berdampingan sejajar bersama bangsa-bangsa lain di kemudian hari. Dengan meyakini bahwa yang diharapkan dan dicita-citakan itu hanya mungkin tercapai dengan bersatu melakukan pekerjaan bersama-sama.³⁰

Mengenai pandangan Sutan Takdir Alisjahbana sebagaimana telah dikemukakan pada halaman-halaman di depan, baik mengenai permasalahan identitas Indonesia atau juga soal keindonesiaan, seperti dapat diduga, tentu menimbulkan tanggapan yang beragam. Dalam kaitan dengan tanggapan yang berupa komentar lisan atau berupa tanggapan melalui radio, jika ada, tidak dapat ditampilkan di sini, sebab selain pada masa itu teknologi komunikasi masih amat sederhana, penelusuran atas hal yang seperti itu sulit dilakukan saat ini. Yang dapat diperoleh dan dibaca tentu adalah tanggapan yang berupa tulisan dan sudah dipublikasikan.

Tanggapan pertama yang dapat dikemukakan di sini adalah pendapat Sanusi Pane melalui artikelnya yang berjudul "Persatuan Indonesia" dan dimuat di *Suara Umum*, edisi 4 September 1935.³¹ Dalam tulisannya ini, dalam kaitan dengan identitas Indonesia dan keindonesiaan, Sanusi Pane menyatakan ketidaksetujuannya apabila dikatakan bahwa keindonesiaan belum ada di masa lalu. Pada zaman dulu, yaitu zaman Majapahit, atau zaman ketika Pangeran Diponegoro hidup, maupun zamannya Teuku Umar, menurut Sanusi Pane, sudah ada yang namanya keindonesiaan itu sehingga ia menyatakan bahwa tesis Sutan Takdir Alisjahbana tidak benar. Menurutnya, "keindonesiaan pada waktu itu pun sudah ada, keindonesiaan dalam adat, dalam seni. Hanya bangsa Indonesia belum muncul, orang Indonesia belum sadar bahwa mereka sebangsa". Lebih lanjut Sanusi Pane mengemukakan pendapatnya seperti berikut ini.

Sungguh boleh disebut ada imperialisme Sriwijaya, Majapahit, Mataram, tetapi hal itu tidak bertentangan dengan keindonesiaan. Di Belanda pun ada pertentangan, ada hegemoni daerah (lebih) dulu, tetapi siapa dapat menyangkal bahwa kebangsaan Belanda yang sekarang pada waktu itu sudah ada dan hanya menanti pengakuan dan wujud?

Kebangsaan Indonesia sudah ada semenjak dahulu kala. Sekarang dirasakan dan diwujudkan.

Dengan demikian, nyata kesalahan Tuan Sutan Takdir Alisjahbana dalam caranya mengemukakan masalah.

Sebaliknya, ia seharusnya berkata: Bagaimanakah kita harus memperbaiki kebudayaan kita sehingga sesuai dengan perasaan kebangsaan sekarang?³²

Selain Sanusi Pane, tokoh lain yang memberi tanggapan adalah filolog Purbatjaraka melalui tulisannya yang berjudul "Sambungan Zaman".³³ Tanggapan Purbatjaraka ringkas saja dan lebih menyoroti pada identitas Indonesia yang bagaimanapun merupakan kelanjutan dari masa sebelumnya. Purbatjaraka menegaskan bahwa "kelanjutan itu ada, dan tidak boleh dihilangkan". Bertolak dari kesadaran yang sedemikian ini Purbatjarakan menegaskan bahwa perjalanan sejarah harus senantiasa dianggap ada. Ini sebabnya, menurutnya, orang sesekali perlu menengok ke masa lalu untuk lebih memberi arti pada masa yang sedang dialami dan untuk menyiapkan masa yang akan datang.

Menurut perasaan saya, yang berguna buat tanah air dan bangsa kita ini ialah mengetahui jalannya sejarah dari dulu sampai sekarang. Dengan pengetahuan ini kita sekuat tenaga berusaha mengatur hari yang akan datang. Sebab hanya dengan pengetahuan inilah orang dapat memilih mana yang baik, mana yang tidak baik buat tanah air dan bangsa kita kelak.

Adapun pendapat Tuan Sutan Takdir Alisjahbana bahwa apa yang kita lakukan sekarang tidak harus berakar pada zaman silam, tetapi pada zaman yang akan datang, itulah sepanjang pikiran saya, terbalik belaka. Ada juga yang menyebutnya *waringin sungsang*, yakni pohon yang akarnya tumbuh di tempat pupusnya mesti keluar. Namun, istilah ini

biasanya dipakai orang di dunia mistik: di sana keadaannya memang serba terbalik dengan keadaan hidup di dunia.

Pendek kata: janganlah mabuk kebudayaan kuno, tetapi jangan mabuk kebaratan juga. Ketahuilah dua-duanya, pilihlah mana yang baik dari keduanya itu, supaya kita bisa memakainya dengan selamat di hari yang akan datang kelak. Inilah tugas berat untuk penganjur kita yang mau memperhatikan nasib bangsa kita, bangsa Indonesia kelak.³⁴

Atas tanggapan-tanggapan tersebut, Sutan Takdir Alisjahbana tidak hanya berdiam diri sebab tampaknya ia menengarai adanya kesalahmengertian terhadap pendapatnya yang mula-mula. Dalam koreksinya yang pertama, ia menjelaskan bahwa ia sadar penuh bahwa sejarah itu merupakan suatu yang berkelanjutan dan tidak berhenti. Tiap-tiap masa dalam sejarah, menurutnya, bersambungan dengan masa sebelumnya. Dinyatakannya bahwa “pembagian sejarah Nusantara ini dalam bagian pra-Indonesia dengan bagian Indonesia, bukan sekali-kali berarti bahwa zaman Indonesia itu tiba-tiba jatuh dari langit, tiba-tiba terjadi dari ketiadaan”.³⁵

Sedangkan mengenai “semangat Indonesia”, ia menjelaskan seperti di bawah ini.

Semangat Indonesia ialah kemauan yang timbul pada abad kedua puluh di kalangan rakyat yang berjuta-juta ini untuk bersatu. Dengan jalan demikian hendak berusaha bersama-sama menduduki tempat yang layak di sisi bangsa-bangsa lain. Kemauan dan cita-cita yang dijunjung dengan kesadaran semacam ini tidak pernah terjadi di lingkungan kepulauan ini sebelum abad kedua puluh.

Kehendak bersatu dan cita-cita mulia bersama yang dijunjung dengan sadar inilah ciri khas zaman Indonesia abad kedua puluh. Zaman sebelum itu yang belum mempunyai kemauan dan cita-cita secara sadar saya sebut dengan nama pra-Indonesia.

Kemudian mengenai “keindonesiaan”, Sutan Takdir Alisjahbana juga secara langsung menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan pada diri Sanusi Pane. Bahkan menurutnya, Sanusi Pane tidak mengerti arti semangat keindonesiaan sehingga arti “Indonesia” itu dicampuradukkan begitu saja.

Komentar Sutan Takdir Alisjahbana atas tanggapan Sanusi Pane adalah sebagai berikut.

Keindonesiaan yang dimaksud oleh Tuan Sanusi Pane yang ada pada zaman Majapahit, Diponegoro, dan Teungku Umar itu ialah keindonesiaan menurut ahli bangsa-bangsa. Keindonesiaan yang dimaksudnya itu adalah keindonesiaan yang tidak disadari, keindonesiaan yang terdapat juga di Filipina, Malaka, dan lain-lain.

Sedangkan keindonesiaan yang saya pisahkan dari pra-Indonesia itu ialah keindonesiaan yang disadari, yang lahir dalam abad kedua puluh ini. Keindonesiaan seperti yang saya maksud sampai sekarang belum terdapat di Malaka, dan lain-lain.³⁶

Sementara atas komentar Purbatjaraka, Sutan Takdir Alisjahbana juga memberikan tanggapannya, utamanya pada kata “kadang-kadang” yang dipakai untuk menyatakan bahwa Sutan Takdir Alisjahbana “kadang-kadang meniadakan, kadang-kadang mengakui adanya kelanjutan zaman silam dengan zaman sekarang”. Ditegaskannya bahwa pemakaian “kadang-kadang” menunjukkan sesuatu yang sesukanya atau semaunya saja padahal menurutnya yang ia pakai adalah “kadang-kala” dengan contoh “kadang-kala ada hubungan antara masa yang silam dengan masa yang sekarang, dan kadang-kala tidak”. Dan agar diperoleh gambaran yang lebih lengkap atas tanggapannya tersebut, berikut ini adalah pernyataannya.

Dalam arti mutlak masa yang sekarang selalu berhubungan dengan masa yang silam. Sejarah berlanjut terus. Tidak ada satu kekosongan antara dua bagian sejarah, sebab hakikat sejarah ialah perjalanan waktu yang tak ada hentinya.

Namun, sejarah selalu dibagi-bagi orang menurut ciri khas yang terdapat dalam penggalan sejarah. Revolusi Prancis, misalnya, dianggap orang sebagai suatu batas dalam sejarah. Bentuk pemerintahan kuno telah tertutup, lenyap, tidak berlanjut lagi. Sejarah baru pun dimulai. Dalam arti ini pulalah saya berkata, bahwa zaman pra-Indonesia tidak berlanjut dengan zaman Indonesia. Zaman pra-Indonesia sudah tertutup dan sekarang mulai zaman Indonesia. Antara kedua zaman itu ada perbedaan yang satu mengandung semangat Indonesia yang insaf dan sadar, yang lain tidak.

Dalam perbedaan ini pun saya menyadari bahwa perbedaan tentang kebudayaan dan sejarah bukanlah seperti perbedaan dalam matematika: lingkaran dengan segi tiga selalu jelas perbedaannya. Sebaliknya, zaman pra-Indonesia dengan zaman Indonesia ada bentuk peralihannya meskipun batas keduanya menjadi kabur.³⁷

Demikian tanggapan Sutan Takdir Alisjahbana atas komentar Sanusi Pane dan Purbatjaraka berkenaan dengan masalah Indonesia dan keindonesiaan.

c. Polemik Mengenai Orientasi Kebudayaan

Dalam hubungannya dengan kebudayaan apa atau mana yang pantas menjadi rujukan atau orientasi, Sutan Takdir Alisjahbana menyatakan dengan tegas bahwa negara-negara yang sudah terbukti maju, yang kedinamisannya sudah mampu membawa kemajuan bagi bangsa itu, yang layak menjadi acuan. Selain itu, masa yang telah silam yang tidak mungkin dapat dipakai sebagai landasan konstruksi untuk mewujudkan semacam persatuan, dalam pandangan Sutan Takdir Alisjahbana, harus ditinggalkan. Kebutuhan akan kehidupan yang ada di hadapan dan harus dihadapi dan dijalani yang seharusnya menjadi sumber pemikiran bersama. Kebersamaan yang diikat oleh suatu kepentingan inilah yang dibayangkan oleh Sutan Takdir Alisjahbana akan mampu menginspirasi hadir atau lahirnya semacam alat yang dapat dipakai untuk menciptakan suatu masyarakat yang dinamis. Dalam kaitan ini, kedinamisan menjadi semacam kata kunci sebagai prasyarat untuk maju dan kedinamisan itu bukan milik masa silam atau kepunyaan bangsa ini, melainkan adalah milik bangsa maju yang telah berkuasa di dunia seperti Eropa, Jepang, dan Amerika.

Oleh keyakinan yang sedemikian ini, dalam perjalanan untuk menjadi bangsa maju, Sutan Takdir Alisjahbana menyatakan bahwa tidak-mungkin-tidak kebudayaan Indonesia akan diperkaya oleh anasir kebudayaan luar, terutama dan seharusnya dari Barat sebab sudah terbukti bahwa Barat dewasa ini yang menjadi pemicu kemajuan. Dikatakan pula olehnya bahwa kebudayaan Indonesia semenjak dulu sudah mengalami akulturasi atau menyerap kebudayaan dari luar, yaitu setidaknya-tidaknya dari kebudayaan Hindu dan Arab. Namun, "sekarang, tiba waktunya mengarahkan pandangan kita ke Barat," tulisnya.³⁸

Pendapatnya mengenai perlu dan pentingnya Barat sebagai sumber atau acuan, dibandingkan dengan masa silam ketika Indonesia lebih

dipengaruhi atau berorientasi kepada tradisi Hindu dan Arab. Menurutnya, jika untuk sekian lama pengaruh Hindu dan Arab itu telah mewarnai kebudayaan Indonesia sementara kemajuan sebagai bangsa hanya biasa-biasa saja, maka tiba saatnya untuk menengok Barat yang lebih dinamis, sebagai sumber acuan. Kendati demikian, ia pun menyadari bahwa ajakan untuk berkiblat ke Barat, tentu akan penuh tantangan sebab anasir budaya dari Timur selama itu memang sudah mampu memberi warna dan bahkan banyak yang memosisikannya sebagai orientasi utama. Uraian berkenaan dengan mengapa Barat pantas sebagai kiblat dapat disimak dari kutipan berikut ini.

Bayangkanlah jarak antara Hindustan dengan negeri kita sepuluh abad yang lalu, sekurang-kurangnya harus ditempuh dengan waktu sebulan pelayaran. Sedang jarak antara negeri kita dengan Eropa sekarang ini (tahun 1935, *cat. peny.*) hanya butuh waktu tiga hari penerbangan. Hubungan dan pergaulan antara bangsa kita dengan bangsa Barat sekarang ini jauh lebih erat ketimbang dengan guru-guru bangsa saat membangun Borobudur seribu tahun silam.

Ucapan yang secara gamblang mengatakan bahwa masyarakat dan kebudayaan bangsa kita harus tumbuh mengarah ke Barat, boleh jadi akan membangkitkan amarah beberapa golongan di negeri kita sekarang ini. Sebab ada di antaranya yang dengan tidak sengaja dan tidak sadar meninabobokan rakyat banyak dengan ucapan-ucapan kosong dan tidak berarti: Timur halus budinya, sedang Barat egoistis, materialistis, dan intelektualistis. Mereka yang mempunyai anggapan seolah-olah semua orang Timur wali yang suci dan semua orang Barat penjahat yang tidak berhati demikian pasti akan kaget mendengar ucapan yang mengatakan bahwa orang Timur harus berguru kepada orang Barat.

Sekalipun tidak enak didengar, semboyan bahwa kita *harus belajar pada Barat*, meskipun menyedihkan, dalam hal ini rasanya kita tidak dapat memilih.³⁹

Kutipan di atas ini sudah sangat terang menegaskan sikap Sutan Takdir Alisjahbana akan budaya mana yang seharusnya diacu dalam pembentukan kebudayaan Indonesia. Atas keterusterangan dan ajakannya menetapkan Barat sebagai kiblat, ia pun sangat menyadari bahwa hal ini

niscaya akan memicu kontroversi mengingat masih banyaknya yang beranggapan bahwa Timur adalah sumber kebajikan sementara Barat hanya menawarkan kebatilan. Padahal, dalam pemahamannya, kemajuan yang telah dicapai hingga saat itu, yaitu sampai pertengahan dekade 1930-an, andil Barat sungguh sangat signifikan.

Bangkitnya semangat keindonesian yang dimulai oleh Budi Utomo pada tahun 1908, menurutnya adalah akibat pandangan dan gairah yang dipacu oleh merasuknya peradaban Barat ke dalam nalar dan mentalitas para tokoh pergerakan di awal abad ke-20 itu. Pendidikan Barat serta pola pergaulan sosial yang diadopsi dari Barat, tambahannya, jelas-jelas telah membangkitkan semangat keindonesiaan melalui organisasi modern yang tumbuh di awal abad ini. Pemimpin sejumlah organisasi yang pada kenyataannya memang mampu memicu pergerakan dan menjadi embrio kebangkitan kebangsaan, disebutkannya sebagai cara Barat yang telah membumi di Hindia Belanda. Demikian pun dengan kata “Indonesia”, tulis Sutan Takdir Alisjahbana, adalah juga dari Barat.

Apabila nyata kepada kita bahwa semangat kesadaran, semangat kebangkitan, semangat kebangsaan yang kita namakan semangat keindonesiaan itu sebagian besar berasal dari Barat atau sekurang-kurangnya dengan perantaraan Barat, wajarlah bila masyarakat dan kebudayaan yang dilahirkan banyak mengandung unsur kebaratan. Jika tidak demikian, tidaklah sesuai jiwa dengan bentuk, semangat dengan kerangkanya.⁴⁰

Apa yang telah diduga oleh Sutan Takdir Alisjahbana bahwa akan banyak yang “kaget mendengar ucapan yang mengatakan bahwa orang Timur harus berguru kepada orang Barat”, memang menjadi kenyataan. Paling tidak memang Sanusi Pane, masih dari tulisan yang sama seperti telah disebutkan, yang memberi tanggapan atas pernyataan Sutan Takdir Alisjahbana tersebut. Di dalam menanggapi pendapat Sutan Takdir Alisjahbana itu, Sanusi Pane menguraikan lumayan panjang mengenai sejumlah terminologi yang bersinggungan dengan kebudayaan Barat yang pada intinya belum mampu mengalahkan Timur. Disebutkan oleh Sanusi Pane bahwa karena di Barat itu alamnya kurang bersahabat maka penghuni daerah itu harus mencari sejumlah siasat untuk mempertahankan diri yang pada gilirannya kemudian melahirkan “materialisme” serta “intelektualisme” yang berdampak pada hadirnya “individualisme”.

Kesemua istilah yang sangat berkaitan dengan cara untuk mempertahankan hidup akibat ganasnya alam ini, memang melahirkan

kemajuan di satu sisi, namun di sisi lain kesempurnaan belum juga diperoleh. Sanusi Pane mengibaratkan hal tersebut dengan orang yang mencari makanan yang sesungguhnya sudah tercukupi namun belum adil dalam membagikannya sehingga masih saja ada yang kekurangan di samping yang berlebihan. Kondisi seperti ini, menurut Sanusi Pane, belum mampu mengalahkan keadaan di Timur yang masih lebih baik sebab alam lebih bersahabat.

Keperluan dan paksaan mempertahankan diri serta menentang alam memang ada. Karena itulah mungkin kemajuan dalam kebudayaan di Timur perbedaannya bertingkat-tingkat. Namun, meskipun ada tingkatan itu, semua bangsa di Timur mampu mencapai tingkat yang setinggi-tingginya, kalau seandainya mengikuti jalannya sendiri. Tingkat tertinggi itu ada di lapisan teratas dalam kebudayaan di India dan di Indonesia, yaitu lapisan yang berpusatkan kesunyatan, mistik, manusia bersatu dengan alam harus meniadakan keinginan jasmaninya dan membersihkan jiwanya.

...

Barat, sebagaimana kita lihat, mengutamakan jasmani, akibatnya lupa pada jiwa. Akalnya dipakai untuk menaklukkan kekuatan alam. Ia bersifat Faust, ahli pengetahuan yang mengorbankan jiwa asalkan menguasai jasmani.

Timur lebih mementingkan rohani sehingga lupa pada jasmani. Akal dipakainya untuk mencari jalan menyatukan diri dengan alam. Ia bersifat Arjuna yang bertapa di Indrakila.⁴¹

Komentar Sanusi Pane ini memperoleh tanggapan pula dari Sutan Takdir Alisjahbana yang pada intinya menyatakan ketidaksetujuannya jika dikatakan bahwa Barat lebih mementingkan jasmani sedangkan Timur lebih mementingkan rohani. Menurut Sutan Takdir Alisjahbana, orang yang tinggal di Timur maupun di Barat sesungguhnya sama-sama mementingkan jasmani dan rohani. "Namun, dalam hal jasmani orang Barat dapat mengalahkan orang Timur. Hal itu disebabkan oleh perbedaan cara berpikir antara Barat dengan Timur," tambahnya sekaitan dengan komentar Sanusi Pane.

d. Polemik Mengenai Sistem Pendidikan

Kongres pertama Permusyawaratan Perguruan Indonesia berlangsung di Solo pada tanggal 8, 9, dan 10 juni 1935. Dari jalannya

kongres, Sutan Takdir Alisjahbana mencatat bahwa kongres ini dapat dikatakan berhasil namun beberapa catatan telah dibuatnya. Yang pertama adalah mengenai terlalu “berhati-hatinya” para penyaji kertas kerja dalam menguraikan pikiran-pikiran mereka. Bagi Sutan Takdir Alisjahbana, kehati-hatian itu perlu namun orang yang sangat berhati-hati lebih banyak akan mengalami kekalahan dibandingkan dengan orang yang berani mengambil risiko.

Kehati-hatian dalam pengertian Sutan Takdir Alisjahbana lebih dikaitkan dengan kecenderungan yang serba “anti”, yaitu “anti-intelektualisme”, “anti-individualisme”, “anti-egoisme”, dan “anti-materialisme” yang mendominasi isi makalah para pemrasaran. Dalam penilaiannya, Drs. Sigit menunjukkan anggapan bahwa pengetahuan itu adalah kekuatan berbahaya yang mempunyai daya anarkis yang diakibatkan oleh pikiran liberal, bahaya pendidikan yang individualistik, dan bahaya yang terlalu mengedepankan hak individu.

Sementara penilaiannya atas Ki Hadjar Dewantara adalah pada penekanan mengenai lamanya belajar di sekolah yang sebanyak 8 jam yang akan melahirkan intelektualisme, namun juga akan menyebabkan terpisahnya sekolah dari kehidupan keluarga, sehingga menjadi sia-sia upaya untuk mendidik anak dengan budi pekerti. Demikian pula komentarnya atas prasaran Dr. Sutomo, Sutopo Adisaputra, dan Dr. Wediodingrat, cenderung negatif sebab para pembicara ini dalam penilaiannya telah memojokkan kecerdasan atau intelektualisme. Lalu apa yang sesungguhnya hendak dikemukakan oleh Sutan Takdir Alisjahbana?

Yang hendak saya nyatakan sekarang hanyalah bahwa prasaran itu kebanyakan mengandung semangat anti-intelektualisme, anti-egoisme, dan anti-materialisme. Di samping yang negatif, yang anti itu ternyata kebanyakan menghendaki kembali kepada yang lama, lari ke pesantren. Bukan suatu kebetulan Tuan Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara, dan Sutopo Adisaputra sama-sama mempropagandakan pesantren dalam prasarannya, meskipun misalnya pesantren yang dikemukakan Dr. Sutomo tidak sama dengan pesantren yang dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau saya tak keliru, Dr. Sutomo mengemukakan pesantren terutama sekali untuk menekan biaya menyebarkan kecerdasan. Bagi Ki Hajar Dewantara, pesantren ialah pusat pendidikan budi pekerti sebagai lawan sistem sekolah Barat.

Maka menurut pikiran saya, dalam pendirian anti-intelektualisme, anti-materialisme, dan pro-pesantren ini, ada

terselip kesalahan berpikir, kesalahan analisis, kesalahan mengemukakan persoalan.⁴²

Sutan Takdir Alisjahbana dalam tulisannya menegaskan bahwa pada umumnya orang-orang terpelajar di masa itu adalah hasil didikan Barat namun sayangnya tanpa mereka sadari masalah di Barat lalu juga menjadi persoalan bangsa Indonesia. Padahal, menurutnya, persoalan bangsa ini sejatinya bukan persoalan seperti yang ada di Barat, yaitu persoalan yang berkaitan dengan masalah intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme, namun adalah persoalan kurang dimanfaatkannya otak atau kecerdasan. Bangsa Indonesia, menurut Sutan Takdir Alisjahbana, telah hidup berabad-abad hanya sebagai parasit atau seperti benalu yang selalu menempel ke masa silam.

Berkat didikan Barat itu bangsa kita mulai memakai otaknya, mulai mempertimbangkan sendiri semua masalah, mulai berontak sebagai manusia yang ikut arus kebiasaan. Terhadap semua masalah, masyarakat di kalangan bangsa kita mulai timbul pikiran baru, orientasi baru: dalam hal politik, sosial, kebudayaan, dan agama.

Dengan menerima didikan Barat, di kalangan bangsa kita mulai hidup individu, mulai lahir kepentingan pribadi. Bangsa kita mulai tahu hak-haknya sebagai manusia yang dianugerahi perasaan dan pikiran sendiri. Ia mulai berani melepaskan dan memutuskan semua ikatan adat, ikatan takhayul, ikatan kebiasaan, dan lain-lain. Ia mulai merasa dirinya sebagai manusia bebas.

Melalui didikan Barat ia mulai memikirkan dirinya sendiri. Tidak takut mengemukakan pendapat pribadi. Mulai sadar haknya sebagai manusia dan sebagai anggota bangsa. Ia mulai berjuang bagi kepentingan dirinya dan kepeningan bangsanya.

Berkat didikan Barat bangsa kita mulai tidak mau hanya asal sekadar hidup. Kaum yang mendapatkan didikan Barat yang materialistia itu tidak dapat dan tidak sudi hidup dengan uang segobang sehari. Pakainnya tidak cukup lagi hanya sehlai saja dan ia mulai berminat tinggal di rumah yang layak. Ia mulai menghargai uang dan harta, dan mulai bekerja keras untuk mengumpulkan uang dan harta, yang sebenarnya menjadi hak dan kewajiban tiap-tiap orang.⁴³

Pendapat atau pandangan Sutan Takdir Alisjahbana yang dapat dikatakan sebagai lantang tersebut, tentu saja mendapat reaksi atau tanggapan dari banyak tokoh dan pendidik atau guru, utamanya yang namanya langsung disinggung dan pendapatnya langsung pula dicuplik dengan sejumlah catatan kritis. Maka tidak ayal jika kemudian dapat kita baca pandangan atau komentar R. Sutomo,⁴⁴ Tjindarbumi,⁴⁵ Adinegoro,⁴⁶ M. Amir,⁴⁷ dan Ki Hajar Dewantara⁴⁸ menanggapi kritik Sutan Takdir Alisjahbana.

Catatan Akhir :

- 1) Hamka, "Mengarang Roman," *Pedoman Masyarakat*, IV (51), 1938, h. 1033.
- 2) A. Teeuw, *Shair Ken Tambuhan*, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1966, h. xi. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Taufiq Ismail, seperti terlihat pada kutipan di halaman 40.
- 3) Sapardi Djoko Damono juga menegaskan perihal ini meskipun dengan embel-embel "tradisi tulis kita". Lihat Damono, *Puisi Indonesia Sebelum Kemerdekaan: Sebuah Catatan Awal*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2003, h. 2.
- 4) Dick Hartoko dan B. Rahmanto, *Pemandu di Dunia Sastra*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1986, h. 140.
- 5) Panuti Sudjiman, peny. *Kamus Istilah Sastra*, Jakarta: Gramedia, 1983, h. 135.
- 6) C. Hooykaas, *Perintis Sastra*, terj. Raihoel Amar Gelar Datoek Besar, Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1981, h. 10.
- 7) C. Hooykaas, *Penyedar Sastra*, terj. Raihoel Amar Gelar Datoek Besar, Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1981, h.18.
- 8) Damono, *Puisi Indonesia ...*, *op.cit.*
- 9) Kamus-kamus istilah sastra yang telah disebutkan dan dirujuk di sini umumnya hanya menyebutkan bahwa pantun adalah bentuk puisi lama tanpa menjelaskan kealamian pantun yang sesungguhnya berupa ekspresi bersastra dalam tradisi lisan. Lihat Sudjiman, peny. *op. cit.*; Zaidan, Rustapa, Hani'ah, *Kamus Istilah Sastra*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1983; dan Hartoko dan Rahmanto, *op. cit.*
- 10) Amir Hamzah, *Esai dan Prosa*, Jakarta: Dian Rakyat, 1982, h. 46.
- 11) Istilah "sonnet" dalam bahasa Inggris berasal dari kata Italia, *sonnetto*, yang dalam ungkapan kita kira-kira bermakna 'suatu suara atau nada yang lirih atau lembut'. Lihat Michael Alexander, *A History of English Literature*, Hampshire dan New York: Palgrave Macmillan, 2000, h. 82.
- 12) Sajak ini dimuat di *Bianglala*, No. 31, 19 Agustus 1870. Sumber pengutipan sajak ini adalah Suyono Suyatno, Juhriah, Joko Adi Sasmito, *Antologi Puisi Indonesia Periode Awal*, Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2004, h. 17-18.
- 13) Sajak ini dimuat dalam *Bintang Djohar*, Nomor 17, 3 Mei 1873. Sumber pengutipan sajak ini adalah Suyono Suyatno, Juhriah, Joko Adi Sasmito, *Antologi Puisi Indonesia Periode Awal*, Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2004, h. 18-19.
- 14) Hooykaas, *Perintis...*, *op.cit.*, h.105.

- 15) Informasi yang cukup lengkap mengenai G. Francis ini dapat dibaca pada buku karya Parmoedya Ananta Toer yang berjudul *Tempo Doeloe: Antologi Sastra Pra-Indonesia*, Jakarta: Hasta Mitra, 1982, h. 29-32.
- 16) Ajip Rosidi melalui tulisannya "Perlu Peningkatan penelitian Sastra Indonesia," dalam *Masalah Angkatan dan Periodisasi Sejarah sastra Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1988, h. 147 juga menyatakan hal yang hampir sama.
- 17) Sinyalemen ini dapat dibaca dalam tulisan Watson, *Loc.Cit.*.
- 18) F. Wiggers, "Lelakon Raden Bei Surio Retno," *Antologi Drama Indonesia, Jilid I: 1895-1930*, Jakarta: Amanah Lontar, 2006, h. 28.
- 19) Roestam Effendi, "Bebasari," *Antologi Drama Indonesia, Jilid I: 1895-1930*, Jakarta: Amanah Lontar, 2006, h. 219-221.
- 20) Taufik Abdullah, H. Misbach Yusa Biran, S.M. Ardan, *Film Indonesia: Bagian I (1900-1950)*, Jakarta: Dewan Film Nasional, 1993, h. 3.
- 21) *Ibid.*
- 22) Djoemantan, "Seruan yang Singkat," *Poetri Hindia*, II (5), 15 Maret 1909.
- 23) Sajak ini tidak diketahui waktu publikasinya. Namun mengingat bahwa Sutomo meninggal pada tahun 1938, besar kemungkinan bahwa puisi ini ditulis pada tahun 1930-an, kemungkinan di majalah *Poedjangga Baroe*. Sajak ini diperoleh dari buku S. Takdir Alisjahbana, *Kebangkitan Puisi Baru Indonesia*, Jakarta: PT Dian Rakyat, 1978, h. 85.
- 24) Lihat *Sinar Hindia* edisi 4 Januari 1919.
- 25) Sajak ini dimuat dalam *Jong Sumatra*, IV (9), 1921, h. 134.
- 26) Sajak ini dikutip dari buku yang disunting oleh Oyon Sofyan, *Sajak-sajak Perjuangan dan Nyanyian Tanah Air*, Jakarta: Penerbit Obor, 1995, h. 153-155.
- 27) Sutan Takdir Alisjahbana, "Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru: Indonesia-PraeIndonesia," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan IV, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008, h. 3-4. Tulisan ini pertama kali dipublikasikan melalui majalah *Pujangga Baru*, edisi 2 Agustus 1935.
- 28) *Ibid.*, h. 6-7.
- 29) *Ibid.*, h. 7-8.
- 30) *Ibid.*, h. 9-10.
- 31) Sanusi Pane, "Persatuan Indonesia," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan IV, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008, h. 18-25.
- 32) *Ibid.*, h. 20.

- 33) Purbatjaraka, "Sambungan Zaman," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan IV, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008, h. 33-35.
- 34) *Ibid.*, h.34-35.
- 35) *Ibid.*, h. 26-27.
- 36) *Ibid.*, h. 28-29.
- 37) *Ibid.*, h. 36-37.
- 38) ¹ Alisjahbana, *loc.cit.*, h. 11.
- 39) *Ibid.*, h. 11.
- 40) *Ibid.*, h. 42.
- 41) *Ibid.*, h.23.
- 42) Sutan Takdir Alisjahbana, "Semboyan yang Tegas: Kritik Terhadap Beberapa Prasaran Kongres Permusyawaratan Perguruan Indonesia," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan Ke-4, ed. Achdiat K. Mihardja, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 42-45.
- 43) *Ibid.*, h. 48.
- 44) R. Sutomo, "Kongres Pendidikan Nasional: Menyambut Pandangan Tuan Sutan Takdir Alisjahbana," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan Ke-4, ed. Achdiat K. Mihardja, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 51-65.
- 45) Tjindarbumi, "Mencari Perbandingan (Verhouding)," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan Ke-4, ed. Achdiat K. Mihardja, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 71-75.
- 46) Adinegoro, "Kritik Atas Kritik," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan Ke-4, ed. Achdiat K. Mihardja, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 111-121.
- 47) M. Amir, "Pertukaran dan Pertikaian Pikiran: Antara Tuan Sutan Takdir Alisjahbana, Adinegoro, dan Dr. Sutomo tentang Peradaban dan Kemajuan Bangsa Kita untuk Masa Depan," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan Ke-4, ed. Achdiat K. Mihardja, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 139-168.
- 48) Ki Hajar Dewantara, "Pembaruan Adab: Pesan Kepada Tuan-Tuan Sutan Takdir Alisjahbana, Dr. Sutomo, dan Sanusi Pane," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan Ke-4, ed. Achdiat K. Mihardja, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 169-173.

BAB VI

PEMIKIRAN KENEGARAAN MASA DEMOKRASI TERPIMPIN DAN ORDE BARU

Di penghujung masa pemerintahan militernya di Indonesia, Jepang memberi peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk membicarakan persiapan kemerdekaan melalui badan yang dibentuk pada Maret 1945. Ini merupakan salah satu bentuk realisasi 'janji kemerdekaan' yang akan 'diberikan' Jepang kepada bangsa Indonesia. Badan yang diberi nama Dokuritsu Zyunbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terdiri dari 60 anggota. Panitia Hukum dasar terdiri dari 19 anggota dibawah pimpinan Ir Sukarno. Sebagian anggota dari kepantiaan itu duduk pula dalam Panitia Kecil Perancang UUD dipimpin Mr. Soepomo. Dalam melaksanakan tugasnya BPUPKI melaksanakan sidang-sidang resmi dan tidak resmi. Sidang resmi pertama 28 Mei hingga 1 Juni dan sidang resmi kedua antara 10—17 Juli 1945 untuk membahas dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan, dan rancangan UUD yang dipimpin Dr. Radjiman Wediodiningrat. Adapun sidang tidak resmi dihadiri 38 orang anggota BPUPKI, berlangsung dalam masa reses antara sidang pertama dan kedua. Sidang-sidang ini membahas rancangan Pembukaan UUD 1945 di bawah pimpinan Ir Sukarno.

Merupakan catatan historis tersendiri bahwa para anggota itu bekerja dalam suasana masa perang dunia kedua. Itu artinya mereka bekerja dalam suasana yang tidak menentu oleh sebab itu ada semacam "tenggat" waktu yang mereka hadapi. Jika kemudian UUD 1945 sebagaimana yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dianggap sebagai konsitusi tertulis yang singkat, bahkan sering bersifat fleksibel, mungkin karena alasan waktu yang singkat itu.

Catatan dan rumusan sidang yang kemudian dihimpun sebagai risalah sidang BPUPKI (Sekneg RI 1996) kini dapat disebut sebagai dokumen politik bangsa yang sangat berharga. Berbagai pertanyaan sejarah yang

diajukan mengenai pemikiran kenegaraan bangsa ini mestilah bertolak dari dokumen itu. Faham kolektivisme atau individualisme Demokrasi adalah pokok pembahasan yang menjadi bahan perdebatan pemikiran mengenai kenegaraan Indonesia. Pada prinsipnya ada dua proses yang menjadi wahana untuk mewujudkan suatu negara yang kuat dan kehidupan masyarakatnya yang sejahtera yaitu melalui proses demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi politik adalah proses pelaksanaan kekuasaan yang berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh pemimpin untuk tujuan negara bangsa yang kuat dan berdaulat sehingga dapat melindungi kepentingan nasional. Sedangkan demokrasi ekonomi adalah jalan yang ditempuh untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Bagian akhir dari buku ini diberi judul **“Pemikiran Kenegaraan dalam masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru”** dengan sub-sub sebagai berikut:

A. KEKECEWAAN TERHADAP DEMOKRASI TERPIMPIN:
KEMBALI KE UUD 1945

Selepas perang kemerdekaan (1945-1949) muncul harapan yang tinggi dari masyarakat Indonesia agar segera terwujud hidup yang aman dan sejahtera. Tentu saja aspirasi tersebut sangat wajar mengingat perang telah mengakibatkan banyak penderitaan dan keadaan tidak menentu. Namun keinginan yang wajar itu tidak terpenuhi bahkan memunculkan rasa frustrasi yang berkepanjangan. Kehidupan bangsa dalam periode sesudah masa perang itu diwarnai dengan ketidakstabilan pemerintahan karena sering bergantinya kabinet. Banyak program yang seharusnya untuk mengatasi masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat menjadi terbengkelai.

Persoalan yang segera dihadapi bangsa Indonesia di awal periode itu justru yang mengemuka pada aspek politik adalah soal bentuk negara serikat dan konstitusi sementara tahun 1950. Republik Indonesia Serikat (RIS) yang menerima “penyerahan kedaulatan” dari Belanda pada Desember 1949, bukan merupakan bentuk negara sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, yakni negara kesatuan. Tidak itu saja tetapi juga karena ada anggapan kuat bahwa bentuk negara federal yang sebagian besar terbentuk oleh karena disponsori H.J. van Mook maka hal itu tidak ada alasan lain kecuali untuk menghancurkan Republik Indonesia. Trauma atas berbagai peristiwa Konferensi Malino dan Den Pasar menjadi dasar anggapan kuat sebagai faktor yang mengancam negara kesatuan dan persatuan bangsa.

Begitulah maka berbagai tuntutan dari berbagai kalangan dalam masyarakat dan daerah untuk membubarkan RIS dan kembali ke bentuk

negara kesatuan RI. Mohammad Natsir sebagai Perdana Menteri berperan besar dalam upaya mewujudkan terbentuknya NKRI. Sementara itu UUD 1950 yang mengamanatkan praktik pemerintahan negara dijalankan dengan sistem parlementer dianggap tidak sesuai dengan demokrasi yang berkepribadian bangsa Indonesia. Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 yang menyatakan konsitusi negara kembali ke UUD 1945 menandai bermulanya ciri kehidupan politik yang kemudian disebut sebagai “demokrasi terpimpin”. Periode 1950-1959 dalam sejarah bangsa kita memperlihatkan ketidakstabilan politik. Herbert Feith memilih istilah untuk menyebut periode itu sebagai masa “demokrasi konstitusional”.

Menurut konstitusi 1950 sistem pemerintahan kita adalah parlementer. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri. Wilopo menyebut periode ini sebagai “zaman pemerintahan partai-partai dan kelemahan-kelemahannya”. Wilopo juga menyebut masa ini sebagai “zaman kabinet silih berganti”. Proses demokratisasi sebenarnya telah dicoba dalam periode itu. Feith mengemukakan mengenai faktor yang menyebabkan kegagalan zaman demokrasi parlementer. Terdapat 6 faktor: kaum sipil memainkan peran dominan; partai-partai politik mempunyai kedudukan sangat penting; persaingan untuk merebut kekuasaan menghargai “rules of the game” yang erat dengan konstitusi; kebanyakan elit politik memiliki jenis kesetiaan yang berkaitan dengan demokrasi konstitusional; kebebasan sipil dilanggar dan pemerintah menggunakan kekerasan.

Kegagalan demokrasi parlementer menurut Wilopo, karena seringnya terjadi pergeseran dukungan partai terhadap kabinet. Pergeseran itu dapat berarti adanya partai yang menarik dukungan kepada pemerintah dengan menarik menteri-menterinya mundur, sehingga kabinet tidak dapat bertahan lama. Kelemahan lain adalah soal tawar-menawar alias “dagang sapi” di dalam pembentukan kabinet. Fraksi-fraksi besar pendukung kabinet tidak selalu mampu menanggulangi kumpulan fraksi-fraksi sedang dan kecil, yang selalu dapat menjadi oposisi, dan akhirnya menjatuhkan kabinet.

B. KEPERIBADIAN NASIONAL MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Gagalnya percobaan untuk menerapkan demokrasi parlementer telah mendorong lahirnya jenis tawaran baru demokrasi yang lain yang disebut “demokrasi terpimpin”. Protagonis sistem politik Indonesia dalam periode berikutnya itu adalah Presiden Soekarno yang didukung militer, khususnya Angkatan Darat. Presiden Soekarno muncul kembali di panggung politik setelah negara menghadapi ancaman perpecahan bangsa. Faktor pemersatu pada diri Soekarno tampaknya menjadi alternatif yang ditunggu-tunggu, setidaknya demikian Soekarno mempersepsikan dirinya. Ia melihat

bahwa sistem politik masa lalu itu tidak sesuai dengan “kepribadian bangsa”. Dengan tegas ia mengatakan bahwa demokrasi seperti itu (maksudnya “demokrasi parlementer”) adalah demokrasi liberal.

Ketidaksabaran Presiden Soekarno dalam untuk mengakhiri demokrasi parlementer sudah terlihat ketika ia sebagai Presiden menunjuk Soekarno sebagai seorang warga negara untuk menjadi formatur pembentuk kabinet sesudah kabinet Ali Sastroamidjojo II (1957). Maka terbentuklah kabinet karya yang dipimpin oleh Ir. Djuanda. Apa yang dimaksud “kepribadian bangsa” oleh Presiden Soekarno adalah jiwa gotong-royong yakni sebagai ciri sekaligus kekuatan bangsa Indonesia untuk menjawab tantangan yang dihadapinya. Jelaslah dengan cara pandang demikian, maka periode yang baru saja dilalui (1950-1957) dianggap sebagai “penyimpangan dari pola dasar kepribadian nasional”. Tidak hanya itu, Presiden Soekarno kini juga memberi penilaian tertentu terhadap revolusi fisik, nama yang ia berikan pada periode tahun 1945-1949.

Dengan konsepnya mengenai “revolusi yang belum” selesai, Presiden Soekarno menganggap bahwa maklumat politik (Bung Hatta) tanggal 1 November 1945 sebagai penyebab arah “revolusi kita” telah berubah kiblatnya dari arah dan nada yang revolusioner menjadi nada yang kompromistis, dan akhirnya di antara sekian jalan kompromi (Linggarjati dan Renville), “revolusi kita “ harus tunduk pada hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang telah menelurkan UUDS-Republik Indonesia Serikat (RIS). Bagi Soekarno UUD itu bukan saja jauh bertentangan dengan UUD 1945, melainkan juga sama sekali mengubah bentuk negara kesatuan RI menjadi negara RI. Sekalipun RI masih ada tetapi berubah statusnya hanya sebagai sebuah negara bagian.

Dilihat dari perspektif Soekarno, yakni menjadikan revolusi sebagai konsep yang terus bergejolak, pandangan ini melihat periode 1955-1959 sebagai “kelip api dalam kegelapan”.

Jika dicermati lebih dalam, kekuatan pendukung tindakan Presiden Soekarno mengubur “demokrasi liberal” tak dapat lain adalah peran tentara Angkatan Darat (AD). Munculnya kekuatan tentara perlu dilacak dari peristiwa yang terjadi pada bulan Oktober 1952. Suatu peristiwa kontroversial di dalam sejarah kontemporer Indonesia terjadi pada tanggal 17 Oktober 1952 di Istana Merdeka, Jakarta. Ribuan orang berunjuk rasa yang menyerbu gedung parlemen memporakporandakan sejumlah dokumen dan peralatan ruangan. Sementara itu pasukan artileri AD mengepung dan mengarahkan moncong-moncong senjatanya ke Istana. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti apa maksud pasukan itu. Apakah mereka tengah mengancam presiden atau hendak melindunginya (Idris, 1996: 136-142). Kepala Staf dan Wakil kepala Staf AD di damping Menteri Pertahanan

Sultan Hamengkubuwono IX, menghadap Presiden Soekarno. Mereka mendukung demonstrasi tentara untuk mendesak Presiden Soekarno membubarkan Parlemen (Sementara).

Mereka juga menolak campur tangan politikus sipil, terutama yang berasal dari PNI di Parlemen ke dalam urusan intern tentara. Pihak tentara melihat campur tangan itu sebagai batu sandungan bagi proses modernisasi tentara revolusioner. Dengan didampingi Wakil Presiden Hatta dan sejumlah menteri, pembicaraan menjadi panas, dan Presiden Soekarno tidak memenuhi tuntutan mereka. Soekarno lalu berpidato di depan massa demonstran dan mengatakan: "Saya tidak ingin menjadi seorang diktator". Peristiwa 17 Oktober 1952 itu berakibat timbulnya gejolak di dalam tubuh tentara AD sendiri. Muncullah dua blok, yakni kelompok yang merencanakan pembangunan AD yakni Simatupang dan A.H. Nasution, kelompok pro peristiwa 17 Oktober dan kelompok Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) yakni Kolonel Bambang Supeno dan Zulkifli Lubis, kelompok yang anti demonstrasi 17 Oktober.

Peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan awal ketegangan berkepanjangan antara pandangan "revolusi belum selesai" dan kebutuhan konsolidasi dan rasionalisasi" tentara. Inilah untuk pertama kalinya tentara terlibat dalam kancah politik nasional. Ketidakpercayaan militer terhadap politisi sipil telah mendorong pemimpin-pemimpinnya mengkonseptualisasikan pemikiran tentang eksistensi yang tepat. Mereka menyebut dirinya sebagai "anak kandung revolusi" dalam konstelasi politik di sebuah negara bangsa yang baru berdiri.

Sebagai republik yang masih muda, Indonesia mencoba menerapkan kehidupan demokrasi dengan dinamika yang kompleks terkait dalam aspek internal dan eksternal. Dalam aspek ke dalam masih ada masalah kedaulatan wilayah Irian Barat (Papua) yang belum masuk ke dalam negara kesatuan Indonesia. Perjuangan untuk membebaskan Irian barat berjalan panjang dan menimbulkan pertikaian partai-partai politik dan pengeluaran anggaran sehingga memperberat perekonomian negara. Masalah keamanan dalam periode ini ditandai dengan gejolak di beberapa daerah bahkan sampai menimbulkan gerakan dan pemberontakan terhadap negara. Gerakan Darul Islam yang muncul pertama kali di Jawa Barat pada tahun 1948 dipimpin S.M. Kartosuwiryo, mendapat dukungan dan meluas pada awal tahun 1950-an di Aceh dipimpin Daud Beureueh dan di Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar.

Sementara itu PRRI/Permesta meletus di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara pada tahun 1957-58. Terlepas dari apakah peristiwa tersebut sebagai suatu pemberontakan atau bukan latar belakangnya adalah karena masalah ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan antara Jawa dan

luar Jawa. dilihat dari perspektif keindonesiaan fakta ini merupakan masalah integrasi bangsa.

Bagaimana pemikiran para pemimpin bangsa menghadapi permasalahan kehidupan masyarakat yang muncul di kalangan para pemimpin bangsa masa ini sebagaimana dikelompokkan Herbert Feith: *solidarity maker* (SM) dan *administrator* (Adm). Kelompok SM memiliki kemampuan membangun dan memperkuat solidaritas yang berperan mempersatukan bangsa dalam menghadapi ancaman: neo-kolonialisme dan imperialisme, tujuan utopis dan *administrators* lebih masa depan. Ciri-ciri Tokoh utama kelompok ini adalah Presiden Soekarno dengan nama-nama yang menjadi perdana menteri dalam kabinet parlementer seperti Wilopo, Ali Sastroamijoyo. Sedangkan kelompok administrasi dengan keahlian mengelola pemerintah lebih secara teknis legal formal berlandaskan hukum.

Kepemimpinan revolusi berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan selama periode demokrasi parlementer. Pada prinsipnya mereka berbeda pandangan terhadap pilihan apakah “revolusi sudah selesai” atau “revolusi belum selesai”. Mohammad Hatta dan kelompoknya menganggap bahwa “revolusi sudah selesai”. Sesudah perang menghadapi Belanda yang diakhiri di meja perundingan KMB-- setelah didahului dinamika perlawanan bersenjata dan diplomasi—Hatta berpendapat bahwa pasak-pasak pada tiang masyarakat bangsa yang longgar dan bangunan yang nyaris hancur segera diperkuat, dan jangan dilanjutkan dengan revolusi selanjutnya. Kondisi yang aman merupakan modal bangsa untuk membangun dan segera mewujudkan kemakmuran bersama.

Sebaliknya, Sukarno dan kelompoknya berpendapat bahwa “revolusi belum selesai”, alasannya bahwa meskipun benar Belanda telah kalah, tetapi musuh bangsa Indonesia masih tetap ada dalam bentuk baru yakni neo-kolonialisme dan neo-imperialisme. Bagi Sukarno revolusi merupakan elan vital untuk menggelorakan perlawanan rakyat terhadap musuh-musuh tersebut.

Masa demokrasi dipimpin ternyata tidak memberi jawab atas masalah bangsa. Wacana dan pemikiran Presiden yang terus digaungkan secara retorik memang memukau dan memesona rakyat sebagai pendengar setia. Soekarno sendiri terpuakau pada dialektika revolusi yang terus digelorakan.

Perbedaan Sukarno dan Mohammad Hatta mulai tampak secara tajam sejak awal 1956 dan puncaknya dengan pengunduran diri sebagai wakil presiden. Itulah maka setelah dikeluarkannya Konsepsi Presiden, Mohammad Hatta segera memberi tanggapan berupa surat pribadi. Ini petikan surat pribadi Bung Hatta kepada Bung Karno tanggal 27 Februari 1957 :

“Bung Karno,

Sejak saya kemaren sore kembali dari Bandung sampai hari ini sudah banyak keluh kesah dari masyarakat yang disampaikan kepada saya, bahwa pemuda-pemuda bersenjata yang berpakaian militer giat sekali mengadakan terror untuk menekankan supaya konsepsi Saudara diterima. Bung Tomo didatangi oleh seorang dengan bersenjata untuk memaksakan, supaya ia menyetujui "konsepsi Bung Karno". [...] Djamaludin Malik sudah dua kali diancam dengan pistol, sehingga dia sekarang menyingkir ke Sumatera Tengah. Kiai Dahlan didatangi di rumahnya dan diancam supaya menyetujui konsep Bung itu. Nyonya Mr. Maria Ulfah Santoso dibawa dengan paksa dengan jeep dari gedung sensor film ke markas besar pemuda TP di Jalan Waringin, katanya untuk mempertanggungjawabkan pemutaran film cabul, tetapi diakhiri dengan gertak supaya konsepsi Bung Karno itu disetujui. [...] Kalau konsepsi Saudara itu oleh pengikut-pengikut Saudara, yang sering bertindak *plus royalists que de le roi*, mau dipaksakan menerimanya dengan jalan terror dan intimidasi, maka konsepsi itu **pada dasarnya** sudah gagal" (Lubis ed, 1986: 18-19).

Umumnya kemudian orang percaya bahwa dengan mengadakan pemilihan umum akan menjadi jalan bagi kestabilan politik dan pemerintahan. Sejak dirancang pada tahun 1946, pemilu dapat dilaksanakan pada tahun 1955 yakni untuk memilih anggota Konstituante yang akan menetapkan UUD dan anggota parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Meskipun Pemilu 1955 sebagai proses demokrasi merupakan prestasi tersendiri yang tercatat dengan tinta emas sejarah karena berjalan lancar aman dan sukses, namun dalam kenyataan kestabilan politik tidak segera terwujud.

Pertikaian partai dalam membentuk kabinet masih terus berlanjut. Tuntutan PKI sebagai peraih keempat peroleh terbanyak Pemilu untuk membentuk "kabinet empat kaki" tidak terlaksana. Sementara itu gejolak daerah dengan lahirnya PRRI dan Permesta mendorong Presiden Sukarno tampil dengan pemikiran untuk menjadikan nilai-nilai kepribadian bangsa sebagai landasan membangun bangsa. Pada bulan Februari 1957 Sukarno mengemukakan Konsepsi Presiden.

Pemilihan Umum 1955 yang semula diharapkan sebagai jalan keluar yang dapat mengatasi kemelut dan ketidakstabilan politik ternyata tidak menjadi kenyataan. Pemilu sebagai upaya untuk memperkuat system politik demokrasi liberal tidak berhasil. Ketidakstabilan politik menjadi faktor minimnya upaya yang dapat dilakukan dalam bidang ekonomi khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu untuk mewujudkan stabilitas politik, Presiden Sukarno mengumumkan gagasannya pada 21 Februari 1957 diberi judul "menyelamatkan republik Indonesia". Pernyataan ini dikenal sebagai "Konsepsi Presiden" yang menegaskan bahwa pada dasarnya bahwa sistem politik yang terbaik dan paling cocok

bukan praktik demokrasi liberal yang liar, demokrasi “zonder” pimpinan. Lebih lanjut Presiden Sukarno menganjurkan agar dibentuk pemerintah “stijl baru”.

Pidato Presiden Sukarno untuk memperbaiki system politik dan kehidupan bernegara yang sedang mengalami keterpurukan meskipun Pemilu sudah diselenggarakan, tidak cukup hanya dengan melakukan perombakan cabinet. Presiden mengatakan “ ... tetapi kita harus merombak gedung ini sama sekali; bukan saja merombak tiang-tiangnya, peratapannya, dinding-dindingnya, tetapi kita rombak sama sekali sam[ai ke fondamen-fondamennya. Dan kita mengadakan fondamen baru, mendirikan gedung baru sama sekali, yaitu gedung ketatanegaraan Republik Indonesia style baru .. [...] telah lebih daripada 11 tahun ini, kita tidak pernah mencapai kestabilan pemerintahan. [...] memang kita selalu gandrung kepada demokrasi dan ingin menyelenggarakan demokrasi itu, oleh karena memang demokrasi lah yang menjadi api pembakar hati kita, api pewahyu daripada segenap tindakan kita. Tetapi menurut keyakinan kita sebagai hasil pengalaman yang 11 tahun ini, demokrasi yang kita ambil, demokrasi yang kita pakai adalah demokrasi yang tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. yaitu apa yang kita namakan demokrasi Barat, namakanlah ini demokrasi parlementer. Tetapi tegas bagi saya demokrasi yang kita pakai 11 tahun ini adalah satu demokrasi impor, demokrasi yang bukan demokrasi Indonesia. [...] bukan demokrasi yang cocok dengan jiwa kita sendiri, maka kita mengalami segenap eksese-eksese daripada sekadar memakai barang impor. Segenap eksese-eksese daripada penyelenggaraan demokrasi yang bukan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian kita sendiri” (Kumpulan Pidato Bung Karno, 2001, 33-37).

Ada dua gagasan yang harus diwujudkan pertama dibentuknya Kabinet Gotong Royong yang terdiri atas orang-orang yang mewakili semua partai atau semua fraksi-fraksi yang mencerminkan seluruh perimbangan kekuatan yang di dalam DPR. Gambarannya seperti yang dikemukakan Presiden dengan istilah “*alle leden aan de werk en eet tafel*”, bahwa “semua anggota dalam kerja dan meja makan bersama”. Kedua, dengan membentuk Dewan Nasional. Gagasan itu didasarkan pada kenyataan bahwa terdapat berbagai golongan di dalam masyarakat yang berdasarkan fungsi dan pekerjaannya ikut dalam menentukan kehidupan negara, yang terwakili di dalam DPR.

Pada awal tahun 1959 tampak gejala makin berkurangnya ancaman terhadap disintegrasi bangsa dilihat dari gejolak dan pemberontakan daerah. Dalam pidato peringatan HUT 17 Agustus 1959, Presiden Sukarno telah menemukan jawab atas permasalahan yang bersifat dualistik: “dualisme antara pemerintah dan kepemimpinan revolusi” antara “

masyarakat adil makmur dan masyarakat kapitalis” antara “gagasan revolusi belum selesai dan kebutuhan akan konsolidasi”.

Situasi politik dan dukungan kuat tentara di bawah Jendral A.H. Nasution—yang telah belajar dari pengalaman masa lalu—telah memungkinkan Presiden Sukarno mengajukan gagasan dijalankannya demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin telah ditegakkan dengan “kembali ke UUD 1945” dan menolak UUD Sementara tahun 1950 dan dengan membubarkan parlemen yang dibentuk sebagai hasil Pemilu 1955. Tindakan yang dilakukan Sukarno ini menjadi salah satu faktor bagi terkendalanya perkembangan demokrasi di Indonesia. ini menandai masa transisi perjalanan ke demokrasi terpimpin sebagaimana dikatakan oleh Daniel S. Lev, dalam *The transition to guided democracy*.

Demokrasi terpimpin seperti dikatakan Sukarno merupakan “penemuan kembali revolusi kita raykat Indonesia”. Dalam sistem politik ini Presiden Sukarno bukan saja sebagai Presiden melainkan juga sebagai Kepala Negara tetapi juga pemimpin besar revolusi. Dalam peristiwa 17 Oktober 1952 tentara gagal memaksa presiden Sukarno untuk membubarkan

Sejak awal 1963 muncul suatu upaya pencarian kembali landasan ideology Demokrasi Terpimpin yang esensial. Wongsonegoro menekankan hubungan antara pemerintah dan rakyat dengan istilah kawula-gusti. Rakyat harus dibimbing sebaliknya pemimpin berkewajiban mengarahkan dan melindungi rakyat. Ini bukan sifat paternalistik. Wongso sudah sejak Persatuan Indonesia Raya (PIR) yang dibentuk pada 1948, setelah menyatakan keluar dari PNI.

Roeslan Abdulgani menyatakan kembali relevansi ide-ide Ki Hajar Dewantara bagi revolusi Indonesia. Sementara itu Soepomo menekankan pada kerukunan dan persatuan spiritual dalam pidato-pidato BPUPKI pada 1945. David Reeve mengemukakan terdapat empat polemik dalam perdebatan tentang kemana arah demokrasi terpimpin (Reeve, 2013:244-249).

Pertama, berasal dari Manifes Kebudayaan (Manikebu) yang dikeluarkan pada 17 Agustus 1963. Sesungguhnya selalu terdapat hubungan antara kebudayaan dan politik, sejak tahun 1920-an. Namun sejak tahun 1950-an terjadi perpecahan mendalam antara para penulis yang mengajukan tanggungjawab seniman untuk memilih tema dan presentasi dan mereka yang menyokong fungsi seni dalam melayani revolusi.

Tema kedua disokong secara lebih agresif pada akhir decade 1960-an oleh lembaga seniman PKI yang terorganisasi, yaitu Lekra. Isu impor film Amerika berkembang menjadi tema polemik ketiga. Dibentuk Komando pengganyangan Film Imperialis Amerika. Sedangkan tema polemik

keempat adalah mengenai isu reformasi agrarian. Kedua isu terakhir ini menjadi tema yang berdampak bagi keseluruhan sistem politik.

“Demokrasi Kita” Mohammad Hatta (1960) “sejarah Indonesia sejak 10 tahun yang terakhir ini banyak memeperlihatkan pertentangan antara idealism dan realita. Idealisme, yang menciptakan suatu pemerintahan yang adil dan yang akan melaksanakan demokrasi yang sebaik-baiknya dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Apalagi sejak dua tiga tahun yang akhir ini kelihatan tindakan-tindakan pemerintah yang bertentangan dengan Undang-undang dasar. Presiden, yang menurut Undang-undang dasar tahun 1950 adalah Presiden konstitusional yang tidak bertanggung jawab dan ikut dapat diganggu-gugat, mengangkat dirinya sendiri menjadi formatir kabinet. Dengan itu ia melakukan suatu tindakan yang bertanggung jawab dengan tiada memikul tanggung jawab. Pemerintah yang dibentuk dengan cara yang ganjil itu diterima begitu saja oleh Parlemen dengan tiada menyatakan keberatan yang prinsipil. Malahan ada yang membela tindakan Presiden itu dengan dalil “keadaan darurat”.

Kemudian Presiden Sukarno membubarkan Konstituante yang dipilih oleh rakyat, sebelum pekerjaannya membuat undang-undang dasar baru selesai. Dengan suatu dekrit pada 5 Juli 1959 dinyatakan berlakunya kembali undang-undang dasar tahun 1945.

C. NEFOS VERSUS OLDEFOS

Pemikiran Sukarno mengenai Indonesia sebagai bangsa yang besar direfleksikan ke dalam monumen dan bangunan seperti Tugu Monumen nasional yang mencerminkan semangat menentang neo-kolonialisme dan neo-imperialisme. Selain itu Monas juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Pada 27 Juni 1960 di Istana Negara Jakarta, Presiden Sukarno menerangkan makna Tugu adalah sesuatu yang menjulang:

“... adalah laksana satu ‘greep naar de sterren’ hendak memegang bintang menjulang mencapai bintang di langit.. Buatlah rakyat itu rakyat yang berjiwa. Buatlah Rakyat itu yang menuju pula kepada suatu kebudayaan yang tinggi. Buatlah Rakyat itu satu Rakyat yang mempelajari dan melatih dirinya dalam yang tinggi. Buatlah Rakyat itu Rakyat yang bangga atas dirinya sendiri. Buatlah Rakyat itu satu Rakyat yang bangga atas perjuangannya. Buatlah Rakyat itu Rakyat yang menghormati pahlawan-pahlawannya yang telah gugur sesuai dengan ucapan saya: bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati pahlawan-pahlawannya yang gugur; bangsa yang demikian itu bisa menjadi bangsa yang besar. Itu

semuanya masuk di dalam golongan kebutuhan yang urgen (Salam 1989:22-23)."

Keberhasilan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 mendorong Sukarno lebih keras dalam menentang kolonialisme di dunia. Dunia saat itu bagi Sukarno adalah zaman masih terdapat banyak bangsa yang belum merdeka yang sebagian besar di Asia Afrika. Tahun 1960-an meskipun sudah mulai banyak bangsa memperoleh kemerdekaannya, namun bentuk baru penjajahan tetap berlangsung. Kolonialisme belum benar-benar hapus di muka bumi. Dalam konteks itu Sukarno mengemukakan gagasan dan menggalang negara-negara Asia Afrika sebagai kekuatan baru untuk melawan negara-negara kolonialis yang sudah mapan, apa yang disebut sebagai "kekuatan lama" (Old established forces=OLDEFOS).

Oleh karena itu sebagai antitesisnya Presiden Sukarno hendak membangun "new emerging forces" (NEFOS), yakni negara-negara yang baru merdeka dan sedang berkembang. Dalam kerangka itu pula Presiden Sukarno berpidato di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1960 berjudul "membangun dunia baru". Presiden Sukarno melihat situasi zaman ketika itu memperlihatkan tatanan dunia yang timpang antara negara-negara yang kaya dan maju dengan yang miskin dan masih terbelakang.

Pidato Presiden Sukarno di PBB : " Di jaman perang urat syaraf ini (PBB) haruslah dipindahkan ke Jenewa, Asia, Afrika atau ke daerah netral lainnya di luar salah satu blok. PBB dilahirkan di saat umat manusia sedang bangkit kembali dari neraka peperangan. Dalam banyak hal, Piagamnya mencerminkan sekarang. PBB sekarang adalah bukan PBB di bulan Juli di sdan Fransisco duapuluh tahun yang lalu, pula dunia sekarang bukanlah dunia pada waktu itu. PBB hanya menjadi medan perdebatan (Sosroatmdjo dalam Katoppo (ed), 1982:323).

Lebih lanjut Presden Sukarno menegaskan:

"Karena PBB didirikan di saat berakhirnya Perang Dunia Kedua agar terjamin koeksistensi secara damai, maka sekarang prinsip dasarnya sudah menjadi kuno. Ketidakseimbangan dunia pada waktu sekarang ini tidak terletak antara negara-negara besar yang sekarang ini senantiasa saling menguji kekuatan masing-masing, akan tetapi terletak dalam pertentangan hidup antara bangsa-bangsa yang baru berkembang dengan bangsa-bangsa imperialis. Seperti terbukti dengan ketegangan di Asia tenggara dan Kongo, maka kekuatan-kekuatan yang baru berkembang meliputi setiap orang. Oleh karena itu justru mereka yang menjadi perhatian dari PBB. Akan tetapi baik Piagam PBB maupun Preambulenya tidak menyebut-nyebut perkataan kolonialisme. Selama dua puluh tahun revolusi yang meliputi tiga perempat bagian dari muka bumi ini, Barat terhindar dari peperangan.

Timur tidak pernah mengenal keadaan damai. Setelah datang perdamaian untuk Eropa, kami merasai keganasan bom atom. Kami mengalami Revolusi Nasional kami sendiri di Indonesia. Kami merasai penyiksaan di Vietnam. Kami menderita penganiyaan di Korea. Kami menghadapi sakratul maut di Aljazair. Dan di saat luka-luka di Asia masih belum sembuh, maka saudara-saudara kami di Afrika dianiaya—herankah orang bahwa sekarang ini kami menuntut, ya, menuntut penghentian siksaan terhadap kami? (Sosroatmodjo dalam Katoppo ed, 1982:323).

Pada masa ini Presiden Sukarno dengan sangat antusias mencanangkan prgram pembangunan karakter bangsa. Istilah yang terlanjur dikenal “nation and charater building” sejatinya tidak sekedar membangun bangsa tetapi juga membangun karakter (nya) bangsa itu. Dalam pidatonya pada HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1963, Presiden m,emberi judul “Genta Suara Revolusi Indonesia”. Sukarno berpidato “saya telah mengemukakan fikiran-fikiran yang mendasari proses “nation building”, yaitu adanya keinginan bersama untuk membangunkan jiwa yang bersatu, persatuan karakter karena persamaan nasib dan patriotisme” (Capita Selecta Kesatuan bangsa, 1964:11). Dari ungkapan itu dapat dikatakan bahwa “pembangunan bangsa” dilakukan dengan “pembangunan karakter”.

Pemikiran Bung Karno terhadap Indonesia adalah suatu bangsa besar yang karena perjuangan panjang dan hebat mampu merebut kemerdekaan. Dan nilai dan semangat itu harus terus digelorakan. Obsesi Presiden Sukarno dalam menajdikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar tanpa dalam kebijakan dan program pemerintah di saat itu. Untuk menyelenggarakan Asia Games IV, Indonesia sebagai tuan rumah harus menyediakan sarana olah raga yang bukan saja memadai mestinya yang megah. Itulah sebabnya di dalam ingatan kita masa ini disebut sebagai zaman pembangunan proyek mercu suar, akan tetapi bagi Sukarno ini soal harga diri dan martabat bangsa. Menanggapi tunduhan itu Presiden Sukarno menegaskan:

” Aku harus membangun bangsa Indonesia. Banyak orang yang berhati katak dengan mentalitas warung kopi menghitung-hitung pengeluaran itu dan menudhku menghambur-hamburkan harta rakyat. Ini semua bukanlah untuk kejayaanku, semua ini dibangun demi kejayaan bangsa. Supaya bangsaku dihargai oleh seluruh dunia. Tulang punggung tanah airku membeku ketika mendengar pertandingan Asian Games 1963 akan diadakan di ibukotanya. Kota-kota lain mempunyai stadion yang lebih besar, tapi tak satupun yang mempunyai atap melingkar seperti kepunyaan kami. Yah, memberantas kemiskinan memang penting, akan tetapi memberi makan jiwa yang telah diinjak-injak dengan sesuatu yang dapat membangkitkan kebangsaan mereka ini pun penting (Adams 1966:432).

D. DARI TRAGEDI NASIONAL KE PEMBANGUNAN NASIONAL:

Akhir masa pemerintahan demokrasi parlementer berujung pada peristiwa tragis yang terjadi pada tanggal 1 Oktober dinihari 1965. Suatu aksi yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Tiga Puluh September telah melakukan penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira TNI. tindakan kudeta terhadap pemerintah yang syah itu telah menimbulkan gejaka politik yang berkepanjangan. Sejak itu situasi krisis yang terus menerus menyebabkan ketidakstabilan kehidupan sosial dan politik. Setelah mendapat desakan kuat dari massa demonstrasi di akhir tahun 1965 dan awal 1966, maka Presiden Sukarno memberikan Surat Perintah kepada Jendral Soeharto untuk mengambil tindakan untuk mengatasi masalah bangsa tersebut.

Soeharto tidak menginginkan terjadinya goncangan yang lebih keras. Pada bulan Juni 1966 dalam sidang umum ke IV MPRS menetapkan keabsyahan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Atas landasan ini Soeharto mendapat mandat dari MPRS untuk menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan dalam masa transisi kekuasaan.

Tampaknya Soeharto tidak mau mengambil suatu tindakan yang terlampau drastis yang jelas akan menimbulkan ketegangan politik dan yang akan menimbulkan pertentangan fisik karena Angkatan Bersenjata akan terlibat di dalamnya, sehingga sebagian besar rakyat akan terganggu hidupnya dan Orde Lama akan mendapat angin.

Terbentuklah “Kabinet Ampera” yang mau tidak mau masih menunjukkan kompromi antara pikiran lama dan pendapat baru. beberapa tokoh yang dianggap dekat dengan Presiden Soekarno masih masuk dalam kabinet ini, dan Soeharto ditetapkan sebagai Ketua Presidium Kabinet/Menteri Utama Hankam.

Seminar Angkatan darat di Bandung merumuskan Orde Baru, menghendaki suatu tata pikir yang lebih realistis dan pragmatis, walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan, diutamakan kepemimpinan nasional, walaupun tidak meninggalkan ideologi perjuangan anti kolonialisme dan anti imperialism. Orde Baru pada hakikatnya adalah suatu tatanan, sedangkan tujuannya ialah menciptakan kehidupan sosial, politik, ekonomi, kultural yang dijiwai oleh moral Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada peringatan hari Proklamasi 17 Agustus 1966 Presiden Soekarno berpidato “Jangan Sekali-Sekali meninggalkan Sejarah” (Jasmerah). Jika dicermati seksama pidato itu sesungguhnya memperlihatkan aspek psikologis Sukarno sebagai tokoh utama bangsa yang sedang mengalami masa surut. Sukarno khawatir rakyat Indonesia akan melupakan perannya yang begitu hebat dalam membangun solidaritas bangsa. Bagi Soeharto pidato itu

terasa sekali bahwa Soekarno mengkritik keputusan yang dikeluarkan MPRS beberapa bulan sebelumnya. Sejak pidato itu timbul reaksi di kalangan masyarakat yang memihak dan kontra terhadap Bung Karno.

Orde Baru lahir dari runtuhnya kehidupan politik Demokrasi Terpimpin yang revolusioner dan menimbulkan konflik dan pertentangan di kalangan masyarakat bangsa. Harapan kehidupan bangsa yang menjadi lebih baik gagal diwujudkan, mirip seperti aspirasi yang muncul setelah perang kemerdekaan. Harapan suatu kehidupan politik yang stabil pun tidak terwujud, malahan yang terjadi adalah “jor-joran” politik. Akar-akar dan sumber konflik berlatar social-ekonomi yang lama tersembunyi tiba-tiba muncul dan mengobarkan konflik antar golongan ideologis yang saling berkompetisi.

Gambaran suasana harmonis berubah dalam sekejap ketika bukan saja konflik dan kekerasan melainkan juga terjadi pembunuhan. Malam bencana 1 Oktober dini hari dengan gugurnya 6 jenderal dan seorang perwira TNI menandai tonggak sejarah sebelum dan sesudahnya. Peristiwa ini seperti “point of no return” bagi akhir nasib sebuah partai yang memperoleh suara terbanyak keempat Pemilu 1955, PKI.

Di awal masa Orde baru, Soeharto dan dukungan tentara menghadapi masalah yang segera harus diatasi adalah ketidakstabilan politik sebagai warisan zaman liberal dan Orde Lama. Mirip ketika Sukarno bersikeras untuk memaksakan “retooling” dan “herordering” atau “rekonstruisasi sistem politik”, Soeharto dengan Orde Baru-nya juga berbicara tentang pentingnya “restrukturisasi politik” dalam kerangka kehidupan yang stabil dan harmonis. Sebagai pengganti gagasan yang terus-menerus melekat pada Demokrasi Terpimpin yaitu “paradigma konflik” melawan “musuh-musuh revolusi”, Orde Baru merumuskan “paradigma konsensus”. Demokrasi terpimpin memakai kata-kata hiperbola dan ungkapan bernada keras seperti “hancurkan kepala batu” “retool”, maka Orde Baru memperkenalkan istilah halus atau eufemisme seperti “diamankan” tetapi artinya “ditangkap” atau “dibunuh” bukan bermakna “dilindungi”. Jadi kedua rezim itu sesungguhnya mengaburkan realitas.

Pemerintah Orde Baru tidak menawarkan teori baru atau ideologi revolusi. Meskipun “revolusi” itu sendiri seperti “ideologi” untuk waktu lama dianggap sebuah kata kotor setidaknya dihindari karena tidak disukai. Sebagai pengganti teori revolusi Orde baru mengajukan “Trilogi Pembangunan” yang terdiri dari tiga aspek penting yakni “stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan”. Perhatikan aspek pertama yang menekankan pentingnya “stabilitas” sebagai landasan kehidupan politik bangsa. Ini karena faktor trauma yang ditimbulkan peristiwa tragis tahun 1965-66.

Presiden Soeharto berpidato di depan DPR pada tanggal 16 Agustus 1967:

“Fungsi dan tujuan Orde Baru adalah mempertahankan memurnikan wujud dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Orde Baru tidak lain adalah tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan Undang-undang dasar 1945”.

Kata-kata “diletakkan kembali” dalam konteks itu karena Orde Baru bereaksi untuk mengadakan koreksi total atas “penyimpangan” terhadap pancasila dan UUD 1945 rezim sebelumnya. Dalam pidatonya itu, pejabat Presiden juga menyerang Orde Lama meninggalkan sila-sila Pancasila. Orde Lama telah mengabaikan hak-hak azasi manusia karena semua aspirasi ditentukan ditentukan oleh kemauan penguasa.

Presiden Soeharto mengulangi pidato kenegaraan tahun 1968 berjanji untuk mengatasi keterbengkelaian proses demokratisasi yang harus dihidupkan kembali. Soeharto tidak menyukai istilah “revolusi multi kompleks” yang akan menutup jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa masyarakat adil dan makmur. Tiga masalah berat yang dihadapi adalah merekonstruksi tatanan masyarakat-bangsa, merehabilitasi ekonomi bangsa, dan merumuskan format politik yang cocok masyarakat-bangsa. Dalam pandangan Soeharto kegagalan pembangunan pada masa demokrasi liberal karena terjadi ketidakstabilan politik dan masa demokrasi dipimpin kehidupan politik didominasi oleh Presiden Sukarno dan PKI. Dalam masa ini politik menjadi panglima. Dalam kunjungan ke Lampung, Juni 1968 mengemukakan agar masyarakat meninggalkan pertentangan politik dan agama, sehingga dapat dicapai stabilitas nasional yang merupakan syarat mutlak pembangunan nasional.

E. JATIDIRI & DEMOKRASI PANCASILA

Masyarakat Indonesia dalam visi Suharto adalah kehidupan yang berdasarkan Pancasila di mana warga negara Indonesia hidup yang selaras dan berdampingan tanpa memedulikan perbedaan di antara mereka.

Selain meletakkan landasan dan kerangka bagi pemulihan ekonomi, Soeharto berhati-hati sekali dalam menekankan landasan ideologis pemerintahannya. Agar jangan sampai terulang seperti terjadi pada masa lalu, maka stabilitas suatu kondisi yang tak boleh ditawar. ABRI adalah kunci stabilitas itu. ‘sejarah’ bagi Soeharto yang dikemukakannya pada April 1969 telah menempatkan Angkatan Bersenjata Indonesia sebagai stabilisator dalam mewujudkan perjuangan bangsa”. Soeharto menempatkan peran ABRI sedemikian penting, seperti tampak dalam kaitannya dengan

penanaman ideology Pancasila. Bagi Soeharto Orde Baru adalah orde Demokrasi Pancasila yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan golongan atau pribadi. Mereka yang perilakunya tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 akan berhadapan dengan ABRI (Elson 2001: 305).

Sesungguhnya tidak terdapat perbedaan yang tajam jika dibandingkan antara pemikiran Presiden Soeharto da yang harus Presiden Sukarno dalam hal karakter bangsa. Dengan menekankan istilah “jati diri” pada dasarnya sama dengan “kepribadian bangsa”. Kedua nya tidak menginginkan pengaruh asing ke dalam ciri bangsa yang bangun dari nilai-nilai dari dalam sendiri.

Dasar pemikiran Soeharto untuk meletakkan landasan ideologis pemerintahannya dilakukan dengan sangat berhati-hati. Elson mencatat bahwa pemikiran Soeharto itu dengan memanfaatkan, memperkuat, dan memperluas gagasan-gagasannya yang ia kembangkan pada tahun 1950-an, yaitu Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila meletakkan dasar konsensus bagi dinamika kehidupan masyarakat di bidang politik. Dalam pengamatan Elson pula bahwa pandangan Soeharto tentang Pancasila begitu sempit. Hal itu dapat dilihat dari pidato Soeharto pada 15 April 1968 yang menegaskan bahwa “ mencoba-coba menggunakan dasar negara yang lain dari Pancasila atau menyelewengkan pelaksanaannya, hanya akan membawa malapetaka bagi seluruh bangsa seperti pengalaman pahit masa lalu” (Elson 2001: 330).

F. WAWASAN NUSANTARA DAN GLOBALISASI

Perjuangan bangsa Indonesia untuk terus menerus mewujudkan NKRI sebagai suatu ruang kehidupan bersama yang terintegratif merupakan tantangan yang tidak mudah apalagi dihadapkan pada arus globalisasi. Akan menjadi lebih berat lagi ketika abad ke-21 ini kita menyaksikan terjadinya pergeseran kekuatan dunia ke Asia Pasifik. Dengan apa yang disebutnya sebagai “re-balancing of power”, Amerika Serikat kini telah menggeser fokus politik globalnya ke wilayah Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) berada di antara dua benua dan samudera yang secara geostrategik memengaruhi perubahan geopolitik.

Presiden Soeharto “ kita memiliki kurang-lebih 13.000 pulau. Di tengah itu ada lautan dan selat-selat yang cukup luas. Bahkan dari keseluruhan wilayah kita sekarang yang lebih dari 5,5 juta km², 2/3nya adalah lautan, perairan, dan Cuma 1/3-nya daratan. Secara geografis, Indonesia mempunyai kekhususan. Kita di persimpangan jalan antara dua benua, antara Asia dan Australia, antara dua samudera, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

Dengan demikian, letak Indonesia sangat strategis. Deklarasi 13 Desember 1957 merupakan salah satu sendi pokok dari kebijaksanaan pemerintah mengenai perairan Indonesia, menyangkut soal kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Dengan deklarasi itu pemerintah RI mengemukakan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia. ... semua kepulauan dan laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat”

“undang-undang yang ditetapkan 1960 mengubah penetapan laut wilayah Indonesia dari suatu cara penetapan laut wilayah selebar 3 mil diukur dari garis pasang surut atau garis rendah (low water line) menjadi laut wilayah selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar. Seluruhnya ada 200 titik pangkal yang dihubungkan oleh hampir 200 buah garis pangkal lurus dengan jumlah panjang seluruhnya sebesar lebih dari 8.000 mil laut.

“keuntungan yang kita peroleh dengan cara penetapan batas-batas berdasarkan konsepsi nebara kepulauan ini tidak kecil, yaitu kedaulatan RI yang penuh atas kurang lebih 3.000.000 km² lautan dengan dasar serta tanah di bawahnya di dalam batas-batas negara Nusantara, ditambah dengan 800.000 km² landas kontinen di laut batas-batas negara kepulauan dengan ditambah pula dengan 3.000.000 km² hak mengeksploitasi kekayaan alam berdasarkan zone ekonomi eksklusif.

Wawasan Nusantara ditetapkan pada tahun 1973 sebagai Tap IV MPR-RI, namun beberapa negara tidak mengakui RI sebagai negara kepulauan berdasarkan konsepsi itu, mereka adalah Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Selandia Baru.

Maka diperjuangkan dalam forum internasional sejak juli 1974 dalam konferensi Hukum laut Internasional, memperjuangkan konsepsi Hukum Negara Kepulauan. Diperjuangkan dalam forum internasional, setelah konsepsi itu disahkan menjadi bagian dari Konvensi Internasional, berarti lebih menatapkan negara RI sebagai negara Nusantara ditinjau dari sudut Hukum Internasional. Sementara kita harus memberi jalan keluar yang akomodatif bagi kepentingan negara dan bangsa lain, yakni untuk menghubungkan antara lautan Pasifik dan Lautan Hindia, antara benua Asia dan Afrika, baik melewati darat maupun udara. Memang banyak yang mempunyai kepentingan dengan wilayah kita ini, kalau kita ingin memperoleh pengakuan sebagai negara kepulauan, Negara Nusantara, dimana kita mempunyai kedaulatan di darat, di laut, maupun di udara, kita harus memberikan jalan kepada mereka.

“di banyak kunjungan kenegaraan saya langsung mengemukakan masalah kekuasaan negara kepulauan itu. Hal ini diakui oleh Prof. Dr. Mochtar

Kusuma Atmaja, ahli kita di bidang hukum laut dan diplomasi, banyak membantu usaha memperoleh pengakuan dunia internasional. Secara pribadi saya juga turut memikirkan jalan keluar dari masalah-masalah sulit, antara lain masalah lintas kapal perang. System sumbu adalah salah satu hasil pemikiran saya yang timbul pada saat masalah ini saya bicarakan dengan Mochtar Kusumaatmaja di tahun 1976".

Sementara pihak merasa lautan kita itu lautan bebas. Maka mereka melakukan dengan caranya sendiri melewati lautan kita yang mengakibatkan kedaulatan kita diinjak-injak. Maka saya berikan petunjuk, tentukan porosnya, jangan sampai perairan kita ini bisa dijelajahi dengan semau-maunya" kita izinkan mereka menggunakan poros yang kita tentukan itu. Tetapi tentu saja dengan syarat, yakni harus memberi tahu lebih dahulu, "saya mau lewat", begitu isyarat mereka, dan kita izinkan mereka lewat.

Deengan demikian, kita bisa mengawasi mereka dan kita tidak merasa kedaulatan kita dilanggar oleh mereka yang mau menggunakan jalur itu.

Dalam rangka memperkenalkan dan memperjuangkan prinsip Wawasan Nusantara itu, gagasan kita lontarkan melalui forum internasional, yakni konferensi PBB tentang Hukum Laut.

Dalam sidang di bulan April 1982, telah berhasil disahkan rumusan-rumusan tentang Hukum Laut sebagai yang telah dibahas selama hampir 10 tahun, menjadi konvensi Hukum Laut Internasional Baru yang di dalamnya tertera prinsip-prinsip Hukum Laut tentang Wawasan Nusantara dalam bentuk prinsip-prinsip mengenai negara kepulauan.

Sekarang, dengan cara penetapan batas-batas berdasarkan konsepsi negara kepulauan ini, kita harus memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang kita peroleh yang tidak kecil artinya itu. Konvensi Hukum Laut 1982 itu telah ditandatangani oleh Indonesia dan oleh lebih dari 150 negara lainnya. Setelah DPR kita menyetujui konvensi itu di bulan Desember 1985, saya sebagai Presiden mensahkan konvensi itu dengan UU no.17, pada akhir Desember tahun itu. Tinggallah sekarang kita mendorong supaya negara-negara ASEAN, Pasifik, khususnya Jepang dan Korea Selatan, negara-negara maju, dan negara berkembang lainnya meratifikasinya.

Wilayah negara Indonesia pada saat diproklamasikan (17 Agustus 1945) tidak seluas dari cakupan yang berdasarkan pengakuan UNCLOS. Pada tahun 1945 wilayah Indonesia sekitar 3 juta km persegi dan bertambah menjadi 5 juta km persegi. Untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara kesatuan dengan wilayah yang demikian luas diperlukan sistem komunikasi satelit domestik sebagai wahana memperlancar hubungan.

Adalah menarik untuk mengetahui bahwa pemikiran Presiden Soeharto dalam hal wilayah Indonesia tampaknya mengacu pada sejarah zaman Majapahit. Begitulah Soeharto lalu mengingat pada sejarah Majapahit, ketika Gajah Mada dulu yang telah bersumpah. Inti dari ikrar itu, seperti banyak dirumuskan bahwa tidak akan makan buah palapa sebelum persatuan dan kesatuan Kerajaan Majapahit menjadi kenyataan. Soeharto pun berpendapat kekokohan persatuan dan kesatuan Nusantara diperteguh dengan diluncurkannya satelit Palapa itu yang merupakan bagian penting daripada sistem satelit domestik. Dengan sistem ini hubungan komunikasi dari satu tempat ke tempat lain di seluruh Indonesia menjadi lancar dan cepat. Karena itulah sistem satelit domestik itu kita beri nama “Palapa” sebagai lambang terjemahnya sumpah Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara.

Juwono Sudarsono, professor Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, pernah mengemukakan bahwa bangsa Indonesia memiliki dua pemimpin nasional yang memberikan sumbangan besarnya sehingga disebut sebagai “pembangun bangsa” (nation builder) yakni Presiden Sukarno. Sedangkan Presiden Soeharto disebut sebagai “pembangun negara” (state builder). Dalam masa Soeharto memang tampak semakin terintegrasinya wilayah negara kesatuan Indonesia. banyak jaringan infrastruktur dibangun dalam masa ini.

Tahun 1980-an, Soeharto “Kita di tengah Dunia Sekarang” dunia masih jauh dari aman. Pertarungan kekuatan adikuasa Amerika dan Rusia. Politik seperti tampak kita cenderung ke barat, namun tetap bebas dan aktif.

Di tahun 1990-an, ada ungkapan Presiden Soeharto yang mungkin masih dapat diingat dalam menghadapi globalisasi, yang intinya begini: mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap kita harus memasuki era globalisasi, zaman keterbukaan. Ini menarik dicermati karena tidak sampai satu dekade kemudian, justru salah satu faktor yang menjatuhkan Soeharto adalah arus globalisasi yang tak mudah dibendung, dengan satu kata kunci “keterbukaan”. Media sosial seperti jaringan internet telah mempermudah hubungan antar individu atau kelompok masyarakat terutama yang digerakkan dari kampus-kampus yang kemudian menjadi faktor menguatnya ikatan mereka dalam suatu gerakan menjatuhkan pemerintahan Soeharto.

LAMPIRAN 1:

“Als ik eens Nederlander was ...” Door R.M. Soewardi Soeryaningrat

“In couranten-artikelen wordt thans ten overloede het denkbeeld geprppageerd om een groot feest hier in Indie te houden; het eeufest van Nederlands Vrijheid. Het mag voor de inwoners van deze landen niet ongemerkt voorbij gaan, dat het in de komende maand November juist honderd jaren geleden zal zijn, dat Nederland een koninkrijk werd en de Nederlanden een onafhankelijke natie vormden, al stond het als zoodanig ook achteraan in het gelid der mogendheden.

Uit een oogpunt van redelijkheid valt inderdaad veel te zeggen voor deze aanstaande viering van een nationale gebeurtenis. Immers pleit dat alleen voor de vaderlandsliefde der Nederlanders, voor hun pieteit jegens het land, waar eens uitdrukking van hun gemoed van trots, dat een eeuw geleden he aan Nederland gelukt was, het vreemde overheerschingsjuk af te schudden en zelf een natie te vormen.

Ik kan mij gemakkelijk in den gemoedstoestand indenken van den Nederlandschen patriot van thans, wien het gegeven is zulk een jubileum te vieren. Wan ook ik ben patriot, en, gelijk de Nederlander van zuiver nationale richting zijn Vaderland lief heeft, zoo heb ook ik mijnen eigen Vaderland lief, meer dan ik zeggen kan.

Wat een vreugd, wat een genot zal het wezen een nationalen dag van zoo groot gewicht te kunnen herdenken. Ik wilde, dat ik voor een oogenblik Nederlander kon wezen, niet een Staatsblad-Nederlander, doch een zuiver onvervalschte zoon van Groot Nederland, geheel vrij van vreemde smetten. Wat zou ik dan jubelen als straks in November de lang verbeide dag komt, de dag der vrijheidsfeesten. Wat zou ik dan juichen bij het vrijelijk zien wapperen der Nederlandsche vlag met het strookje Oranje daarboven. Ik zou tot heesch wordens toe medezingen het “Wilhelmus” en het “Wien Neerlands bloed”, als straks de muziek zou inzetten. Ik zou verwaand kunnen zijn van al die manifestaties, ik zou God danken in de christelijke kerk voor zijn goedheid, ik zou een wensch, een smeekbede ten hemel zenden om ‘t behoud van Neerlands macht, ook in deze Kolonien, opdat het ons mogelijk zou blijven, onze grootheid te handhaven met deze kolossale macht achter ons. Ik zou alle Nederlanders hier in Insulinde vragen om financieelen steun, niet alleen voor het feest zelf, doch

ook voor de vlootplannen van Colijn, die zoo ijverde voor het behoud van Neerlands onafhankelijkheid, ik zou ik weet waarlijk niet, wat ik dan verder zou doen, als ik Nederlander was; want ik zou tot alles in staat zijn, geloof ik.

Neen, toch niet! Als ik Nederlander was, zou ik nog tot alles in staat zijn. Ik zou inderdaad wenschen, de komende onafhankelijkheidsfeesten zoo uitgebreid mogelijk te organiseeren, doch ik zou niet willen, dat de inboorlingen dezer landen aan die herdenking mee deden, ik zou hen verbieden mee te jubelen bij de festiviteiten, ik zou zelfs het feestterrein wenschen at te zetten, opdat geen inlander wat zoude kunnen zien van onze uitgelaten vreugde bij deze herdenking van onzen vrijheidsdag.

Daar light, dunk me, zoo iets van onwelvoegelijkheid in, het lijkt me zoo ongegeneerd, zoo ongepast, indien wij-ik ben hog eltijd Nederlander in verbeelding-den inlander laten mede juichen bij de herdenking onze onafhankelijkheid, wij kwetsesn heneerstens in hun fijn eergevoel, doordat wij hier in hun geboorteland, waar wij overheerschen, onze eigen vrijheid hardenken. Wij jubelen thans, omdat we honderden jaren geleden verlost werden van een vreemde heerschappij; en dit allez zal nu plaats hebben ten aanschouwe van hen, die nu nog steeds onder onze heerschappij staan. Zouden wij niet denken, dat die arme geknechten ook niet snaken maar het oogenblik, dat ze evenals wij nu, eenmaal zulke feesten zouden kunnen vieren?! Of meenden wij soms, dat wij door onze lang doorgezette, geestdoodende fnuik-politiek den inboorlingen alle menschelijke zielsgevoelens hadden gedood? Dan zouden wij toch zeer zeker bedrogen uitkomen, want zelfs de onbeschaafdeste volken verwenschen allen vorm van overheersching. Als ik Nederlander was, zou ik dan ook geen onafhankelijkheidsfeest vieren in een land, waar wij het volk zijn onafhankelijkheid onthouden.

Geheel in de lijn van dezen gedachtengang is het onbillijk niet allen, maar ook ongepast, om de inlanders to doen bijdragen ten bate van het feestfond. Beleedigt men ze reeds door de idee der feestelijke herdenking zelf van Neerlands vrijheid, thans maakt men ook hun beurzen ledig. Voorwar een moreele en stoffelijke beleediging!

Wat denkt men toch met al dat feestgevier te kunnen bereiken, hier in Indie? Als het een uiting van nationale vreugde moet beduiden, dan is het wel onverstanding om het hier in een overheerscht land te doen. Men stoot het volk hier voor het hoofd. Of wil men daarmede een grootheidsbetoogingin politieken zin ? Vooal in deze tijden, waar het volk van Indie bezig is zich te vormen en nog in een slaapdrongen periode van ontwakingverkeert, is het een tactische

fout, om dat volk het voorbeeld te geven, hoe het eventueel zijn vrijheid moet vieren. Men prikkelt zoo de hartstochten, men ontwikkelt onbewust den vrijheidszin, de hoop op een komende onafhankelijkheid. Zonder opzet roept men het inlandsche volk toe: "klijkt, menschen, hoe wij onze onafhankelijkheid herdenken; hebt de vrijheid lief, want het is een waar genot, om even vrij volk te wezen, vrij van alle overheersching!"

Als de maand November dezes jaars voorbij zal zijn, zullen de Nederlandsche kolonisten een politiek waagstuk hebben uitgehaald. De risico zij dan op hun rekening. Ik zou de verantwoordelijkheid niet willen dragen, al was ik ook een Nederlander.

Als ik Nederlander was, nu op dit moment, dan zou ik pretesteeren tegen het denkbeeld dezer herdenking. Ik zou in alle couranten schrijven, dat het verkeerd is, ik zou mijn mede-kolonisten waarschuwen, dat het gevaarlijk is in dezen tijd vridheidsfeesten te houden, ik zou alle Nederlanders afraden, om het ontwakende, vrijmoedig geworden volk van Neerlandsch Indie voor het hoofd te stooten en het mogelijk tot britaliteit te brengen. Waarachtig, ik zou protesteeren met alle kracht, die in me is.

Doch ik ben geen Nederlander, ik ben slecht een bruine zoon van dit tropisch land, een inboorling van deze Nederlandsche Kolonie, en daarom ook zal ik niet prosteeren.

Want als ik protesteerde, zou het mij kwalijk worden genomen. Ik zou immers het Nederlandsche volk, dat hier in mijn land regeert, beleedigen en van mij afstooten. En dat wil ik niet, dat mag ik niet. Als ik Nederlander was zou ik immers het inlandsche volk niet voor het hoofd willen stooten?!

Ook zou men mij brutaal kunnen noemen tegenover Hare Majesteit, onze geerbiedigde Konigin, en dat zou onvergeeflijk zijn, want ik ben haar onderdaan, die haar steeds trouw moet blijven.

En daarom protesteer ik niet !

Integendeel, ik zal aan de feesten deelnemen. Als straks een collecte wordt gehouden, dan zal ik mijn bijdrage doen, al moest ik daardoor mijn huishoudelijke begrooting tot op de helft terug brengen. Het is mijn plicht als inlander van Nederlan's Kolonie, om den onafhankelijkheidsdag van Nederland, het land van onze meesters, met luiser mede te herdenken. Ik zal mijn landgenooten en-onderdanen van het koninkrijk der Nederlanden allen vragen, om aan'at feest deel te nemen, want al is di feest van zuiver Nederlandsche beteekenis, dan nog hebben we daarin de beste gelegenheid, om onze trouw en

ons medevoelen aan Nederland te betuigen. Alzoo zullen we houden een "aanhankelijkheidsdemonstratie". Wat een genot zal het mij wezen. Goddank, dak ik geen Nederlander ben.

Alle ironie terzijde thans.

Zooals ik in den aanhef van dit opstel heb, pleit het meervermelde 100-jarig jubileum van Neerlands onafhankelijkheid voor de overal zoo hoog verheven trouw aan het vaderland, in ons geval van de Nederlanders. Ik gun dezen dan ook ten volle de vreugde, die ze zullen genieten van hun nationale herdenking. Wat mij en velen mijner landgenooten echter tegen de borst stuit, is hoofdzakelijk het feit, dat thans weder de inlan ders hebben mede te betalen voor een zaak, die hun niet het minst aanbelangt. Wa zal he feest, dat wij helpen tot stand komen, ons wej brengen? Niemendal, hoogstens een herinnering aan ons adres, dat wij geen vrij volk zijn en dat "Nederland ons nimmer onafhankelijkheid zal schenken", voor zoolang althans de heer Idenburg de landvoogdij blijft voeren, en dan-raar toch-de les, die wij uit de feesten zullen trekken; dat het n.l. een plicht moet zijn van een ieder, om den dag der onafhankelijkheidsverklaring zijns volks op waardige wijze te herdenken.

Ik voel dan ook veel meer voor het denkbeeld, dezer dagen het eerst in het inlandsche dagblad "Kaoem Moeda", en in "De Expres" ontvouwd om te Bandoeng, vanwaar de idee der herdenking is uitgegaan en waar ook het hoofdcomite gevestigd is, een commissie van ontwikkelde inlanders te vormen, welk lichaam op den dag der herdenking een telegram van gelukwensch an de Konigin zal zenden, waarbij echter tevens aangedrongen wordt op de buitenwerkingstelling van artikel 111 R.R., en op spoedige instelling van een indisch Parlement.

Het resultaat van het verzoek-vooral wat betreft het laatste gedeelte daarvan-laai ik liever buiten bechouwing; de beteekenis daarvan allen kan ons reeds van groote waarde zijn. Houdt zulk een verzoek niet reeds een protest in zich, dat ons, ten eerste, alle recht wordt en blijft onthouden om over politieke zaken te speken, dat ons m.a.w. alle vrijheid op dat gebied is onzegd? Een vrijheidlievend volk als het Nederlandsche, dat thans zijn vrijheidfeesten gaat houden, moet zulk verzoek wel billijken.

Wat de instelling van het parlement aangaat, daaruit spreekt ten duidelijkste de innige wensch, om coute que coute een stem in het kapittel te

hebben. Dit is dan ook zeer noodig. Waar uit de manier ontwaken van het Indische volk genoegzaam kan blijken, dat de emancipatie met bijzondere snelheid voortschrijdt, daar mag zeker worden gedacht aan de mogelijkheid, dat dit nu nog overheerscht volk op eenmaal zijn meester over het hoofd zal groeien. Wat dan, als veerting miljoen goed ontwaakte menschen verantwoording komen eischen van dat honderdtal, dat de Tweede Kamer moet vormen en een volksvertegenwoordiging wordt genoemd? Wil men dan liever te elfder ure kapituleeren, als de crisis daar zal zijn?

Het klinkt een beetje wonderbaar, dat het meergemeld comite om een parlement zal vragen. Terwijl door de Regeering slechts schoorvoetend wordt te werk gegaan tot creëring eener koloniale vertegenwoordiging, waar hoogstwaarschijnlijk enkel uitgezochten door de Regeering worden benoemd als onze (z.g.) afgevaardigden in dien (z.g.) kolonialen raad-vied gemeenteraden!- komt daar het comite in galop aan met een geweldig voorstel, niets meer of minder dan een Indisch parlement.

Blijkbaar heeft het Comite slechts het oog gehad op het protest, in dat vooshads niet in te wiligen verzoek vervat, en minder op het resultaat daarvan. Merkwaardig is het immers, dat juist op den dag, dat Nederlanders hun vrijheidsdag herdenken, het comite komt aanwaaien bij de koningin, om de opheffing te verkrijgen van de absolute heerschappij van Nederland over een volk van veertig million zielen.

Ziedaar, nu reeds, de invloed van het denkbeeld der herdenking!

Neen, voorwaar, als ik Nederlander was, ik zou nimmer zulk jubileum willen vieren hier in een door ons overheerscht land. Eerst dat geknechte volk zijn vrijheid geven, dan pas onze eigen vrijheid herdenken".

LAMPIRAN 2:

"Kracht of Vrees? " Door dr. Tjipto Mangunkusumo

"Geachte Redactie!

Een hoog geluk is ons gisteren beschoren : de hulpofficier van justitie is op ons kantoor gekomen, om beslag te leggen op de brochures van R.M. Soewardi Soerjaningrat, onzen secretaris. Zonder nu de justitie of de politie te willen uitdagen, moeten wij verklaren, dat een gevoel van trots van ons meester maakte.

Was het een uiting van kracht, die men met die in beslag name wilde demonstreeren? Och, arm! Men denkt toch niet, dat wij ons zullen laten ontmoedigen, omdat wij tegenover een overmacht komen te staan? Daar ligt juist iets prikkelends in, om die overmacht te tarten, haar te noodzaken, haar uiterste krachten in te spannen, om ons klein te krijgen. Naar mate haar actie sterker wordt, naar dezelfde mate zal onze kracht groeien.

Was het vrees, die de menschen dreef, om nu reeds onzen invloed te fnuiken?

Dan is die in beslag name een compliment voor onzen secretaris. Daaruit blijkt dan toch wel, dat "het schotschrift van het warhoofd R.M. Soewardi Soeryaningrat" zooals het betiteld werd door het "Bat. Hbl." Niet zoo onbenullig was, als wij eerst dachten. Er is dan toch onder de "geestesparia's" iemand opgestaan, die geacht wordt door zijn verward geschrijf" de "logge, indolente massa" der inlanders in beweging te kunnen brengen. Voor de Nederlanders zou zulks lang niet prettig wezwn!

Er is nog een derde mogelijkheid! Wij gelooven niet, dat een geestesproduct van een "geestes-paria" de aandacht van de europeesche hoogstaande autoriteiten zou kunnen trekken, were het niet, dat die autoriteiten op een gevoelige plek zijn geraakt. Wij vermoeden, dat het "schotschrift" iets beleedigends voor onze blanke meesters bevat.

Het kan zijn, maar wij herinneren ons niet, dat ooit een europeesch persorgaan vervolgd werd wegens belediging van ons. Och, och! het "amoreele" inlandsche volk is toch maar een natir van slaven: het zal zich dus niet licht geraakt gevoelen!

Doch die vervolging van een blad, dat aan het zaaien is van rassenhaat kan komen. Wij dienen af te wachten!

Komt de vervolging niet, dan zal daarmede getoond zijn, dat er hier geen recht bestaat. Gelukking, dat ons dan geen blaam kan treffen.

De tijd is gekomen, om stelling te nemen. Onze broeders, de Jong Javanen, roepen wij op, om nu goed op te letten op de uitingen van de europeesche pers. Wat ons reeds onder de oogen is gekomen, lijkt zeer op een uitdaging. "Wij zijn de sterksten, en dus moet jij je mond houden; wij zijn de bezitters van je land", hebben wij reeds vernomen. Ziet, dat is eenvoudig misbruik van sterkte, als men ons door die strekte de mond will snoeren en niets onaangenaams wil hooren.

Maar bij Allah! dat zal niet zoo gemakkelijk gaan. Ons Comite heeft zich vast voorgenomen met de geestelijke middelen, waarover het berschikt, wij mogen ons immers niet wapenen! Te blijven strijden, desnoods tot het bittere einde.

Broeders, steunt dat comite!

Het is niet geheel onmogelijk, zelfs zeer waarschijnlijk, dat onze secretaris zich voor den raad van justitie zal moeten verantwoorden. Wij benijden hem allen zeer, dat hij in de gelegenheid is gesteld, dit kleine offer aan het altaar des Vaderlands te brengen.

Broedres! Wat kunnen wij doen, om hem blijk te geven van ons medegevoel voor de zaak, waarvoor hij gestraft zal worden?

Ons Comite heeft gedacht, dat wij van ons goeivoel voor ons Vaderland slecht kunnen getuigen door hem rechtskundige hulp te doen verleen, die dan door ons betaald wordt. Wij doen daarom een beroep op Uw vederlandsliefde. Doet blijk daarvan door ons geldelijk te steunen. Hij breght een persoonlijk offer, wij geldelijk.

Intusschen zijn er een paar plaatsen hiep of Java, waar het binnen landsch Bestuur onder de inheemsche bevolking nog steeds propaganda maakt

voor de “honderdjarige Vrijheid van Nederland”, en van haar bedragen vraagt. Wij blijven protesteeren, en vragen, wie ons dat kan beletten?

Zend liever het geld, als u er te veel van hebt, naar ons toe, dan zullen wij op onze manier die honderdjarige vrijheid herdenken.

Terwij starkes alles, wat zich Nederlander noemt, in een feestroes toasten en speeches zal aanhooren en afsteken over de zoetheid van de Vrijheid, zal onze broeder Soewardi van diezelfde vrijheid worden beroof”.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. A. Rivai, *Student Indonesia di Eropa*, Jakarta: KPG, 2000
- Takhasi Siraishi, *Jaman Bergerak*, Jakarta, Cet I, Pustaka Utama Grafiti, 1997,
- Mas Marco, *Hubungan Orang Buangan Di Boven Digul*, Jakarta, Cet I, Kepustakaan Populer Gramedia, 2002.
- Dewi Yuliati, *Semaoen Pers Bumi Putra Dan Radikalisasi Sarekat Islam* Semarang, Semarang. 2000.
- Soe Hog Gie, *Orang-Orang di Persimpang Kiri Jalan*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, Cet III,
- Soe Hog Gie, *Di Bawah Lentera Merah*, Yogyakarta, Cet II, PT Bentang Pustaka, 2005,
- Marco, "Surat Perlawanan Persdelict", *Koran Perstoean Hindia*, 7 Agustus 1920.
- Bambang Sokawati Dewantara, R.M. Suryopranoto, *Bangsawan, Pendekar Rakyat Jelata*, Jakarta: Roda Pengetahuan, 1982
- Abdullah, Taufik dan AB Lopian (editor). 2012. *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Van Hoeve dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Adams, Cindy, *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, edisi revisi (terjemahan), Jakarta: Yayasan Bung Karno dan Media Pressindo, 2007.
- Alam, wawan Tunggul, *Pertentangan Sukarno VS Hatta*, Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2003.
- Anonim. 1972. *Bung Hatta: Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun bung Hatta ke-70.
- Djohan, Bahder. 1980. *Bahder Djohan: Pengabdian Kemanusiaan*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Djojoadisurjo, Ahmad Subardjo. 1978. *Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Harahap, H.A.H dan B.S. Dewantara, 1980, *Ki Hajar Dewantara dkk : Ditangkap, Dipenjarakan dan diasingkan*, Jakarta : PT. Gunung Agung.

- Hatta, Mohammad. 1978. *Memoir*. Jakarta: Tintamas.
- Huntington, Samuel P. 2002. *Benturan Antar peradaban dan Masa Depan Politik Dunia* (terj). Yogyakarta: Qalam.
- Kartodirdjo, Sartono, dkk. 1995. *Negara Dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Kartodirdjo, Sartono. 2005. *Sejak Indische Sampai Indonesia*. Jakarta: KOMPAS.
- Kutoyo, Sutrisno. 1981/1982. *Prof. H. Muhammad Yamin*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud.
- Legge, John D., 1972, *Sukarno : Sebuah Biografi Politik*, Jakarta : Sinar Harapan.
- Madjid, Nurcholis. 2004. *Indonesia Kita*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Matanasi, Petrik. *Sejarah Tentara: Munculnya Bibit-Bibit Militer di Indonesia Masa Hindia Belanda Sampai Awal Kemerdekaan Indonesia*. 2011. Yogyakarta: Narasi.
- Nalenan, R. 1982. *Iskaq Tjokroadisurjo: Alumni Desa Bersemangat Banteng*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Nanulaita, I.O. 1982/1983. *Johannes Latuharhary, SH*. Jakarta: Direktorat dan Nilai Tradisional, Depdikbud.
- Noer, Deliar, 2012, *Mohammad Hatta : Hati Nurani Bangsa*, Jakarta : KOMPAS.
- Pattikaihattu, John. 1982/1983. *Dr. Jacob Bernadus Sitanala: Hasil Karya Dan Pengabdianannya*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai tradisional, Depdikbud.
- Rahardjo, Iman Toto K dan Herdianto WK (editor) *Bung Karno dan Partai Politik: Kenangan 100 Tahun Bung Karno*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Reksodihardjo, Soegeng. 1981/1982. *Dr. Cipto Mangunkusumo*. Jakarta: Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Depdikbud.
- Rivai, A. 2000. *Student Indonesia Di Eropa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Roem, Mohammad. 1989. *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*. Jakarta: PT Gramedia.
- Shiraishi Takashi, *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005
- Silalahi, S. 2001. *Dasar-Dasar Indonesia Merdeka*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Singodimedjo, Kasman. 1982. *Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Soeratman, Darsiti, 1983/1984, *Ki Hajar Dewantara*, Jakarta : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud.
- Soewito, Irna H.N. Hadi. 1985. *Soewardi Soerjaningrat Dalam Pengasingan*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- SSP, Pranata, Ki Hajar Dewantara: Perintis Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1959.
- Suratmin. 1982/1983. *Dr. Sutomo*. Jakarta: Direktorat dan Nilai Tradisional, Depdikbud.
- Sutjiatiningsih, Sri. 1982/1983. *Soegondo Djojopoespito: Hasil Karya dan Pengabdian*. Jakarta: Direktorat sejarah dan Nilai Tradisional.
- Tashadi. 1984. *Dr. D.D. Setiabudhi*. Jakarta: Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Depdikbud.
- Tirtoprodjo, Susanto. 1984. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Pembangunan Jakarta.
- Mawardi, Sidi. 2000. *Bibit Perseteruan Nasionalis Islam Vs nasionalis Sekuler: Pengalaman Jong Islamietyen Bond 1925-1942*. Jakarta: yayasan Studi Perkotaan (SandiKota).
- Sunaro, Mr. *Apakah Negara Hukum itu?* Tanpa Tahun. Djakarta: Usaha Penerbitan Gapura.
- Djoyoadisuryo, Ahmad Subardjo. *Kesadaran Nasional, Otobiografi*. 1978. Jakarta: Gunung Agung.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. 1983. Jakarta: C.V. Rajawali.
- Hatta, Mohammad. *Memoir*. 1978. Djakarta: Tintamas.
- Soekarno. *Mentjapai Indonesia Merdeka*. 1933, Reprint 1959. Jakarta: Departemen Penerangan.
- Hatta, Mohammad. *Pengantar Pancasila*. 1981. Jakarta: Idayu.
- Hatta, Mohammad. *Pantjasila Djalan Lurus*. 1966. Bandung: Angkasa.
- Sunoto. *Mengenal Filsafat Pancasila*. 1983. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Ull.
- Adams, Cindy. *Sukarno: An Autobiography as Told as Cindy Adams*. 1965. New York: The Bobbs Merrills Company.
- Sekretariat Negara RI, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 25 Mei 1945-22 Agustus 1945*. 1995. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Frederick, William H. Soeri Soeroto (eds). *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*. 1982. Jakarta: LP3ES.

- Bung Karno. *Negara Nasional dan Cita-cita Islam*. 2007, Reprint 1953. Depok: Visi Gagas Komunikasi.
- Watson, Peter. *Ideas, History from Ine to Freud*. 2006. London: Phoenix.
- Warrington, Marnie Hughes. *Fifty Key Thinkers on History*. 2005. New York: Routledge.
- Oetojo Oesman, Alfian (eds). *Pancasila Sebagai Ideologi*. 1992. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Sjahrir, Sutan. *Sosialisme Indonesia Pembangunan (Kumpulan Tulisan)*. 1982. Jakarta: Leppenas.
- Newland, Kathleen, Kemala Candrakirana (eds). *Menjelajah Cakrawala (Kumpulan Karya Visioner Soedjatmoko)*. 1994. Jakarta: Gramedia.
- Mintz, Jeanne S. *Mohammed, Marx, and Marhaen: the Roots of Indonesian Socialism*. 1965. New York: Frederick A Praeger.
- Hoffer, Eric. *Gerakan Massa (Terjemahan)*. 1993. Jakarta: Yayasan Obor.
- Scherer, Savitri Prastiti. *Keselarasan dan Kejanggalaan: Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX, (Terjemahan Jiman S. Rumbo)*. 1985. Jakarta: Sinar Harapan.
- Scherer, Savitri Prastiti. *Harmony and Dissonance Early Nationalist Thought in Java*. 1975. Ithaca: Cornell University Press.
- Aqib Suminto, H. *Politik Islam Hindia Belanda*. 1980. Jakarta: LP3ES.
- Feith, Herbert, Castle Lance (eds). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, (Terjemahan Min Jub Hoon)*. 1988. Jakarta: LP3ES.
- Rivai, Abdul. *Student Indonesia di Eropa: Kumpulan Karang-karangan Dr. A. Rivai Redactuer Bintang Timoer di Eropa dari November 1926 sampai Mei 1928*. 2000. Jakarta: KPG.
- Tirtoprodjo, Susanto. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. 1984. Jakarta: PT. Pembangunan Jakarta.
- Dewantara, Bambang Sokawati. R.M. Suryopranoto: *Bangsawan, Pendekar Rakyat Jelata*. 1982. Jakarta: Roda Pengetahuan.
- Abdullah, Taufik. *School and Politics: the Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1933), Monograph Series*. 1971. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.
- Abdullah, Taufik (ed). *Pemuda dan Perubahan Sosial*. 1982. Jakarta: LP3ES

- "Dari Abdul Rivai Sampai Sarjana Indonesia Abad XX." *Majalah Basis*, No.1-2, Tahun ke-45, 1996.
- "Abdul Rivai: Pionir Pers Pribumi di Luar Negeri." *Majalah Basis*, No.11-12, Tahun ke-59, 2010.
- "Kasimo: Politik Bermartabat." *Majalah Basis*, No.11-12, Tahun ke-59, 2010.
- "Tjokroaminoto dan Obsesi Persatuannya." *Majalah Berkala Kajian dan Pengembangan*, No. 1, Vol. IV Tahun 1987.
- "Marco Kartodikromo dan Pemikiran Anti-Kolonial." *Majalah Driyarkara*, No. 3 Tahun XXII, 1996.
- "I.J. Kasimo dan Partai Politik." *Majalah Driyarkara*, No. 3 Tahun XXII, 1996.
- "Tentang Kolonialisme: Multatuli dan Pemikirannya." *Majalah Driyarkara*, No. 3 Tahun XXII, 1996.
- "Bung Natsir: Menghadang Konflik, Membangun Toleransi." *Majalah Driyarkara*, No. 3 Tahun XXII, 1996.
- "Bayangan Fasisme Perspektif Sjahrir." *Majalah Driyarkara*, No. 3 Tahun XXII, 1996.

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

Direktori
Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Perpustakaan
Jenderal Kebudayaan

959.8
LAO
s

2013